

MELACAK JEJAK

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Setengah Abad Direktorat Jenderal Kebudayaan 1966-2016



MELACAK JEJAK DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

**Setengah Abad Direktorat Jenderal
Kebudayaan 1966-2016**

Nunus Supardi

**Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

2016

**Setengah Abad Direktorat Jenderal
Kebudayaan (1966-2016)**

**MELACAK JEJAK
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
Setengah Abad Direktorat Jenderal
Kebudayaan**

Copyright@Nunus Supardi, 2016

Desain Sampul: Agus Riyanto & Zulkarnaen

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Jl. Jend. Sudirman, Senayan-Jakarta

ISBN: 978-602-73975-4-5

Cetakan ke-1 : Desember 2016

Ukuran : 16,5 cm x 22 cm

Jumlah halaman: 320 Halaman

TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN/DIPERJUALBELIKAN

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan

Upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan tentunya telah banyak dilakukan oleh banyak pihak mulai dari seniman, penikmat seni, budayawan, dan tak terkecuali pemerintah. Peranan pemerintah dalam urusan kebudayaan tidak terlepas dari mandat yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara spesifik dalam pasal 32 yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa pemerintah berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam kapasitasnya sebagai penjamin bahwa masyarakat dapat memiliki kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah harus menjadi fasilitator, yaitu sebagai penyedia fasilitas dan pendukungan sehingga kebudayaan tidak hanya dapat dilestarikan, namun juga dikembangkan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerhati dan pelaku budaya, dan masyarakat.

Untuk memahami rekam jejak kebijakan mengenai kebudayaan di Indonesia, melacak jejak Direktur Jenderal Kebudayaan di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk disimak. Memahami siapa saja yang sudah mengisi jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dan memahami rekam kerja mereka sejak tahun 1966 hingga sekarang adalah langkah untuk memahami rencana kerja, kebijakan, dan keber-

hasilan yang sudah dicapai selama ini. Akan tetapi, dengan melihat sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 50 tahun, menjadi jelas bahwa masih sangat sedikit jumlah program kebudayaan yang bersifat holistik komprehensif. Akibat dari program-program yang belum dibangun dengan solid ini adalah kinerja yang bergantung pada kehebatan orang yang berada di balik jabatan tersebut. Wajah Direktorat Jenderal Kebudayaan bukan berupa program-program unggulan yang integratif dan memberdayakan masyarakat tetapi merupakan kharisma dan kehebatan orang yang mengisi jabatan tersebut. Dengan kata lain, masih ada tugas yang harus diselesaikan yaitu memperkuat dan memperjelas tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan, sehingga siapa pun yang mengisi jabatan ini kelak memiliki arahan untuk rencana kerja yang kuat dan terstruktur, dan terutamanya direktorat dengan program-program yang solid.

Meskipun begitu, buku ini juga memperlihatkan bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, rekam kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 50 tahun belakangan sungguh luar biasa. Tentu sulit untuk mengukur sejauh mana kemajuan kebudayaan nasional Indonesia itu sendiri. Tapi, kita dapat melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh para Direktur Jenderal Kebudayaan melalui pembangunan infrastruktur, baik itu bangunan fisik seperti Taman Budaya Bali yang merupakan gagasan dari Prof. Dr. Ida Bagus Mantra maupun pembangunan sumber daya manusia melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang berkaitan erat

dengan pemajuan kebudayaan. Banyak pula kegiatan yang sudah dihasilkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di forum internasional seperti Art Summit: Music and Dance yang menjadi ajang seniman tari dan musik tingkat dunia untuk memperlihatkan karya mereka. Ajang ini digagas di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Edi Sedyawati di tahun 1995 dan sekarang menjadi agenda tetap Dirjen Kebudayaan.

Selain dapat bermanfaat untuk memetakan kebijakan yang sudah dilaksanakan, selaku pemegang jabatan Dirjen Kebudayaan, buku ini juga bermanfaat untuk merumuskan rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan memahami keberhasilan dan tantangan Dirjen Kebudayaan sebelumnya dan melihat ruang-ruang yang masih dapat dikembangkan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ruang-ruang kebudayaan terutamanya harus diperluas. Direktorat Jenderal Kebudayaan harus membangun gerakan kebudayaan di mana setiap individu memiliki ruang partisipasi yang luas dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting di sini karena ada potensi masyarakat yang harus didorong dan difasilitasi sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang membuat dukungan atas kegiatan kebudayaan lebih terjamin.

Akhir kata, melalui buku ini pemikiran dan gagasan para Direktur Jenderal Kebudayaan dapat terdokumentasikan dengan baik dan tercetak abadi dalam perjalanan pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Saya menyambut baik hadirnya buku ini dan berharap buku dapat

memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dengan mengenalkan kepada masyarakat sosok-sosok Direktur Jenderal Kebudayaan dan kontribusi mereka selama ini. Terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepada Penulis, Bapak Nunus Supardi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memastikan terbitnya buku ini.

Selamat membaca,

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hilmar Farid

Pengantar Penulis

Tanpa kita sadari perjalanan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai lembaga kebudayaan yang ada di pemerintahan pusat telah mencapai usia setengah abad (1966-2016). Lembaga itu dipimpin oleh seorang “direktur jenderal”, dan sampai sekarang telah melahirkan delapan direktur jenderal. Tetapi di balik itu masih banyak orang yang tidak mengetahui kapan Direktorat Jenderal Kebudayaan dibentuk. Juga tidak banyak yang tahu nama dan urutan pejabat yang pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan.

Di kalangan karyawan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud) sendiri, hampir tidak ada yang tahu tanggal tahun dibentuk serta tidak mengenal lagi siapa Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) pertama. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk ke Direktorat Jenderal Kebudayaan sekitar tahun 1980-an kebanyakan sangat mengenal Prof. Dr. Edi Sedyawati (Dirjenbud kelima) yang masa akhir jabatannya tahun 1999. Sebagian lagi masih ada yang ingat nama G.B.P.H. Poeger sebagai Dirjenbud keempat. Tetapi kebanyakan sudah tidak mengenal lagi siapa Dirjenbud ketiga, apalagi kedua dan pertama. Tidak tahu lagi nama dan urutan direktur jenderal yang pernah memimpin Direktorat Jenderal Kebu-

dayaan. Termasuk dalam beberapa buku sumber, penyebutan nama dan urutan banyak yang salah.

Sebagai contoh, di dalam buku “Indonesia dalam Alur Sejarah” yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012. Di dalam buku itu masih salah menyebut Direktur Jenderal Kebudayaan pertama. Kesalahan itu tidak hanya sekali. Pertama, pada alinea kedua dari bawah halaman 600 ditulis “*Pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktur Jenderal Kebudayaan pertama adalah Prof. Dr. IB Mantra*”. Selanjutnya pada alinea pertama dari bawah pada halaman yang sama ditulis “*Sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan yang pertama, Prof. IB Mantra merintis pula pengembangan....dst.*” (Susanto Zuhdi/Ed, 2012: hal 600)

Apabila data dan informasi dari dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri tidak akurat, maka data yang berkembang di luar juga akan ikut tidak akurat. Sebagai contoh, di dalam situs Wikipedia yang menampilkan daftar nama-nama Direktur Jenderal Kebudayaan, ternyata juga tidak lengkap. Sesuai urutan, nama-nama yang dicantumkan adalah sebagai berikut: (1) Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (menjabat sejak 1968-1978); (2) Prof. Dr. Haryati Soebadio (menjabat sejak 1978-1988); (3) Drs. Gusti Bاندoro Pangerang Haryo Poeger (menjabat sejak 1988-1993); (4) Prof. Dr. Edi Sedyawati (menjabat sejak 1993-1998); (5) Dr. I Gusti Ngurah Anom (menjabat sejak 1998-1999); (6) Prof. Kacung Marijan PhD (menjabat sejak 2012-2015). Selanjutnya pada akhir Desember 2015, Dr. Hilmar Farid dilantik menjadi Dirjen Kebudayaan ke-7 sampai dengan

sekarang. (Diunduh pada 5/7/2016. Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kebudayaan).

Dengan dicantumkan dalam Wikipedia nama Prof. Ida Bagus Mantra sebagai Dirjen Kebudayaan pertama pada dua contoh di atas, orang akan menyimpulkan bahwa “Direktorat Jenderal Kebudayaan” lahir pada 1968 itu juga. Kenyataannya tidak demikian. Masih ada satu nama Dirjen Kebudayaan yang dilupakan.

Hal seperti demikian itu bisa terjadi karena tidak ada sumber yang menyebut nama R.M. Indrosoegondo sebagai Dirjen Kebudayaan sehingga nama itu tidak dikenal. Melalui buku ini penulis menampilkan data kapan Direktorat Jenderal Kebudayaan lahir, serta nama dan urutan Direktur Jenderal Kebudayaan secara lengkap. Adapun untuk jabatan Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala serta Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film yang pernah lahir, tidak ikut dipaparkan karena nomenklaturnya berbeda.

Selain dipaparkan nama dan sekilas riwayat hidup para direktur jenderal, isi buku ini lebih ditekankan pada paparan dari hasil pelacakan jejak langkah yang berkaitan dengan konsep, kebijakan dan strategi masing-masing dalam mengemban tugas memajukan kebudayaan bangsa. Dengan mengenali konsep, kebijakan dan strategi masing-masing direktur jenderal, akan menjadi masukan bagi direktur jenderal berikutnya. Khusus untuk Direktur Jenderal Kebudayaan ke-8, yaitu Dr. Hilmar Farid dalam buku ini belum dipaparkan karena baru beberapa bulan menjabat.

Dalam sistematika penyajian, paparan isi buku ini dimulai dari “Bab I Pendahuluan” berisi paparan tentang latar belakang kehadiran lembaga kebudayaan di pemerintahan. Seperti diketahui kehadiran lembaga kebudayaan di pemerintahan masih menimbulkan dua pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra.

Di dalam Bab II dipaparkan latar belakang lahirnya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Banyak di kalangan karyawan Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri yang tidak mengetahui kapan direktorat jenderal itu lahir. Mengetahui kapan lahir tentulah memiliki nilai tersendiri. Dengan mengetahui tanggal lahirnya diharapkan akan dapat memberikan edukasi, inspirasi, spirit dan kebanggaan para pengelola kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya memajukan kebudayaan bangsa.

Selanjutnya, di dalam Bab III dipaparkan mengenai kehadiran Wakil Menteri Bidang Kebudayaan. Jabatan Wakil Menteri berada di atas jabatan direktur jenderal dan di bawah jabatan menteri. Selama ini juga tidak banyak yang mengetahui bahwa pada 1966 pernah lahir jabatan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan. Baru pada 2011 lahir jabatan yang sama.

Sementara itu, di dalam Bab IV sampai dengan Bab X dipaparkan secara sekilas tentang riwayat hidup, konsep, kebijakan dan strategi masing-masing direktur jenderal sesuai dengan masa jabatannya. Bab XI sebagai Penutup, disampaikan beberapa catatan sebagai kesimpulan dari seluruh hasil pelacakan jejak para Direktur Jenderal Kebudayaan selama setengah abad.

Rencana penulisan buku ini sebenarnya sudah lama. Tetapi karena terbatasnya data, khususnya untuk Direktur Jenderal Kebudayaan pertama R.M. Indrosoegondo, maka penulisan menjadi tersendat. Berkat bantuan semua pihak akhirnya naskah dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para nara-sumber dan rekan-rekan yang telah membantu dalam pengumpulan data. Masing-masing kepada keluarga RM Indrosoegondo (Sdr. Muwardi) yang telah meminjamkan foto-foto R.M. Indrosoegondo, Kepala SMP Muhammadiyah IV Yogyakarta, Ibu Isbandi (Yogyakarta), Ibu GBPH Poeger (Yogyakarta), Bpk. Kastowo Himodigdo (Jakarta), Sdr. Suhatno (Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Yogyakarta), Sdr. Ngurah Arjana (Jakarta), Ibu Isnurwati (Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin), Sdr. Siswanto (Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta), Bpk. Soedarmadji Damais, (Badan Kerja sama Kesenian Indonesia) dan rekan-rekan yang belum di sebut di dalam buku ini.

Terakhir, kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan beserta jajarannya yang telah menerbitkan buku ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam. Tulisan ini masih banyak kekurangannya. Semoga ada manfaatnya.

Penulis

Daftar Isi:

Sambutan	
Direktur Jenderal Kebudayaan.....	iv
Pengantar Penulis.....	xiii
BAB I	Pendahuluan..... 1
A.	Dasar Pembentukan Direktorat Jenderal Kebudayaan..... 2
B.	Perbincangan model pengurusan kebudayaan..... 4
C.	Beberapa kali perubahan..... 8
BAB II	Lahirnya Direktorat Jenderal Kebu- dayaan..... 11
A.	Nomenklatur Bidang Kebudayaan (Masa 1945-1962)..... 13
B.	Lahirnya Direktorat Kebudayaan (Masa 1962-1966)..... 18
C.	Lahirnya Direktorat Jenderal Kebu- dayaan (Masa 1966-sekarang)..... 19
BAB III	Jabatan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan..... 23
A.	Ny. Siti Lasmidjah Hardi..... 24
B.	Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch.Ph.D..... 31
BAB IV	RM Indrosoegondo..... 47

BAB V	Prof. Dr. Ida Bagus Mantra.....	95
BAB VI	Prof. Dr. Haryati Soebadio.....	141
BAB VII	Drs. Gusti Bandoro Pangeran Haryo Puger.....	191
BAB VIII	Prof. Dr. Edi Sedyawati.....	217
BAB IX	Dr. I Gusti Ngurah Anom.....	253
BAB X	Prof. Kacung Marijan PhD.....	275
BAB XI	Penutup.....	315

Daftar Bacaan

Indeks

BAB I

PENDAHULUAN

Sebelum melacaki jejak para Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) perlu kita lebih dahulu mengetahui latar belakang sejarah kelembagaannya. Adanya jabatan “Direktur Jenderal Kebudayaan” karena dibentuknya sebuah satuan kerja dengan nama “Direktorat Jenderal Kebudayaan”. Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0318/U/1983 yang ditandatangani Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, akronim Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “DITJENBUD”. Untuk akronim jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan menjadi “DIRJENBUD”. Akronim yang ditetapkan 33 tahun yang lalu itu masih berlaku hingga sekarang.

Kelahirannya memiliki sejarah yang panjang dan cukup berliku. Dimulai dari awal Indonesia merdeka (17 Agustus 1945), mulai dari pembentukan kabinet pertama hingga kabinet yang sekarang. Selama perjalanan 71 tahun nomenklatur satuan kerja yang mengurus kebudayaan itu berjalan, beberapa kali harus mengalami perubahan. Dimulai dari satuan kerja dengan status “bagian”, kemudian berkembang hingga menjadi “direktorat jenderal”. Demikian pula halnya dengan orang yang dipercaya memimpin satuan kerja itu, juga silih berganti karena diberhentikan, diganti, atau memasuki masa pensiun.

A. Dasar pembentukan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Ada tarik-menarik mengenai pengurusan kebudayaan antara lembaga kebudayaan yang berkembang di masyarakat dengan yang ada di pemerintahan. Sebagaimana diketahui kelahiran lembaga kebudayaan di masyarakat bersifat alami, atas kesadaran dan inisiatif masyarakat pendukung suatu kebudayaan. Mereka mendirikan lembaga sebagai wadah untuk beraktivitas memajukan kebudayaannya. Oleh sebab itu muncul pendapat agar masalah pengurusan kebudayaan lebih baik diserahkan saja kepada masing-masing masyarakat pendukungnya, dan pemerintah tidak perlu ikut campur.

Sementara itu, ada pihak yang menyatakan pemerintahan perlu ikut campur dalam mengurus kebudayaan. Lahirnya lembaga kebudayaan di pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari amanat pasal 32 UUD 1945. Diterimanya bidang kebudayaan ke dalam pasal tersendiri dalam UUD 1945, membuktikan bahwa bidang kebudayaan mempunyai posisi yang sama dengan bidang yang lain: agama, pendidikan, kesehatan, perdagangan, penerangan, perindustrian, pekerjaan umum, dll.

Dalam pasal 32 UUD 1945 itu dengan jelas diamanatkan "pemerintah atau negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Dengan demikian pembentukannya memiliki dasar konstitusional yang kuat. Hingga kini lembaga itu masih tetap ada, dan hal itu menunjukkan bahwa bidang kebudayaan diperlukan dan memiliki peran

penting dalam ikut menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proses diterimanya pasal itu oleh para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setelah melalui sidang-sidang yang serius. Semula, posisi bidang kebudayaan ditempatkan pada pasal 34. Dalam pembahasan berikutnya posisinya digeser ke pasal 33. Pada sidang pleno pengesahan Rancangan UUD menjadi UUD yang dipimpin oleh Soepomo, saat itu Moh. Hatta mengusulkan agar pasal 33 tentang kebudayaan dipindahkan tempatnya, didekatkan dengan pasal 31 bidang pendidikan. Ternyata usul Moh. Hatta itu diterima secara aklamasi. Bidang kebudayaan yang pada rancangan awal ditempatkan pada pasal 33 dipindahkan ke pasal 32 di bawah pasal 31 tentang pendidikan. Judul babnya, masih tetap “Bab XIII: Pendidikan”. Baru setelah UUD 1945 diamanatkan (2002), judul bab itu berubah menjadi “Bab XIII, Pendidikan **dan Kebudayaan**”.

Bunyi pasal 32 itu aslinya singkat saja, yaitu “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, tanpa ada ayat sebagai rincian. Agar masyarakat dapat menangkap dan menafsirkan isi pasal itu dengan tepat, para pendiri bangsa menambah 3 kalimat sebagai penjelasan. Tiga kalimat penjelasan itu adalah sebagai berikut: “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan

harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Sayang, setelah diamandemen ketiga kalimat penjelasan yang amat penting perannya itu justru dihilangkan. Padahal, dalam seminar di Universitas Indonesia pada 1987, Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (dosen Universitas Indonesia) telah mengingatkan tentang peran tiga kalimat itu dalam memberikan "Penjelasan" isi pasal 32 yang singkat itu. Menurut Prof. Nazaruddin ketiga kalimat itu membuat bangsa Indonesia "*mampu melepaskan diri dari rasa curiga terhadap kebudayaan suku-suku. Kebudayaan suku-suku bangsa tidak perlu dipandang sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasional; kebudayaan daerah atau suku bukanlah ancaman, melainkan pembentuk kebudayaan nasional*". (Muhadjir, Editor, 1987:363)

B. Perbincangan model pengurusan kebudayaan

Sesuai dengan amanat pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya itu BPUPKI dan PPKI kemudian membahas secara serius mengenai kelembagaan yang akan ikut mengurus kebudayaan dalam pemerintahan. Di dalam rapat BPUPKI disepakati untuk membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Di kementerian inilah bidang kebudayaan akan ditampung. Seperti apa bentuk, tugas, fungsi dan misi kelembagaan kebudayaan di pemerintahan itu baru dibahas kemudian dalam Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung. Dalam kongres itu dibentuk

sesi khusus dengan judul “organisasi kebudayaan”. Ada 4 tokoh yang ditugasi membahas masalah peran dan posisi kebudayaan dalam tata organisasi pemerintahan dikaitkan dengan keberadaan lembaga kebudayaan di masyarakat. Keempat pemakalah itu adalah Mr. Koentjoro Poerbopranoto, De Vleter, Lim Ek Cheang, dan Muh. Yamin.

Hasilnya kemudian dijadikan dasar dalam penataan kelembagaan bidang kebudayaan baik di lingkungan pemerintah maupun di masyarakat hingga sekarang. Dalam kongres itu Mr. Koentjoro Poerbopranoto menyatakan bahwa untuk mengurus kebudayaan sebaiknya dibentuk lembaga kebudayaan yang mampu mengarahkan (mengaktifkan) kesanggupan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai kebudayaan yang meresap dalam jiwa bangsa sendiri. Organisasi itu harus merupakan satu badan gabungan (*overkapping*) atau badan koordinasi organisasi yang merupakan badan penyelenggara. Selanjutnya, ditegaskan oleh Koentjoro bahwa “pemerintah wajib membantu organisasi kebudayaan di masyarakat”.

Sementara itu, pemakalah De Vleter tidak memberikan pendapat secara jelas tentang kelembagaan kebudayaan seperti yang diharapkan. Dalam makalahnya ia hanya menguraikan hasil penyimakan ketika menghadiri Kongres Dunia di Brussel tahun 1946 yang melahirkan piagam *Universal Declaration Right*. Disarankan agar dalam mengurus kebudayaan piagam itu perlu dijadikan untuk penyempurnaan kelembagaan.

Pemakalah Lim Ek Cheang sebagai pemakalah berikutnya berpendapat bahwa untuk mencapai kemajuan yang kekal bagi kebudayaan bangsa, isi kelembagaan itu harus

internasional, tetapi bentuk (*vorm*) dan gaya (*style*) tetap nasional. Seperti apa bentuk lembaga yang bergaya internasional maupun yang bergaya nasional itu, Lim Ek Cheang tidak menjabarkannya secara kongkrit.

Jabaran lebih jelas mengenai bentuk dan gaya kelembagaan itu datang dari pemakalah Muhammad Yamin. Dari pengamatan Yamin ada tiga bentuk atau model kelembagaan yang mengurus kebudayaan. Pertama, model yang diterapkan di negara totaliter (komunis) seperti yang berlaku di Rusia. Disebutkan, yang dominan mengurus pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan adalah Pemerintah. Dengan model pengurusan kebudayaan seperti itu melahirkan kebudayaan Rusia yang dikagumi banyak bangsa.

Model kedua adalah yang diterapkan di negara nasional-demokratis (liberal) seperti di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Yang dominan mengurus pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan sebagian besar di bawah “kewenangan” masyarakat. Dengan model pengurusan seperti itu menghasilkan kebudayaan Eropa dan Amerika yang juga dikagumi banyak bangsa.

Setelah memperhatikan kondisi bangsa Indonesia yang pluralis, multikultur, beraneka ragam agama dan bahasa, Yamin menyimpulkan bahwa untuk pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam negara RI diperlukan model ketiga. Diperlukan sebuah lembaga yang merupakan gabungan antara dua model, yaitu Rusia dan negara-negara Eropa dan Amerika, dengan membentuk satu lembaga yang menjadi wadah bertemunya lembaga kebudayaan di masyarakat dengan di pemerintahan untuk

dapat bekerja bersama yang sebaik-baiknya. (*Majalah Indonesia*, 1950: 414-415).

Akhirnya, kongres di Bandung menyepakati selain dibentuk lembaga kebudayaan di pemerintahan, juga dibentuk lembaga kebudayaan semi pemerintah sebagai wadah bertemunya lembaga kebudayaan di masyarakat dengan yang ada di pemerintahan. Kehadiran lembaga kebudayaan di masyarakat sangat diperlukan karena lembaga itu menjadi wadah beraktivitasnya para pemilik atau pemangku kebudayaan.

Sebagaimana diketahui, kebudayaan itu tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan bukan di dalam ruang-ruang kantor lembaga kebudayaan di pemerintahan. Lembaga itu menjadi kantong-kantong kekuatan yang potensial, yang dapat membantu keberhasilan program pemajuan kebudayaan yang dicanangkan pemerintahan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah kerja sama antara keduanya dimediasi oleh sebuah lembaga yang sifatnya semi lembaga pemerintah, yang oleh Yamin disebutnya dalam bentuk Dewan Kebudayaan.

Rekomendasi kongres di Bandung diwujudkan dengan berdirinya Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) tanggal 14 April 1952. BMKN telah berjasa dalam ikut memajukan kebudayaan bangsa. Dari hasil pengumpulan data keanggotaan (2015) jumlah anggota BMKN perseorangan sebanyak 298 orang dan anggota dari organisasi kebudayaan dari seluruh Indonesia sebanyak 273 organisasi. Sejarah telah mencatat bahwa kelahiran BMKN telah membuat aktivitas kebudayaan antara lembaga di masyarakat dan di pemerintahan dapat berjalan dengan

baik, dan berhasil mendokumentasikan berbagai peristiwa budaya. Selain menerbitkan majalah, buletin, buku, menyelenggarakan diskusi, seminar, pameran, pertunjukan, memberikan penghargaan seni rupa dan sastra juga menyelenggarakan Kongres Kebudayaan 1954, 1957 dan 1960.

Berbagai kegiatan budaya itu kebanyakan disiapkan diselenggarakan di gedung Balai Budaya, di Jln. Gereja Theresia No. 47, Menteng, sebagai tempat satu-satunya di tahun 1950-1970-an tempat berkumpulnya para seniman, budayawan dan cendekiawan. Gedung sederhana itu menjadi "rumah budaya" yang sangat terkenal saat itu. Sejumlah seniman besar pada masa lahir dan besar di Balai Budaya: Trisno Sumardjo, Zaini, Pramudya Ananta Toer, Affandi, Anas Ma'ruf, Wiratmo Sukito, Asrul Sani, Ajip Rosidi, Umar Khayam, Wahyu Sihombing, Misbach Yusa Biran, Daduk Djajakusumah, Gayus Siagian, Taufiq Ismail, Soe Hok Djien, Kusnadi, HB Jassin, Soedjatmoko, Goenawan Mohamad, Sutardji Calzoum Bachri, dll. Sayangnya, setelah peristiwa G30S/PKI 1965 BMKN mengalami kemunduran dan akhirnya bubar dengan sendirinya. (Nunus Supardi, 2015)

C. Beberapa kali perubahan

Jika dirunut sejak awal Indonesia merdeka (1945-sekarang), perjalanan lembaga kebudayaan di pemerintahan telah mengalami beberapa kali perubahan. Antara 1945 sampai dengan 1966 terjadi lima kali perubahan. Antara 1966 sampai dengan 1999 relatif stabil, hanya terjadi perubahan pada nomenklatur unit-unit di dalam tubuh direktorat jenderal, disesuaikan dengan perkem-

bangun zaman. Setelah memasuki masa reformasi terjadi silih berganti perubahan baik nomenklatur dan posisi kelembagaan.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari 20-10-1999 sampai dengan 23-7-2001 nomenklatur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Tahun 2001 bidang kebudayaan dipecah menjadi dua direktorat jenderal, yaitu: (1) Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Pendidikan Nasional dijabat oleh Dr. I Gusti Ngurah Anom, dan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, dijabat oleh Dr. Sri Hastanto, S.Kar. Dengan demikian sejak itu nomenklatur “Direktorat Jenderal Kebudayaan” tidak ada lagi.

Setelah Presiden Gus Dur digantikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (23-7-2001—20-10-2004), lahir kebijakan baru. Bidang kebudayaan yang selama 55 tahun disatukan dengan bidang pendidikan dalam susunan Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001) dipisah untuk digabungkan dengan bidang pariwisata, dalam Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam perjalanan sampai sekarang nomenklatur bidang kebudayaan paling tidak telah mengalami 10 kali perubahan, pergantian, pemindahan dan bahkan penghapusan.

Baru pada 2011 nomenklatur “Direktorat Jenderal Kebudayaan” muncul lagi, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan *reshuffle* kabinet. Bidang kebudayaan dikembalikan lagi untuk bersatu dengan bidang pendidikan. Pengembalian itu menunjukkan bahwa eksperimen penggabungan kedua bidang yang telah

berjalan selama 10 tahun itu dinilai tidak berhasil (gagal). Kembalinya bidang kebudayaan nomenklatur kementerian juga berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan berubahnya nomenklatur Menteri Diknas Moh. Nuh menghidupkan kembali keberadaan “Direktorat Jenderal Kebudayaan” hingga sekarang.

Dari paparan sekilas di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memajukan kebudayaan bangsa para pendahulu telah meletakkan dasar pengurusan bidang kebudayaan secara konstitusional. Pembentukan lembaga kebudayaan di pemerintahan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945 hingga kini masih tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peran bidang kebudayaan memang diperlukan. Melalui berbagai forum keberadaanya terus diperbincangkan terutama mengenai perlunya dikembangkan kerja sama antara lembaga kebudayaan di masyarakat dengan di pemerintahan.

BAB II

LAHIRNYA DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Kapan Direktorat Jenderal Kebudayaan lahir? Banyak orang yang tidak tahu jawabnya. Bahkan di kalangan karyawan Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri selalu menjawab tidak tahu. Mengetahui kapan lahirnya sebuah lembaga yang diberi label “Direktorat Jenderal Kebudayaan” tentulah memiliki nilai tersendiri. Terutama bagi para karyawan lembaga itu sendiri. Mengetahui kapan lahir, diharapkan akan dapat memberikan edukasi, inspirasi, spirit dan kebanggaan para pengelola kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya memajukan kebudayaan bangsa melalui lembaga itu.

Untuk mengetahui tanggal lahir itu ternyata tidak mudah. Mau tidak mau harus menelusuri jejak perjalanan dari dicapainya kesepakatan yang bulat dari para pendiri bangsa ketika menyiapkan diri menjadi Indonesia merdeka. Sejak menyatakan diri menjadi bangsa merdeka tanggal 17 Agustus 1945, secara *de facto* dan *de jure* lahirlah negara-bangsa baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka untuk menata dan melaksanakan pemerintahan sendiri. Merdeka untuk memajukan kebudayaan sendiri.

Seperti dikatakan oleh Ki Hadjar Dewantara, makna kemerdekaan bagi sebuah bangsa pada hakikatnya adalah kemerdekaan untuk mengembangkan kebudayaannya. Bila sebelum merdeka warga bangsa tidak memiliki keleluasaan untuk memajukan kebudayaannya, setelah menjadi bangsa merdeka akan lebih gampang lagi bagi kita untuk mencari jalan yang luas dan lapang, bebas dari ikatan-ikatan sleur kolonial, bebas dari kebekuan kultural nasional, menuju ke arah pembangunan kebudayaan yang sangat perlu untuk Indonesia yang kini merdeka dan akan terus merdeka. (Dewantara 1994 : 75).

Menindaklanjuti kemerdekaan itu para pendiri bangsa segera menyiapkan dasar sebagai tempat berdirinya bangsa Indonesia, antara lain falsafah negara (Pancasila), undang-undang dasar negara (UUD1945), bendera nasional (Merah-Putih), lagu kebangsaan (Indonesia Raya), bahasa nasional (bahasa Indonesia), lambang negara (burung Garuda), dan semboyan atau motto (Bhinneka Tunggal Ika). Tahap berikutnya adalah menyiapkan organisasi pemerintahan negara yang di dalamnya terdapat lembaga yang mengurus kebudayaan. Sesudah UUD 1945 diundangkan dan resmi menjadi undang-undang dasar negara, dimulailah penataan susunan lembaga pemerintahan.

Langkah itu berupa pembentukan kabinet dan penetapan para menteri. Dua hari setelah proklamasi, yakni pada 19 Agustus 1945 diumumkan susunan kabinet pertama, diberi sebutan Kabinet Presidentil. Jumlah kementerian dalam kabinet pertama itu tidak hanya 12 seperti yang disepakati dalam sidang PPKI, tetapi ditambah dengan 5 menteri negara. Salah satu kementerian itu adalah

Kementerian Pengajaran. Berbeda dengan kesepakatan dalam sidang PPKI nomenklatur yang disetujui adalah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Mulai dari awal kemerdekaan hingga sekarang, nomenklatur kelembagaan bidang kebudayaan dalam pemerintahan beberapa kali mengalami perubahan. Perjalanan panjang itu dapat dibagi menjadi tiga periode: (1) Nomenklatur bidang kebudayaan periode 1945- 1962; (2) periode Lahirnya Direktorat Kebudayaan 1962-1966; dan (3) periode Lahirnya Direktorat Jenderal Kebudayaan 1966-sekarang. Gambaran sekilas mengenai berbagai perubahan-perubahan itu adalah sebagai berikut.

A. Nomenklatur bidang kebudayaan (periode 1945-1962)

Sejak awal kemerdekaan bidang kebudayaan telah masuk dalam susunan lembaga di pemerintahan. Bidang kebudayaan dimasukkan ke dalam susunan organisasi Kementerian Pengajaran. Meskipun nomenklatur kementerian itu tidak mencantumkan label “kebudayaan” tetapi di dalam Kementerian Pengajaran itu bidang kebudayaan ikut diurus. Pada awalnya, struktur kelembagaan dalam kabinet belum disusun secara lengkap. Selain sempitnya waktu dalam melakukan persiapan menyambut Indonesia merdeka, kondisi keamanan setelah merdeka juga belum memungkinkan. Penjajah Belanda dengan membonceng masuknya tentara Sekutu, berusaha merebut kembali wilayah jajahan Hindia Belanda dari tangan Jepang.

dan Budaya pada Fakultas Sastra dan Filsafat, Universitas Indonesia yang kemudian berubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan. Dengan perubahan itu struktur organisasi dari Jawatan Kebudayaan yang baru berbeda dengan struktur yang lama, pada 1948.

B. Lahirnya Direktorat Kebudayaan (periode 1962-1966)

Masa berlakunya nomenklatur Jawatan Kebudayaan cukup lama, yaitu 16 tahun mulai 1948 – 1964. Sebenarnya pada masa kabinet Kerja II (6 Maret 1962 – 13 November 1963) telah terjadi perubahan organisasi Kementerian PP dan K yang cukup mendasar. Berdasarkan Keppres No. 94 Tahun 1962, nomenklatur Kementerian PP dan K dipecah menjadi dua, yaitu: (1) Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dipimpin oleh Prof. Dr. Prijono; (2) Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), dipimpin oleh Prof. Ir. Tojib Hadiwidjaja. Tetapi pada saat itu nomenklatur lembaga yang mengurus bidang kebudayaan masih tetap dalam status “jawatan”.

Baru pada 9 Mei 1964 Menteri PD dan K mengeluarkan Keputusan Menteri No. 34/1964. Dalam keputusan itu struktur Kementerian PD dan K dibagi menjadi 4 direktorat, yaitu: (a) Direktorat Pendidikan Umum; (b) Direktorat Pendidikan Kejuruan; (c) Direktorat Pendidikan Masyarakat; dan (d) **Direktorat Kebudayaan**. Dengan adanya perubahan itu maka mulai 1964 status **Jawatan Kebudayaan** berubah menjadi **Direktorat Kebudayaan**. Sebagai sebuah direktorat, tugas dan fungsi Direktorat

Kebudayaan adalah mengurus bidang-bidang seperti yang diurus oleh Jawatan Kebudayaan. Masa berlakunya nomenklatur "Direktorat Kebudayaan", cukup singkat, sekitar dua tahun, kemudian diganti lagi dengan nomenklatur baru.

C. Lahirnya Direktorat Jenderal Kebudayaan (Masa 1966-sekarang)

Setelah pecah peristiwa G30S/PKI 1965, berkembang tuntutan masyarakat melalui demonstrasi mahasiswa, pemuda dan pelajar, agar dilakukan perubahan dalam tata pemerintahan. Susunan kabinet baru yaitu kabinet Dwikora II (1966) yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno dengan julukan *Kabinet Seratus Menteri* ditolak oleh para demonstran. Di dalam kabinet itu terdapat Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibagi menjadi tiga menteri dan seorang menteri koordinator. Masing-masing dijabat oleh Prof. Dr. Prijono sebagai Menteri Koordinator; Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dijabat oleh Sumardjo; Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dijabat oleh Dr. J. Leimena (*ad interim*); dan Menteri Olah Raga dijabat oleh Maladi.

Pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) kepada Letjen Soeharto untuk dan atas nama Presiden mengambil tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketertiban, ketenangan, serta kestabilan pemerintahan. Berkenaan dengan SUPERSEMAR itu pada 20 Juni 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum. Salah satu ketetapan-pannya adalah TAP MPRS No. IX Tahun 1966, tentang

pengukuhan Supersemar dan menunjuk Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pengemban TAP MPRS tersebut.

Selanjutnya, tanggal 27 Maret 1966 Kabinet Dwikora II diganti menjadi Kabinet Dwikora III. Dibentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), memiliki empat departemen, yaitu: (1) Departemen Pendidikan Dasar; (2) Departemen Perguruan Tinggi; (3) Departemen Kebudayaan; (4) Departemen Keolahragaan. Usia kabinet itu sekitar 3 bulan saja, kemudian pada 25 Juli 1966 diganti lagi dengan Kabinet Ampera I, dan pada **4 Agustus 1966** dikeluarkan Keppres No. 173 Tahun 1966 yang berisi penetapan struktur organisasi masing-masing departemen. Muncullah nomenklatur “**Direktorat Jenderal Kebudayaan**”. Ini berarti sejak tanggal, bulan dan tahun itu bidang kebudayaan ditetapkan berstatus “direktorat jenderal”, setingkat jabatan Eselon I.

Yang menarik, ada data lain yang menyebut pembentukan Direktorat Jenderal Kebudayaan itu berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Presidium Kabinet Ampera I, Soeharto, pada **25 Juli 1966**. Data yang satu lagi menyebutkan sejak dikeluarkannya SK No. 175/ U/KEP/ 11/1966, **3 November 1966**. Tanggal itu disebut dalam buku Memorandum Akhir Masa Jabatan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (1978: hal.7). Dengan adanya tiga “tanggal” itu lalu tanggal yang mana yang berlaku sebagai awal dibentuknya “Direktorat Jenderal Kebudayaan”? Tanggal 25 Juli 1966, 4 Agustus 1966, atau tanggal 3 November 1966?

Dari ketiga data “tanggal” itu penulis cenderung memilih tanggal **4 Agustus 1966** sebagai tanggal lahir

Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pertimbangannya, jika memilih tanggal “25 Juli 1966” dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Presidium Kabinet Ampera I, belum tentu pada tanggal itu nomenklatur “Direktorat Jenderal Kebudayaan” langsung lahir. Jika memilih tanggal “**3 November**” (1966) dengan diterbitkannya Keppres No. 175/Kep./11/1966, jelas terlalu lama jarak waktunya dengan pembentukan Kabinet Ampera yang berlaku sejak 25 Juli 1966. Ada sekitar 3 bulan lamanya terjadi ketidakpastian mengenai kehadiran lembaga baru itu.

Sementara itu, jika memilih tanggal “**4 Agustus**” sudah dengan jelas dasarnya, yaitu Keppres No. 173 Tahun 1966 tanggal 4 Agustus 1966, yang di dalamnya telah menyebut nomenklatur “Direktorat Jenderal Kebudayaan”. Tanggal itu dapat disebut sebagai tanggal perubahan status dari “**direktorat**” (Kebudayaan) diganti menjadi “**direktorat jenderal**” (Kebudayaan). Dengan demikian jawaban dari pertanyaan di atas adalah tanggal **4 Agustus 1966** sebagai tanggal lahir Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan pada 4 Agustus tahun 2016 ini “Direktorat Jenderal Kebudayaan” tepat berusia **50** tahun.

Hitungan usia 50 tahun itu sebenarnya tidak penuh, karena ada jeda 11 tahun nomenklatur Direktorat Jenderal Kebudayaan sempat menghilang. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata. Bidang kebudayaan dipecah menjadi dua direktorat jenderal, yaitu “Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, dan “Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film”. Alasan pemecahan bidang kebudayaan menjadi dua

direktorat jenderal itu adalah untuk mengoptimalkan peran bidang kebudayaan dalam mendukung program pariwisata dan dalam membangun karakter bangsa di masa reformasi.

Baru pada periode jabatan SBY kedua, yaitu pada 18 Oktober 2011 ketika Presiden SBY melakukan *reshuffle* kabinet, bidang kebudayaan dikembalikan untuk disatukan dengan bidang pendidikan. Sejak itu Kementerian Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Prof. Moh. Nuh, dan keberadaan Direktorat Jenderal Kebudayaan dihidupkan lagi. Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan Dirjenbud adalah Prof. Kacung Marijan PhD, sampai dengan akhir 2015.

Dari seluruh gambaran mengenai latar belakang sejarah kelembagaan bidang kebudayaan di lingkungan pemerintahan sejak awal Indonesia merdeka hingga sekarang menunjukkan adanya dinamika perubahan dan penyempurnaan. Suatu dinamika yang terjadi seiring dengan hakikat kebudayaan yang cenderung selalu berkembang.

Berikutnya kita akan melacak jejak para Direktur Jenderal Kebudayaan yang mengawaki jalannya perkembangan kebudayaan mulai dari Direktur Jenderal Kebudayaan pertama hingga kedelapan. Kedelapan Dirjenbud itu adalah: R.M. Indrosoegondo, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Prof. Dr. Haryati Soebadio, G.B.P.H. Poeger, Prof. Dr. Edi Sedyawati, Dr. I Gusti Ngurah Anon, Prof. Kacung Marijan PhD, dan Dr. Hilmar Farid.

BAB III

JABATAN WAKIL MENTERI BIDANG KEBUDAYAAN

Dalam perjalanan sejarah kelembagaan bidang kebudayaan di pemerintahan RI selama 71 tahun (1945-2016), pemikiran untuk menjadikan bidang kebudayaan dalam kementerian tersendiri sudah sering disampaikan. Meskipun usulan itu telah berkali-kali disampaikan dalam berbagai forum, tetapi hingga saat ini belum ada realisasinya. Yang pernah terjadi adalah dibentuknya jabatan yang posisinya di atas direktur jenderal dan di bawah jabatan menteri. Jabatan itu adalah jabatan dengan nama “Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan” dan dengan nama “Wakil Menteri Bidang Kebudayaan”.

Sampai sekarang telah melahirkan dua “Wakil Menteri Bidang Kebudayaan. Pertama, dalam Kabinet Ampera I yang menggantikan Kabinet Dwikora III, tanggal 25 Juli 1966, dibentuk jabatan Wakil Menteri (ada yang menyebutnya Pembantu Menteri) Bidang Kebudayaan. Yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto ketika itu adalah Ny. Lasmidjah Hardi dengan tugas mengoordinasikan direktorat dan lembaga kebudayaan yang ada.

Kedua, “Wakil Menteri Bidang Kebudayaan” yang dibentuk pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY). Pada tanggal 19 Oktober 2011, Presiden SBY me-*reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Bidang kebudayaan yang semula bergabung dengan bidang pariwisata disatukan kembali dengan bidang pendidikan, dibentuk Direktorat Jenderal Kebudayaan. Meskipun sebelumnya antara kedua bidang itu telah bersatu selama 55 tahun, untuk kehadirannya sekarang memerlukan penataan ulang hubungan kerja antara kedua bidang itu. Selama keduanya berpisah telah terjadi berbagai macam perubahan, baik dalam hal tata organisasi maupun dalam hal hubungan misi antara keduanya. Kelembagaan bidang pendidikan telah mengalami perubahan dan dengan demikian tata organisasi, visi dan misiya perlu dilakukan penataan ulang.

Dengan dikembalikannya bidang kebudayaan bersatu dengan bidang pendidikan, nomenklatur Kementerian Pendidikan Nasional diganti menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, di lingkungan Kemendikbud dibentuk jabatan baru, Wakil Menteri (Wamen) bidang kebudayaan. Yang ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai Wamen adalah Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D.

Gambaran sekilas mengenai kedua wanita yang menduduki jabatan penting sebagai Wakil Menteri Bidang Kebudayaan itu adalah sebagai berikut.

A. Ny. Siti Lasmidjah Hardi

Lasmidjah Hardi menjabat sebagai Wakil Menteri (ada yang menyebutnya Pembantu Menteri) Bidang Kebudayaan

pada masa jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Ny. Artati Mardjuki Soedirdjo. Nama Hardi di belakang namanya adalah nama suaminya, seorang politikus dan tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI). Menurut pengakuannya seperti tercantum dalam buku *Lasmidjah Hardi, Perjalanan Tiga Zaman*, tugasnya adalah memberikan ceramah, dan kunjungan ke daerah-daerah. Karena keadaan keuangan negara sangat terbatas, sering kali segala biaya ke daerah itu ditanggung sendiri. Masih menurut Lasmidjah, “aku memang menyukai pekerjaan yang ada hubungannya dengan soal kebudayaan”. (Irna H.N. Hadi Soewito, dkk: hal. 142).

Wanita yang sering disebut sebagai “Wanita Tiga Zaman” dan bernama Siti Lasmidjah, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 14 April 1916. Ia adalah putri dr.



Soewardi (Wardi) yang juga kelahiran Purworejo. Suwardi masuk ke STOVIA tahun 1889 dan lulus tahun 1896 (Marihardono dkk, 2014: hal. 293).

Lasmidjah Hardi, Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan, 1966

Saat Lasmidjah lahir dr. Soewardi sedang tugas di Trenggalek. Oleh karena itu, meskipun saat itu Lasmidjah baru 3 hari lahir, oleh Ibunya langsung dibawa ke Trenggalek menyusul Bapaknya. Itulah sebabnya banyak orang menulis, Lasmidjah lahir di Treng-

galek. Seperti yang tertulis dalam Ensiklopedia Jakarta, Budaya dan Warisan Sejarah ditulis "Wanita pejuang tiga zaman, istri politikus Hardi itu lahir di Trenggalek (Jawa Timur) tahun 1916".

Latar belakang pendidikan, Lasmidjah pernah sekolah di Mulo tetapi tidak tamat. Ia dikenal wanita yang gigih dan cerdas. Sejak berusia 15 tahun sudah aktif dalam pergerakan rakyat. Akibatnya ia terkena larangan tinggal di Trenggalek, kemudian bersama orang tuanya pindah ke Batavia melanjutkan pengabdianya sebagai guru Sekolah Rakyat milik perkumpulan yang bernama "Istri Sedar". Di Batavia tinggal bersama kakaknya Lasmikin, isteri tokoh pejuang nasionalis, Yahya Nasution.

Tahun 1930-an Lasmidjah menjadi anggota Partindo yang didirikan oleh Mr. Sartono setelah pemerintah kolonial melarang Partai Nasional Indonesia (PNI) dan menjeblakan Soekarno ke penjara Sukamiskin Bandung. Setelah Indonesia merdeka dan memasuki babak revolusi Lasmidjah terlibat dalam berbagai aktivitas dan menyelenggarakan dapur umum. Rumahnya dijadikan Posko pemuda yang aktif dalam rapat umum di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945. Lasmidjah juga masuk ke dalam kegiatan yang cukup berat dilakukan oleh sorang wanita, yaitu menyelendupkan senjata ke pedalaman (Cikampek dan sekitarnya) dan sebaliknya membawa beras dari Cikampek ke Jakarta. Sekembali dari masa pengungsian ke Yogyakarta bersama Ny. Maria Ulfah Santoso mendirikan Bank Koperasi Wanita.

Selain menari, Ibu Lasmidjah juga pernah main drama bersama teman seangkatannya, seperti: Ny. Utami Surja-

darma, Mien Soedarpo, Ani Harahap dan Awaludin Djamin. Nama yang terakhir itu pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI (KAPOLRI). Judul cerita yang dimainkan adalah "Setahun di Bedahulu" karya sastrawan I Gusti Pandji Tisna. Masih di bidang kesenian, Ibu Lasmidjah juga masuk sebagai anggota Paduan Suara, di bawah asuhan seniman musik terkenal saat itu, Asbon. Paduan suara itu sering main di Hotel Indonesia, aula Bank Indonesia, dan pernah pentas di Istana disaksikan oleh Bung Karno.

Dari sekian pertunjukan yang pernah diikuti, yang paling berkesan adalah ketika terlibat dalam pertunjukan drama "Loro Jonggrang" untuk menghimpun dana membiayai perjuangan Trikora yang dikoordinasikan oleh Menteri Sosial, Muljadi Djojomartono. Pertunjukan kolosal ini melibatkan 200 pemain. Drama itu dipentaskan di Aula Bank Indonesia, Hotel Indonesia dan Istora Senayan. Sebelum pentas untuk menarik perhatian masyarakat, didahului dengan arak-arakan pemain yang berkostum prajurit, dayang-dayang diikuti dengan pendeta (resi).

Setelah sukses dengan drama Loro Jonggrang, pentas berikutnya adalah drama kolosal "Sumpah Sakti Gajah Mada" dengan sutradara Wim Umboh, dan naskah ditulis oleh Sidik Gondowarsito, dosen Universitas Indonesia. Salah satu pemain drama "Sumpah Sakti Gajah Mada" itu adalah Dicky Zulkarnain sebagai Gajah Mada dan Ny. Rosmijati Sudarto (isteri ajudan Presiden Soekarno, Jenderal Sudarto) sebagai Tri Buana Tunggaladewi.

Pada pementasan kedua di Hotel Indonesia ada kejadian yang cukup menarik. Mendadak ada berita bahwa Bung Karno akan hadir, sementara tempat pertunjukan

telah ditata tanpa kehadiran tamu VVIP. Sampai-sampai Teguh Karya (Steve Liem) ikut sibuk menata kursi. Kejadian menarik berikutnya terjadi ketika pada adegan pisowanan (menghadap raja) di kerajaan Majapahit, Bung Karno meminta Kol. Marinir Bambang Widjanarko (ajudan Bung Karno) menembang Pangkur Palaran dan Bung Karno berdiri bagaikan seorang sutradara. Perintah Bung Karno kedua adalah agar pada adegan tertentu dari atas panggung turun “hujan” bunga mawar dan melati. Drama itu juga digelar di Semarang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Semarang. Rencana pertunjukan berikutnya di Malang batal karena meletus peristiwa G30S/PKI. Hasil dari pertunjukan itu disumbangkan untuk perjuangan Dwikora (Irna Hanny Hastoeti Hadi Soewito: Wanita Pejuang: Perjalanan Tiga Zaman).

Masih ada satu lagi kegiatan yang diikuti oleh Ibu Lasmidjah Hardi, yaitu pentas “Pandratari Irama Nusa”. Pandratari adalah singkatan dari Paduan Suara, drama dan tari, yang saat itu melibatkan Rahayu Effendi, Titik Qadarsih, Marini dll. Para artis muda itu dapat bekerja sama dengan baik bersama artis “sepuh” seperti Ibu Djuariah Hendarsin, Ibu Abadi, Ibu Sri Jakse dan Ibu Wiwoho Sudjono SH.

Selain aktif di bidang kebudayaan, Ibu Lasmidjah Hardi juga aktif bidang sosial kemasyarakatan. Beliau aktif dalam berbagai yayasan, seperti: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Pengurus Yayasan Dana Bantuan, Pengurus Yayasan Bunga Kemboja, Mengelola Yayasan Wanita Pejuang, mendirikan Paguyuban Wanita Pejuang, Yayasan Pecinta Sejarah, dan Yayasan Obor Ke-

bajikan. Atas segala jasa dari perjuangannya, Ibu Lasmidjah Hardi telah menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan sebagai "Tokoh Wanita". Anugerah dan Tanda Kehormatan yang diterima oleh Ibu Lasmidjah Hardi adalah Bintang Jasa Naraya, Satyalencana Perintis Kemerdekaan dan Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan '45. Wafat tanggal 10 Maret 1998 dalam usia 82 tahun, dimakamkan di makam Peristis Kemerdekaan di Tanah Kusir Jakarta.



Lasmidjah Hardi mendampingi presiden Soekarno di Istana Negara bersama Juanda dan Leimena. Bawah:



Atas: menerima potongan tumpeng dari Presiden Soeharto mewakili Perintis Kemerdekaan pada HUT Proklamasi ke-51, 1966. Bawah: Foto bersama sebelum pementasan drama "Setahun di Bedahulu". Berdiri: a.l. Awaludin Djamin, Murdono, Aedy Moward. Duduk: Lasmidjah Hardi, J. Harahap, A. Kamil, Tien Benyamin, Mien Soedarpo. Jongkok paling kanan: Nely Adam Malik.

B. Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti, M. Arch., Ph.D.

Pada 2011, penataan kelembagaan bidang kebudayaan didasarkan pada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi eselon satu Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 92 tahun 2011. Struktur organisasi Kementerian Pendidikan Nasional (Diknas) pada saat itu terdiri atas: (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal, dan Informal; (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; dan (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan adanya Perpres tersebut kelembagaan kebudayaan disatukan kembali dengan bidang pendidikan.

Menurut Prof. Dr. Miftah Thoha, sebelum bidang kebudayaan masuk, kelembagaan bidang pendidikan sudah cukup besar alias gemuk, terdiri atas lima belas jabatan eselon satu, mulai dari wakil menteri sampai ke staf ahli bidang budaya dan psikologi pendidikan. Dengan kondisi kelembagaan seperti itu, "lembaga pendidikan pada Masa Reformasi tergolong sangat besar, tetapi kurang produktif dan efektif dengan pegawai yang kurang kompeten dan profesional...". (Endang Sunarya dkk, 2012: 215).

Kenyataan seperti itu menyebabkan peluang bidang kebudayaan untuk dapat mempertahankan dua direktorat jenderal seperti di lingkungan Kementerian Parekraf menjadi kecil. Meskipun bidang kebudayaan disebut sebagai bidang strategis dalam pembangunan karakter bangsa, tetapi pada kenyataannya bidang itu hanya mendapatkan jatah satu direktorat jenderal, yang berarti nomenklatur

lama dihidupkan lagi, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Sebelum dilakukan *reshuffle* kabinet, Kementerian Pendidikan Nasional yang kemudian berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki wakil menteri (wamen) bidang pendidikan. Hadirnya Wamen satu lagi mempunyai tugas membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaan (Pasal 8). Ruang lingkup tugas wamen adalah (1) membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang kebudayaan; dan (2) membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon satu yang membidangi kebudayaan di lingkungan kementerian.

Bobot tugas Wamen Bidang Kebudayaan dibandingkan dengan Wamen Bidang Pendidikan benar-benar tidak seimbang. Bila Wamen Bidang Kebudayaan mengoordinasikan satu eselon satu (Direktorat Jenderal Kebudayaan), Wamen Bidang Pendidikan mengkoordinasikan empat eselon satu Bidang Pendidikan, yaitu (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; dan (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Jabatan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II bukanlah jabatan struktural dan tidak harus ada dalam setiap kementerian. Wakil menteri juga tidak termasuk anggota kabinet, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mengefektifkan kinerja kementerian. Mengenai pembentukan jabatan wakil menteri, Ketua Gerakan Nasional

Pemberantas Korupsi (GNPK) mempersoalkan pembentukannya dan melakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. GNPK menilai pembentukan wakil menteri telah melanggar UUD 1945.

Sementara itu, menurut Azulian Rifai, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya (*Kompas*, 8 Februari 2012) bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, posisi wakil menteri pernah diadakan. Tidak seharusnya kewenangan konstitusional Presiden tersebut diintervensi oleh cabang kekuasaan lain, termasuk oleh kekuasaan yudisial. Atas dasar ini, langkah Presiden SBY mengangkat para wakil menteri sudah sesuai dengan ketentuan. Bahwa jumlahnya terkesan diobral menurut Azulian itu soal lain.

Akhirnya, pada 5 Juni 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji material Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK menyatakan bahwa penjelasan pasal yang mengatur posisi wakil menteri itu bertentangan dengan UUD 1945. Posisi wakil menteri diatur dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara, dengan penjelasan bahwa “Yang dimaksud dengan *wakil menteri* adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet.” Selanjutnya MK menyarankan agar posisi wakil menteri segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif presiden. Oleh sebab itu, semua Keppres pengangkatan tiap-tiap wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian hukum.

Yang ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai Wakil Menteri Bidang Kebudayaan ialah Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti M. Arch. Ia lahir 15 Mei 1959 di Yogyakarta. Lulusan Universitas Gajah Mada 1982 S1 Fakultas Teknik Arsitektur, jurusan Arsitektur dan Perencanaan (Insinyur). Tahun 1987, S2 (M.Ach) Universitas Wisconsin, USA, Architecture and Urban Planning: Museum Development. Tahun 1998, lulus S3 (PhD) dari The Universities of Surrey University and Bournemouth University, Inggris.



Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch. Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, 2012

Menjabat sebagai Wakil Menteri Bidang Kebudayaan sejak 19 Oktober 2011. Isteri dari David Sanders Ph.D. asal Kanada itu banyak memiliki pengalaman di bidang

pariwisata dan kebudayaan. Ia mendapat penghargaan Karya Satya dari Presiden RI 2001. Selain itu sebagai Tokoh Pariwisata Berprestasi pilihan PWI Yogyakarta (SIWATA) 1999, British Chieiving Award 1994 dan Mashall Award (Marshall Foundation) bidang Permuseuman 1985.

Setelah dilantik dan memulai tugasnya, Wiendu menyampaikan beberapa konsep, kebijakan, dan strategi dalam membantu menteri di bidang pemajuan kebudayaan bangsa. Konsep, kebijakan dan strategi itu pada dasarnya bertolak pada tiga pesan penting yang disampaikan Presiden SBY. Pertama, kebudayaan perlu mendapatkan ruang sangat sentral sebagai pilar terpenting dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Kedua, perlu dirumuskan kebijakan yang nantinya akan diikuti program-program strategis dan lebih menyeluruh. Ketiga perlu dibangun kerja sama dengan instansi terkait, terutama dengan Wamen Bidang Pendidikan.

Menurut Wiendu penyatuan kembali bidang pendidikan dan kebudayaan harus disambut baik karena kedua bidang tersebut perlu diintegrasikan. Jika kebudayaan masuk ke kurikulum harus bersinergi dengan pendidikan dalam hal penanaman nilai dan peradaban untuk membangun karakter bangsa dan manusia berkarakter. Langkah yang dilakukan ialah banyak memasukkan kebudayaan yang membangun karakter bangsa dalam kurikulum pendidikan.

Karena pemisahan kedua bidang itu maka selama ini muatan kebudayaan dinilai sangat minim dalam kegiatan pendidikan. Minimnya akses muatan kebudayaan dalam kegiatan pendidikan tampak dari tidak adanya pilihan

dalam pelajaran untuk mengambil mata pelajaran bahasa Batak dan Jawa. Begitu pula dalam ekstrakurikuler untuk menari juga belum disediakan di semua sekolah. Jika kebudayaan masuk dalam kurikulum, kekuatan lokal akan tumbuh subur.

Pendapat seperti itu sebenarnya sudah sering disampaikan orang. Salah satu pendapat menyatakan, pemisahan itu tidak hanya menyebabkan bidang kebudayaan menjadi “kocar-kacir” telah kehilangan makna dan semangat, tetapi bidang pendidikan juga mengalami hal sama. Dalam acara dialog “Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan” dengan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan tanggal 12/12/2011 seluruh peserta menyambut baik penyatuan kembali itu. Banyak pakar yang hadir menilai kondisi bangsa sedang mengalami krisis kebudayaan karena kebudayaan dipisahkan dari pendidikan. Antara lain disoroti tentang penyelenggaraan pendidikan yang lebih mengutamakan kecerdasan otak dan kurang memerhatikan pendidikan emosi, seni, sejarah, budaya, etika dan moral. Prof. Dr. HAAR Tilaar menanyakan: *“apakah setelah kembali ke lingkungan pendidikan akan dilakukan penataan ulang untuk menyatukan keduanya ataukah kebudayaan hanya akan sekedar menempel saja?”*

Bila penyelenggaraan pendidikan benar seperti yang digambarkan di atas, maka kenyataan itu menurut penulis patut untuk disayangkan bisa terjadi. Yang terkesan, selama bidang kebudayaan berada di luar bidang pendidikan penyelenggaraan pendidikan kurang menempatkan bidang kebudayaan dalam proses penyelenggaraan pendidikan membangun karakter bangsa. Bukankah sejak

lahirnya UU tentang Dasar-dasar Pendidikan No. 4 Tahun 1950, kemudian diganti dengan UU No. 2 Tahun 1989 dan terakhir diganti lagi dengan UU No. 20 Tahun 2003 telah menempatkan kebudayaan sebagai dasar dan akar dalam penyelenggaraan pendidikan?

Di dalam UU no. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan jelas disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan berdasar atas dasar yang termaktub dalam Pancasila, UUD 1945 dan atas dasar kebudayaan Indonesia. Di dalam UU berikutnya, yaitu UU no. 2 Tahun 1989 pasal 1 angka 2 Pendidikan Nasional juga jelas dinyatakan bahwa pendidikan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian acuannya sudah sangat jelas. Tinggal menerapkan, dan tidak perlu lagi melihat apakah bidang kebudayaan ada di dalam atau di luar bidang pendidikan.

Untuk menata ulang penyatuan kedua bidang itu, pada 28 Februari 2012 diselenggarakan “Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan”, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Nasional di Sawangan. Beberapa kesimpulan yang dijadikan sebagai pokok kebijakan antara lain integrasi bidang kebudayaan dengan bidang pendidikan itu perlu didorong untuk dapat berfungsi untuk: (1) Memperkokoh identitas bangsa (*national*

identity); (2) Mempertahankan falsafah bangsa Pancasila dan motto Bhinneka Tunggal Ika (*cultural diversity*); (3) Perekat masyarakat (*social cohesion*); (4) Meningkatkan budaya damai (*culture of peace*); (5) Membentuk karakter bangsa (*character building*); dan (6) Membuat arahan kebudayaan (*standart setting*)

Selain itu, di dalam rembuk itu juga disimpulkan tentang perlunya dikembangkan adanya integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta menyiapkan masyarakat Indonesia untuk mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian pertemuan kedua bidang dalam kementerian baru itu akan mempercepat proses pembudayaan menuju proses peradaban, sesuai dengan amanat UUD 45. Dalam hal proses pembudayaan melalui kedua bidang itu, perlu dikembangkan pendayagunaan semua lembaga kebudayaan dan sumber daya budaya di antaranya museum, cagar budaya, kesenian, dan film sebagai pendukung program pendidikan. Juga perlu didorong berkembangnya integrasi antara nilai-nilai budaya ke dalam proses belajar siswa, serta sinergitas antara kelembagaan pendidikan dan kebudayaan di daerah.

Dari Rembuk Nasional itu dapat diidentifikasi masalah dan kendala yang dijadikan bekal untuk menata ulang penyatuan kedua bidang itu. Masalah belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum terwujud. Oleh karena itu perlu diupayakan terbitnya regulasi di bidang kebudayaan terutama UU tentang Kebudayaan serta PP sebagai turunan dari UU yang telah ada, yaitu Undang-Undang no 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya dan Undang-Undang no 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Hasil pembangunan berupa lembaga-lembaga kebudayaan diantaranya museum dan taman budaya, perpustakaan, balai bahasa, balai Arkeologi, galeri, dll, serta sumber daya budaya antara lain cagar budaya, kesenian, bahasa, tradisi perlu diperkuat dan memiliki status hukum yang jelas dan pendirian lembaga pendidikan yang memiliki program seni budaya, perlu dimanfaatkan untuk mendukung program yang lain. Selain itu, sumber daya manusia sebagai unsur penting dalam memajukan kebudayaan bangsa perlu ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya.

Bagian lain yang dinilai penting untuk dikembangkan adalah penyediaan fasilitas pemajuan kebudayaan berupa bangunan fisik, peralatan teknis, kegiatan teknis, seperti penelitian, penerbitan, lomba, festival, pergelaran, kongres, seminar, dll, yang didukung oleh anggaran memadai. Untuk itu perlu adanya penyusunan cetak biru (blueprint) yang berisi konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan. UU tentang Kebudayaan dan cetak biru pembangunan kebudayaan itu akan menjadi panduan dan arah kebijakan kebudayaan dalam 15-20 tahun ke depan.

Dalam cetak biru itu semula diusulkan adanya lima pilar untuk dijadikan dasar. Kelima pilah itu ialah pilar karakter dan jati diri, pilar sejarah, warisan dan karya budaya, pilar diplomasi budaya, pilar pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan budaya, serta pilar sarana dan prasarana budaya. Wiendu menargetkan cetak biru tersebut selesai pada akhir 2011. Untuk penyusunan cetak biru tersebut, dilakukan oleh pemerintah bersama

kalangan akademisi, budayawan, seniman dan pekerja seni.

Selain itu, ia juga akan ikut mengevaluasi peredaran film di tahun 2012. Wiendu Nuryanti mengatakan, berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, kementerian yang mengurus film adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian mulai 2012 Kemendikbud ikut mengevaluasi peredaran film. Menurut Wiendu, peredaran film saat ini sangat mendesak untuk ditata ulang. Selain itu juga melakukan penataan di bidang sensor film dengan melakukan pemetaan kemampuan apa yang harus ada di tangan para tenaga sensor.

Sebagai langkah awal mengevaluasi peredaran film, Kemendikbud mempertemukan sineas film bersama pemerintah melalui media diskusi untuk mendorong lahirnya film-film yang memiliki nilai kultural-edukatif. Misalnya, film-film dokumenter tentang kehidupan anak atau guru yang bekerja di daerah pedalaman. Termasuk film yang bertemakan pada pembangunan karakter seperti film kepahlawanan. Memang, film termasuk seni yang tidak mungkin dibatasi secara keras. Namun, perlu ada anjakan untuk menata agar produk atau karya film yang beredar dapat masuk sebagai konsumsi yang memiliki muatan kultural-edukatif bagi generasi muda. Kebijakan di bidang film melahirkan program Apresiasi Film (AFI), Nonton Bareng (NOBAR) Film Inspiratif sebagai media pesemaian karakter bangsa, dan Mobil Bioskop Keliling.

Upaya yang dilakukan Wiendu antara lain menindaklanjuti lahirnya UU tentang Kebudayaan, salah satu

agenda atau Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR-RI. Selain menyiapkan RUU Kebudayaan versi Pemerintah (Ditjenbud) juga menyampaikan Daftar Isian Masalah (DIM) dari RUU Kebudayaan yang disusun oleh DPR-R. Oleh Ditjenbud (2014) hasil penyusunan DIM itu dikembalikan ke DPR.

Dalam hal penyusunan cetak biru pengembangan kebudayaan setelah beberapa kali dirapatkan akhirnya ditetapkan paradigma pembangunan kebudayaan Indonesia ke dalam delapan pilar. Kedelapan pilar itu adalah: (1) Hak-hak Berkebudayaan; (2) Jatidiri dan Karakter Bangsa; (3) Multikulturalisme; (4) Sejarah dan Warisan Budaya; (5) Industri Budaya; (6) Diplomasi Budaya; (7) Pranata dan SDM Kebudayaan; dan (8) Sarana dan Prasarana Budaya.

Sebagai kelanjutan dari lahirnya delapan pilar itu upaya menjadikannya delapan pilar benar-benar menjadi pegangan pembangunan kebudayaan sampai dengan 15-20 tahun ke depan. Sebagai tindak lanjut dari delapan pilar tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan merancang program dan kegiatan dari masing-masing pilar. Antara lain melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi, apresiasi, penominasian, ekshibisi, kompetisi, konferensi, dialog, seminar konferensi dan kongres. Juga dilakukan kerja sama kebudayaan dengan berbagai negara melalui pembentukan Rumah Budaya atau Pusat Kebudayaan di luar negeri. Selain itu juga melalui regulasi, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan potensi yang dimiliki kebudayaan bangsa, dan lain-lain.

Salah satu langkah untuk mewujudkan konsep diplomasi budaya, Indonesia menggagas berlangsungnya

forum dialog budaya antarbangsa. Forum itu diberi nama World Culture Forum (WCF). Pertemuan pertama diselenggarakan di Bali sehingga pertemuan itu juga dikenal dengan nama “Bali Forum”. Tujuan utamanya adalah untuk mempererat hubungan harmonis antarbangsa, menciptakan peradaban dunia, menjunjung tinggi dan menghargai keunikan dan keanekaragaman budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi forum itu untuk menjadikan Indonesia sebagai “Rumah Dunia” bagi pertemuan dan diskusi berbagai isu strategis dalam bidang kebudayaan, khususnya terkait dengan perdamaian, pelestarian alam, pembangunan, dan globalisasi.

Pertemuan WCF dibuka oleh Presiden SBY di Mangu-pura Hall, Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, pada Senin, 25 November 2013. WCF sebagai forum budaya internasional mendapat dukungan UNESCO, dihadiri sejumlah menteri kebudayaan, praktisi budaya, LSM, dan pembuat kebijakan dari 65 negara. Dalam pembukaan SBY menyatakan bahwa WCF direncanakan menjadi acara sekelas forum internasional, seperti World Economic Forum dan World Social Forum.

Selama ini belum ada forum global yang membahas pentingnya kebudayaan. Melalui WCF setiap negara bisa saling memahami dan mengapresiasi keragaman budaya secara lebih baik di tengah-tengah globalisasi. Amartya Sen, peraih Nobel bidang ekonomi dan Fareed Zakaria wartawan dan ahli hubungan internasional, memberikan ceramah wacana budaya pada acara pembukaan. Adapun Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, memberikan

sambutan melalui video. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menyatakan melalui WCF Indonesia ingin menjadi *global home* untuk dialog kebudayaan. Pertemuan menghasilkan resolusi yang disebut dengan “Bali Promise”.



Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Prof. Wiendu Nuryanti mendampingi mantan Presiden RI ke-3 BJ. Habibie pada peresmian Museum Kepresidenan di Bogor.



Atas: Wapres Prof. Dr. Budiono dan Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti pada pembukaan Wayang Summit 2012. Bawah: Prof. Wiendu Nuryanti membuka Kongres Bahasa Jawa 2011 di Surabaya.



Atas: Prof. Wiendu Nuryanti memberikan sambutan pada pembukaan pameran peringatan 236 Tahun Museum Nasional, di Museum Nasional.
 Bawah: penyerahan sertifikat UNESCO tari Saman, dari Aceh

6.



BAB IV

RM INDROSOEGONDO (1966-1968)

RM Indrosoegondo adalah Direktur Jenderal Kebudayaan pertama. Kalau ternyata di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri nama-nama direktur jenderal ketiga, kedua dan pertama itu tidak dikenal, apalagi di lingkungan masyarakat. Sedihnya lagi, di lingkungan Ditjenbud sendiri tidak ditemukan naskah atau dokumen yang memuat tentang riwayat hidup beliau. Nama RM



Indrosoegondo hanya ditemukan dalam buku berjudul "Memorandum Akhir Masa Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra 1968-1978."¹ Itu pun hanya sebaris kalimat saja.

R.M. Indrosoegondo, Direktur Jenderal Kebudayaan pertama 1966-1968

Bunyi kalimat itu adalah:
"Sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan yang pertama ditunjuk Bapak Indrosugondo yang

¹ Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sekretaris ditjenbud adalah M. Idris (1966-1968), ayah dari pemain sepak bola terkenal Suwardi Idris.

pada waktu itu menjabat Atase Kebudayaan Indonesia untuk Amerika Serikat". (Ditjenbud, 1978: hal. 5) Hanya itu saja keterangan yang ada. Selebihnya, siapa Indrosoegondo menjadi pertanyaan yang penuh "misteri". Sumber tertulis tidak tersedia, sementara narasumber yang mengenalnya telah tiada. Mencari jawab siapa dan di mana keluarga beliau sepertinya juga menemui jalan buntu. Berbeda dengan direktur jenderal yang lain untuk melacak jejaknya relatif lebih mudah.

Dari bantuan "Google", penulis menemukan nama Indrosoegondo di alamat rumah di Jln. Cipete Udik persil Nomor 78, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Rumah itu tercatat milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperoleh atau dibangun 1952 di atas tanah seluas 865 m². Penghuni rumah itu tercatat atas nama Ny. RAY. Indrosoegondo. Setelah penulis datang ke rumah itu memang benar pernah dihuni oleh RM Indrosoegondo, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari penghuni mendapatkan penjelasan bahwa rumah itu sudah dijual dan ditempati orang lain yang tidak mengenal RM Indrosoegondo.

Melalui "Google" pula penulis menemukan nama Himpunan Ahli Rias Pengantin "HARPI MELATI" di Jln. Dr. Saharjo 109 Jakarta Selatan. Nama Ibu BRA Indrosoegondo menjadi salah satu pendiri. Disebutnya ia adalah seorang perias dari Puro Pakualaman yang kondang saat itu. Himpunan itu sangat terkenal pada zamannya, sehingga sudah biasa merias orang-orang penting, termasuk dari kalangan Isatana. Mulai tahun lima puluhan Bung Karno sangat mendorong kemajuan wanita Indonesia di segala bidang,

termasuk dalam hal rias pengantin. Sayang sekali, setelah himpunan penulis datang tidak ada pengurus yang mengetahui riwayat BRA Indrosoegondo maupun RM Indrosoegondo suami sang perias kondang itu.

Tahun 2005 penulis mendapatkan guntingan koran Singapore Free Press tahun 1952 yang memuat iklan tentang pertunjukan kesenian Indonesia dari Sumatera dan Bali di bawah naungan *The Indonesian Fine Art Movement Troupe*. Rombongan itu dipimpin oleh Mr. Indrosoegondo dan Bachtiar Effendi yang datang pertama kali ke Malaya setelah pergelarannya sukses luar biasa di Kolombo. Pelindung misi ini adalah Dr. Mohd. Razif, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Malaya. Grup ini bermain di Victoria Teater Singapura tanggal 24, 25, 27, 28 Maret 1952. (Sumber: <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/>

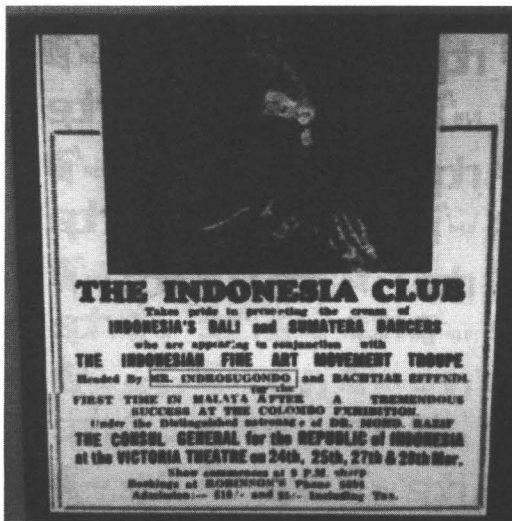
Digitised/

Article/freepress

19520322-

1.2.47.1.aspx.

Nama Indrosoegondo dalam iklan koran Singapore Free Press, 1952



pul. Selain pencarian melalui sumber pustaka, juga melalui narasumber. Selain melalui sumber pustaka yang

ditemukan baru sebuah buku memorandum akhir masa jabatan Prof. Dr. IB Mantra seperti disebut di atas, penulis mendapatkan guntingan koran KAMI dan Sinar Harapan. Sementara itu, mencari data melalui bantuan narasumber ternyata juga tidak mudah, karena sudah pada tiada. Dari beberapa narasumber yang sempat penulis wawancarai seperti Drs. Amir Sutaarga (mantan Kepala Museum Pusat), Sardono W. Kusumo, Retno Maruti, Prof. Dr. Edi Sedyawati, Sumandari Soekamso, Ibu GBPH Poger, Dinusatomo, Prof. Dr. Inayati, dll, hanya mendapat cerita pengalaman ketika bersama dengan Indrosoegondo. Semua hanya mengaku kenal tetapi tidak mengetahui latar belakang pekerjaan Indrosoegondo secara lengkap.

Setelah melalui cara “bercerita dan bertanya” kepada siapa pun yang dari segi usia layak menjadi narasumber, akhirnya setahap demi setahap data itu mulai terkumpul. Tahun 2012 melalui bantuan Drs. Kastowo Himodigdo (74 tahun), mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Jerman dan Inspektur pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ditemukan nama kampung tempat tinggal keluarga Indrosoegondo. Kampung yang disebutkan adalah Banaran di Yogyakarta.

Mendapatkan informasi itu baru tanggal 15 Oktober 2013 penulis dapat menindaklanjuti, mendatangi kampung Banaran. Sebelum melacak ke kampung itu, penulis lebih dahulu bertemu dengan Sdr. Suhatno, pensiunan pegawai Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. Ayah Sdr. Suhatno pernah bekerja di bidang kesenian Jawatan Kebudayaan Yogyakarta. Ia menyebut daerah Banaran di jln. Sukun. Ternyata untuk menemukan jln. Sukun juga

tidak mudah. Nama jalan itu jarang dikenal orang karena kini berubah menjadi Jln. Ki Mangunsarkoro. Setelah ketemu jalannya, baru kemudian menanyakan lokasi rumah.

Sangat beruntung, ketika ketemu dengan seorang Bapak berusia sekitar 70 tahunan dapat memberikan petunjuk yang agak jelas. Penulis diminta datang ke alamat Jln. Ki Mangunsarkoro No. 34. Bangunan pada alamat itu kini menjadi SMP Muhammadiyah. Setelah bertemu dengan Kepala Sekolah baru menjadi jelas. Rumah itu memang dulu milik RM Indrosoegondo, dan kini oleh Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Yogyakarta dijadikan gedung SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta.

Selanjutnya penulis menemui Ibu Isbandi yang tinggal di sebelah kiri gedung SMP itu. Dari Ibu Isbandi penulis mendapatkan izin untuk melihat gudang penyimpanan sejumlah benda “milik” RM Indrosoegondo yang masih ada. Begitu masuk ke dalam gudang yang gelap dan pengap, mata penulis langsung menatap wajah “orang” yang seperti berdiri di suatu tempat. Wajahnya terpantul ke permukaan kaca rias oval pada pintu sebuah almari. Sebuah lukisan yang tampak kusam tetapi tampak hidup. Lukisan yang menggambarkan bayangan seseorang yang sedang berdiri sambil menghisap cangklong dalam pose sedang melukis.

“Orang” yang berdiri di dalam kaca itu seperti sedang menyapa penulis yang baru datang. Ketika penulis masih terkesima diam karena seperti berhadapan dengan “orang” yang memberi kesan berwibawa, penjaga gudang menjelaskan bahwa itu lukisan diri RM Indrosoegondo. Lukisan yang dilukis sendiri oleh beliau (lukisan ada di halaman

90). Penulis merasa lega, orang yang penulis cari sekian lama akhirnya ketemu juga. Di dalam gudang itu tersimpan berbagai benda koleksi antara lain gamelan pelog-slendro, dua lukisan, lukisan wayang medium kaca, payung, tombak, dan sebuah arca. Benda-benda itu dalam keadaan tidak terawat, dan beberapa bagian mengalami kerusakan yang cukup parah.

Selain mendapat izin untuk melihat ke dalam gudang, dari Ibu Isbandi penulis mendapatkan sebuah nomor telepon seseorang. Setelah dihubungi beberapa kali mendapat jawaban “nomor yang Anda tuju belum terpasang”. Berikutnya, dari Ibu Isbandi penulis mendapatkan keterangan bahwa Bapak dan Ibu Indrosoegondo almarhum dimakamkan di makam keluarga Pakualaman, di Pemandikan Sunyaragi, Yogyakarta.

Kepalang tanggung sudah berada di Yogyakarta, penulis meluncur ke makam beliau, sekaligus ziarah. Di sela-sela doa semoga arwah Bapak dan Ibu Indrosoegondo diterima di sisi-Nya, penulis selipkan doa semoga diberi kemudahan dalam melacak jejak beliau. Ketika mau meninggalkan makam penulis memberikan nomor HP kepada juru kunci, dengan pesan apabila suatu ketika ada keluarga RM Indrosoegondo yang berkunjung ke makam agar nomor HP itu diberikan.

Sekitar 6 bulan kemudian penulis menerima telepon dari seseorang yang menanyakan apakah betul penulis telah berkunjung ke makam RM Indrosoegondo. Si penelpon ternyata adalah keponakan cucu beliau, bernama Muwardi. Dari pertemuan dengan cucu buyut itu penulis

mendapatkan beberapa tambahan data. Menurut Muwardi, RM Indrosoegondo diperkirakan lahir bulan Januari 1907 di Yogyakarta, dari trah KGPAA Paku Alam II. Beliau berputra KPH Gondowinoto, mempunyai putra RM Pj. Notosoegondo, kemudian melahirkan RM Indrosoegondo dan memiliki seorang putra bernama Adi Soegondo. Rumah tinggal di Ki Mangunsarkoro No. 34 Yogyakarta merupakan bagian dari kompleks perumahan keluarga Pakualaman.

Beliau menikah dengan Raden Nganten Sutinah atau R.Ay. Indrosoegondo, putri RM Prawirowisoto dari Madiun. Beliau adalah putra RM Prawiroadiningrat yang merupakan keturunan dari Pangeran Ronggo Prawirodirjo, Bupati Madiun. RAY. Indrosoegondo wafat tahun 60-an, kemudian RM Indrosoegondo menikah lagi dengan RAY. Suminah atau KRAY. Tumenggung Indroadiningrat, cucu Paku Alam V. RM Indrosoegondo wafat pada tanggal 7 November 1976 dalam usia 69 tahun, dimakamkan tidak berdampingan dengan makam istrinya RAY. Indrosoegondo, tetapi terpisah sekitar 10 m jaraknya.

Rumah dan tanah itu kini statusnya diwakafkan ke Yayasan Pendidikan Muhammadiyah, menjadi SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Bentuk rumah induk masih dipertahankan keasliannya. Perubahan terjadi berupa tambahan bangunan Mushola di bagian depan sebelah kanan, dan bangunan kelas di bagian belakang. Sementara itu, pendopo di sebelah kiri berikut gudang juga masih dipertahankan, ditempati oleh Ibu Isbandi yang masih ada pertalian darah dengan Ny. RM Indrosoegondo. Menurut Ibu Isbandi masih ada sejumlah benda yang disimpan di

dalam almari yang sampai sekarang belum diketahui apa isinya.

Tentang kisah secara lengkap tentang beliau, si cucu buyut ternyata tidak banyak tahu. Sebaliknya, ia malahan mengucapkan terima kasih kepada penulis karena kini ia sedikit banyak mulai tahu riwayat pekerjaan dan jabatan kakek buyutnya. Patut ditambahkan RM Indrosoegondo berputra hanya satu orang bernama Adi Sugondho sudah almarhum. Putra tunggal itu tidak memiliki putra atau putri, sehingga dari garis keturunan RM Indrosoegondo tidak ada lagi orang yang dapat dijadikan narasumber.

Indrosoegondo seorang seniman

Sebagai disinggung di bagian awal, Indrosoegondo telah melukis potret diri yang kini disimpan di dalam gudang. Selain itu ia juga seorang penari dan pembina tari. Dari hasil pelacakan berikutnya, RM Indrosoegondo adalah seorang seniman dan sekaligus juga pemikir di bidang kebudayaan. Tidak hanya berkarya (melukis dan menari) tetapi ia juga menyampaikan pikiran dan ide dalam memajukan kebudayaan dan kesenian Indonesia. Ada satu nama yang perlu dicatat karena kedekatannya dengan RM Indrosoegondo, yaitu Soemarjo LE. Pada masa Indrosoegondo menjabat, Soemarjo menjabat Ketua Lembaga Musikologi dan Koreografi.

Sebagai seorang pelukis Indrosoegondo selain mengajar melukis juga aktif dalam organisasi seniman. Pada 1945, di Yogyakarta berdiri perkumpulan seni lukis dengan nama Pusat Tenaga Pelukis Indonesia (PTPI). Kegiatannya menga-

dakan kursus menggambar serta pembuatan poster-poster bernuansa perjuangan. PTPI dipimpin oleh Dja-jengasmoro dan Indrosoegondo menjadi salah satu anggota bersama antara lain Sindusisworo (ex anggota Persatuan Ahli Gambar Indonesia/Persagi yang berdiri tahun 1938), dan Prawito. Selain itu, pada 1946 berdiri perkumpulan baru dengan nama Seniman Indonesia Muda (SIM), dan pada 1947 berdiri perkumpulan bernama Pelukis Rakyat. Meskipun berbeda organisasi, mereka termasuk Indrosoegondo kerap menggelar pameran bersama. Pada 1948, misalnya, SIM dan Pelukis Rakyat mengadakan pameran bersama. (Majalah ART edisi 01 Juni 2008).

Selanjutnya, pada 1949 berarti empat tahun setelah Republik Indonesia diproklamasikan, sejumlah tokoh muda termasuk RM Indrosoegondo telah menggagas perlunya didirikan lembaga pendidikan seni tingkat akademi. Bersama-sama dengan RJ Katamsi – yang di tahun 1939 mendirikan Sekolah Kerajinan Tangan (*Kunst Ambachts School*) - Djajengasmoro, Sarwono, Hendra Gunawan, Kusnadi, Sindusisworo, Prawoto, memiliki pemikiran yang menjangkau jauh ke depan dengan mendirikan akademi seni rupa.

Usaha itu berhasil dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri PP & K No. 32/Kebudayaan, tanggal 15 Desember 1949 dengan nama Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) yang kini berubah menjadi Institut Seni Indonesia (ISI). Sebulan kemudian, tepatnya pada 15 Januari 1950, pukul 10.00 pagi WIB, bertempat di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, ASRI Yogyakarta diresmikan. (Suharno Wisetrotomo: 2012). Dalam acara peresmian ber-

dirinya ASRI itu, selain sebagai salah satu pendiri, Indrosoegondo juga menyampaikan sambutan mewakili Jawatan Kebudayaan.

Sebagai seorang pelukis, namanya memang tidak tercatat dalam deretan nama-nama pelukis. Tetapi beberapa karyanya ada yang masih disimpan di gudang di Jl. Mangunsarkoro Yogyakarta, dan di rumah putranya Adi Sugondho di Jln. Jagakarsa II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dua lukisan yang di gudang Yogyakarta adalah lukisan Potret Diri dan lukisan diri Ny. Indrosoegondo. Sementara itu, yang tersimpan di Jagakarsa berjudul Portet Diri dan Pemandangan.

Selain melukis, RM Indrosoegondo juga seorang penari dan pembina tari. Untuk menggambarkan posisi RM Soegondo dalam dunia tari di Indonesia dapat disimak dari perannya dalam persiapan dan penyelenggaraan New York World's Fair (NYWF) 1964 dan 1965. Untuk mengisi acara NYWF baik tahun 1964 maupun tahun 1965 menurut Prof. Sardono W. Kusumo peran Indrosoegondo sangat besar, terutama dalam menyiapkan pertunjukan seni.

Bagi Sardono W. Kusumo yang saat itu berusia 19 tahun, menjadi salah satu penari yang dipersiapkan untuk tampil di NYWF merupakan kebanggaan tersendiri. Bersama sejumlah penari dari Solo dan Yogyakarta dikumpulkan jadi satu untuk melakukan latihan bersama. Tempat latihan di pendopo rumah RM Indrosoegondo Jln. Sukun Yogyakarta. Mereka selama hampir tiga bulan berlatih di bawah asuhan R.M. Indrosoegondo.

Selain dipakai untuk latihan tari untuk persiapan NYWF, Indrosoegondo sehari-hari memanfaatkan pendopo

rumahnya sebagai tempat latihan tari bagi para peminat tari. Banyak anak dan remaja yang belajar menari di pendopo rumah tinggal itu. Prof. Dr. Poppy Inayati, sekarang dosen arkeologi Universitas Gajah Mada, juga pernah belajar menari di pendopo rumah beliau. Murid yang lain adalah BRAY Saijah yang kemudian menjadi istri GBPH Poeger, waktu kecil juga belajar menari juga pada Sang Guru, Indrosoegondo.

Menyongsong acara WFNY tahun 1964, Indrosoegondo mendapat kepercayaan dari Bung Karno untuk menyiapkan tarian. Latihan bersama setiap minggu dipusatkan di pendopo Banaran, dan para penari dari Solo datang ke Yogya. Selain sebagai seorang tokoh pemersatu, menurut Sardono RM Indrosoegondo merupakan pribadi yang sangat serius di bidang seni, khususnya seni tari Jawa. Pada masa-masa itu ia berhasil membawa generasi muda menggemari tari tradisi (Jawa) dan melahirkan sejumlah seniman tari yang berhasil. Bagi Sardono, Indrosoegondo merupakan seorang tokoh tari yang telah berhasil “menyatukan” dua gaya tari dalam satu kegiatan latihan dan pertunjukan bersama, yaitu antara penari-penari gaya Surakarta dengan gaya Yogyakarta.

Langkah yang ditempuh oleh RM Indrosoegondo itu dinilai telah membuat “ketegangan” yang terjadi antara aliran tari gaya Surakarta dan Ngayogyakarta menjadi longgar. Keduanya dapat tampil bersama dalam satu latihan dan dalam pertunjukan. Melalui pendekatan seorang pendidik yang sabar, tekun, dan serius generasi muda beda aliran itu dapat menyatu, dan langkah itu menjadi tonggak sejarah yang berlanjut hingga sekarang.

Hal lain yang memberi kesan mendalam bagi para muridnya adalah keteguhannya merahasiakan tujuan latihan bersama. Selama berlatih Pak Indro sama sekali tidak memberitahu para penari bahwa latihan-latihan selama tiga bulan itu merupakan persiapan untuk tampil pada acara WFNY di Amerika Serikat. Setelah beberapa hari mau berangkat baru para penari diberi tahu. Mereka sangat senang dan bangga akan tampil di sebuah acara dunia. Ada rasa “suprice” yang tidak dapat dilupakan oleh para penari.

Kejadian itu juga masih dikenang oleh Retno Maruti yang waktu itu juga “*kedhapuk*”, atau terpilih sebagai duta bangsa. Waktu itu Retno Maruti berusia 17 tahun (1947). Beberapa nama penari dari Surakarta maupun Yogyakarta yang latihan bersama di pendopo Indrosoegondo antara lain: Djoko Sutarjo, Maridi, Rubiah, Soca, Dona Siwi, Tjokrowarsito, Kusumo Kesowo, (Surakarta), Bagong Kussudiardjo, Tamba, Sadikin, Ben Suharto, Sudarsono, Sumarsono, Suharto, Marjadi, Mandoyo, Sinden Sumarmi (Nara-sumber: Prof. Sardono tanggal 7/1/2015; Retno Maruti; dan Sentot tanggal 8/1/2015). Sebagai *desiner interiour* adalah Chris Broekhuisen dengan korden yang dihias dengan gambar wayang karya seorang *dhalang* sekaligus seniman wayang yang bernama Tasman, lengkapnya Henk Sulaiman Tasman. Selain menari dan melukis, Indrosoegondo juga menulis buku. Salah satu tulisannya berjudul “Sejarah Kesenian di Indonesia”, pernah dipaparkan di Institut Kebudayaan Indonesia di Balai Kota Yogyakarta tanggal 6 Februari 1962.

Selain tercantum di dalam koran *The Singapore Free Press*, hal. 3, tanggal 22 Maret 1952, nama Mr. Indrosoegondo juga tercatat dalam *The New York Public Library for the Performing Arts*, sebuah “blog” yang diselenggarakan dan dikelola oleh Jerome Robbins Dance Division New York. Di dalam perpustakaan itu tercantum nama Indrosugondo, dan disebutnya sebagai *Artistic Director of Indonesian Pavilion World's Fair* yang diselenggarakan di New York. (Sumber: Jerome Robbins Dance Division - diunduh tanggal 4/2/2013).

Dalam perjalanan hidup Indrosoegondo sebagai seniman dan pembina seni menunjukkan banyak karya dan kebijakan yang telah dihasilkan. Atas jasa-jasanya sebagai seniman dan pembina seni oleh Bagong Kussudiardjo selaku anggota Panitia Seleksi, Indrosoegondo diusulkan untuk mendapatkan “Anugerah Penghargaan Anugerah Budaya 1993”. Pada tahun 1993, pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan “Penghargaan Anugerah Budaya”, sebagai Pembina Seni.

Indrosoegondo dan New York World's Fair

Acara internasional yang satu ini juga membuat nama Indrosoegondo tidak dapat ditinggalkan, seperti yang disebut sebelumnya. Seorang ahli sejarah Amerika Sharyn Elise Jackson telah menulis tesis tentang New York World Fair (NYWF) 1964 dan 1965. Menurut Sharyn, acara NYWF 1964 dan 1965 itu ada kaitan dengan RM Indrosoegondo, yang menjabat sebagai Atase Kebudayaan di AS, sebelum dipanggil pulang untuk memangku jabatan Dirjenbud.

NYWF merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan pemerintah Amerika Serikat.

Dalam acara 1964 dan 1965 Indonesia ikut serta dengan menampilkan pavilion khusus. Tetapi kisah tentang partisipasi dalam NYWF menjadi lain, setelah terjadi hubungan yang memburuk dengan cepat antara bangsa Indonesia dengan Amerika Serikat. Hal itu terjadi karena selama 1964, Bung Karno dalam berbagai pidatonya menunjukkan politik anti-Barat dan anti-Amerika. Hal ini yang membuat marah Presiden AS Lyndon Baines Johnson. Lebih-lebih setelah Indonesia menyatakan keluar dari organisasi dunia PBB pada bulan Januari 1965, dan secara resmi menarik diri dari NYWF. Akhirnya, yang terjadi semua asset (pavilion) Indonesia kemudian disita dan ditutup. (Wikipedia.org)

Pada awalnya, Indonesia sangat bersemangat untuk ikut dalam NYWF. Indonesia merupakan negara Asia urutan pertama yang mendaftar. Bahkan Indonesia dipuji karena kesediaan ikut serta itu hanya diperlukan waktu empat hari setelah menerima undangan. Sesuai dengan penjelasan Kementerian Penerangan, "*Keikutsertaan Indonesia adalah dalam rangka realisasi cita-cita Revolusi Indonesia di bidang internasional dengan tujuan untuk menyimpulkan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia ...*". Presiden Sukarno meminta agar paviliun itu ditempatkan antara pavilion Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kebijakan itu dipilih dengan tujuan untuk menunjukkan netralitas Indonesia di masa Perang Dingin. Tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur.

Untuk mencapai keinginannya itu akhirnya Presiden Sukarno, langsung datang sendiri ke AS bertemu dengan Presiden Kennedy, sekaligus sebagai wakil dari Negara-negara peserta Konferensi Negara-negara Nonblok di Beograd. Bung Karno terjun langsung ke lokasi untuk memilih lokasi paviliun. Sukarno memilih lahan seluas 40.000 kaki persegi. Indonesia menjadi negara pertama yang secara resmi menyetujui perjanjian sewa dengan panitia NYWF.

Dengan konsep seperti di atas, maka Pavilion Indonesia menurut Sharyn memiliki nilai politis, dalam arti mencerminkan "keinginan untuk menciptakan sebuah sintesis antara ideologi Barat dan Timur". Indonesia berusaha memberikan kesan tentang politik luar negeri "bebas-aktif" kepada masyarakat pengunjung. Bung Karno ternyata tidak hanya turun tangan dalam menentukan konsep dan lokasi pavilion, tetapi juga turun tangan dalam memilih pemandu. Digambarkan, pemandu harus terdiri atas gadis-gadis cantik yang tidak kalah dengan gadis-gadis Perancis atau Amerika. Masih ditambahkan oleh Bung Karno bahwa tujuan dari Paviliun Indonesia adalah merupakan ekspresi dari semangat kemerdekaan setelah Indonesia dapat mengusir pemerintah kolonial.

Selain memilih gadis-gadis cantik, Sukarno mencurahkan waktu dan pikirannya untuk perencanaan bentuk Pavilion itu sendiri. Sebagai seorang pelukis, seorang penggemar seni dan kolektor benda seni, berbagai koleksi itu termasuk yang ditampilkan di NYWF. Sementara itu, Sukarno sebagai seorang insinyur, benar-benar ikut membantu merencanakan desain bangunan. Menurut Sharyn

sangat disayangkan, Bung Karno sendiri tidak pernah melihat hasil karyanya itu. Di luar acara NYWF, hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia mulai memburuk. Pilihan tanggal 16 Mei 1964 sebagai “Hari Indonesia” dalam acara NYWF batal dihadiri Presiden Soekarno.

Meskipun Indonesia menarik diri dari PBB pada bulan Januari 1965, tetapi BK menyatakan bahwa Indonesia akan terus ikut pameran di NYWF kedua (1965). Tetapi dengan berbagai sikap politik BK anti Amerika mendorong Presiden Lindon B. Johnson mengancam akan mengambil tindakan terhadap Indonesia dengan menutup paviliun Indonesia. Pada 11 Maret, BK mengumumkan secara resmi penarikan dari NYWF 1965. Sementara itu, Panitia mengambil alih Pavilion dan melarang setiap pejabat Indonesia memasuki Fairgrounds. Manajer pameran Indonesia, S. Haditirto, terganggu oleh hubungan yang tiba-tiba menjadi dingin dari pihak Panitia. "*Saya tidak mengerti. Tampaknya bahwa tirai besi tiba-tiba turun antara kami dengan Panitia*", demikian ungkapan Haditirto seperti ditulis oleh Sharyn. Akhirnya, selama NYWF kedua berlangsung, Paviliun Indonesia dijaga petugas dan dibiarkan kosong. (Sumber: Wikipedia.org).

Karena keterlibatannya dalam menyiapkan acara kesenian di Pavilion Indonesia di NYWF 1964 dan 1965, nama Indrosoegondo tercatat dalam *The New York Public Library for the Performing Arts*, sebuah “blog” yang diselenggarakan dan dikelola oleh Jerome Robbins Dance Division New York. Ia tercatat sebagai *Artistic Director of Indonesian Pavilion World's Fair* yang diselenggarakan di

New York. (Sumber: Jerome Robbins Dance Division - diunduh tanggal 4/2/2013).

Menjadi guru sejarah kesenian

Pada 1950, Front Seniman Jogjakarta mendirikan Sekolah Seni Drama dan Film, dipimpin oleh Sri Moertono. Bertindak sebagai penasihat adalah S. Mangoensarkoro yang pada waktu itu masih menjabat Menteri PPK. Salah satu guru sekolah itu adalah RM Indrosoegondi, mengajar sejarah kesenian. Tahun 1952 terbit buku karya Indrosoegondo berjudul Sejarah Kesenian Indonesia, dan pernah disampaikan pada Institut Kebudayaan Jogjakarta.

Guru yang lain adalah Pak Saffoedin (Tari dan Pencak), Soemarjo LE (Musik), Hatmanto (Pedalangan), Bakri Siregar (Sejarah drama dan karang mengarang), Sri Hardjokoesomo (Seni Suara Daerah), Koesnadi (Acstock dan Stitting), dan Djajengasmoro (Chemigrafie). Speak-training, Mimiek, Make-up, dan Acting (Pengetahuan umum tentang kesandiwaraan, film, dll) diajar oleh Sri Moertono. Tujuannya, untuk mendidik atau mencari kader pemuda dan pemudi dalam lapangan sandiwarra dan film untuk menjadi orang-orang ahli dalam lapangan tersebut (Sumber: Majalah Aneka 20 Juli 1952).

Anggota Panitia Pengawas Film

Lembaga itu dibentuk pada 1951, diketuai oleh Ny. Maria Ulfah Santoso, menjabat sampai dengan 1961. Pada tahun itu Menteri PP dan K Prof. Dr. Prijono mengeluarkan Surat Keputusan No. 23/1961, tanggal 7 Maret

1961. Isinya tentang penunjukan Ketua dan anggota Panitia Pengawas Film (PPF) yang baru. Panitia yang beranggotakan 35 orang itu diketuai oleh Ny. Utami Surjardarma, menggantikan Mr. Maria Ulfah Santoso. Di antara 35 orang anggota itu, 4 orang merupakan anggota lama. Anggota Panitia berasal dari wakil-wakil golongan/perkumpulan: wanita, agama, kesenian, kebudayaan, dan pengajaran, pemerintah dan pemuda. Salah satu dari ketigapuluh lima orang anggota PPF itu adalah RM Indrosoegondo. Dengan nomor urut 15, Indrosoegondo mewakili Jawatan Kebudayaan, Kementerian PP dan K.

Direktur Jenderal Kebudayaan pertama

Setelah terbentuk Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tanggal 4 Agustus 1966, giliran berikutnya adalah menetapkan siapa yang ditunjuk sebagai direktur jenderal. Ternyata yang dipercaya untuk menduduki jabatan itu adalah RM Indrosoegondo. Dengan penunjukan itu maka Indrosoegondo merupakan Dirjen Kebudayaan pertama, menjabat mulai Juli 1966 sampai dengan 1 Juni 1968.

Sementara itu, ada data lain mengenai pengangkatan RM Indrosoegondo yang berbeda sehingga mengundang pertanyaan. Kalau kita berpegang pada Keputusan Presiden Soekarno No. 173 Tahun 1966, yang bertanggal 4 Agustus 1966 maka RM Indrosoegondo resmi menjadi Dirjenbud sesuai dengan tanggal tersebut. Isi dari Keppres itu jelas mengenai pengangkatan Indrosoegondo sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Dengan demikian kalau ada data lain yang menyebutkan diangkat sejak 3 November 1966, menjadi pertanyaan. (<http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/>

[15000/kp1731966.pdf](#), diunduh 8/1/2015). Kalau pembentukan Direktorat Jenderal Kebudayaan berlaku mulai tanggal itu mengapa Keppres tentang pengangkatan Dirjenbud lebih awal dari berdirinya lembaga? Ada beda waktu selama 3 bulan antara tanggal 4 Agustus 1966 dengan 3 November 1966.

Kekisruhan mengenai “tanggal” itu besar kemungkinan disebabkan oleh adanya kekisruhan dalam alih kepemimpinan negara dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Meskipun pada saat itu sesuai TAP MPRS No. IX Tahun 1966 Soeharto mendapatkan mandat menyusun kabinet baru, tetapi pada bagian lain Presiden Soekarno 3 November 1966 masih mengeluarkan Surat Pengangkatan Menteri dan para direktur jenderal.

Sebelum dipanggil pulang untuk menjabat sebagai Dirjenbud, Indrosoegondo sedang menjabat Atase Kebudayaan di Amerika Serikat. Sebagai penggantinya ditunjuk atase kebudayaan yang baru, Herqutanto. Bersamaan dengan Herquntarto diangkat pula atase kebudayaan di Kanada Prof. Dr. Achmad Sanusi SH, Jaman untuk Cekoslowakia, Drs. Firdaus Amir untuk Australia, Tulus Subroto untuk Republik Persatuan Arab (RPA), Brigjen Sutojo Gondo untuk Uni Soviet, Drs. Umar Ali untuk Jepang, Arnold Lisapati Ms untuk Jerman Barat, Alwi Umry untuk Malaysia dan Drs. Hendarsin sebagai Asisten di California, Amerika Serikat (Sinar Harapan, 11/7/1968).

Sebelum itu Indrosoegondo menjabat sebagai Atase Kebudayaan di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pembentukan Atase Kebudayaan berdasarkan rekomendasi Konferensi Kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan

pada 5-7 Agustus 1950 di Jakarta, yaitu mengusulkan agar pemerintah menempatkan atase-atase kebudayaan di Negara-negara lain.

Indrosoegondo menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan pertama sampai dengan 1 Juni 1968. Indrosoegondo berhenti sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan karena memasuki masa pensiun. Selama dua tahun menjabat dirjen yang menjabat sebagai Menteri PP dan K adalah Sarino Mangoenpranoto. Tahun berikutnya, pada 11



Oktober 1967, berdasarkan Keppres No. 171 Tahun 1967 yang ditunjuk sebagai menteri adalah Sanusi Hardjadinata, menggantikan Sarino Mangunpranoto.

Koentjoro Poerbopranoto Kepala Jawatan Kebudayaan 1949-1952, atasan RM Indrosoegondo

Sebelum menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan, beberapa sumber menyebutkan bahwa status Indrosoegondo adalah pegawai negeri sipil. Mulai bekerja dari bawah di "Bahagian Kebudayaan" Kementerian Pengajaran RI (1945-1948) kemudian di Bagian "D", bagian yang mengurus kebudayaan (1948-1949) kemudian di Jawatan Kebudayaan (1949-1964) dan Direktorat Kebudayaan (1964-1966). Ketika pada tanggal 5 Agustus 1949, nomen-klaturnya Bahagian Kebudayaan diganti menjadi Jawatan Kebudayaan, status Indrosoegondo menjadi Kepala Bidang

Kesenian pada Jawatan Kebudayaan Yogyakarta. Kepala Jawatan Kebudayaan di Pusat dijabat oleh Koentjoro Poerbopranoto, yang kemudian tahun 1952 digantikan oleh Soedarsono.

Meskipun statusnya sebagai pegawai Kementerian PP dan K, tetapi Indrosoegondo banyak menghabiskan waktu tugasnya di Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini sebagai Atase Kebudayaan. Pembentukan Atase Kebudayaan didasarkan pada rekomendasi Konferensi Kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 5-7 Agustus 1950, di Gedung Pertemuan Umum Kotapraja Jakarta Raya. Konferensi itu memilih tema: Kebudayaan Nasional dan Hubungannya dengan Kebudayaan Bangsa-bangsa lain.

Di dalam rekomendasi itu Konferensi menganjurkan kepada pemerintah untuk (1) mengadakan persetujuan-persetujuan kebudayaan dengan Negara-negara lain; (2) menempatkan atase-atase kebudayaan di Negara-negara lain; dan (3) mengirimkan ke luar negeri dan melakukan dengan luar negeri pertukaran mahaguru, mahasiswa, seniman, sarjana dan calon ahli. Seperti ditulis oleh koran *Sin Po* konferensi itu secara khusus menyoroti masalah perlunya kerja sama kebudayaan antarbangsa yang dijembatani oleh pembentukan Atase Kebudayaan di luar negeri. Hadir dalam konferensi beberapa Duta Besar, dan Atase Kebudayaan RRT untuk Indonesia Mr. Liang Sang Yuan.

Selanjutnya, pada tahun 1952 mulai dibentuk Atase Kebudayaan di beberapa negara antara lain RRT, India, Belanda dan Amerika Serikat. Yang ditunjuk sebagai Atase

Kebudayaan pertama di RRT adalah Indrosoegondo. Kemudian sekitar tahun 1960-an Indrosoegondo dipindahkan ke Amerika Serikat. Nama lain yang pernah diangkat sebagai atase kebudayaan pada saat itu adalah Ny. Dra. Satyawati Suleiman seorang arkeolog, atase kebudayaan di India.

Peletak dasar pembangunan kebudayaan

RM Indrosoegondo menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan memang tergolong singkat. Hanya sekitar dua tahun saja, mulai 1966 sampai dengan 1968, kemudian memasuki masa pensiun. Meskipun singkat tetapi ada beberapa hal penting dapat dicatat, sebagai bagian dari sejarah kebudayaan maupun sejarah perjalanan kelem-bagaan kebudayaan dalam pemerintahan.

Sebagai direktur jenderal pertama, Indrosoegondo mengemban tugas berat dalam meletakkan dasar-dasar pengembangan kebudayaan di segala bidang, baik teknis, administratif, koordinasi dan kerja sama dengan negara lain. Tidak hanya peletak dasar pembangunan kebudayaan di lingkungan pemerintah saja, melainkan juga berbagai kegiatan dari organisasi kebudayaan di masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pemerintahan yang baru (Orde Baru), di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dilaksanakan berbagai program untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baru. Bagian penting yang dilakukan adalah mengajak masyarakat mengubah cara pandang (*mindset*) lama untuk memasuki cara pandang yang baru. Tugas itu bukanlah mudah. Beberapa langkah yang dilakukan oleh

RM Indrosoegondo antara lain: menata kelembagaan kebudayaan di pemerintahan maupun di masyarakat, menata ketenagaan, serta menata konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan.

Menata kelembagaan kebudayaan

Langkah yang dilakukan pertama adalah menata posisi kebudayaan dalam pemerintahan, terutama kelembagaan yang akan menjadi kendaraan menuju pembangunan nasional. Tidak hanya kelembagaan di tingkat pusat tetapi juga yang ada di daerah-daerah dan di masyarakat. Dengan perubahan status dari “direktorat” menjadi “direktorat jenderal” struktur organisasi juga mengalami perubahan. Struktur organisasi ketika dalam status “direktorat” dibagi menjadi 6 bidang, yaitu: (1) Bidang Kesenian; (2) Bidang Adat-Istiadat dan Cerita Rakyat; (3) Bidang Taman Kebudayaan; (4) Bidang Museum; (5) Bidang Pendidikan Tenaga; dan (6) Bidang Tata Usaha.

Setelah statusnya berubah dari “direktorat” menjadi “direktorat jenderal” tugas Indrosoegondo, langkah yang dilakukan adalah menata kelembagaan secara lebih konseptual sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, dan terarah menuju keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Satuan kerja yang semula berstatus “bidang” diganti menjadi “direktorat”. Susunan organisasinya terdiri atas: (1) Direktorat Kesenian; (2) Direktorat Pendidikan Kesenian; (3) Direktorat Museum; (4) Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Sementara itu, untuk mengurus bagian administrasi direktorat jenderal, dibentuk Sekretariat

Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sekretaris Ditjenbud pertama adalah M. Idris, ayah dari pemain sepak bola terkenal Suwardi Idris.

Bagian menarik dari kebijakan Indrosoegondo adalah pembentukn dua satuan kerja untuk bidang kesenian, sementara untuk unsur kebudayaan yang hanya satu satuan kerja saja. Satuan kerja bidang kesenian terdiri atas: (1) Direktorat Kesenian, dan (2) Direktorat Pendidikan Kesenian. Tugas Direktorat Kesenian adalah membina dan mengembangkan kesenian di masyarakat. Adapun tugas Direktorat Pendidikan Kesenian mengurus penyelenggaraan lembaga pendidikan kesenian yang telah berdiri, seperti: Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI), ASRI, Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI), Akademi Seni Tari Indonesia di Bali (ASTI) Akademi Seni Drama dan Film (ASDRAFI), Akademi Musik Indonesia (AMI), Konservatori Tari Indonesia (KONRI) beberapa Konservatori Karawitan (KOKAR)² yang sebelumnya di bawah asuhan Jawatan Kebudayaan atau Direktorat Kebudayaan.

Untuk mengurus masalah permuseuman, yang semula berstatus "bidang museum" diganti juga menjadi *Direktorat Museum*. Demikian pula halnya dengan pengu-rusan bidang bahasa dan sastra yang semula berstatus *lembaga (Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan)*, juga diganti menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Unit organisasi yang menangani masalah kebudayaan yang ada di daerah juga mengalami perubahan. Untuk melaksa-

² Beberapa lembaga pendidikan kesenian yang telah berdiri, antara lain: Konservatori Tari di Bali, Konservatori Karawitan di Jawa Tengah, Konservatori di Padang Panjang, ASRI, dan SSRI.

nakan pembinaan kebudayaan di daerah dibentuk kantor inspeksi daerah kebudayaan.

Di samping dibentuk unit *direktorat*, keberadaan beberapa satuan kerja dalam status "*lembaga*" masih tetap dipertahankan. Ada tiga "*lembaga*", yaitu (1) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) untuk mengurus benda warisan budaya bangsa (*tangible*); (2) Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA) untuk mengurus bidang sejarah termasuk sejarah kehidupan manusia Indonesia; serta (3) Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK) untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan musik dan tari yang berkembang di Indonesia

Dengan adanya perubahan status dari yang semula "direktorat" menjadi "direktorat jenderal" serta yang semula berstatus "bidang" menjadi "direktorat", menunjukkan adanya semangat perubahan untuk menyesuaikan dengan tuntutan untuk melakukan upaya "rehabilitasi kebudayaan" setelah pecah pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, tetapi juga untuk menyongsong dimulainya pembangunan nasional di segala bidang yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru.

Menata SDM kebudayaan

Di samping menata struktur organisasi kebudayaan, tugas berikutnya yang oleh banyak orang dinilai berat adalah membersihkan personalia yang secara langsung atau tidak menganut faham sosialis-komunis dari lingkungan lembaga di pemerintahan dan organisasi kebudayaan di masyarakat. Suatu tugas yang cukup berat, sulit

dan sensitif karena menyangkut hajat hidup seseorang berikut keluarganya.

Diindikasikan tidak sedikit pegawai di dalam lembaga kebudayaan di pemerintahan yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Selain itu juga menertibkan berbagai pusat kegiatan kesenian dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan atau pengamanan dan pengendalian langsung terhadap semua pelaksanaan kegiatan kesenian yang dari berbagai pusat olah seni, dan atau bentuk-bentuk pengorganisasian lainnya, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah. Tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah mengkoordinasikan berbagai lembaga beserta kegiatannya agar menjadi semuanya tertib dan sehat.

Oleh karena itu tidak aneh bila nama Indrosoegondo banyak disebut dalam berita di media cetak ketika itu. Sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Indrosoegondo mengangkat Letkol Sampoerno sebagai Wakil Direktur Kesenian. Dalam surat penugasan tanggal 20 April 1968 disebutkan tugasnya adalah mengepalai urusan-urusan administrasi (Harian KAMI, 21/6/1968). Masuknya Letkol Sampoerno ke dalam jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan di samping untuk mengembangkan kesenian Indonesia juga untuk membantu menertibkan masalah kepegawaian.

Tetapi ternyata kebijakan itu telah mendatangkan kritikan. Di dalam Jurnal Kebudayaan Harian KAMI, A Bastari Asnin menilai masuknya Letkol Sampoerno itu telah mendapat tugas khusus, yaitu untuk mengamankan, meneliti dan sebagai segala kegiatan kesenian di seluruh Indonesia. Diibaratkan oleh Asnin, pengangkatan itu seperti

“seorang anak kecil yang berhasil membohongi ibunya untuk mendapat sebilah pisau untuk membunuh saudara-saudaranya yang lain”. Artinya, Asnin merasa heran mengapa kegiatan kesenian di Indonesia masih perlu diamankan, diawasi dan diteliti. Tampaknya, ada perbedaan persepsi dalam hal menafsirkan tugas diberikan kepada Letkol Sampoerno dalam hal “mengamankan, mengawasi dan meneliti” kegiatan kesenian di Indonesia. Tugas itu sepertinya lebih ditujukan pada upaya melakukan pembersihan faham kiri dan dalam rangka melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan.

Masih soal kesenian, Asnin juga menulis tentang mulai menjamurnya bar dan night-club di Jakarta. Banyak anak muda turun ke gelanggang dansa untuk menyalurkan naluri kreatifnya. Tetapi mereka menari hanya dengan menggerakkan tangan, kaki dan badan tanpa memperimbangan unsur kepuasan ekspresi seni. Yang mereka lakukan tidak lebih dari tarian kera yang lagi “meré-meré” (Bahasa Jawa), yaitu berteriak-teriak, meloncat ke sana ke mari dari satu pohon ke pohon yang lain. Kenyataan itu seharusnya menjadi tantangan dan tugas nyata dari Direktorat Jenderal Kebudayaan (Sinar Harapan, 23/3/1968).

Selanjutnya, masih dalam Harian KAMI (tanggal 28/6/1968), pada kolom Induk Karangan diturunkan tulisan berjudul “Tugas Sulit dan Berbahaya Seorang Overste”. Yang dikhawatirkan oleh Harian ini dengan tugas yang “sulit dan berbahaya” itu juga bukan dalam kaitan dengan penertiban kepegawaian melainkan bagi kehidupan seni di Indonesia. Seorang kolonel menduduki jabatan

Direktur Kesenian dinilai “berbahaya” karena diasosiasikan orang akan merupakan “sensor terhadap kegiatan kreatif”. Dengan penggunaan istilah-istilah: penertiban, pembinaan, pengawasan atau pengamanan dan pengendalian, “mau tidak mau adalah kata-kata keras buat kegiatan kreatif”. Dalam kaitan dengan kesenian kata-kata itu dibaratkan seperti minyak dengan air.

Harian KAMI juga menilai pengangkatan seorang kolonel dalam bidang kesenian itu akan mendatangkan kesulitan, karena akan melawan kodrat. Akan berhadapan dengan sesuatu yang tak mungkin diingkari dan diubah karena kegiatan kreatif mengharuskan adanya kemerdekaan. Siapa pun yang mencoba melawan kodrat itu meskipun tidak kwalat akan gagal dan sia-sia. Dengan adanya penertiban, pembinaan, pengawasan atau pengamanan dan pengendalian itu akan membikin kita bergidik mendengarnya. (Harian KAMI 28 Juni 1968).

Selain Harian KAMI, koran Sinar Harapan juga menuliskan tulisan yang sama. Disebutkan bahwa kebijakan memberikan tugas kepada Sampoerno SH untuk melakukan penertiban, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan pengendalian organisasi dan kegiatan kesenian itu menjadi sorotan pers dan kaum budayawan menyorot kebijakan itu. Kebijakan itu dinilai sebagai bentuk sensor gaya neo-Orla. Sangat disayangkan pejabat tingkat nasional membuat kebijakan seperti itu, sehingga oleh IPMI dan kalangan budayawan disampaikan desakan agar membatalkan keputusan itu (Sinar Harapan, 29/6/1968).

Kebijakan Indrosoegondo mengangkat Letkol Sampoerno SH itu ternyata tidak menimbulkan gejolak di bidang kesenian seperti yang dikhawatirkan orang. Sampoerno memang seorang militer berpangkat letnan kolonel saat itu. Tetapi ia juga seorang pecinta seni dan seorang penari (Jawa), yang aktif melakukan pembinaan dan pengembangan seni tari. Grup seni pertunjukan tari "Pelangi Nusantara TMII", Badan Kesenian Nasional Indonesia (BKNI) tahun 1977, yang pada tahun 2003 berubah menjadi Badan Kerja sama Kesenian Indonesia (BKKI) didirikan oleh Sampoerno SH. Jabatan sebagai Direktur Kesenian berlanjut pada masa jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. I.B. Mantra.

Merehabilitasi kebudayaan

Sebagai Direktur Jenderal pertama, Indrosoegondo berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar tentang konsep, kebijakan, dan strategi nasional, termasuk dalam melakukan persiapan menuju pembangunan kebudayaan yang pada saat itu sedang gencar-gencarnya dikampanyekan. Indrosoegondo juga berperan banyak dalam menentukan kebijakan dalam "melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan" (*Sinar Harapan*, 3 April 1968) dan mengubah pola pikir (*mindset*) masyarakat tentang kebudayaan, terutama berkaitan dengan masalah hubungan antara kebudayaan dan ideologi politik yang menempatkan politik sebagai panglima.

Meletusnya peristiwa gerakan makar yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menganut faham komunis merupakan sebuah usaha merebut kekuasaan

negara atau kudeta. Gerakan perebutan kekuasaan itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat: Jenderal A.H. Nasution (lolos dari penculikan dan pembunuhan), Letnan Jenderal A. Yani, Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto, Mayjen S. Parman, Mayjen M.T. Haryono, Brigadir Jenderal (Brigjen) Sutojo, Brigjen D.I. Panjaitan, serta Brigjen Katamso, dan Kolonel Sugiono di Yogyakarta.

Gerakan ini dapat diatasi dan langkah berikutnya adalah membubarkan PKI dan melakukan penumpasan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Gerakan simpatisan PKI yang ingin membangkitkan kembali faham komunis dengan lahirnya Gerakan PKI Malam yang dipimpin oleh Mbah Suro alias Mulyono, pada 5 Maret 1967 padepokannya berhasil dihancurkan oleh ABRI karena jalan perundingan tidak membuahkan kesepakatan. Tugas penting berikutnya adalah melaksanakan program “rehabilitasi kebudayaan”.

Tujuan dari program ini adalah untuk mengubah pandangan dan pola pikir (*mindset*) masyarakat tentang kebudayaan berkaitan dengan ideologi politik. Sebelum pecah peristiwa 1965, Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) telah mencanangkan slogan “politik sebagai panglima”, “tujuan menghalalkan cara” dengan menggunakan kebudayaan sebagai medianya.

Tugas berat lainnya yang diemban oleh Dirjenbud adalah ikut mendorong perubahan iklim politik dari pola pikir berkebudayaan, dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada ideologi partai politik menjadi kebudayaan berorientasi netral dan humanis-universal. Seperti ditulis

oleh Harimurti Kridalaksana dua tahun setelah dibentuknya Direktorat Jenderal Kebudayaan “*pemerintah memang perlu melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan*”. (*Sinar Harapan*, 3 April 1968).

Langkah yang telah diambil oleh Dirjenbud adalah membersihkan oknum LEKRA dari keanggotaan dan pengurus dari Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN). Selain itu juga mengeluarkan organisasi LEKRA dari keanggotaan BMKN, seperti yang dimuat dalam harian API 20/10/1966. Mendapat tugas untuk “merehabilitasi kebudayaan” setelah posisi kebudayaan berada dalam lingkaran kepentingan politik, maka sebagai Dirjen Kebudayaan R.M. Indrosoegondo dapat disebut sebagai peletak dasar pemikiran mengenai hubungan antara kebudayaan dengan politik, dalam hal ini mengenai pandangan bahwa politik adalah panglima. Bersama-sama dengan para seniman, budayawan, cendekiawan dan organisasi kebudayaan yang tidak sehaluan dengan Lekra melakukan sejumlah perubahan untuk pemajuan kebudayaan sesuai amanat Pasal 32 UUD 1945.

Menyiapkan konsep, kebijakan dan strategi pengembangan kebudayaan

Salah satu langkah penting dalam rangka “rehabilitasi kebudayaan” dan menyusun kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan Indrosoegondo menyelenggarakan Musyawarah Kesenian, Simposium Kebudayaan Nasional dan Simposium Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia. Langkah itu dimaksudkan untuk menghimun berbagai pemikiran tentang pembangunan kebudayaan ke depan. Penyeleng-

garaan Musyawarah Kesenian Nasional yang disingkat MUKENAS mendapatkan dukungan besar dari Front Kebudayaan Revolusioner (FKR), LESBUMI bersama dengan 10 organisasi lainnya. MUKENAS diselenggarakan di Jakarta tanggal 1 - 4 Juni 1966, dihadiri oleh beberapa tokoh antara lain Mayjen Soeharto, Adam Malik, H. Usmar Ismail, H.A. Chalid Mawardi, J.S. Hadis, dan masih banyak lagi.

Target yang ingin dicapai oleh MUKENAS menuju ke arah lahirnya kesepakatan untuk menjadikan semboyan “kebudayaan nasional yang berkepribadian” menjadi garis haluan dalam memajukan kebudayaan bangsa. Selain itu juga untuk tujuan mempersatukan konsepsi tentang kebudayaan nasional yang konstruktif guna disumbangkan kepada revolusi dan kebudayaan nasional kita.

Kegiatan berikutnya adalah menyelenggarakan Simposium Kebudayaan Nasional, yang diselenggarakan tanggal 9 Mei 1966 di Jakarta. Tampil sebagai pembicara adalah J.U. Nasution dengan judul “Politik Kebudayaan Nasional dalam Semangat Angkatan 66”. Sebagai pembicara yang lain adalah Boen S. Oemarjati dengan judul “Daya Cipta: Perannya Mengarahkan Potensi Pembangunan”.

Di bidang bahasa diselenggarakan Simposium “Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia: Sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru”. Simposium diselenggarakan dari tanggal 25-28/10/1966. Kegiatan disponsori oleh: Ditjen Kebudayaan, Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan, Fakultas Sastra UI, IKIP Jakarta dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) Jakarta Raya. Kesimpulan Simposium

mencakup bidang-bidang: (1) ilmu bahasa; (2) Ilmu Kesusasteraan; (3) Pengajaran Bahasa dan Kesusastraan.

Merintis pemugaran Candi Borobudur

Pada masa jabatan Indrosoegondo pemugaran kembali Candi Borobudur mulai dilakukan perintisan. Pada tahun 1967, pemerintah RI mengirim surat ke UNESCO, mengimbau agar candi Borobudur diselamatkan dari keruntuhan. Sebagai lembaga internasional yang mengoordinasikan urusan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk mengkoordinasikan studi teknis dan pengumpulan dana untuk menyelematkan pemugaran candi. Pekerjaan persiapan itu dimulai 1968 melalui kerja sama antara Direktorat Purbakala dengan Universitas Gajah Mada dan Institut Teknologi Bandung. Selain itu juga melibatkan tenaga ahli dari Belanda, Prancis, Belgia dan Italia. Untuk melaksanakan persiapan itu dibentuklah Badan Pemugaran Candi Borobudur (BPCB).

Menurut Masanori Nagaoka dari UNESCO Jakarta yang terlibat dalam kegiatan persiapan itu dari berbagai disiplin: “...*aerial photo analysis, archaeology, architecture, chemistry, conservation techniques, engineering seismology, foundation engineering technology, landscape planning, meteorology, microbiology, petrography, physics, soil mechanics, surveying and terrestrial photogrametry*”. Sebagai proyek besar - ada yang menyebutnya sebagai mega proyek - dan sangat kompleks, pemugaran candi Borobudur memerlukan persiapan yang panjang. Terutama dalam hal pengorganisasian dan manajemen proyek pemugarannya. (Balai Konservasi Borobudur, 2013: hal. 126)

Selanjutnya, pada 27 Maret 1968 dilaksanakan pelantikan Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI, dan sebagai wakil presiden adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berkenaan dengan pelantikan presiden, Kabinet Ampera II yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Oktober 1967, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1968 pada 6 Juni 1968 diganti menjadi Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Dalam susunan kabinet itu nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap ada dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Mashuri, S.H. Karena Indrosoendo memasuki masa pensiun maka jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan digantikan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, dosen Universitas Udayana, Bali. IB Mantra dilantik menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan kedua berdasarkan Keputusan Presiden No. 17/ M/1968.

Catatan akhir

Dari sekilas gambaran tentang peran sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan pertama seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa Indrosoegondo dapat disebut sebagai peletak dasar dalam memajukan kebudayaan bangsa. Meskipun menjabat relatif singkat, hanya 2 tahunan saja (1966-1968), tetapi misi yang telah diselesaikan oleh Indrosoegondo menjadi dasar dalam penyusunan konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan pada tahap-tahap berikutnya.

Setelah meletus peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI), Indonesia memasuki babak sejarah baru.

Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah mengembalikan keamanan dan membangun pemerintahan yang bersih dari paham komunis dan jargon politik seperti "Politik adalah Panglima" dan "Tujuan Menghalalkan Cara". Dominasi ideologi politik yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan termasuk ke dalam kehidupan berkebudayaan dan berkesenian mulai dikikis habis.

Dalam menghadapi perubahan seperti itu, kelompok budayawan, seniman, dan cendekiawan yang tidak sependapat dengan paham tersebut berupaya mengembalikan kebudayaan dalam posisi netral, bebas dari pengaruh ideologi politik mana pun. Sebelum peristiwa G30S/PKI meletus, kelompok humanisme sosialis atau sosialisme komunis terus mengganyang kelompok humanisme universal. Setelah itu, keadaan menjadi berbalik arah. Kelompok humanisme universal didukung penuh oleh kelompok netral dan seluruh komponen bangsa bersatu untuk mengubah pola pikir (*mindset*) untuk memerangi dan menolak kehadiran paham itu. Pada saat itu Harimurti Kridalaksana mengusulkan agar "pemerintah melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan" secara terencana dan secara nasional. Tetapi diingatkan, jika dalam pelaksanaan program itu disebut kata *pemerintah*, tidak berarti kebudayaan hanya menjadi urusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja, atau urusan para seniman saja, tetapi urusan seluruh masyarakat dan segala potensinya (*Sinar Harapan*, 3 April 1968).

Program "rehabilitasi kebudayaan" yang menjadi tugas RM Indrosoegondo sebagai Dirjenbud telah menghasilkan

suatu kehidupan kebudayaan yang lepas dari kepentingan politik. Di dalam harian Sinar Harapan Th. VII No. 2362, tanggal 3 April 1968, dua tahun setelah program itu dicangkan Harimurti Kridalaksana menulis antara lain berbunyi: *"Suasana 'politik sebagai panglima' yang meliputi kehidupan senibudaya sudah lewat. Tak ada lagi sekarang usaha paksaan supaya senibudaya diabdikan kepada suatu ideologi, entah ideologi partai politik atau yang lain. Pendek kata, udara politik yang segar meniupi kehidupan senibudaya kita"*.

Selanjutnya, dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa RM Indrosoegondo adalah peletak dasar penataan kelembagaan di bidang kebudayaan, pendidikan SDM di bidang kebudayaan dan perintis konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan bangsa. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Atase Kebudayaan di Tiongkok dan Atase Kebudayaan di Amerika Serikat (1964-1966), seorang pelukis, penari, dan pembina tari yang mengangkat nama Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu sangat tepat RM Indrosoegondo mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan jasanya di bidang kebudayaan.

Selanjutnya, berbagai koleksi yg tersimpan di dalam gudang yang kotor dan lembab perlu diselamatkan (dikonservasi) a.l. Berupa: 2 buah lukisan, 4 buah payung, dua perangkat gamelan, arca, lukisan kaca dll. seyogyanya disimpan dan dipamerkan di museum atau galeri. Juga perlu terus ditelusuri tinggalkan Indrosoegondo yang antara lain dalam bentuk buku karya lukis, foto dll.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 78 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-pokok dan program Kabinet AMPERA, perlu segera mengangkat Sekretaris Djenderal dan Direktur-direktur Djenderal dari tiap-tiap Departemen ;

KETIDAK : Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada para Menteri Ulu dan para Menteri Kabinet AMPERA untuk diketahui dan se-martimta.

Ditapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

sd.

SUKARNO

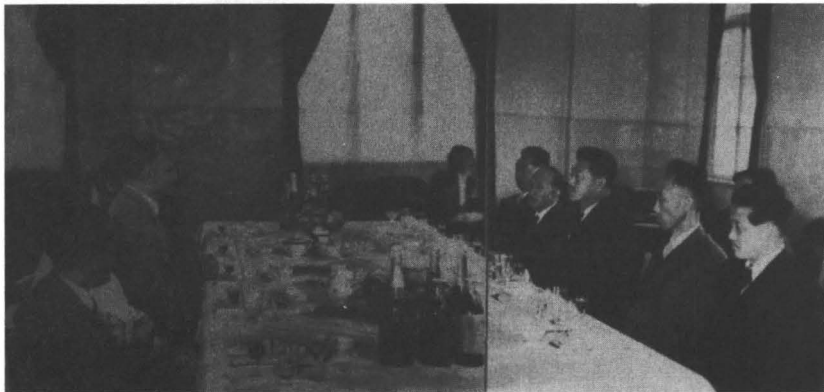
DEPARTEMEN PERTANIAN DAN KEMUKAJARAN:

- | | |
|--|---|
| 1. Sekretaris Djenderal | Brigadir Djenderal TNI Prof. Dr. Tumantiri. |
| 2. Direktur Djenderal Pendidikan Dasar | Kolonel Inf. Drs. Setiadi. |
| 3. Direktur Djenderal Perguruan Tinggi | Moehari, S.E. |
| 4. Direktur Djenderal Olah Raga | Letnan Kolonel Sukanto Sajidina |
| 5. Direktur Djenderal Kebudayaan | Indro Suganto. |
| 6. Direktur Djenderal Pemuda/Trusmi | Rusda Kutarar. |

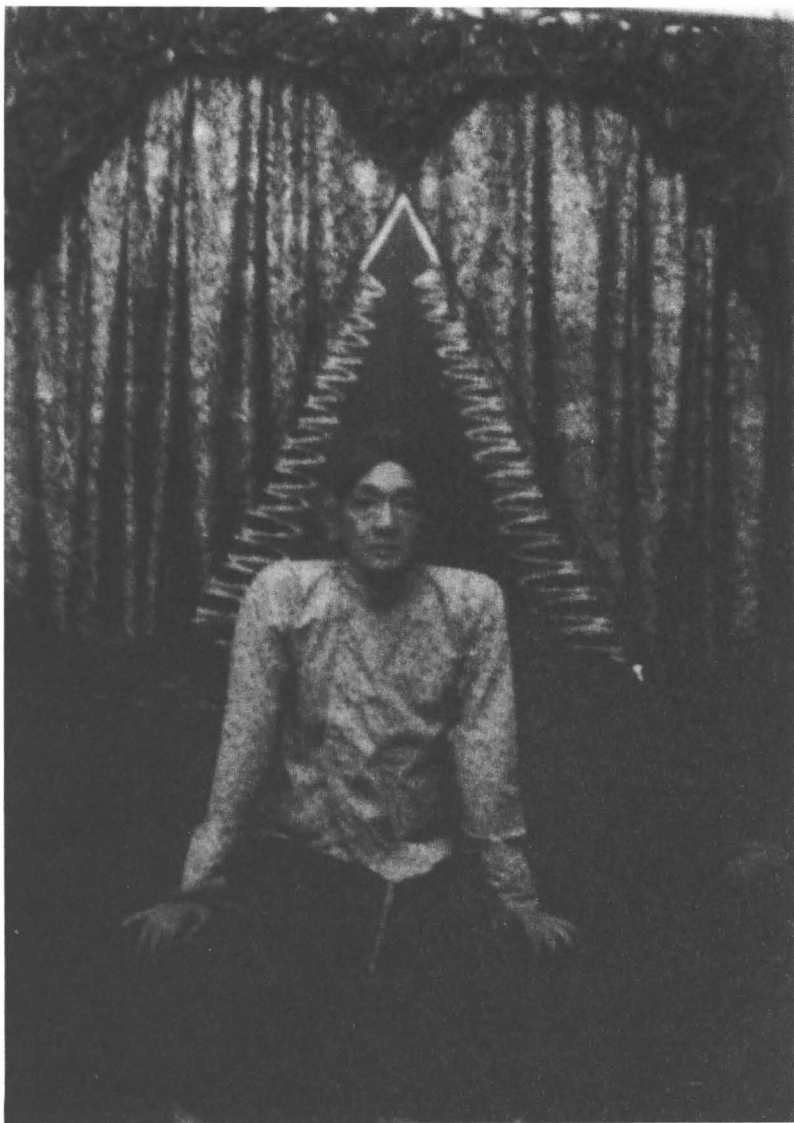
Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Indorsoegondo sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan.



Atas: Rumah RM Indrosoegondo, di Yogyakarta (Foto: Siswanto). Bawah: Pendopo, tempat latihan tari, beserta gamelan pelog-slendro berada dalam gudang di bagian belakang pendopo (Foto: Siswanto).



Atas: R.M. Indrosoegondo waktu menjadi Atase Kebudayaan di RRT (ujung kanan). Bawah: RM Indrosoegondo ketika mendampingi Duta Besar dalam suatu pertemuan. RM Indrosoegondo di ujung depan sebelah kiri.



RM Indrosoegondo dalam busana Jawa



*RM Indrosoegondo ketika menikahkan putra tunggalnya, Adi Sugondho
(Koleksi keluarga, foto: Nunus Supardi)*



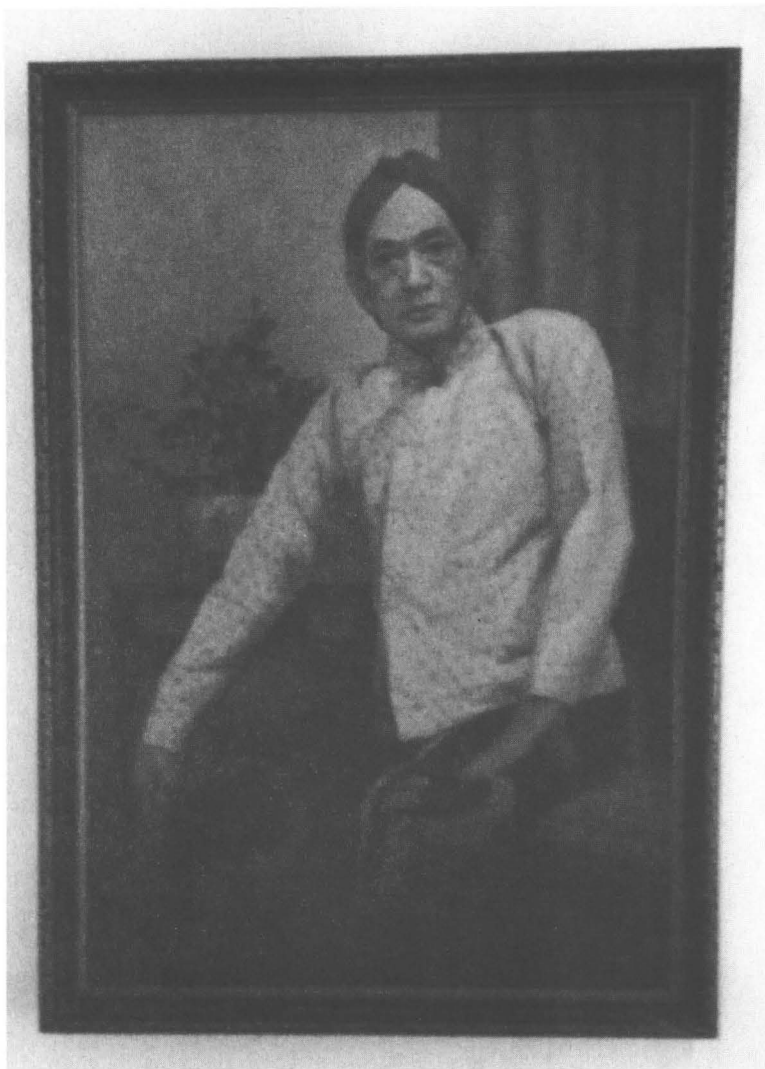
RM Indrosoegondo di masa tua (Koleksi keluarga, foto: Nunus Supardi)



Atas: Masjid Sunyaragi, Yogyakarta di dalam komplek makam.
 Bawah: Makam RM Indrosoegondo di pemakaman Sunyaragi
 Yogyakarta. (Foto:nunus supardi



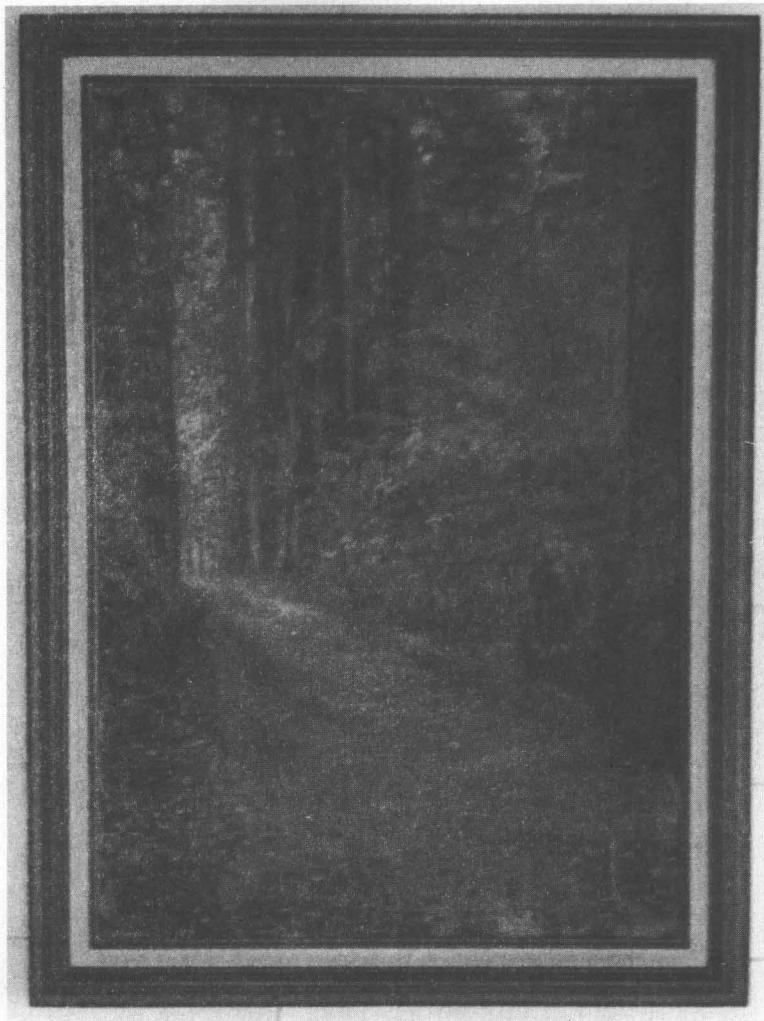
Lukisan "Potret Diri" karya Indrosoegondo disimpan di gudang jln. Ki Mangunsarkoro Yogyakarta (Foto: Siswanto)



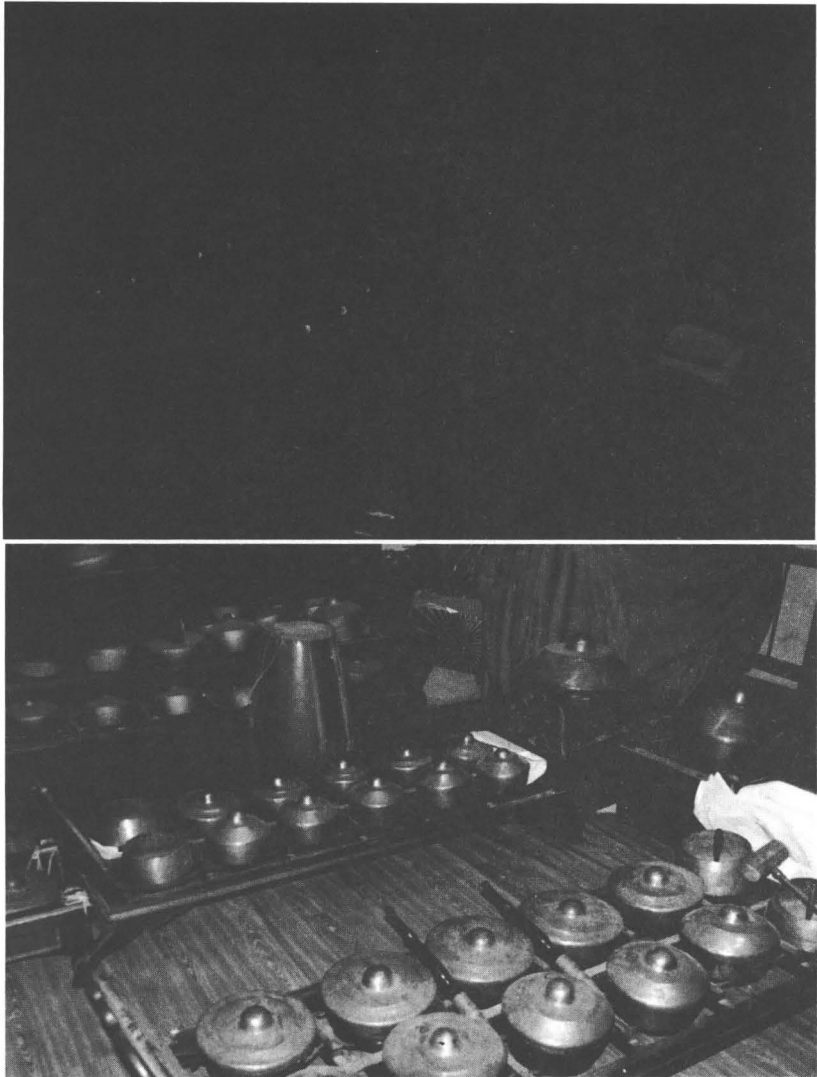
*Lukisan "Potret Diri" karya Indrosoegondo disimpan di Jagarsa, Jakarta
(Foto: Nunus Supardi)*



Lukisan "BR Ay. Indrosoegondo" karya Indrosoegondo disimpan di gudang di Jln. Ki Mangunsarkoro, Yogyakarta (Foto: Siswanto)



*Lukisan Pemandangan karya RM Indrosoegondo disimpan di Jagakarsa,
Jakarta (Foto: Nunus Supardi)*



Dua perangkat gamelan pelog-slendro koleksi RM Indrosoegondo disimpan di gudang di Jln. Ki Mangunsarkoro, Yogyakarta dalam kondisi kurang terawat (Foto:nunus supardi)

BAB V

PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA (1968-1978)

Prof. Dr. Ida Bagus Mantra ditunjuk menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan selama dua periode, mulai 1968-1978.³ Pada akhir masa jabatan RM Indrosoegondo tidak



secara langsung digantikan oleh Prof. IB Mantra. Untuk mengisi masa jeda itu diisi jabatan pimpinan dalam bentuk presidium, diketuai oleh Drs. Moh. Amir Sutarga.

Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Direktur Jenderal Kebudayaan II (1968-1978).

IB Mantra lahir tanggal 8 Mei 1928 di Griya Kedaton, tepatnya di Banjar Bengkel, Denpasar (di Badung, Bali). IB Mantra adalah

³ Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah pelukis Abas Alibasjah (1968-1978)..

putra kedua dari Ida Pedanda Ketut Telaga dan istrinya, Gusti Istri Rai. Seperti biasa dalam kehidupan masyarakat Bali yang dikenal menjunjung tinggi agama dan kebudayaan, di masa kecil Gus Mantra (panggilan masa kecil) sudah terlibat di dalam aktivitas kesenian di desanya. Darah seni mengalir dari kakek buyutnya, seorang seniman sastra Bali. Selain bidang seni, Gus Mantra sejak muda sudah kelihatan sangat berminat pada bidang ilmu pengetahuan.

Memulai pendidikan dasar di Holland-Inlandsche School (HIS), sekolah Belanda pada 1940. Ketika menginjak usia remaja Mantra muda mulai memasuki organisasi kebangsaan, memimpin perkumpulan yang diberi nama Pemuda Republik Indonesia (PRI). Kakaknya yang bernama Ida Bagus Djapa adalah seorang pejuang kebangsaan yang gugur saat pada 1946 yaitu ketika kaum pemuda pejuang menyerbu tangsi pasukan Belanda NICA yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dengan kepergian sang kakak, status Gus Mantra menjadi kakak lelaki tertua bagi kedua adik perempuannya. Keadaan ini pula yang memberikan keteguhan bagi Ida Bagus Mantra untuk terus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Pada 1949, ia melanjutkan pendidikan ke AMS, setara dengan Sekolah Menengah Atas. Setelah lulus, Gus Mantra kemudian merantau mengenyam pendidikan ke Universitas Visva Bharati Santiniketan, India, mendapat gelar sarjana (S1). Pada 1954 Ida Bagus Mantra menikah dengan I Gusti Ayu Badri dan dikaruniai lima orang putra dan putri. Tak berhenti pada jenjang sarjana, pada 1957 Ida Bagus Mantra

kembali Universitas Visva Bharati Santiniketan di India dan meraih Doctor of Philosophy.

Setelah menyanggah gelar “doktor” Ida Bagus Mantra memulai pengabdianya kepada masyarakat sebagai pengajar dengan jabatan sebagai Asisten Ahli pada Fakultas Sastra di Universitas Indonesia, Jakarta. Karir selanjutnya, pada 1959 beliau menjabat Sekretaris Fakultas Sastra Universitas Udayana. Atas dasar keahliannya pada 1961 beliau dipercaya untuk menjadi anggota Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang menelorkan Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969. Kemudian pada 1965 diangkat menjadi Rektor I Universitas Udayana.

Di Bali atas prakarsa Direktorat Jenderal Kebudayaan Prof. IB Mantra didirikan lembaga semi pemerintah dengan nama Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat menjadi Listibya. Anggotanya terdiri atas unsur masyarakat, seniman, budayawan dan pemerintahan. Lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan Bali yang telah berusia 46 tahun itu hingga kini masih tetap ada.

Keberadaan lembaga itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali No.: 2 Tahun 1988. Sumbangan yang telah diberikan oleh lembaga itu antara lain mendirikan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) tahun 1969 kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) pada 1988 dan mulai 2003 berubah menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) dengan menggabungkan Pusat Studi Seni Rupa dan Desain (PSSRD) Universitas Udayana

dengan STSI Bali. Selain itu LISTIBYA juga menjadi motor penggerak penyelenggaraan Pekan Kesenian Bali (PKB).

Menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan

Pada 27 Maret 1968 dilaksanakan pelantikan Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI, dan sebagai wakil presiden adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berkenaan dengan pelantikan itu Kabinet Ampera II yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Oktober 1967, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1968 pada 6 Juni 1968 diganti menjadi Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Dalam susunan kabinet itu, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap ada dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Mashuri, S.H.

Pada saat itu R.M. Indrosoegondo telah memasuki masa pensiun. Yang ditunjuk sebagai penggantinya adalah Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dari Universitas Udayana, Bali, yang saat itu juga duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), perwakilan dari Bali. Prof. I.B. Mantra dilantik menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan kedua berdasarkan Keputusan Presiden No. 17/M/1968. Prof. I.B. Mantra menjabat selama dua periode, yaitu dari 1968-1978 bertepatan waktunya dengan dimulainya Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I, 1969/1970.

Pada 1971 diselenggarakan Pemilu II, setelah Pemilu I tahun 1955, dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden adalah Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada 27 Maret 1973 dibentuk Kabinet Pembangunan II

(1973-1978), dan yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Prof. Dr. Syarief Thayeb. Jabatan Direktur Jendral Kebudayaan masih tetap dipegang oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, yang berarti sudah menjabat selama dua periode, yaitu mulai 1968 hingga 1978.

Ketika memegang jabatan periode pertama (1968-1973), jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipegang oleh Mashuri SH. Selain dikenal dengan menteri yang memberlakukan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tahun 1972, Mashuri juga dikenal sebagai menteri yang serius dalam melakukan perubahan pola pikir (mindset) dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Konsep perubahan itu menjadi bahan dasar dalam penyusunan konsep pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada Pelita I, 1969/1970-1973/1974.

Pada kabinet periode 1973-1978, jabatan menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Mashuri SH digantikan oleh Prof. Dr. Ir. RM Sumantri Brodjonegoro. Masa jabatan beliau tergolong singkat, dilantik tanggal 28 Maret 1973, kemudian pada tanggal 18 Desember 1973 beliau wafat. Jabatan Mendikbud digantikan oleh dr. Teuku Mohammad Syarief Thayeb mulai 1974 hingga 1978.

Ketika menjabat Mendikbud, Syarief Thayeb dikenal sebagai peletak konsep kebebasan mimbar akademis, meliputi kebebasan berpendapat serta penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi secara lisan maupun tertulis. Sebagai seorang yang pernah menduduki jabatan Atase Kebudayaan di Jepang dan Duta Besar di Amerika Serikat, beliau termasuk mempunyai perhatian besar terhadap pengembangan kebudayaan, termasuk dalam restorasi

candi Borobudur dan pengembalian berbagai koleksi dari luar negeri.

Setelah mengakhiri masa jabatan sebagai Dirjenbud 1978, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra diangkat menjadi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali. Usai pengabdianya sebagai pemimpin Nusa Dewata, ia dipercaya untuk menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di India. Dan pada 1993, beliau menjadi anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) RI. Tanggal 7 Juli 1995, salah satu putra terbaik Bali ini berpulang kepangkuan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Selama menjabat sebagai Direktorat Jenderal Kebudayaan selama dua priode (sepuluh tahun) dan pengalaman bekerja di Depernas yang menelorkan Garis-garis Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 Prof. Mantra dapat disebut sebagai peletak dasar pembangunan bidang kebudayaan. Selain itu Prof. IB Mantra juga telah memperkuat landasan kelembagaan bidang kebudayaan di pemerintahan, yang dirintis oleh pendahulunya, R.M. Indrosoegondo. Sekilas gambaran mengenai konsep, kebijakan dan strategi Prof. IB Mantra dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut.

Kebijakan pembangunan kebudayaan

Berbagai pemikiran tentang “rehabilitasi kebudayaan” yang dihimpun oleh Direktur Jenderal Kebudayaan sebelumnya (Indrosoegondo) dijadikan bahan untuk penyusunan garis kebijakan di bidang kebudayaan oleh pemerintahan baru. Upaya pembenahan orientasi kebudayaan

yang telah diletakkan oleh Indrosoegondho dilanjutkan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Sebagai kelanjutan dari pembedaan yang dilaksanakan sampai dengan 1967, pada tanggal 28 Oktober 1968 diselenggarakan Seminar Bahasa Indonesia, memperbincangkan tentang landasan pengembangan bahasa. Seminar ini diprakarsai oleh Ikatan Linguistik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Sastra UI, IKIP Jakarta dan Direktorat Bahasa dan Kesusastraan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Salah satu kesimpulan seminar adalah diusulkannya perubahan status Direktorat Bahasa dan Kesusastraan menjadi sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berada langsung di bawah Presiden.

Sementara penyusunan pokok-pokok kebijakan pembinaan dan kebudayaan belum dapat diselesaikan, sudah harus menyiapkan rencana pembangunan kebudayaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita) 1969/1970-1973/1974. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program Repelita I belum didasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD '45. Dasar penetapan Pelita I oleh Presiden RI adalah TAP MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan bukan TAP tentang GBHN.

Sebagai orang yang pernah duduk di Dewan Perancang Nasional (Depernas), Prof. IB Mantra menjadi motor penggerak dalam penyusunan konsep, kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan. Pada awalnya, rencana pembangunan di bidang kebudayaan seperti yang tercan-

tum dalam buku Rencana Pembangunan Lima Tahun (1969/70-1973/74) masih sangat sederhana. Dalam keseluruhan konsep Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bidang kebudayaan digabungkan menjadi satu dengan Olah Raga dalam judul Pembinaan Kebudayaan dan Olah Raga.

Pada saat itu program pengembangan kebudayaan nasional diarahkan pada 3 sasaran pokok, yaitu: *"Pertama, penggalian unsur-unsur kebudayaan, termasuk kepurbakalaan dan permuseuman sebagai pusat-pusat penelitian dan penyaluran serta penanaman dan pengembangan kebudayaan. Kedua, pembinaan kebudayaan yang antara lain meliputi pembinaan lembaga-lembaga pendidikan kesenian dan kegiatan-kegiatan kebudayaan di daerah-daerah. Ketiga, pencegahan kemungkinan pengaruh-pengaruh negatif kebudayaan asing. Selain itu, pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai objek pariwisata akan ditingkatkan."* (Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969/70-1973/74, II C, hal. 27)

Sementara pembangunan berjalan, terus diupayakan penyempurnaan kebijakan. Pada awal 1970 di Venesia, Unesco menyelenggarakan konferensi antarpemerintah mengenai kelembagaan, administratif, finansial dan kebijakan kebudayaan. Berdasarkan konferensi itu Unesco 1972 menyelenggarakan konferensi kebijakan kebudayaan Eropa di Helsinki dan kebijakan kebudayaan di Asia tahun 1973 di Yogyakarta. Setelah melalui berbagai diskusi, upaya meletakkan dasar kebijakan pengembangan kebudayaan (*Cultural Development Policy*) Indonesia dapat diselesaikan dalam bentuk dokumen yang pada awalnya

berjudul Pokok-pokok Kebijaksanaan Kebudayaan (*versi 1973*).

Dalam masa ini ditingkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional untuk memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional, dan kesatuan nasional termasuk menggali dan memupuk kekayaan kebudayaan daerah sebagai unsur penting yang memperkaya dan memberi corak kepada kebudayaan nasional. Sementara itu masalah tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta kemanfaatan nasional untuk diwariskan kepada generasi muda terus dibina dan dipelihara.

Pendirian Wisma Seni Nasional, 1969

Memasuki Pembangunan Lima Tahun (PELITA) masa Orde Baru (1969/1970), proyek itu dihidupkan lagi dengan nama Proyek Wisma Seni Nasional (WSN). Untuk mempersiapkan rencana itu pada tahun 1974 diadakan diskusi dan menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Galeri Kesenian Nasional dan Teater Nasional disatukan dengan nama baru yaitu Wisma Seni Nasional (WSN). Wisma Seni Nasional adalah *sebuah tempat (wadah) yakni sebuah kompleks yang memiliki berbagai fasilitas untuk melestarikan kebudayaan bangsa (dalam arti melaksanakan fungsi pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan) kebudayaan bangsa, serta menjadi tempat pertemuan kebudayaan antardaerah, dan dengan kebudayaan/kesenian asing*. Sesuai misinya, bangunan WSN terdiri atas 3 komponen bangunan utama: Teater Nasional, Galeri Nasional dan Pusat Informasi Budaya.

Mengenai persiapan pembangunan fisik WSN, telah dilakukan langkah-langkah persiapan yaitu pembuatan detil gambar rancang bangun WSN. Dimulai 1976 dibentuk Panitia Kerja Nasional Perencanaan WSN, anggotanya antara lain: Abas Alibasyah, Ir. Soeparto, Dr. Soedjatmoko, Ir. Herbowo, Ir. F. Silaban, Affandi dan Fajar Sidik. Panitia Kerja menyusun konsep dasar sebuah WSN untuk disayembarakan perencanaan gambar desainnya. Tahun 1977 dilaksanakan sayembara, dan yang keluar sebagai pemenang I, II, III, adalah dengan kode: 823382, GONIA, PA.1.77. Berdasarkan hasil sayembara itu kemudian dibuatkan cetak biru (blue print) WSN beserta maketnya oleh PT Arsiplan Bandung, pimpinan Ir. Slamet Wira-sonjaya.

Tahun 1977 Pemda DKI mengeluarkan surat penetapan Izin Lokasi No. 182/P/P/ P3K/DTK/ V/1977 untuk lahan seluas 13 ha guna pembangunan WSN. Izin ini prinsip itu hingga kini belum dicabut dan perlu tetap dipertahankan atau perlu juga dilakukan penyegaran SK dengan pihak Pemda DKI. Lahan seluas 13 ha tsb. mencakup batas-batas: (1) Selatan, Hotel Transaera (sekarang gedung Departemen Kelautan dan Perikanan); (2) Barat, Jln. Medan Merdeka Timur; (3) Utara, gereja Emanuel; dan (4) Timur, Sungai Ciliwung;

Penyerahan Museum Kota Tua kepada Pemda DKI Jakarta, 1968

Museum Kota Batavia Lama disiapkan sejak 1937 dan diresmikan dan dibuka untuk umum pada 22 Desember pada 1939. Museum ini menempati bangunan

yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara No. 27, Jakarta Kota. Didirikan oleh Yayasan Oud Batavia (Stichting Oud-Batavia) untuk menggambarkan sejarah kota Batavia dalam sebuah museum. Tujuannya untuk mengumpulkan, merawat, dan memamerkan berbagai koleksi yang dapat menggambarkan sejarah kota Batavia sejak masa pra-sejarah hingga masa kini, termasuk menggambarkan kehidupan masyarakat Betawi, dan bangsa asing seperti Arab, India, Belanda, Portugis dan Cina. Museum ini ingin menggambarkan Jakarta sebagai pusat pertemuan budaya.

Pada 1957 nama *Oud Bataviasche Museum* berubah menjadi Museum Djakarta Lama di bawah naungan LKI (Lembaga Kebudayaan Indonesia), nama baru dari Bataviasche Genootshap van Kunsten en Wetenschappen. Pada 17 September 1962 lembaga ini diberikan kepada Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI. Pada masa menjelang akhir jabatan Indrosoegondo, dilakukan persiapan penyerahan kepada Pemda DKI Jakarta. Penyerahan dilakukan pada awal masa jabatan Prof. Dr. IB Mantra, tepatnya pada 23 Juni 1968 unit Museum Djakarta Lama diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Penyerahan itu dilakukan oleh Drs. Amir Sutaarga (Direktur Museum) dan diterima oleh Gubernur Ali Sadikin.

Selain menyerahkan unit Museum Djakarta Lama, pemerintah Pusat melalui Direktur Museum juga menyerahkan berbagai koleksi milik Museum Nasional yang berupa koleksi yang menggambarkan kota Batavia. Yang menarik dari acara serah-terima itu, dalam sambutannya Ali Sadikin mengatakan akan membangun gedung Museum

Jakarta Lama yang baru di jln. Cikin Raya (Sinar Harapan, 25/6/1968).

“Expo 70” di Osaka Jepang

Pada bulan Maret 1970 di kota Osaka Jepang berlangsung “Expo 70”, suatu pameran dagang dan industri dunia terbesar setelah Expo Montreal. Untuk mensukseskan acara itu datang delegasi dari “Expo 70” Jepang dipimpin oleh Mr. Ushima Toshio. Kedatangannya untuk bertemu dengan Menteri Ekuin Sri Sultan Hamengku Buwono IX, mempromosikan dan mengundang Indonesia untuk ikut meramaikan acara tersebut.



Patung “Dewi Sri” karya Muljadi W di “Expo 70”, Osaka Jepang. (Foto: Nunus S)

Dijelaskan oleh Mr. Ushima, Indonesia mendapat kehormatan untuk menempatkan karya patung pada stand “Peace Building” yang disiapkan oleh PBB/UNESCO. Stand “Peace Building” itu selain mempunyai bangunan induk dilengkapi pula dengan taman yang “dihiasi” berbagai patung. Dari Asia tampil 4 patung termasuk Indonesia. Untuk menyiapkan acara tersebut Prof. Mantra menunjuk Kusnadi dari Direktorat Kesenian sebagai koordinator persiapan. Setelah melalui beberapa kali rapat akhirnya tema patung yang dipilih adalah “Dewi Sri”. Yang ditunjuk sebagai pelaksana

adalah seniman Muljadi W dari Sanggar-bambu '59 pimpinan Soenarto PR. (Majalah Varia No. 609, 1969).

Perhatian pengunjung terhadap pavilion Indonesia pada "Expo 70" sangat besar. Selain menampilkan patung "Dewi Sri" di taman "Peace Building", juga digelar berbagai acara musik dan tari serta pameran benda budaya. Pada saat itu pasangan penari muda Retno Maruti - Sentot Sudiarto menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Yang unik, kedua penari itu melangsungkan pernikahan nikah di tengah-tengah acara "Expo 70" Jepang itu berlangsung.

Setelah "Expo 70" ditutup, patung "Dewi Sri" dibawa pulang dan disimpan di Wisma Arga Mulya, Puncak, Bogor. Wisma itu milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 1979, ketika penulis selama sebulan tinggal di Wisma itu mengikuti pendidikan dan latihan melihat patung yang tergolek kehujanan, dililit tanaman dan rerumputan di teritisan gudang belakang. Ketika patung itu penulis ceritakan kepada Pak Kusnadi, barulah tahu bahwa patung itu pernah berperan penting. Tiga puluh tujuh tahun kemudian (3 Juni 2016), penulis melacaknya ke Wisma Arga Mulya. Ternyata patung itu kini dirawat dengan baik, berdiri tegak di tengah taman menghiasi Wisma Argamulya yang telah berubah menjadi hotel berbintang.

Festival Ramayana Internasional, 1971

Untuk mensukseskan proyek nasional Festival Ramayana Internasional (se-Asia) 1971 dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1971 dibentuk Panitia Nasional, yang dari anggota-anggota mencerminkan kegiatan ini meru-

pakan kegiatan penting saat itu. Yang duduk sebagai Panitia antara lain Menteri Negara EKUIN sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hankam dan Direktur Jenderal Kebudayaan sebagai sekretaris Panitia.

Tugas Panitia Nasional itu adalah menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penentuan tempat, waktu, peserta, pembiayaan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan. Selain dibentuk Panitia Nasional juga dibentuk Badan Pelaksana yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan festival yang ditetapkan oleh Panitia. Sebagai Ketua Badan Pelaksana adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merangkap anggota, Dirjen Kebudayaan sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota dan Dirjen Pariwisata sebagai Wakil Ketua II dan anggota.

Anggota yang lain adalah Dirjen Urusan Politik Deplu, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Dirjen Keuangan, Kepala Kepolisian RI, Dirjen Ciptakarya, Dirjen Penerangan, Dirjen Imigrasi, Dirjen Perindustrian Ringan dan Kerajinan Rakyat, Gubernur/Kepala Daerah tempat penyelenggaraan, dan sebagai sekretaris adalah Pejabat dari Direktorat Jenderal pariwisata. Festival diselenggarakan di Taman Candrawilwatikta di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, dibuka oleh Presiden Soeharto tanggal 31 Agustus 1981 pkl. 19.00.

Festival itu dihadiri oleh utusan dari Birma, India, Khmer, Malaysia, Muangthai dan Indonesia. Festival yang pertama kali diselenggarakan itu tergolong sukses yang dapat mengangkat nama Indonesia di mata internasional khususnya Asia. Dalam hal ini tugas Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. IB Mantra cukup berat karena dalam waktu relatif singkat harus menyiapkan sebuah event internasional di desa Pandaan, kabupaten Pasuruan, yang diberi nama Taman Candra Wilwatikta Pandaan. Panggung terbuka itu dibangun oleh Gubernur Jawa Timur, Kolonel M. Wijono 1963. Untuk melengkapi tata cahaya, Panitia itu dibantu lampu penerangan dari perusahaan Philips.

Penataan kelembagaan, 1969

Pada masa jabatan Prof. I.B. Mantra, penyempurnaan tata kelembagaan kebudayaan yang dirintis oleh Indro-soegondo masih terus dilanjutkan, sehingga kelembagaan bidang kebudayaan semakin mantap. Sejak mulai menjabat telah terjadi lima kali perubahan, yaitu pada 1969, 1971, 1974, 1975, dan 1978.

Sesuai dengan Keppres No. 183 Tahun 1968 tanggal 6 Juni 1968 diumumkan Susunan Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Dalam susunan kabinet tersebut, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetap ada dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Mashuri, S.H. Tidak lama kemudian, dalam tahun 1969 dikeluarkan Keppres No. 39 Tahun 1969 dan No. 84 Tahun 1969, yang mengatur kelembagaan pemerintah, Kepmendikbud No. 141 Tahun 1969, yang menetapkan susunan organisasi Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan secara lengkap adalah sebagai berikut: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Lembaga Bahasa Nasional (LBN); (3) Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); (4) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); (5) Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); (6) Direktorat Kesenian; (7) Direktorat Pendidikan Kesenian; (8) Direktorat Museum. Dalam struktur organisasi ini, yang menarik adalah lembaga sebagai unit memiliki misi penelitian dan pengkajian menempati posisi pertama baru kemudian disusul oleh unit direktorat.

Dua tahun kemudian, yakni dalam tahun 1971 dilakukan lagi penataan organisasi lagi. Secara khusus dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) No. 060/1971, tanggal 12 Maret 1971, tentang Tujuan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan, dan Tata Kerja dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun unit-unit yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan urutannya diganti menjadi sbb.: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal; (2) Lembaga Bahasa Nasional (LBN); (3) Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); (4) Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); (5) Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); (6) Direktorat Kesenian; (7) Direktorat Pendidikan Kesenian; (8) Direktorat Museum.

Selanjutnya, pada 1974 dikeluarkan Keppres No. 45 Tahun 1974, tanggal 26 Agustus 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen. Pada Nomor Urut 12 dalam

Keppres tersebut tercantum nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, dalam lampiran Keppres itu dirinci hingga Eselon II, dan dalam Bab II "Susunan Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan" pada No. Urut (7) disebutkan nama unit Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam Pasal 9 Direktorat Jenderal Kebudayaan dirinci lagi menjadi beberapa unit eselon II: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pendidikan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (4) Direktorat Sejarah dan Purbakala. Selanjutnya, empat lembaga yang ada pada Kepmendikbud No. 060/1971, yakni LBN, LPPN, LSA, dan LMK sesuai dengan Pasal 11, berubah menjadi *Pusat* yakni: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pengganti Lembaga Bahasa Nasional; (2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional disingkat PPPN atau P3N, pecahan dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional; (3) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, pengganti Lembaga Sejarah dan Antropologi; (4) Pusat Pembinaan Perpustakaan (unit baru)

Perubahan mendasar yang terjadi pada tahun 1974 adalah penggantian status *lembaga*, yakni Lembaga Bahasa Nasional, Lembaga Penelitian Peninggalan Nasional, Lembaga Musikologi dan Koreografi, dan Lembaga Sejarah dan Antropologi diganti menjadi *Pusat*. Prof. Mantra juga meletakkan dasar penataan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) dengan merintis berdirinya UPT di bidang seni (Wisma Seni Nasional dan Taman Budaya), museum (Museum Negeri Provinsi dan Museum Khusus), tinggalan

sejarah dan purbakala (Kantor Suaka dan Balai Penelitian Arkeologi) dan bahasa (balai bahasa).

Pada 1975 diadakan penataan organisasi lagi guna menyesuaikan dengan perkembangan. Berdasarkan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975, Direktorat Jenderal kebudayaan mengalami perubahan nama dan statusnya menjadi: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pengembangan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala. Sementara itu, pusat-pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah (1) Pusat Pembinaan Perpustakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional; (4) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya; dan (5) Museum Pusat.

Perubahan mendasar pada Keppres ini adalah masalah keberadaan lembaga-lembaga pendidikan bidang kesenian yang dibina oleh Direktorat Pendidikan Kesenian. Lembaga pendidikan yang berdiri sejak dibentuknya Jawatan Kebudayaan (1949) itu merupakan realisasi dari rekomendasi Kongres Kebudayaan 1948 dan 1951 serta Konferensi Kebudayaan 1950, mulai dari pendidikan tingkat menengah hingga pendidikan tinggi. Lembaga-lembaga itu adalah: Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI), Sekolah Menengah Musik Indonesia (SMMI), Sekolah Menengah Kerajinan Indonesia (SMKI), Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI), Akademi Seni Drama dan Film (ASDRAFI) dan Konservatori Karawitan (KOKAR) dan Konservatori Tari di berbagai

daerah. Setelah Jawatan Kebudayaan berubah menjadi direktorat jenderal kebudayaan, pembinaan lembaga-lembaga itu dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Pendidikan Kesenian.

Berdasarkan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975 status Direktorat Pendidikan Kesenian dipindahkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lembaga-lembaga pendidikan kesenian tingkat menengah (SSRI, SMMI, SMKI) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk lembaga pendidikan kesenian tingkat tinggi (KOKAR, ASRI, ASTI, ASDRAFI). Hal ini didasarkan pada kebijakan bahwa semua lembaga pendidikan yang ada di luar Departemen P dan K harus digabungkan (*disatuatapkan*). Pada saat itu pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan mengusulkan agar posisi lembaga pendidikan itu tetap berada di bawah naungan Direktorat Jenderal kebudayaan, karena Ditjen Kebudayaan pada dasarnya masih satu atap dengan Ditjen Dikdasmen, di bawah atap Depdikbud.

Usul tersebut tidak disetujui dan sebagai gantinya dibentuk Direktorat Pengembangan Kesenian di samping Direktorat Pembinaan Kesenian yang sudah dibentuk sejak tahun 1966. Dengan lahirnya dua direktorat ini menyebabkan kegiatan kesenian menjadi tidak lancar karena kedua lembaga ini pada hakikatnya memiliki misi yang tidak banyak perbedaannya. Tumpang-tindih tugas dan fungsi itu sangat dirasakan di daerah-daerah, mengingat masyarakat beranggapan bahwa keduanya itu sulit untuk

dipisahkan. Oleh karena itu mulai tahun 1979 kedua direktorat itu disatukan menjadi Direktorat Kesenian.

Tiga tahun kemudian lahir Keppres Keppres No. 27 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa pasal, termasuk Lampiran 12 Keppres No. 45 Tahun 1974. Pada pasal 9 tentang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang semula terdiri atas lima ayat ditambah dengan satu ayat baru, yaitu Ayat (6), yang mengatur tentang hadirnya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke dalam jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kehadiran direktorat baru ini di lingkungan kebudayaan sempat mengundang polemik.

Perubahan nomenklatur Lembaga Bahasa dan Kesusastraan menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang berdiri sejak tahun 1959 menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan (dalam Kepmendikbud No. 175/Kep/1966) dimaksudkan untuk menampung misi bidang Bahasa dan Kesusastraan yang sebenarnya tidak hanya menitikberatkan pada misi penelitian tetapi juga misi pembinaan, terutama dalam hal penulisan dan pemakaian bahasa Indonesia.

Pada Kepmen No. 034 dan 041/1969, nomenklaturnya diganti lagi menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Dengan demikian misi lembaga ini lebih menitikberatkan pada penelitian kebahasaan dan kesastraan. Selanjutnya dalam tahun 1974, status LBN diganti menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, mengikuti pedoman Keppres No. 44 tahun 1974, khususnya mengenai

pembentukan 'Pusat'. Perubahan itu tidak hanya berlaku pada LBN tetapi juga pada LSA, LPPN dan LMK.

Dihapusnya Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK) dan Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA)

Kedua lembaga itu dibentuk pada tahun tahun 1966. Tugas pokok dan fungsi LMK adalah melakukan penelitian (*research*) perkembangan seni musik dan tari di Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmiah. Sementara itu, tugas pokok dan fungsi LSA adalah melakukan penelitian (*research*) dan pendokumentasian bidang sejarah, antropologi budaya dan geografi budaya. Pada tahun 1974 keberadaan kedua lembaga itu dihapuskan. Nomenklatur LSA berubah menjadi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, dan seluruh fungsi penelitian (*research*) dan pendokumentasian bidang sejarah, antropologi budaya dan geografi budaya ditampung dalam lembaga baru itu.

Sementara itu dengan dihapusnya LMK, fungsi penelitian perkembangan seni musik dan tari di Indonesia menjadi masalah, karena meskipun dibentuk Direktorat Pembinaan Kesenian dan Direktorat Pengembangan Kesenian, tetapi kedua direktorat itu tidak melakukan fungsi penelitian. Oleh karena itu fungsi fungsi penelitian perkembangan seni musik dan tari ditampung dalam fungsi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Tetapi dalam pelaksanaan, fungsi penelitian seni musik dan tari perlahan-lahan menjadi hilang hingga sekarang, karena tidak lama kemudian (1979) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya berubah bentuk menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai

Tradisional yang dalam tugas pokok dan fungsinya tidak melakukan penelitian seni khususnya seni musi dan tari.

Pemecahan Lembaga bidang Purbakala

Lembaga ini telah berdiri sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu sejak didirikannya *Oudheidkundige Dienst* pada tanggal 14 Juni tahun 1913. Setelah Indonesia merdeka lembaga ini berubah menjadi Jawatan Purbakala, Dinas Purbakala dan kemudian Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN), yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penelitian, penggalian, pemeliharaan dan pemugaran di bidang purbakala dan peninggalan nasional.

Pada masa jabatan Prof. Mantra, yakni pada tahun 1974 LPPN dipecah menjadi 2 unit, yaitu menjadi (1) Direktorat Sejarah dan Purbakala; dan (2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P3N). Pemecahan ini dilakukan mengingat beban tugas LPPN cukup berat dan banyak masalah baru yang harus diselesaikan. Pemecahan didasarkan pada bidang kegiatan yang dikerjakan. Direktorat Sejarah dan Purbakala, lebih menekankan pada fungsi direktiva, yaitu melakukan upaya pemeliharaan, perawatan, perlindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala. Misi ini diambil dari kegiatan Bidang Pemeliharaan dan Pemugaran ketika masih bernama Lembaga Penelitian Purbakala dan-Peninggalan Nasional. Sementara itu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional memiliki fungsi melakukan penggalian (*ekskavasi*) dan penelitian bidang purbakala dan peninggalan nasional.

Pada saat itu, keberadaan Direktorat Sejarah dan Purbakala sering dipersoalkan mengenai perbedaannya dengan tugas dan fungsi Direktorat Museum. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama memelihara, merawat dan melestarikan benda warisan budaya bangsa. Untuk mengatasi hal ini diambil kesepakatan bahwa Direktorat Sejarah dan Purbakala melakukan pemeliharaan, perawatan, perlindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala yang ada di lapangan, sementara Direktorat Museum lebih menekankan pada pemeliharaan, perawatan, perlindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala yang disimpan di dalam gedung.

Direktorat Bahasa dan Kesusastraan diganti menjadi Lembaga Bahasa Nasional (LBN)

Kelembagaan bidang bahasa dan sastra mengalami perkembangan yang menarik untuk disimak. Pada 1947 berdiri Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) yang melakukan kegiatan ilmiah di bidang kebahasaan dan kebudayaan. Selanjutnya, pada 1948 dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo No. 1532/A 26 Februari 1948 didirikan Balai Bahasa sebagai salah satu bagian dari Jawatan Kebudayaan. Akan tetapi, dengan Surat Keputusan Menteri PP dan K tanggal 1 Agustus 1952, kedudukan Balai Bahasa dipindahkan ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Selanjutnya, tugas Balai Bahasa ditangani oleh lembaga baru, yaitu Lembaga Bahasa dan Budaya, yang dibentuk dari hasil penggabungan Bagian Penyelidikan Bahasa dari

Balai Bahasa cabang Yogyakarta dengan ITCO. (*Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997*, 1998:7)

Setelah berjalan selama tujuh tahun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PP dan K No. 69626/B/S tanggal 1-6-1959 lembaga ini berganti nama lagi menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastaan. Sejak itu, status lembaga keba-
hasaan ini beserta cabangnya terlepas dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia, lalu sepenuhnya berada di bawah Kementerian PP dan K. Kewenangan lembaga ini semakin bertambah besar setelah pada 1964 Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah, yang semula berada di bawah Jawatan Pendidikan Umum disatukan ke dalam Lembaga Bahasa dan Kesusastaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, nama Lembaga Ba-
hasa dan Kesusastaan pada 1966, sesuai dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 November 1966 No. 75/V/Kep./I/1966 berubah lagi menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastaan. Baru tiga tahun berjalan, pada masa jabatan Prof. Mantra berdasarkan Surat Keputusan Men-
teri Pendidikan dan Kebudayaan No. 034/1969 tanggal 24 Mei 1969, nama itu berubah lagi menjadi Lembaga Bahasa Nasional.

Pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sebutan jenis lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara resmi baru muncul setelah 1974, pada jabatan Prof. Dr. IB Mantra. Nama itu tercantum dalam Keppres No. 44 Tahun 1974. Pada awalnya lembaga dengan sebutan se-

perti itu belum ada. Yang ada adalah sebutan Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Misalnya, Kantor Balai Bahasa (1948) memiliki kantor cabang di Yogyakarta, Makassar, dan Singaraja. Demikian pula halnya dengan Kantor Dinas Purbakala selain bekantor di Pusat (Batavia) juga memiliki kantor cabang di daerah, yaitu di Prambanan, Gianyar, Trowulan dan Makassar.

Macam dari UPT yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan diambil dari berbagai unsur atau aspek yang dimiliki oleh kebudayaan. Nomenklatur UPT tersebut adalah: (1) UPT penelitian arkeologi, disebut balai arkeologi (balar); (2) UPT perlindungan kepurbakalaan disebut suaka peninggalan sejarah dan purbakala (SPSP) dan Balai Studi dan Konservasi di Borobudur. SPSP sekarang disebut balai pelestarian peninggalan purbakala (BP3); (3) UPT permuseuman, disebut Museum Nasional (Musnas), museum negeri provinsi (Musprov), dan museum khusus; (4) UPT sejarah dan nilai tradisional disebut balai kajian sejarah dan nilai tradisional (BKNST); (5) UPT kesenian disebut taman budaya (TB); (6) UPT kebahasaan dan kesastraan disebut balai bahasa; (7) UPT perpustakaan disebut perpustakaan wilayah (pustakwil).

Pendirian Taman Budaya

Apa itu Taman Budaya? Mengacu pada hasil Kongres Kebudayaan 1948, 1951, dan 1954, serta UNESCO 1955 dan pidato Prof. Dr. Prijono 1964. Dalam buku Pelita I dicantumkan sasaran pembangunan Taman Kebudayaan. Sesuai dengan namanya, lembaga itu menjadi wadah penampungan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

kebudayaan. Fasilitas yang dibangun di dalam Taman Kebudayaan diarahkan untuk dapat menampung kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu: museum, sejarah, kepurbakalaan, adat-istiadat, kesenian, bahasa, perpustakaan. Kegiatan itu dapat berupa pelatihan, pertunjukan, pameran, diskusi, seminar, penelitian, dan lain-lain.

Dalam perjalanan selanjutnya konsep awal sebuah Taman Kebudayaan mengalami perubahan. Perubahan *pertama*, nama atau nomenklatur nya berubah dari Taman Kebudayaan menjadi Taman Budaya. Perubahan *kedua*, pemisahan komponen bangunan yang ada dalam Taman Kebudayaan atau Taman Budaya. Untuk menyatukan berbagai kegiatan dari unsur-unsur kebudayaan dalam satu kompleks memerlukan lahan yang amat luas. Meskipun pada saat itu (1970-an) mencari tanah untuk pembangunan relatif masih mudah, tetapi karena kendala kecilnya alokasi anggaran kebudayaan, maka konsep itu direvisi dengan cara memecah lokasi, sehingga gedung UPT- UPT: Museum, Bahasa, Perpustakaan, Balai Kajian Sejarah, dan Nilai Tradisional, Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala dan Taman Budaya dibangun secara terpisah.

Sebagai model, Taman Budaya pertama yang dibangun adalah Taman Budaya Bali, menempati tanah hibah dari keluarga Prof. Mantra, seluas $\pm 6,5$ hektar, terletak di jantung kota Denpasar. Mulai dibangun sekitar tahun 1974/1975 dan mulai digunakan 1978 ditandai dengan diselenggarakannya Pekan Kebudayaan Bali (PKB) pertama. Bangunan ini dirancang oleh arsitek otodidak termuka dari

Bali, Ida Bagus Tugur, dengan mengambil model arsitektur pura dan arsitektur Istana Kerajaan di Bali. Sementara mengenai komponen-komponen bangunan yang perlu dibangun didasarkan pada hasil diskusi dengan para budayawan dan seniman. Komponen bangunan Taman Budaya Bali menjadi dasar atau model pembuatan **standarisasi** bangunan Taman Budaya di seluruh Indonesia.

Setelah penyelenggaraan PKB I selesai, fungsi Taman Budaya mengalami perubahan karena didorong oleh penerjemahan Taman Budaya Bali ke bahasa Inggris menjadi Bali Art Centre, hingga kini. Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia semua brosur termasuk profil Taman Budaya Bali dibuat dalam dua versi, Indonesia dan Inggris. Sejak itu Taman Budaya Bali lebih dikenal dengan sebutan Art Centre Bali dan ditangkap oleh masyarakat sebagai Pusat Kesenian. Fungsi Taman Budaya lalu dimaknai sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan kesenian saja. Meskipun namanya "Taman Budaya", tetapi masyarakat menjadi terbiasa bahwa kompleks itu sebagai tempat kegiatan kesenian. Tidak hanya masyarakat Bali tetapi seluruh Indonesia.

Lalu apa sebenarnya fungsi sebuah Taman Budaya yang sesungguhnya? Dalam kaitannya dengan kesenian, secara sederhana dalam arahannya Prof. Mantra mengatakan "*Taman Budaya akan berfungsi sebagai **laboratorium** dan **etalase** sekaligus juga sebagai **tempat pendidikan** dan **pelatihan seni***". Sebuah laboratorium berarti suatu tempat atau ruang tertentu yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk mengadakan percobaan.

Etalase adalah tempat memamerkan barang-barang yang dijual. Yang dimaksud dengan fungsi sebagai laboratorium bagi Taman Budaya adalah sebagai tempat atau kompleks untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen di bidang seni (lukis, tari, drama, kria, fotografi, sastra) dll. Yang melakukan percobaan atau eksperimen adalah para seniman, calon seniman, guru, peneliti dll.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi sebagai etalase bagi Taman Budaya adalah sebagai tempat atau kompleks untuk memamerkan, mementaskan, mempertunjukkan berbagai hasil percobaan dan eksperimen yang dilakukan di laboratorium tadi. Yang dietalasekan tidak semata-mata hasil dari laboratorium Taman Budaya itu sendiri, melainkan juga mengetalasekan hasil karya berbagai sanggar atau kursus yang ada di luar Taman Budaya, bahkan dari provinsi lain. Yang mengetalasekan hasil lab adalah para seniman, pimpinan sanggar dan bagian birokrasi.

Sementara itu, mengenai fungsi pendidikan dan pelatihan seni dimaksudkan untuk menjadikan Taman Budaya sebagai pusat kegiatan belajar (pendidikan), kursus, dan latihan seni. Yang melaksanakan adalah para seniman atau di ada di Taman Budaya mapun dari luar Taman Budaya. Dengan demikian titik berat misi utama Taman Budaya adalah mengurus bagian "hulu" yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas seniman, mencetak calon-calon seniman, untuk menunjang keberhasilan program atau sektor lain atau "hilir" dalam arti pemanfaatannya seperti: pendidikan karakter bangsa, kesejahteraan masyarakat, pariwisata, dll. Misi utama ini harus

dipertahankan agar rencana untuk memberi arah Taman Budaya tidak terjebak menjadi salah arah.

Mengenai keberadaan Taman Budaya Bali, Tod Jones dalam bukunya "Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia" menilai sangat berhasil (Tod Jones, 2015: hal. 239). Tetapi setelah lembaga itu diserahkan ke daerah sesuai dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, keahadirannya ditafsirkan berbeda. Dalam harian *Kompas* (13/7/2012) dimuat tulisan berjudul "Taman Budaya Belum Punya Arah". Judul itu sebagai kesimpulan dari diskusi lokakarya Pengembangan Seni dan Budaya, di Surabaya, Jawa Timur, 12/7/2012. Benang merah dari acara yang dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dan pengelola Taman Budaya (TB) dari berbagai daerah menyimpulkan bahwa sebagian besar dari 25 TB di Indonesia belum memiliki arah pengembangan. Bahkan, kondisi fisik beberapa TB sangat memprihatinkan. Manfaat taman itu sebagai wadah bagi masyarakat untuk bereks- presi dan berkreasi pun belum kelihatan.

Membaca berita ini bagi penulis tidak heran lagi, karena dari hasil evaluasi 5 tahun pelaksanaan Otonomi Daerah (2001-2005) memang menunjukkan pengurusan kebudayaan di daerah-daerah pada umumnya sangat memprihatinkan, bila dibandingkan dengan sebelum diserahkan. Tidak hanya TB atau bidang kesenian saja. Pada sebagian besar Pemerintah Daerah belum membenahi kewenangan pelestarian kebudayaan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat. Belum didukung oleh suatu konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan di masing-masing daerah atau suku bangsa. Andaikan konsep yang

dibuat Pemerintah Pusat sebelum otonomi daerah berlaku tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang, perlu ada upaya untuk menata atau mengoreksi konsep, kebijakan dan strategi itu. Seperti yang dikatakan Ketua Forum Taman Budaya Seluruh Indonesia Helmy Azeharie: *"Banyak daerah yang menganggap taman budaya tidak penting sehingga anggarannya minim. Anggaran daerah pun lebih diprioritaskan untuk sektor lain, seperti transportasi, pertanian, atau pendidikan"*.

Seperti telah disinggung di atas, konsep yang telah diletakkan oleh Prof. Mantra mengenai konsep, kebijakan dan strategi pembangunan kesenian yang berkaitan dengan bidang kelembagaan antara pusat dan daerah. Di tingkat Pusat didirikan sebuah UPT Nasional. Nomenklatur untuk UPT tingkat Nasional dan namanya adalah Wisma Seni Nasional, yakni gabungan dari rencana pembangunan Galeri Nasional dan Teater Nasional. Selanjutnya, di tingkat Provinsi didirikan sebuah UPT tingkat provinsi, dan namanya adalah Taman Budaya dan bukan Taman Kebudayaan seperti dalam rencana semula. Adapun di tingkat Kabupaten/Kota Madia didirikan UPT tingkat kabupaten/kotamadia, namanya adalah Gelanggang Olah Seni. Untuk pembangunan Taman Budaya, hingga penyerahan kewenangan Pusat ke Daerah tanggal 1 Januari 2001, dari 27 provinsi telah dibangun 25 Taman Budaya di 25 provinsi. Untuk provinsi Sumatera Selatan hingga 2001 belum berhasil membangun Taman Budaya, sedang untuk provinsi DKI Jakarta telah memiliki Taman Ismail Marzuki yang dibangun dengan anggaran daerah.

Sementara itu mengenai UPT Gelanggang Olah Seni di tingkat Kabupaten/Kota Madia yang pembangunannya direncanakan akan dibiayai oleh pemerintah Pusat belum dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran untuk difokuskan pada penyelesaian pembangunan Taman Budaya di tingkat provinsi. Baru satu buah saja Gelanggang Olah Seni yang didirikan, yaitu di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dibangun pada tahun 1985.

Adapun realisasi pembangunan UPT Kesenian di tingkat Pusat, yaitu Wisma Seni Nasional yang telah dirintis sejak tahun 1960-an hingga kini belum terwujud, meskipun dari segi perencanaan sudah lengkap. Yang sudah berhasil dibentuk baru pendirian Galeri Nasional, sebagai bagian dari keseluruhan komponen Wisma Seni Nasional, yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 Jakarta.

Peletak dasar pokok-pokok kebijakan pembangunan kebudayaan

Pada 1973 disusunlah kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang dituangkan dalam buku *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Kebudayaan* (versi 1973). Dalam buku ini ditegaskan tentang definisi kerja bidang kebudayaan sehingga aspek budaya yang ditangani menjadi jelas. Aspek kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup (1) kebudayaan tradisional dan folklore; (2) politik bahasa nasional; (3) kepurbakalaan dan permuseuman; (4) pembinaan kesenian; (5) dan pendidikan kesenian. (*Pokok-Pokok Kebijaksanaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1973*).

Penggagas Pekan Kesenian Bali (PKB)

Prof. Mantra yang menggagas diselenggarakannya Pesta Kesenian Bali (PKB). Ketika itu selain melakukan pembinaan ke desa – desa, secara khusus lembaga ini juga bertugas memberikan pembinaan kepada sanggar – sanggar seni ataupun sekaha – sekaha yang akan tampil dalam Pesta Kesenian Bali (PKB). Seiring perkembangannya dan semakin meningkatnya kebutuhan akan seni pertunjukan sampai pada untuk mendukung kegiatan kepariwisataan dan misi kesenian ke luar negeri, lembaga ini pun sangat berperan di dalamnya.

Untuk lebih menjangkau semua daerah di Bali yang memiliki daerah kantong-kantong kebudayaan yang sangat banyak, Listibya ini pun dibentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan. Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Listibya adalah Lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan dan Pembinaan terhadap pengembangan Kebudayaan Bali. Kegiatan PKB yang digagas oleh Prof. Mantra itu menjadi motor penggerak diselenggarakannya acara festival budaya atau kesenian di beberapa daerah.

Penataan Perutusan Kebudayaan

Pada masa Prof. Mantra menjabat masalah perutusan kebudayaan dalam arti penerimaan dan pengiriman misi kebudayaan menjadi perhatian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam lalu-lintas pengiriman misi kebudayaan ke luar negeri maupun penerimanaan perutusan kebudayaan dari luar negeri volumenya makin

meningkat dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif. Pengaturan itu selain didasarkan pada Kongres Wina 1815 yang diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818 tentang hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik juga didasarkan pada hasil konferensi Hubungan Diplomatik di Wina tgl 2/03/1961, melahirkan (*Viena Convention on Diplomatic Relations Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*).

Konvensi itu mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antarbangsa tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistem sosialnya. Selanjutnya, dua puluh hari kemudian yaitu pada tanggal 22 Maret 1961, mengeluarkan Keppres No. 100/1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan. Utusan atau perutusan dapat berarti pengiriman dari pemerintah Indonesia ke luar negeri, maupun penerimaan perutusan yang datang dari negara lain.

Perintis berdirinya KPP Kesenian dan Hiburan

Untuk melengkapi dan mengawal jalannya Keppres tersebut pada tahun 1971 oleh Prof. Mantra mengusulkan kepada Mendikbud agar dibentuk **Komisi Peneliti Kegiatan Kesenian/Hiburan Dalam Rangka Hubungan Luar Negeri**. Usul tersebut mendapatkan persetujuan dan kemudian ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 013/1971, tanggal 15 Januari 1971 tentang pembentukan komisi tersebut.

Setelah keluar Kepmendikbud tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. SK.104/K/1971 yang khusus mengatur tentang Perusahaan Klab Malam (*Night Club*) karena dengan adanya kegiatan ini banyak penyanyi dan penari yang didatangkan dari luar negeri. Pada saat itu kewenangan dalam mengurus kedatangan penyanyi dan penari asing ada pada Departemen Perhubungan.

Karena masalah penerimaan peraturan kebudayaan makin meningkat, pada 1976 ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 168/P/1976 tentang pembentukan Komisi Peneliti dan Penilaian (KPP) Kegiatan Kesenian/Hiburan. Selanjutnya untuk mengatur usaha mendatangkan penyanyi dan penari asing dan mengatur penyelenggaraan pertunjukannya ditetapkan pula Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0310/U/1976 yang mengatur tentang Izin Usaha Impresariat.

Pemugaran Candi Borobudur

Melanjutkan rintisan pemugaran yang dilakukan oleh Indrosoegondo, pada tahun 1971 Indonesia Prof. Mantra bersama UNESCO menyelenggarakan seminar internasional penyelamatan candi Borobudur. Seminar dihadiri oleh peserta dari Jerman, Jepang, USA, Belanda, Prancis dan Italia. Dalam seminar ini dibahas mengenai hasil dari penelitian, rencana teknis pemugaran dan pelaksanaannya secara sistematis dan ilmiah. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 1972 UNESCO memulai kampanye untuk mengumpulkan bantuan dari berbagai negara untuk pemugaran candi Borobudur, seperti yang pernah dilakukan

pada penyelamatan monumen Abu Simbel di Nubia. Hasil dari kampanye terkumpul dana sekitar digunakan untuk membiayai pemugaran yang menelan biaya sekitar \$ 7.750.000,- dan pemerintah Indonesia menyediakan dana sebesar \$ 2.750.000,-

Tahun 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Panitia Konsultasi Pemugaran Candi Borobudur, diketuai oleh Prof. Ir. R. Roosseno didampingi oleh 4 orang tenaga ahli: Mr. D. Chihara (Jepang) Mr. J.E.N. Jensen (USA), Mr. R. Lemaire (Belgia) dan Karl G. Siegler (Jerman). Tahun 1973 pemugaran candi Borobudur dimulai.

Perintis kerja sama antarinstansi

Menjelang akhir masa jabatan sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan (1968-1978) Prof. Dr. Ida Bagus Mantra “ngebut” menyiapkan Memorandum of Understanding (MOU) dengan instansi lain yang memiliki kedekatan tugas dan fungsi dengan lembaga yang dipimpinnya. Menurut IB Mantra untuk menyelaraskan dan meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan perlu dibangun kerja sama dengan Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film dan dengan Direktorat Jenderal Pariwisata, yang dituangkan dalam naskah Kerja Sama atau MoU.

Dalam rangka membangun kerja sama antara Ditjenbud dengan Direktorat Jenderal Pariwisata, pada 1978 atas inisiatif Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra diselenggarakan Seminar Kebudayaan dan Pariwisata di Hotel Bali Beach. Tahun berikutnya (1979) diselenggarakan seminar kedua di Hotel Sri Wedari

Yogyakarta. Demikian pula halnya dengan perintisan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film (RTF) dilakukan beberapa kali pertemuan antara kedua direktirat jenderal. Selain dilakukan beberapa kali pertemuan juga pada 1978 diselenggarakan seminar tentang Kebudayaan, Radio dan Televisi di Hotel Dana Surakarta.

Pemulangan warisan budaya bangsa dari Belanda

Pada masa jabatan Prof. Mantra upaya pengembalian warisan budaya Indonesia di Belanda ditangani secara serius. Usaha pengembalian benda-benda warisan budaya Indonesia sudah dirintis sejak 1954. Diawali dengan penjelasan Mr. Moh. Yamin, Menteri PP dan K, yang ketika itu diundang untuk berbicara dalam konferensi Kementerian Penerangan 1954. Pada 1954 itu lahir persetujuan antara pemerintah Belanda dengan pemerintah RI, tertanggal 13 Juli dan 24 Juli 1954, bahwa pihak Belanda menyetujui bersama untuk menyerahkan beberapa koleksi sebagai berikut: (1) Schedel Sangiran, yang waktu itu berada berada pada Prof. Koningwald; (2) Keropak Negerakrtagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca disimpan di Museum Leiden; (3) Arca asli Prajñaparamita, disimpan di Museum Leiden; (4) Manuskrip dalam bahasa Melayu, Jawa Sunda Madura dan lain-lain dialek bahasa Indonesia; (5) Schedel Trinil Du Buis di Leiden; (6) Oorlogs-documenten, (dokumen-dokumen perang sesudah tahun 1940; (7) Peta-peta lama, peta-peta geologi dari Indonesia.

Realisasi dari persetujuan itu baru ditindaklanjuti

dengan Perjanjian Kebudayaan antara kedua negara yang ditandatangani tanggal 7 Juli 1968. Disusul kemudian Pangeran Bernhard berkunjung ke Indonesia memulihkan kedekatan hubungan kedua bangsa. Pada kunjungannya bulan Maret 1970, harian Indonesia Raya dalam Tajuknya menulis *"...kedua bangsa kini sama-sama melihat ke depan dalam membina hubungan persahabatan dan kerja sama yang bermanfaat bagi kedua bangsa"*.

Setelah itu dibalas dengan kunjungan Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto ke Belanda pada bulan September 1970. Dalam pidato Jamuan Makan Balasan untuk menghormati Sri Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard, 3 September 1970, Presiden Suharto mengatakan: *"Saya meninggalkan Indonesia dengan keyakinan bahwa kita telah menutup sejarah masa lampau; dan sekarang kita membuka lembaran baru yang penuh harapan di masa depan"*. Pada saat jamuan makan itulah dilangsungkan penyerahan kembali, keropak Negarakrtagama. Serah terima dilaksanakan di istana "Huis Ten Bosch". Keropak itu diserahkan oleh Sri Ratu Juliana langsung kepada Presiden Soeharto.

Koleksi lain yang menyusul dikembalikan adalah arca Ken Dedes (Prajñaparamita), yang telah bermukim di Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, sekitar 105 tahun. Pada 1975 arca Ken Dedes pulang kampung. Selain patung Ken Dedes atas kerja keras Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Belanda. Pada 1978 beberapa benda budaya Indonesia yang ada di Belanda dikembalikan ke RI, antara lain: berbagai pusaka/keris Lombok, Bali, Jawa, berbagai perhiasan emas

(cincin), pelana kuda, payung, sanggurdi dan tombak Pangeran Diponegoro.

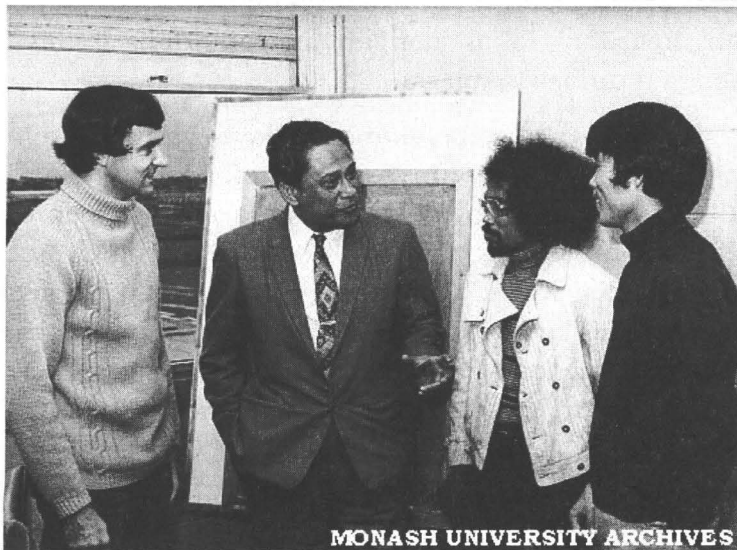
Selain itu, juga dikembalikan berbagai arsip dan dokumen penting, film dokumenter, foto dari Belanda yang kini disimpan di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Sementara itu, dari Yayasan Oranje-Nassau Belanda diserahkan sebuah lukisan karya pelukis Raden Saleh mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro. Setelah tiba di Indonesia berbagai koleksi yang dipulangkan termasuk lukisan Raden Saleh dipamerkan di Museum Nasional Jakarta dalam rangka memperingati 200 tahun berdirinya Museum Nasional, 24 April 1978.

Mengenai kebijakan benda warisan Prof. I.B. Mantra sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan (1968-1978) pernah mengatakan bahwa tidak semua benda budaya yang ada di luar negeri harus semua kembali. Ada beberapa benda, karena di Indonesia sudah ada ataupun mudah diperoleh, tidak perlu harus kembali. *“Biarlah benda-benda budaya yang ada di sana, sebab orang luar juga perlu tahu”*. (Kompas, 2/5/1978). Pada kesempatan ketika memberikan sambutan Prof. Mantra menegaskan lagi: *“Biarlah benda-benda itu tetap di sana menjadi duta-duta bangsa”*. Tampaknya ada sinyal kekhawatiran dari Prof Mantra. Benda-benda itu akan lebih terjamin kelestariannya bila tetap berada di sana. Khawatir bila benda-benda itu kembali belum tentu akan terjamin kelestariannya bila dibandingkan dengan tetap berada di sana.

Catatan akhir

Dari sekilas pelacakan jejak pada masa jabatan Prof. Mantra, memasuki masa pembangunan menunjukkan banyak gagasan yang telah ditebarkan oleh Mantra bagi pembangunan kebudayaan bangsa. Berbagai kegiatan kebudayaan dilaksanakan dengan anggaran pembangunan. Selain melakukan penataan kelembagaan, SDM juga melakukan pembangunan berbagai fasilitas kebudayaan. Berbagai gagasan-gagasan itu lahir dengan didasari oleh kuatnya pribadi Prof. Mantra sebagai pejabat yang lahir dan besar di kalangan masyarakat yang memegang teguh tradisi dan kearifan lokal dengan ajaran dan budaya Hindu sebagai sumber inspirasi.

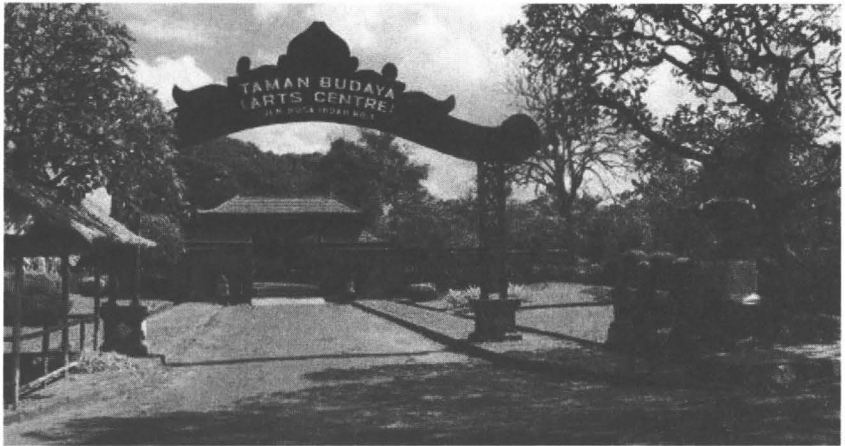
Dengan latar belakang budaya yang berkembang di lingkungan kehidupannya itu, Prof. Mantra telah meninggalkan jejak konsep, kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan yang membuktikan bahwa dengan menjunjung tinggi tradisi luhur yang tak kalah dengan budaya dunia, dapat dijadikan sebuah model perpaduan yang dapat berjalan harmonis antara tradisi dan modern. Konsep, kebijakan dan strategi itu diawali oleh Prof. Mantra dengan pembangunan Taman Budaya (Art Center) Bali di atas tanah miliknya yang dihibahkan untuk kemajuan kebudayaan bangsa.



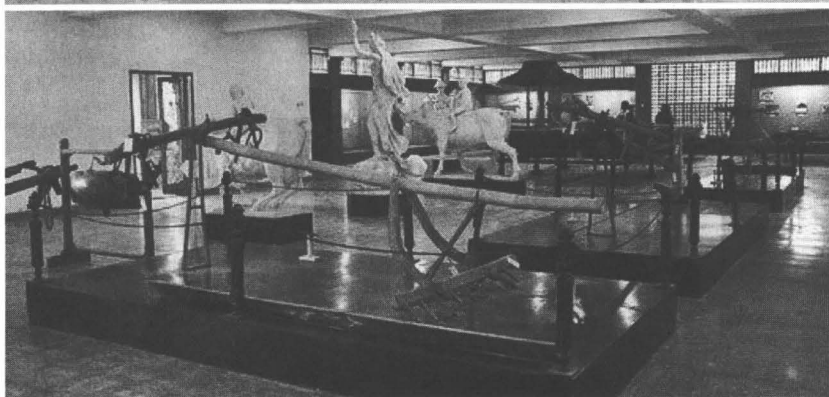
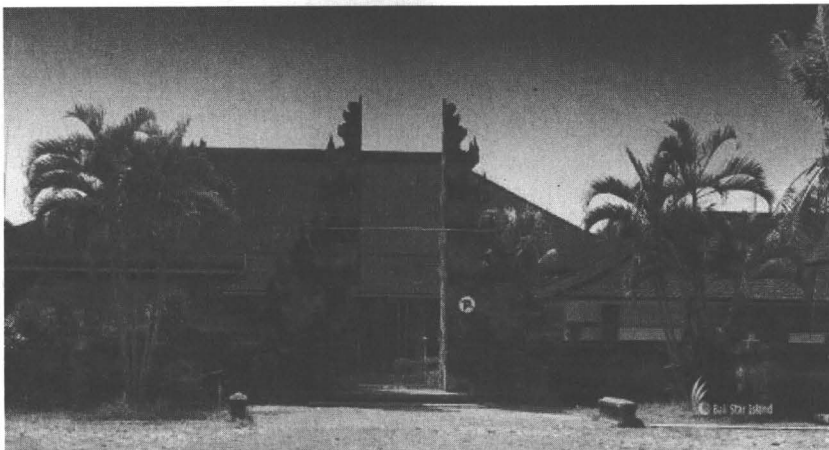
Atas: *Symposium Internasional "The Cultural Self-comprehension of Nations. Di Innsbruck Austria, 27-29 Juli 1974. Keterangan dari kiri: Prof. Honorat Aguessy (Benin) Dr. Hisako Matsubara (Jepang) Prof. Ida Bagus Mantra (Indonesia), Dr. O. Sanda (Nigeria) Dr. A. Rahman (India). Bawah: Dalam sebuah seminar di Monash University di Australia .*



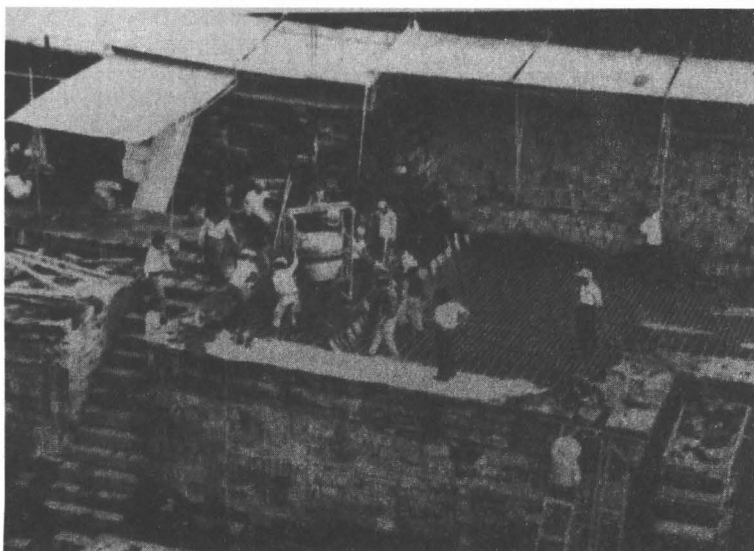
Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra ketika meresmikan Sasana Budaya Pura Besakih 1977.



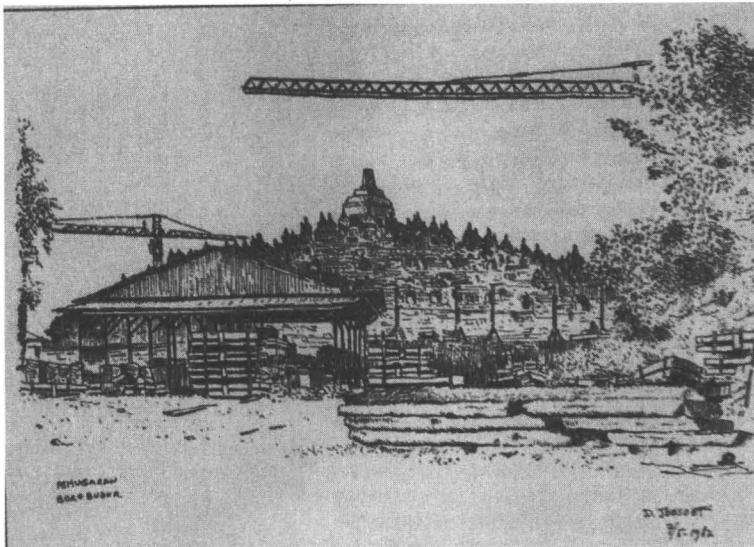
Salah satu dari realisasi gagasan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, ialah Taman Budaya atau Art Centre Bali



Atas: Gedung Museum Subak di Tabanan Bali, sebelumnya adalah gedung Sasana Budaya yang dibangun atas gagasan Prof. IB Mantra.
 Bawah: tata pameran Museum Subak, Bali yang diresmikan oleh Prof. IB Mantra 1981



Kesibukan pemugaran candi Borobudur. (Sumber: 100 Tahun Pascapemugaran candi Borobudur)



Atas: Di sela-sela kesibukannya, sebagai Mendikbud Prof. Dr. Daed Joesoef sebagai pelukis sempat membuat sketsa pemugaran candi Borobudur. .Bawah: Di sela-sela kunjungannya, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra ikut larut dalam acara Pesta Kebudayaan Bali. 1979



Prof. Dr. Ida Bagus Mantra bersama istri.

BAB VI

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO (1978-1988)

Pada 1977 diselenggarakan Pemilu III, dan yang terpilih sebagai presiden adalah Soeharto dan wakil presiden adalah Adam Malik. Pada 29 Maret 1978 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan III (1978-1983), dan yang ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dr. Daoed Joesoef. dilantik pada 29 Maret

1978. Selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoef melancarkan pandangan baru yang amat menyegarkan bagi kalangan kebudayaan. Pandangan yang menyatakan bahwa “pendidikan adalah bagian dari kebudayaan”, dapat diartikan sebagai sebuah koreksi terhadap pemosisian hubungan antara kebudayaan dan pendidikan dan sebaliknya.



Prof. Dr. Haryati Soebadio

Dengan pandangan seperti itu Daoed Joesoef ingin meletakkan posisi kebudayaan secara benar. Untuk merealisasikan pendapatnya itu, Prof. Daoed didampingi Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Haryati Soebadio, dosen Universitas Indonesia, Jakarta, yang biasa dipanggil Nunuk dan nama samaran untuk karya novel dan cerpennya, Aryanti.

Prof. Dr. Haryati Soebadio (Prof. HS) menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan selama dua periode, 1978-1988.⁴ Ia dilahirkan pada tanggal 24 Juni 1928 di Jakarta, putri kedua dari tiga bersaudara yang semuanya wanita dari keluarga Noto Soebadio, seorang Sarjana Hukum lulusan Rijks Universiteit Leiden. Prof. HS mendapat pendidikan *Europeese Lagere School* (ELS) di Madiun dan Jakarta 1940, SMP Jakarta dan SMA Jakarta lulus tahun 1946. Untuk pendidikan lanjutan HS memilih bidang sastra Sansekerta dan Jawa Kuno di *Gemeentelijke Universiteit Amsterdam* mengambil jurusan *Indo-Iraanse taal en Letterkunde* di Belanda. Ia lulus tahun 1956 dan berhak menyandang gelar Sarjana Sastra. HS lalu pulang ke Indonesia dan menjadi dosen di Fakultas Sastra UI. Tahun 1969, ia kembali ke Amsterdam untuk mengambil program doktor.

Setelah pulang ke Indonesia, ia kembali ke kampus UI sebagai pengajar dan kemudian menjadi guru besar. Pada tanggal 29 April 1975 Dr. Ny. Haryati Soebadio terpilih

⁴ Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Drs. Bastomi Ervan, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1978-1988, dan kemudian dilanjutkan saat Drs. GBPH Poeger menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan sampai dengan 1993..

sebagai Dekan Fakultas Sastra UI menggantikan Dr. Harsya W Bachtiar. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 1978-1988, ia diangkat sebagai Direktur Jendral Kebudayaan. Di kalangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai birokrat HS dikenal sebagai pejabat yang lincah, tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Ia menguasai beberapa bahasa sing, seperti Inggris, Prancis, Belanda dan Jerman, ditambah bahasa Sansekerta.

Aktivitas kesehariannya tidak hanya pada membaca buku-buku yang berbau kuno, namun juga buku-buku wanita kriminal karangan Agatha Christie, Hero Wolf dan Dorothy Sayere. Sebagai dosen telah menghasilkan beberapa karya ilmiah, antara lain *Art of Indonesia* (1992) *Dynamics of Indonesian History* (1985). Jnanasidhanta (1971) *Geschiedenis van Indonesie: Land, Volk en Cultuur* (1998).

Di samping menulis karya ilmiah dengan keahlian di bidang sosial-budaya, khususnya sejarah dan filologi, Prof. HS juga "sebagai Manggala I Penataran P4". Ia juga juga menulis novel. Dalam penulisan novel, HS pernah memenangkan Hadiah Pertama dari Sayembara Majalah Femina tahun 1977 dengan judul novelnya *Selembut Bunga* dengan nama samaran Aryanti. Karya lainnya, *Dunia Tak Berhenti Berputar* mendapat hadiah harapan tahun 1976. Karya yang lain *Hidup Perlu Akar* (1981), *Kartini Pribadi Mandiri* (1990) dan *Getaran-getaran* (1990).

Novel *Getaran-getaran*, merupakan cerita yang mengupas masalah mistis dan paranormal. Dalam novel itu Mahrani Juwita (Rani) seorang wanita muda yang baru ditinggal suaminya yang meninggal mendadak. Beberapa

orang menganggap rumah tempat tinggalnya dihuni makhluk halus yang menurut paranormal adalah arwah isteri pertama suaminya yang telah meninggal dengan cara bunuh diri. Karena arwah isterinyalah akhirnya suami itu meninggal.

Dalam buku “Angkatan 2000 Sastra Indonesia” karya Korrie Layun Rampan (Grasindo, 2000) terdapat 17 pengarang perempuan dari 78 pengarang, sementara pengarang laki-lakinya sebanyak 61 orang. Dalam hal ini kehadiran HS sebagai penulis novel ikut menyumbang jumlah pengarang perempuan di Indonesia. Prof. Dr. Haryati Soebadio yang mantan Dirjen Kebudayaan Dikbud dan mantan Menteri Sosial Kabinet Pembangunan V serta anggota MPR-RI (1988–1993), digolongkan sebagai merepresentasikan pengarang dari pejabat publik.

Prof. Dr. HS ditunjuk menjadi Menteri Sosial untuk periode 1988-1992. Mantan Menteri Sosial (1988-1993) meninggal dunia pukul 07.30 WIB Senin, tanggal 30 April 1999 di rumah kediamannya di Perumahan Bukit Pratama 1 No. B 4-5 Jln. H. Sijan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Prof. HS wafat dalam usia 80 tahun meninggalkan dua orang anak, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta. Menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung periode 1993-1996, Dekan Fakultas Sastra UI, mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Prof. HS pernah mendapat penghargaan Knight Commanders Cross dari Republik Federasi Jerman dan Bintang Mahaputra Adipradana (1992)

Direktur Jenderal Kebudayaan III (1978-1988)

Prof. Dr. Haryati Soebadio menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan III selama dua periode, mulai 1978-1983 diteruskan masa 1983-1988. Sebagai Menteri P dan K adalah Dr. Daoed Joesoef. Sebagai Mendikbud Dr. Daoed Joesoef mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan dan kebudayaan. Bahkan beliau adalah Mendikbud yang meletakkan pandangan yang amat strategis bagi kebudayaan dalam kaitannya dengan pendidikan.

Di dalam uraian yang dituangkan dalam judul “Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan”, Daoed Joesoef menyampaikan pandangan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan kebudayaan pada hakikatnya merupakan *“rangkaian aksi kebudayaan yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis”*. Pengembangan kebudayaan juga sebagai usaha sadar untuk memelihara, menghidupkan, memperkaya, membina, menyebarkan dan memanfaatkan segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran, kemauan serta perasaan manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, untuk dihayati, diresapi dan dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat.” (Prof. Mr. Munadjat Danusaputro, 1983: hal. 245)

Selain itu, Daoed Joesoef juga meluruskan pola pikir tentang hubungan antara kebudayaan dan pendidikan dengan menyatakan bahwa “pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan”, dan bukan sebaliknya seolah-olah kebudayaan menjadi bagian dari pendidikan. Untuk merea-

lisasikan pandangan itu pada 1981 dikembangkan suatu gerakan Sekolah sebagai Pusat Kebudayaan. Melalui gerakan ini pendidikan sebagai bagian kebudayaan harus mampu membawa peserta didik menuju ke arah peradaban bangsa, karena peradaban dinilai lebih tinggi daripada kebudayaan.

Dalam hubungan dengan hal ini diharapkan sekolah dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya, baik secara fisik maupun spiritual bagi pendorongan suatu kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Di dalam "Sekolah Sebagai Pusat Kebudayaan" dikembangkan kegiatan: (1) pengembangan logika; (2) pengembangan etika; (3) pengembangan estetika; dan (4) pengembangan praktika. (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1981:hal. 4)

Setelah masa jabatan Dr. Daoed Joesoef berakhir tahun 1983, beliau digantikan oleh Prof. Dr. Nugroho Notosoesanto (dilantik 19 Maret 1983). Dr. Nugroho dikenal sebagai menteri yang meletakkan konsep wawasan almater, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, dan Pendidikan Humaniora, Program Wajib Belajar 6 Tahun, dan Orang Tua Asuh. Pada 1985 beliau wafat kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Fuad Hassan, menjabat dari 1985-1993. Prof. Fuad banyak dikenal masyarakat sebagai seorang psikolog, seniman (pemain biola dan pelukis) dan budayawan. Selama menjabat beliau banyak memberikan perhatian terhadap bidang kebudayaan. Banyak kegiatan kebudayaan yang digagas dan dikembangkan beliau dan masih berlangsung hingga kini.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan 1978-1988, Prof. HS dikenal sebagai pejabat yang lincah, tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Selain itu Prof. HS banyak melahirkan ide-ide baru, juga melanjutkan program yang telah diletakkan oleh pendahulunya, RM Indrosoegondo dan Prof. Dr. IB Mantra.

Gambaran sekilas tentang konsep, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

Penyempurnaan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan

Setelah Prof. HS menjabat, langkah pertama yang dilakukan adalah menyelenggarakan seminar membahas kebijakan pembangunan kebudayaan. Bertolak dari Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia", amanat dari kata "memajukan" disepakati untuk diartikan sebagai langkah untuk melakukan kegiatan yang bersifat "pembinaan" dan "pengembangan". Langkah "pembinaan" lebih diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia bidang kebudayaan. Sementara itu langkah "pengembangan" diarahkan pada upaya peningkatan dan pemajuan unsur-unsur kebudayaan, seperti bahasa, kesenian, kepurbakalaan, nilai-nilai budaya dll.

Bertolak dari hasil seminar tersebut maka lahirlah *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan*, versi 1973) diganti menjadi *Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan* versi

1980. Unsur kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah (1) bidang kemasarakatan, yang sasarannya diarahkan pada penanaman kesadaran berbangsa, pengukuhan jati diri dan pendorongan tumbuhnya kebanggaan nasional; (2) bidang bahasa; (3) bidang kesenian; (4) bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (5) bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang sasarannya diarahkan pada mengisi peran pendidikan dalam proses pembudayaan serta peningkatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. (*Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1980*).

Pada 1986 Pokok-Pokok Kebijakan versi 1980 diperbaiki lagi, lalu dihasilkan kebijakan baru menjadi versi 1986. Kebijakan itu dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0151/F1.IV/ N.86 tanggal 15 Maret 1986, dan judulnya berubah menjadi Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur yang ditangani mencakup (1) kepurbakalaan; (2) kesejarahan; (3) nilai tradisional; (4) kesenian; (5) kebahasaan dan kesastraan; (6) penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (7) permuseuman; dan (8) perpustakaan dan perbukuan. (*Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1986*).

Kedelapan unsur kebudayaan itulah yang diterima sebagai "definisi kerja" bagi keberadaan kelembagaan kebudayaan di pemerintahan hingga kini. Dalam hal pena-

nganannya tidak seluruh unsur itu berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pembangunan kebudayaan yang dituangkan ke dalam Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut dijadikan dokumen dari Indonesia untuk memenuhi permintaan Unesco. Pokok-pokok kebijakan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *"Cultural Policy in Indonesia"* untuk masukan UNESCO.

Melanjutkan proyek Wisma Seni Nasional

Dalam perkembangan selanjutnya, tahun 1979 diselenggarakan seminar tentang WSN dan dari seminar ini disimpulkan untuk meninjau ulang (menyederhanakan) rencana bangunan yang telah ada. Tahun 1982 PT Arsiplan Bandung menyelesaikan tugas membuat Master Plan, gambar dan Maket WSN yang baru. Pada masa jabatan Prof. HS dilihat dari sisi persiapan, dalam hal ini mengenai rencana pengadaan tanah, gambar desain, koleksi yang akan dijadikan bahan pameran hasilnya dapat dikatakan sudah memadai. Tetapi ketika berbicara tentang pelaksanaan (realisasi) dalam bentuk penyediaan anggaran pembangunannya, proyek ini menjadi seperti bermain layang-layang. Kadang-kadang benang dilepas sehingga layang-layang menari-nari mengangkasa. Tetapi suatu ketika benangnya ditarik habis sehingga layang-layang itu tiarap di bumi. Karena alasan terbatasnya anggaran, maka proyek itu dinilai *tidak penting*, sehingga pada tahun anggaran 1984/1985 proyek ini dihapuskan dari daftar proyek.

Sesuai arahan Mendikbud, Prof. Dr. Fuad Hassan, lanjutan pembangunan difokuskan pada pembenahan aset yang telah ada untuk dapat difungsikan bagi kepentingan kebudayaan. Aset lahan dan bangunan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 berupa Aula direhabilitasi dan ditata lingkungannya. Pada tanggal 23 Februari 1987, dengan berbekal aset lahan dan bangunan yang ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, meresmikan berdirinya “Gedung Pameran Seni Rupa” Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah gedung berfungsi selama 10 tahun, pada tahun 1998 statusnya dapat ditingkatkan menjadi sebuah Galeri Nasional. Kini, Galeri Nasional telah menjadi sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang dapat dijadikan *‘pelipurlara’* bagi seniman dan budayawan yang telah lama memimpikan hadirnya Wisma Seni Nasional.

Kerja sama dengan Departemen Penerangan

Mengapa kerja sama dengan Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film (Ditjen RTF itu penting? Departemen Penerangan yang membawahkan Radio Republik Indonesia (RRI) dengan stasiun-stasiun radio di berbagai tempat, sejak awal kemerdekaan telah berperan dalam membangun pemahaman budaya bangsa di samping membangun persatuan bangsa dan pengembangan kesadaran politik bagi para pendengarnya. Dalam menanamkan pemahaman budaya, RRI tidak hanya sebatas menyiarkan khasanah budaya tradisi (ketoprak, wayang kulit, drama modern, wayang orang, makyong, lenong, dll) tetapi juga dalam konteks pembentukan budaya Indonesia baru. RRI (Ja-

karta) mempunyai kelompok musik sendiri dengan pemain-pemain yang terpilih. Melalui siaran RRI, kebudayaan masing-masing suku bangsa diperkenalkan sehingga masyarakat mengenal, memahami dan mencintai keanekaragaman budaya bangsa. Salah satu acara yang disiarkan dengan tujuan itu adalah Bentara Musik Nusantara yang diasuh oleh B. Suryabrata, berisi contoh musik berbagai daerah di Indonesia disertai penjelasan mengenai karakteristik musikalnya masing-masing.

Selain itu secara nasional RRI menyiarkan acara kebudayaan yang mengarah pada pembentukan karya seni yang menjunjung standar mutu, seperti dengan pemilihan Bintang Radio, untuk jenis-jenis musik Langgam, Keroncong, dan Seriosa. Di bidang sastra Indonesia baru beserta perkembangannya, disiarkan melalui mata acara "Mutu Ilmu dan Seni". Singkatnya, melalui radio berbagai sistem nilai budaya bangsa dan peristiwa budaya dengan cepat dapat disebarluaskan ke seluruh masyarakat.

Tahun 1962 berdiri lembaga penyiaran pandang-dengar (*audio-visual*) yang disebut televisi (tv) dengan nama Televisi Republik Indonesia (TVRI). Berbagai siaran kebudayaan melalui radio yang sebelumnya hanya dapat dinikmati suaranya, kini ditambah dengan gambar bergerak, sehingga informasi itu menjadi semakin lengkap dan menarik. Berbagai acara kebudayaan (sekitar 40%) digelar seperti Aneka Safari, Bhinneka Tunggal Ika, Drama modern, Komedi, Lawak (Sri Mulat, Reog BKAK), Lenong yang dimotori oleh Sumantri Sastrosuwondo, musik Chandra Kirana, dan masih banyak lagi. Meskipun daya jangkauannya tidak seluas siaran radio, tetapi kehadiran tv

telah memberi peluang berbagai acara budaya dapat disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Atas pertimbangan itulah Prof. Mantra dan Drs. Sumadi Dirjen RTF periode 1973-1983 menyiapkan MoU tentang penyebarluasan kebudayaan melalui radio dan tv.

Rintisan Prof. IB Mantra itu dilanjutkan dan direalisasikan oleh penggantinya, Prof. Dr. Haryati Soebadio. Penandatanganan naskah kerja sama antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Direktorat Jnderal Radio, Televisi dan Film tanggal 14 Desember 1979 No. 029/A.I/1979 dan No. 18/KEP/DIRJEN/RTF/1979 antara Prof. Dr. Haryati Soebadio dengan Drs. R. Soemadi. Dari Keputusan Bersama itu melahirkan Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional disingkat TKPPKN yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari kedua lembaga.

Tim ini secara periodik bertemu untuk mengevaluasi dan mengembangkan program dan materi siaran. Selain itu juga dibentuk tim kerja yang tugasnya mengolah bahan siaran baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman suara dan film, dengan nama Tim Koordinasi Siaran, disingkat TKS. Anggota Tim juga terdiri atas wakil-wakil kedua lembaga. TKS banyak menghasilkan tulisan dan rekaman. Hasil TKS dalam bentuk tulisan telah dibukukan dengan judul "Khasanah Budaya" secara berseri. Sementara itu dalam bentuk rekaman film telah dihasilkan antara lain film-film berjudul: Pembuatan Keris, Pembuatan Gamelan, Upacara Eka Dasa Ludra, Upacara Sekaten, Tabot, Makepung, Makyong, Upacara adat Dayak, Nias, Seren Tahun, Karapan Sapi, berbagai tarian dan masih banyak lagi.

Berbagai produk itu dibuat sendiri oleh tenaga profesional dari kedua lembaga.

Melalui MOU, terajut hubungan saling memberi dan saling menerima antara kebudayaan dan penerangan dan sebaliknya. Sayang kerja sama yang dirintis Drs.Sumadi harus berakhir bersamaan dengan pembubaran Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak salah bila Sophan Sophian (almarhum) sebagai anggota DPR memprotes keputusan itu, karena Departemen Penerangan mempunyai arti historis dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Ketika itu Gus Dur menjawab singkat: "prèk dengan sejarah!" (Nunus Supardi/Koordinator Penulisan, 2004: hal. 60).

Penataan Pertunjukan Kesenian dan Hiburan

Pembentukan KPP Kesenian dan Hiburan pada masa jabatan Prof. IGBM masih dilanjutkan pada masa jabatan Prof. HS. Tahun 1980 Kepmendikbud Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 168/P/ 1976 tentang pembentukan Komisi Peneliti dan Penilaian (KPP) Kegiatan Kesenian/Hiburan disempurnakan, diganti dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10/P/ 1980 tentang Penyempurnaan KEPMEN No. 168/P/1976 Pembentukan Komisi Peneliti dan Penilai Kegiatan Kesenian dan Hiburan Dalam Rangka Hubungan Luar Negeri.

Tahun 1983 Kepmen di atas diganti lagi dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0599/U/1983, sebagai pengganti KEPMEN No. 10/P/1980 yang tujuannya untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan

instansi-instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam pelayanan, penanganan dan pengendalian terhadap kegiatan kesenian dan hiburan baik dari luar maupun antardaerah/provinsi. Tahun 1983, sebelum Prof. HS mengakhiri masa tahap I, ditetapkan Kepmendikbud Kepmendikbud No. 10/P/1980 diganti lagi dengan Kepmendikbud yang baru, No. 0599/U/1983.

Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pariwisata

Pada masa jabatan Prof. Dr. Haryati Soebadio (1978-1988) dilanjutkan rintisan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pariwisata yang dirintis oleh Prof. IB Mantra dengan menyelenggarakan seminar di Hotel Sanur Beach Bali, 1978. Tahun 1980 ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Prof. Dr. Haryati Soebadio) dan Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Ahmad Tirtosudiro). Berdasarkan MoU tersebut dibentuklah Komisi Kerja sama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Kebudayaan (KKPP Wisata Budaya), yang anggota berdiri atas wakil kedua direktorat jenderal.

Dalam memasuki 1993 kerja sama untuk pengurusan kebudayaan dan pariwisata ditingkatkan dengan memasukkan Departemen Dalam Negeri ke dalam anggota Komisi setelah penandatanganan MoU antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi serta Menteri Dalam Negeri di Palembang. Selama hampir lima belas tahun Komisi itu berjalan dengan baik. Komisi menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi

secara rutin dan rapat kerja tahunan yang dihadiri pula oleh para kepala kantor wilayah kedua departemen. Segala gesekan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik melalui rapat Komisi. Tetapi setelah tahun 1995 kerja sama antara kedua direktorat jenderal itu mulai retak.

Merintis penyusunan Rancangan UU tentang Kebudayaan

Ditjenbud merintis Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kebudayaan. Draf Naskah Akademik dan RUU tentang Kebudayaan pada 1985 mulai dirintis penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Bersamaan dengan itu, bidang kebudayaan juga berinisiatif untuk menyusun RUU tentang kebudayaan. Untuk menyiapkan penyusunan RUU tersebut bidang pendidikan membentuk TIM untuk menyusun Naskah Akademik dan draf RUU.

Demikian pula halnya untuk bidang kebudayaan. Penyusunan Naskah Akademik ditangani oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Dikbud). Seperti dinyatakan oleh Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, Kepala Balitbang Dikbud dan sekaligus sebagai Ketua TIM, bahwa tugas dari Balitbang Dikbud *"...menghasilkan naskah-naskah akademik yang dapat dijadikan landasan dalam penentuan Pimpinan Departemen, baik dalam bentuk keputusan, peraturan (atau rancangan peraturan), atau pun rencana pengembangan"*.

Pada masa jabatan Prof. HS, mulai dirintis penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan.

Untuk mewujudkan kehendak tersebut, penyusunan Naskah Akademik dikerjakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BALITBANG DIBUD). Setelah melalui beberapa kali rapat yang dipimpin oleh sebuah Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan Nasional yang dipimpin oleh Prof. Dr. Harsja Bachtiar, dan sekretaris Dra. Rudjiati Muljadi, pada tanggal 25 September 1985 Naskah Akademik selesai disusun.

Pada masa jabatan juga dirintis penggantian *Monumenten Ordonnantie* (MO) Stbl. 238 tahun 1931 buatan Belanda yang dinilai sudah tidak sesuai dengan lagi dengan perkembangan zaman. Mulai tahun 1985 dibentuk TIM untuk melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Benda Cagar Budaya sebagai pengganti MO Stbl. 238 tahun 1931, yang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman beserta Naskah Akademiknya

Kerja sama ASEAN

Selain membangun kerja sama antara kedua dirjen untuk memajukan kebudayaan bangsa, juga membangun kerja sama dalam menghadapi kerja sama regional ASEAN. Kerja sama kebudayaan dengan negara-negara Asean Direktorat Jenderal Kebudayaan mulai aktif menyiapkan pelaksanaan kegiatan kebudayaan Asean yang diwadahi dalam *Asean Committee on Culture and Information* (Asean COCI) dan *Seameo Project on Archaeology and Fine Art* (SPAFA). SEAMEO (*South East Asia Ministry of Education Organization*) adalah forum pertemuan para Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Negara-negara anggota Asean. Masih dalam rangka kerja sama, pada 1986 diselenggarakan Festival Gamelan Internasional pertama di Expo 86 Vancouver Canada. Pada tahun yang sama dikirim Perutusan Kesenian ke Belanda dan Jerman untuk memperkenalkan kekayaan dan keanekaragaman budaya bangsa.

Untuk mewujudkan program kerja sama ASEAN, Prof. Haryati bersama Drs. Sumadi aktif menghadiri sidang-sidang *Asean Committe on Culture and Information (ASEAN COCI)*. Komisi ini merupakan wadah kerja sama kebudayaan dan penerangan di kawasan Asean. Komisi ini dipecah menjadi dua yaitu Subkomisi Kebudayaan dan Subkomisi Penerangan. Untuk Indonesia masing-masing Subkomisi dipimpin oleh Prof. Haryati dan Bapak Sumadi.

Pemugaran Candi Borobudur

Melanjutkan rintisan persiapan pemugaran Candi Borobudur, Prof. HS banyak melakukan kampanye pengumpulan dana yang dikoordinasikan oleh Unesco. Kegiatan itu antara lain dengan menyelenggarakan pameran dengan judul *"The Exhibition of the Ancient Indonesia Art - Candi Borobudur and Its Environs"*, di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang antara 1980-1981. Dalam rangka melindungi benda cagar budaya bangsa meskipun telah ada undang-undang produk Belanda *Monumenten Ordonnantie* dan dilengkapi dengan berbagai peraturan, tindak pelanggaran semakin meningkat. Pemugaran candi Borobudur yang menjadi proyek berskala internasional itu dikoordinasikan oleh

UNESCO di bawah koodinator pelaksana Prof. Dr. R. Soekmono dimulai 1973 dan diresmikan pada tahun 1983.

Kongres Bahasa Indonesia III

Untuk lebih memantapkan kebijakan kebahasaan dan kesastraan, pada tahun 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III, 24 tahun setelah Kongres Bahasa Indonesia 1954 di Surakarta. Di samping itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen P dan K dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Seminar Pengembangan Kebudayaan Nasional pada tanggal 17-20 Juli 1978. Dari seminar itu dihasilkan rumusan sebagai berikut: (1) Titik sentral pembangunan nasional adalah manusia Indonesia.

Oleh karena itu pendekatan kultural dalam pembangunan nasional merupakan keharusan apabila pembangunan itu bertujuan mengangkat martabat manusia Indonesia sesuai dengan aspirasi Pancasila; (2) Segenap usaha pembangunan nasional seyogyanya dilaksanakan berdasarkan Pancasila; (3) Mendorong laju proses integrasi nasional untuk mencapai identitas nasional yang berlaku bagi setiap manusia Indonesia; (4) Perlu dikembangkan sifat-sifat kritis, kreatif dan inovatif yang dilandasi oleh kewiraswastaan yang tangguh, kepribadian yang utuh dan mantap untuk menghadapi segenap tantangan dari dalam dan luar; (5) Memupuk solidaritas sosial dan membangkitkan kemampuan swadaya masyarakat. (Pengembangan Kebudayaan Nasional, Risalah Hasil Seminar LIPI, 1978, hal. 12-13).

Pemindahan Unit Perpustakaan dari Museum Nasional, 1988

Pada 1778, sejumlah ilmuwan Belanda mendirikan lembaga penelitian yang diberi nama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW). Selain melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kesenian, sesuai dengan Anggaran Dasar, BGKW juga memelihara museum dan perpustakaan. Setelah Indonesia merdeka, BGKW berubah menjadi Museum Nasional, dan Unit Perpustakaan menjadi bagian dari Museum Nasional. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia juga ingin memiliki sebuah Perpustakaan Nasional sebagaimana yang ada di berbagai negara. Dalam rangka mewujudkan keinginan itu di dalam Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahun 1961-1969, telah dimasukkan program pendirian sebuah Perpustakaan Nasional.

Persiapan pendirian Perpustakaan Nasional itu dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0990/ F1.IV/D/88, tanggal 20 Desember 1988, tentang pemindahan unit Perpustakaan Museum Nasional beserta semua koleksi berupa buku-buku dan Naskah Kuno yang dihimpun sejak berdirinya BGKW. Di dalam proses pemindahan itu dalam butir 1 keputusan dinyatakan: "*Memindahkan penyimpanan koleksi naskah kuno yang semula merupakan bagian dari perpustakaan Lembaga Kebudayaan Indonesia (Museum Nasional sekarang) ke Perpustakaan Nasional*".

Uniknya, pada saat itu unit organisasi Perpustakaan Nasional sendiri belum terbentuk, sehingga dalam penyerahan itu dijelaskan sbb.: *"Hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan koleksi naskah kuno tersebut pasal 'Pertama' sejak diserahkannya ke Perpustakaan Nasional tetap ditangani oleh staf Museum Nasional sampai organisasi Perpustakaan Nasional yang baru terbentuk"*. Untuk sementara, kantor Perpustakaan Nasional ditempatkan di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta, yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pembangunan gedung Perpustakaan Nasional dapat terwujud berkat bantuan Presiden Suharto dan besarnya perhatian Ibu Tien Suharto.

Membidani lahirnya Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud

Setelah segala upaya untuk melanjutkan pembangunan Wisma Seni Nasional mengalami jalan buntu karena kendala anggaran, pada akhirnya diputuskan oleh Mendikbud Prof. Dr. Fuad Hassan untuk merenovasi Aula yang ada di Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 untuk dimanfaatkan sebagai gedung pameran seni rupa. Mulai tahun 1986 dilakukan pemugaran secara bertahap gedung Induk.

Untuk merealisasikan keputusan itu penulis sebagai mendapat perintah dari Prof. Fuad, yaitu untuk mengecek keadaan kantor salah satu calon pemborong. Setelah hasilnya penulis laporkan, Prof. Fuad langsung memutuskan PT Dela Rohita pimpinan Guntur Sukarnoputra yang ditunjuk. Dengan keputusan itu pada awalnya Prof. HS sempat menyampaikan ketidaksetujuannya. Pada saat

itu untuk hal-hal yang bersentuhan dengan keluarga Bung Karno cenderung sering dihindari karena dikhawatirkan akan mengundang masalah. Tetapi Prof. Fuad tetap pada keputusannya.

Hasil renovasi Aula itu oleh Mendikbud, Prof. Dr. Fuad Hassan ditetapkan menjadi “Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud” disingkat GPSR DEPDIBUD. Selama sebelas tahun (1987-1998), menjadi tempat untuk menampung berbagai pameran seni rupa karya seniman Indonesia dan asing. Bahkan pada 1995 digunakan untuk tempat “Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Non-Blok”. Pameran yang diikuti oleh 41 negara anggota itu merupakan pameran pertama dari sejarah perjalanan organisasi Non-Blok.

Peresmian Pemugaran Candi Borobudur

Proyek besar di bidang pemugaran yang perlu disebutkan di sini ialah kelanjutan dan penyelesaian pemugaran Candi Borobudur yang dilaksanakan dengan bantuan dari negara-negara asing melalui UNESCO. Proyek itu dimulai sewaktu Direktur Jenderal Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, sehingga ketika Prof. HS menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan, pemugaran sudah mendekati penyelesaian. Dalam hal ini Prof. HS tidak lagi menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kerja sama dengan negara-negara donor. Pembicaraan pendahuluan dengan UNESCO ataupun membuat keputusan mengenai jenis bantuan dan cara penanganannya dengan

kontraktor gabungan Filipina-Indonesia telah diselesaikan oleh Prof. IB Mantra.

Meskipun demikian bukan berarti Prof. HS tidak menghadapi masalah. Dalam hal pekerjaan lanjutan dan penyelesaian masih banyak masalah yang harus ditangani, termasuk pengusutan laporan finansial, yang waktu itu justru menimbulkan beda pandangan. Bahkan sempat terjadi sedikit ketegangan antara panitia nasional dengan wakil UNESCO. Pemugaran dinyatakan selesai, dan masih dalam masa jabatan Prof. HS, purnapugar diresmikan oleh Presiden Suharto, dihadiri oleh Direktur UNESCO, wakil dari negara-negara donor, dan sejumlah tokoh penting pada 23 Februari 1983 yang ditandai dengan penandatanganan prasasti pada sebangkah batu yang antara lain bertuliskan nama-nama negara dan perusahaan swasta yang menyumbang dana pemugaran.

Perintis berdirinya Taman Purbakala Borobudur

Setelah hasil pemugaran diresmikan langkah berikutnya adalah penataan lingkungan candi yang direncanakan dalam bentuk taman. Proses pembangunan taman tidak kalah rumitnya dengan proses pemugaran candi. Itu berarti harus dilakukan Sebagaimana diketahui di sekeliling candi telah berubah menjadi sebuah kompleks hunian penduduk. Tidak ada cara lain selain harus memindahkan (merelokasi) sejumlah rumah penduduk dan segala bangunan pendukung termasuk masjid. Masalah besarnya ganti rugi pembebasan tanah menjadi isu utama, sehingga sempat muncul penolakan terhadap pembuatan taman.

Sampai dengan masa akhir jabatan Prof. HS, gejolak ketidakpuasan penduduk masih saja muncul. Tetapi berkat pendekatan yang baik, terutama oleh H. Budihardjo sebagai putra Borobudur (dari desa Tingal) semua gejolak itu akhirnya dapat dengan baik. Masalah itu sempat mendapat sorotan dari berbagai pihak di dalam maupun luar negeri. Media massa dan surat-surat protes dari dalam dan luar negeri gencar membicarakan masalah tanah dan kerugian penduduk di sekitar candi, yang dinilai akan kehilangan nafkah.

Giliran berikutnya yang dilakukan oleh Prof. HS adalah menyiapkan dokumen untuk penetapan status kelembagaan untuk mengurus situs kawasan Borobudur. Dalam beberapa kali pembahasan disepakati untuk menjadikan kawasan itu Taman Purbakala, dan ada yang mengusulkan nama Taman Arkeologi (*Archaeological Park*). Dengan pilihan nama seperti itu akan mewadahi dua kepentingan, yaitu untuk menjaga kelestarian kawasan melalui pemeliharaan, perawatan, pengembangan dan perlindungan, di sisi untuk pemanfaatan kawasan candi menjadi tujuan pariwisata. Tahun 1992, empat tahun setelah Prof. HS tidak lagi menjabat sebagai Dirjenbud keluarlah Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur. Bukan "Taman Purbakala Borobudur".

Penanganan Bom di Borobudur

Kejadian yang cukup menggemparkan waktu Prof. HS menjabat Dirjenbud adalah pengeboman candi Borobudur 21 Januari 1985. Sembilan stupa dan patung Budha

peninggalan dinasti Syailendra itu hancur karena ledakan-nya cukup dahsyat.

Setelah kasusnya diselesaikan, pemugaran kembali dilaksanakan pada bagian yang rusak, sehingga sama sekali tidak terlihat lagi mana yang pernah rusak. Peresmian perbaikan pascabom dilaksanakan secara sederhana dan bersamaan dengan acara itu diserahkan bantuan alat pengaman elektronika dari Departemen Perhubungan. Selain ledakan bom, pernah terjadi pula musibah “kecil” yaitu petir yang menyambat stupa utama dan seorang petugas terkena sambaran petir sampai terjatuh dari tangga.

Pemugaran Masjid Demak, 1987

Pemugaran Masjid Demak termasuk yang sangat penting pula. Proyek itu semula hendak dilaksanakan dengan bantuan luar negeri, dalam hal ini negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Namun dana terbesar akhirnya berasal dari Bantuan Presiden. Dana pemugaran dari APBN menyusul belakangan, sedangkan OKI hanya membantu sekadarnya, yaitu yang berwujud nasihat arkeolog yang didatangkan sebagai peninjau dari Turki.

Masjid Demak termasuk masjid kuno di Indonesia. Masjid itu tetap berfungsi dari awal sampai sekarang sesuai dengan maksud pembangunannya, yaitu sebagai masjid. Dengan demikian menurut pandangan pemugaran arkeologi, masjid itu tergolongkan “monumen hidup”, yaitu cagar budaya yang tidak pernah berubah fungsi atau ditinggalkan

sesuai fungsinya pada saat dinyatakan sebagai “monumen”. Hal itu berbeda dengan bangunan candi seperti pada candi-candi di Jawa atau Sumatera, fungsi asli sudah lama ditinggalkan ketika bangunan itu ditetapkan sebagai “monumen” atau bangunan cagar budaya. Oleh sebab itu pelaksanaan pemugaran Masjid Demak harus sesuai dengan kaedah-kaedah arkeologi dan betul-betul diawasi agar pemugarannya tidak menyalahi keadaan aslinya..

Acara peresmian terjadi pada 1987. Waktu itu Prof. HS sebagai Dirjenbud mendapat tugas memberi laporan pendahuluan kepada Presiden di Masjid Demak pada saat istirahat sebelum upacara resmi dimulai. Pada saat memasuki kabupaten Demak, Presiden menanyakan perihal menara masjid. Menara yang ada di depan masjid bukan termasuk bangunan aslinya.

Masjid Demak, sebagaimana masjid yang dibangun pada abad ke-16, tidak pernah dilengkapi dengan menara, karena azan biasa diserukan dari atas atap. Menaranya baru dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar 1924. Dapat ditambahkan lagi bahwa kaki menara yang terbuat dari besi itu berasal dari kaki menara air Perusahaan Air Minum (PAM) zaman Belanda. Oleh karena itu menara bukan merupakan benda yang mesti dipertahankan, melainkan dapat dihilangkan, supaya masjid kembali pada bentuk aslinya. Menurut Prof. HS, Presiden tampak dapat menerima dan menyetujui pandangan seperti itu.

Pemugaran Benteng Vredenburg 1982

Tanggal 9 Agustus 1980 ditandatangani Surat Perjanjian antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Dr. Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam perjanjian itu disebutkan Benteng Vredenburg dapat dimanfaatkan. Tahun 1981 Benteng Vredenburg dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya dengan Kepmendikbud 0224/U/1981, tanggal 15 Juli 1981. Tahun 1984, oleh Nugroho Notosusanto ditetapkan sebagai museum perjuangan nasional. Kemendikbud Fuad Hassan No. 0475/O/1992 tanggal 23 November 1992 menjadikan Museum Khusus Perjuangan Nasional atau Museum Benteng Yogyakarta.

Proyek pemugaran bangunan bersejarah Benteng Vredenburg awalnya dibiayai dengan dana Bantuan Presiden (Banpres) Permohonan disampaikan oleh Mendikbud Dr. Daoed Joesoef, Menteri P dan K didampingi oleh Dirjenbud Prof. HS. Dalam rancangan semula, kompleks benteng akan dijadikan sejenis Taman Budaya, dengan kemungkinan diadakan pementasan seni. Idea itu dari awal ditentang oleh para sejarawan, karena dinilai akan merusak suasana. Benteng dianggap sebagai perwujudan perampasan kuasa dengan kekerasan oleh pihak asing. Maka, bila dipugar, perlu dijadikan tempat untuk memperlihatkan kenyataan penderitaan dan perlawanan bangsa kita.

Pelaksanaan pemugaran dari dana Banpres itu ditangani oleh Panitia dari Yogyakarta. Meskipun saat itu belum ada kejelasan mengenai fungsinya, tetapi Panitia

memutuskan untuk memulai pemugaran. Ternyata pelaksanaan pemugaran sempat dihentikan karena ada ketidakberesan dalam pertanggungjawaban keuangan. Masalahnya semakin hangat saat Nugroho Notosusanto menjadi Menteri P dan K. Akhirnya oleh Nugroho diputuskan untuk pelaksanaan pemugaran ditangani oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam operasional fungsinya. Diputuskan Benteng dijadikan museum perjuangan dan diisi dengan diorama yang menggambarkan perjuangan bangsa kita melawan kekuasaan asing. khususnya yang terjadi di wilayah Yogyakarta.

Pembangunan patung Proklamator

Dalam menyiapkan disain patung kedua proklamator ditentukan melalui sayembara. Hasilnya dipamerkan di Bina Graha guna dinilai oleh Presiden. Sebagai Dirjenbud Prof. HS pun hadir sebagai salah satu anggota tim juri dan tim pengarah pembangunan monumen, bersama-sama dengan Ismail Saleh, Sekretaris Kabinet (waktu itu), dan wakilnya, Moerdiono, serta Radinal Mochtar, yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya di Departemen Pekerjaan Umum.

Pembuatan patung diserahkan kepada dua pematung ulung dari Bandung dan Yogyakarta. Dengan begitu tim pengarah sewaktu-waktu ke Bandung dan Yogya untuk melihat perkembangan pembuatannya. Tim pengarah yang sama juga bertugas memberikan arahan pada pembangunan makam Bung Hatta. Disain bangunan dirancang oleh Presiden Soeharto sendiri, yang kemudian dibahas

bersama dengan keluarga Bung Hatta, termasuk dengan Wangsawijaya, sekretaris Bung Hatta.

Pembangunan Museum Monjali

Pembangunan Museum Monumen Yogya Kembali (Monjali) dirancang saat Prof. HS menjabat Dirjenbud dan penyelesaiannya pada saat menjabat Menteri Sosial. Waktu itu Prof HS duduk sebagai Tim Pengarah dan anggota Dewan Juri Sayembara. Pembangunan Monjali langsung mendapat arahan dari “tangan pertama”, Presiden Soeharto. Pak Harto adalah pelaku sejarah dalam perjuangannya merebut kemerdekaan melawan tentara kolonial di wilayah Yogyakarta dan terutama dalam Serangan 1 Maret 1949. Seperti diketahui terdapat beda pendapat di berbagai kalangan mengenai tanggal tanggal yang terkait. Namun menurut Prof. HS, informasi yang disampaikan oleh Presiden, didukung dengan data kongkrit.

Pemindahan Direktorat Pendidikan Kesenian ke Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah

Sejak berdirinya Jawatan Kebudayaan, terus diupayakan pendirian lembaga yang menangani masalah pendidikan kesenian sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan 1948 dan 1951 serta Konferensi Kebudayaan 1950. Lembaga pendidikan didirikan mulai dari pendidikan tingkat menengah hingga pendidikan tinggi. Lembaga itu adalah Sekolah Seni Rupa Indonesia, Sekolah Menengah Musik Indonesia, Sekolah Menengah Kerajinan Indonesia,

Akademi Seni Rupa Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, dan Konservatori Musik dan Tari di berbagai daerah.

Setelah Jawatan Kebudayaan berubah, pembinaan lembaga itu dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Pendidikan Kesenian. Pada 1975, berdasarkan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975, status Direktorat Pendidikan Kesenian dipindahkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lembaga pendidikan tingkat menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk lembaga pendidikan tingkat tinggi. Hal itu didasarkan pada kebijakan bahwa semua lembaga pendidikan yang ada di luar Departemen P dan K harus digabungkan (disatuatapkan). Pada saat itu pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan mengusulkan agar posisi lembaga pendidikan itu tetap berada di bawah naungan Direktorat Jenderal kebudayaan karena Direktorat Jenderal ini pada dasarnya masih satu atap di bawah Departemen P dan K.

Usul tersebut tidak disetujui dan sebagai gantinya dibentuk Direktorat *Pengembangan Kesenian*, di samping Direktorat *Pembinaan Kesenian* yang sudah dibentuk pada 1966. Dengan lahirnya dua direktorat ini, kegiatan kesenian menjadi tidak lancar karena kedua lembaga ini pada hakikatnya memiliki misi yang tidak banyak perbedaannya. Tumpang tindih tugas dan fungsi itu sangat dirasakan di daerah karena masyarakat beranggapan bahwa keduanya itu sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, mulai 1979 kedua direktorat itu disatukan menjadi Direktorat Kesenian

Dengan pindahanya lembaga pendidikan kesenian dari lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, “hubungan batin” yang berkaitan dengan masalah konseptual, teknis, dan substansial menjadi terputus. Masing-masing seperti berjalan sendiri-sendiri, sibuk menyelesaikan program dan proyeknya. Beberapa upaya untuk mendekatkan hubungan antara keduanya telah dilakukan, antara lain dalam bentuk penyusunan rencana dan program secara terpadu (Kepmendikbud No. 209 Tahun 1982 tentang Sistem Perencanaan Terpadu), Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu, pada 1986 dibentuk wadah yang disebut Konsorsium Ilmu Pengetahuan yang di dalamnya terdapat Konsorsium Sastra dan Seni, yang tugasnya membahas disiplin ilmu seni atas dasar kepakaran, kedudukan seni, dan kemampuan berkarya seni. Konsorsium tersebut kemudian berubah menjadi Komisi Disiplin Ilmu Seni yang di dalamnya terdapat Komisi Pendidikan Seni.

Penggantian Lembaga Bahasa Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Dalam perkembangan selanjutnya, nama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada 1966, sesuai dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 November 1966 No. 75/V/Kep./I/1966 berubah lagi menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Baru tiga tahun berjalan, pada masa jabatan Prof. Mantra berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 034/1969 tanggal 24 Mei 1969, nama itu berubah lagi menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Selanjutnya, pada masa jabatan Prof HS

sesuai dengan Keputusan Menteri Dikbud No. 0222g/O/1980 dibentuklah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan statusnya tetap menjadi satu dengan Departemen Pendidikan Nasional.

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional

Pada masa jabatan Prof. HS, mulai 1979 status Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya diganti menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Ditjarahnitra). Perubahan itu dilakukan mengingat sangat diperlukannya fungsi direktiva, yaitu fungsi pembinaan, penanaman, serta sosialisasi nilai-nilai sejarah dan nilai budaya bangsa kepada masyarakat. Dengan adanya perubahan itu, posisi direktorat itu menjadi unik. Sebagai sebuah direktorat fungsi utama yang semestinya adalah bersifat direktiva, tetapi dalam kenyataan fungsi penelitian yang sebelumnya dimiliki oleh Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya masih tetap melekat.

Tugas pokok dan fungsi direktorat ini menjadi ganda, yaitu fungsi direktiva dan fungsi penelitian, sehingga berbeda dengan unit-unit direktorat yang lain, yang tidak memiliki fungsi penelitian. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah dan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program, serta penataan unit pelaksana teknis. Di dalam unit Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional terdapat UPT Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) yang menitikberatkan fungsi penelitian sehingga memiliki tenaga fungsional peneliti. Permasalahan timbul ketika tenaga peneliti pada BKNST

memerlukan pengesahan angka kredit penelitian untuk kenaikan pangkat. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai induk dan pembina BKNST tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan angka kredit penelitian karena sebagai sebuah “direktorat” dengan sendirinya tidak memiliki tenaga yang menduduki jabatan fungsional peneliti, sehingga Direktur Ditjarahnitra tidak memiliki kewenangan untuk mensahkan angka kredit tersebut.

P4N diganti menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PUSLIT-ARKENAS)

Seperti telah disinggung di atas, pada masa jabatan Prof. IB Mantra Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN), pada 1974 LPPN dipecah menjadi dua unit, yaitu (1) Direktorat Sejarah dan Purbakala; dan (2) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N). Pemecahan ini dilakukan mengingat beban tugas LPPN cukup berat dan banyak masalah baru yang harus diselesaikan. Pemecahan didasarkan pada bidang kegiatan yang dikerjakan. Direktorat Sejarah dan Purbakala lebih menekankan fungsi direktiva, yaitu melakukan pemeliharaan, perawatan, perlindungan, dan pemugaran berbagai benda peninggalan sejarah dan purbakala. Misi ini diambil dari kegiatan Bidang Pemeliharaan dan Pemugaran ketika masih bernama Lembaga Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Sementara itu, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional memiliki fungsi melakukan penggalian (ekskavasi) dan penelitian bidang purbakala dan peninggalan nasional.

Pada masa jabatan Prof. HS, (1979) nomenklatur Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N) diganti menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Nomenklatur itu masih berlaku hingga sekarang. Yang berubah hanya lembaga induk yang membawahkan Puslit-arken. Bila sebelumnya secara administrasi terutama masalah anggaran berada di bawah Sekretariat Jenderal dan secara teknis di bawah Direktur Jenderal Kebudayaan, kini baik teknis maupun anggaran berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lahirnya Direktorat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sebelum masuk ke dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan posisi bidang penghayat kepercayaan sempat beberapa kali pindah posisi. Tahun 1975, berdasarkan Instruksi Menteri Agama No. 13/1975, pengurusan bidang penghayat kepercayaan berada di Departemen Agama, dalam ini ditempatkan pada Subbagian Umum Tata Usaha. Berdasarkan Keppres No. 40/1978 penghayat kepercayaan sebagai unsur budaya spiritual dari Departemen Agama dipindahkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1979 lahirlah Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ditbinyat).

Kehadiran direktorat baru itu sempat mengundang berbagai komentar. Menurut Prof. HS pembentukan direktorat baru itu sudah menjadi fakta. Dalam tulisan berjudul

“Ramah dan Penuh Pengertian” antara lain menulis tentang hadirnya direktorat baru itu. Dijelaskan oleh Prof. HS sbb.: “saya diberitahu oleh Menteri Daoed Joesoef, bahwa saya diharapkan ‘menyelamatkan dan mengarahkan’ keberadaan direktorat baru itu. Ketika itu saya belum sepenuhnya paham akan keseluruhan permasalahan direktorat baru itu Tetapi sekarang dapat saya akui, bahwa terutama tahun-tahun permulaan itu, masalah kepercayaan cukup pelik, terutama karena menghadapi sikap kurang toleran, bahkan memusuhi, oleh berbagai kalangan masyarakat, yang tidak sepenuhnya memahami keadaan kepercayaan itu”. (Dimuat dalam buku Diantara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” hal. 286-296.)

Yang menarik, pada acara Sarasehan para penghayat kepercayaan di Tawangmangu, Presiden Soeharto memberikan amanat tertulis yang dibacakan oleh Prof. HS. Dalam pengarahan itu jelas sekali gerak yang diharapkan dari pihak pemerintah, masyarakat dan penghayat sendiri dan bertolak dari pasal 32 UUD 1945 dan GBHN. Disimpulkan oleh Prof. HS, bahwa cara penerimaan Presiden mengenai masalah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan ciri khas kebudayaan tradisional, dan untuk itu perlu ada sikap toleransi dilihat dari sisi keagamaan khususnya.

Peristiwa G30S/PKI 1965 telah membawa nama dan posisi penghayat kepercayaan sempat diperbincangkan lagi. Meletusnya peristiwa gerakan makar yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan sebuah usaha merebut kekuasaan negara atau kudeta. Gerakan perebutan kekuasaan itu diawali dengan penculikan dan

pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat: Jenderal A.H. Nasution (lolos dari penculikan dan pembunuhan), Letnan Jenderal A. Yani, Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto, Mayjen S. Parman, Mayjen M.T. Haryono, Brigadir Jenderal (Brigjen) Sutojo, Brigjen D.I. Panjaitan, serta Brigjen Katamso, dan Kolonel Sugiono di Yogyakarta.

Gerakan ini dapat diatasi dan langkah berikutnya adalah membubarkan PKI dan melakukan penumpasan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Dalam menghadapi keadaan seperti itu para anggota dan simpatisan yang masih hidup berusaha untuk bangkit kembali. Salah satu upaya untuk bangkit kembali itu adalah munculnya Gerakan PKI Malam yang dipimpin oleh Mbah Suro alias Mulyono, alias Surodihardjo. Pusat gerakan ini di desa Nginggil, Kecamatan Menden, yang terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Blora dan Kabupaten Ngawi. Lokasinya terpencil di tepi Bengawan Solo. Gerakan yang "dibungkus" dalam bentuk perdukunan atau perguruan yang berbau mistik ini menjadi sebuah "bentuk organisasi" tempat berkumpulnya sisa-sisa PKI yang berusaha menamakan pengaruhnya kepada masyarakat.

Keberhasilan Mbah Suro membangun padepokan ini dilakukan dengan menggunakan kendaraan perdukunan, klenik, dengan menyebarkan kepercayaan atau kebatinan Djawa Dwipa dengan menyatakan dirinya sebagai *Pandito Gunung Kendeng*. Melalui cantrik-cantriknya yang tidak lain adalah sisa-sisa anggota atau simpatisan PKI melakukan agitasi dan propaganda untuk memengaruhi masyarakat sehingga tempat itu dianggap keramat dan menjadikan semua perintah Mbah Suro wajib diturut. Padepokan

Mbah Suro dijadikan tempat penyusunan kekuatan bersenjata dari sisa-sisa PKI. (Komunis di Indonesia, Jilid IV, 2009:75-77)

Pada 5 Maret 1967 padepokan ini berhasil dihan-curkan oleh ABRI karena jalan perundingan tidak membuahkan kesepakatan. Akan tetapi, dengan berakhirnya drama Mbah Suro, hal itu berdampak negatif terhadap para penghayat kepercayaan atau kebatinan. Akibat dari penggunaan kedok perdukunan, klenik, kepercayaan atau kebatinan untuk kepentingan gerakan PKI seperti yang dilakukan oleh Mbah Suro itu telah membuat kalangan para penganut kebatinan yang murni ikut kena getahnya. Pada umumnya para penganut paham kebatinan saat itu tidak berani menampakkan diri seperti sebelumnya karena risiko dicap terlibat dalam G30S/PKI sangat berat. Selain diakibatkan oleh kasus Mbah Suro, perbedaan pandangan antara para penghayat dan penganut agama (Islam) juga masih menyimpan persoalan.

Dengan lahirnya Tap MPR No. II/1978 dan Tap MPR No. IV/1978 yang mendorong lahirnya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa maka posisi lembaga direktorat itu memiliki dasar yang konstitusional. Yang jelas, dari serangkaian perbincangan tentang *kepercayaan*, telah menjadi bagian yang paling seru adalah ketika Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyiapkan rancangan UUD 1945. Perdebatan berkenaan dengan *kepercayaan* cukup mene-gangkan dan akhirnya melahirkan Pasal 29 UUD 1945 menunjukkan bahwa sejaka awal pada pendiri bangsa telah

menyepakati posisi bidang itu. Demikian pula halnya ketika dilaksanakan pembahasan amandemen UUD 1945 pada masa reformasi Pasal 29 sama sekali tidak mengalami perubahan.

Pemindahan Unit Perpustakaan dari Museum Nasional

Dalam rangka pengembangan organisasi di bidang perpustakaan, sesuai dengan rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, perlu dibentuk lembaga Perpustakaan Nasional. Untuk itu, dilakukan berbagai persiapan, antara lain memindahkan unit perpustakaan dan semua koleksi berupa buku dan naskah kuno yang dihimpun sejak berdirinya *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (1778) dari lingkungan Museum Nasional ke Perpustakaan Nasional.

Pemindahan itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0990/ F1.IV/D/88 tanggal 20 Desember 1988. Dalam butir 1 keputusan dinyatakan *"Memindahkan penyimpanan koleksi naskah kuno yang semula merupakan bagian dari perpustakaan Lembaga Kebudayaan Indonesia (Museum Nasional sekarang) ke Perpustakaan Nasional"*. Anehnya, pada saat itu unit organisasi Perpustakaan Nasional sendiri belum terbentuk sehingga dalam penyerahan itu dijelaskan sebagai berikut: *"Hal yang berhubungan dengan pengurusan koleksi naskah kuno tersebut pasal 'Pertama' sejak diserahkannya ke Perpustakaan Nasional tetap ditangani oleh staf Museum Nasional sampai organisasi Perpustakaan Nasional yang baru terbentuk"*.

Penyerahan Neurocranium Pithecanthropus Ngawi Jawa Timur ke Laboratorium Bio-Paleoantropologi Universitas Gajah Mada

Pada masa jabatan Prof. HS juga melahirkan kebijakan untuk menyerahkan fosil Neurocranium Pithecanthropus Ngawi Jawa Timur kepada Laboratorium Bio-Paleoantropologi Universitas Gajah Mada. Penyerahan itu dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan, No. 0952/ F1.IV/C.88, tanggal 9 November 1988. Penyerahan ini didasarkan atas surat kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, No. 12456/I/ 04/1988, kepada Direktur Jenderal kebudayaan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa “fosil Neurocranium Pithecanthropus yang ditemukan di Ngawi sangat besar arti dan nilainya bagi ilmu pengetahuan”.

Guna kepentingan penelitian ilmiah, diperlukan penyimpanan khusus bersama dengan fosil Pithecanthropus lainnya, di Laboratorium Bio-Paleoantropologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Setelah penyerahan itu, masalah pengamanan dan pemeliharaan tersebut diserahkan kepada Laboratorium Bio-Paleoantropologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada butir ketiga dinyatakan “untuk keperluan penelitian dan atau pemindahan benda tersebut bagi kepentingan ilmu pengetahuan, harus seijin Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”.

Penerimaan Museum Sumpah dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Sebuah gedung yang beralamat Jalan Kramat No. 106, Jakarta, menjadi bersejarah karena di gedung ini dilangsungkan Kongres Pemuda II tanggal 20 Oktober 1928, yang melahirkan ikrar atau sumpah yang kemudian dikenal sebagai *Sumpah Pemuda*. Gedung ini kemudian dikenal masyarakat sebagai *Gedung Sumpah Pemuda*. Pada 15 Oktober 1968 Prof. Mr. Soenario – salah satu peserta kongres tahun 1928 – mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, meminta perhatian dan pembinaan terhadap Gedung Kramat 106 agar nilai sejarah yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara.

Dengan Surat Keputusan Gubernur No. cb.11/1/12/72 tanggal 10 Januari 1972 dengan mengacu pada Monumenten Ordonantie Stbl. No. 238 tahun 1931, Gedung Kramat 106 ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Setelah mengeluarkan surat keputusan tersebut, pada 3 April 1973 Gubernur melaksanakan pemugaran dan selesai tanggal 20 Mei 1973. Gedung Kramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama *Gedung Sumpah Pemuda*. Pada 20 Mei 1974 Gedung Sumpah Pemuda kembali diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto.

Mengingat museum tersebut memiliki sejarah yang amat penting bagi bangsa Indonesia, pada 16 Agustus 1979 pengelolaan Gedung Sumpah Pemuda diserahkan oleh Pemda DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan

selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga. Pertimbangannya, gedung ini memiliki sejarah yang berhubungan dengan kepemudaan, dan dirancang untuk digunakan sebagai Pusat Informasi Kegiatan Kepemudaan di bawah Kantor Menteri Muda Urusan Pemuda yang kemudian berubah menjadi Menteri Muda Urusan Pemuda dan Olah Raga.

Upacara peresmian dilaksanakan pada 28 Oktober 1980, yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Gedung Sumpah Pemuda oleh Dra. Jos Masdani, atas permintaan Menteri Muda Urusan Pemuda Mayor TNI AU dr. Abdul Gafur, sebagai tanda penyerahan pengelolaan gedung dari Pemda DKI Jakarta kepada Departemen P dan K. Tiga tahun kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 029/O/1983 tanggal 7 Februari 1983, yang menyatakan bahwa Gedung Sumpah Pemuda dijadikan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan nama Museum Sumpah Pemuda.

Penerimaan Museum Kebangkitan Nasional dari Pemda DKI Jakarta

Gedung yang beralamat di Jalan Abdul Rachman Saleh No. 26, Jakarta Pusat, pada awalnya adalah gedung sekolah STOVIA (*School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen*) atau Sekolah Kedokteran Bumiputera yang didirikan pada 1899. Dari tahun 1902 hingga 1925, gedung ini resmi digunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran

dan asrama pelajar STOVIA. Peristiwa ini dijadikan titik awal tumbuh atau bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Sebagai gedung bersejarah oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta Raya pada 1973 direnovasi dan selanjutnya dijadikan museum dengan nama *Museum Kebangkitan Nasional* dan pengelolaanya di bawah Pemda DKI Jakarta.

Sama halnya dengan Museum Sumpah Pemuda, berdasarkan pertimbangan bahwa situs ini memiliki sejarah yang penting bagi seluruh bangsa, pada 27 September 1982 pengelolaan Museum Kebangkitan Nasional diserahkan oleh Pemda DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat gedung tersebut harus mendapat perlindungan dan pemeliharaan, pada 12 Desember 1983 Pemerintah menetapkan gedung ini sebagai benda cagar budaya. Mulai tanggal 17 Februari 1984, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 030/0/1984 mulai berlaku struktur organisasi dan tata kerja penyelenggaraan Museum Kebangkitan Nasional.

Penyerahan Pengelolaan Tugu Nasional/Monumen Nasional kea Pemda DKI Jakarta

Untuk melaksanakan pembangunan Tugu Nasional (TUNAS) atau Monumen Nasional (MONAS) telah dibentuk panitia. Dalam perjalanannya hingga bangunan itu dinyatakan “selesai”, Panitia Pelaksana Pembangunan beberapa kali mengalami perubahan atau penyempurnaan. Panitia Tugu Nasional pertama dibentuk pada 1954, yang diketuai

oleh Sarwoko Martokusumo, sekaligus sebagai pengga-
gas. Panitia dibantu beberapa orang tokoh, termasuk Wali
Kota Sudiro menjadi Pembantu Umum dan Bung Karno
menjadi Pelindung Panitia, kemudian diganti atau disem-
punakan lagi pada 1959, 1961, dan 1962. Yang dimaksud
dengan *Panitia Pembina Tugu Nasional* adalah pengganti
Panitia Monas yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 116,
tanggal 8 Oktober 1961.

Panitia yang terakhir diberi nama Panitia Pembina,
ditetapkan dengan Keppres No. 314/1968, dengan susunan
sebagai berikut: (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Ketua merangkap anggota; (2) Gubernur/KDH DKI Jakarta
Raya, Wakil Ketua merangkap anggota; (3) Pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai
Sekretaris merangkap anggota; (4) Pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara merangkap
anggota; (5) Anggota: Wakil Sekretariat Negara/Sekretariat
Kabinet; Wakil Departemen PUTL; Wakil Departemen
Hankam; dan Wakil Lembaga Pariwisata Nasional.

Pada 1978 di awal masa jabatan Prof. HS sebagai
Direktur Jenderal Kebudayaan, pengelolaan Tunas dari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Prof. Dr. Daoed
Joesoef) diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta (Tjokro-
pranolo) pada 21 Agustus 1978. Di dalam "Berita Acara
Serah Terima" dimuat tiga hal sebagai berikut: (1) semua
biaya pemeliharaan dan penyempurnaan Tunas dibe-
bankan pada hasil penerimaan Tunas; (2) jika ada
kekurangan keperluan tersebut pada *punt a* di atas akan
ditanggung bersama oleh Depdikbud dan Pemda DKI Ja-

karta; dan (3) hal yang berhubungan dengan pembinaan berada di bawah Panitia Pembina Tugu Nasional.

Bagian yang menarik dari perjalanan pengelolaan Tunas adalah tidak berfungsinya Panitia Pembina seperti yang tercantum pada butir (c) Berita Acara. "Panitia Pembina" tidak berfungsi dan tidak pernah pernah memberikan fungsi pembinaan terhadap jalannya pengelolaan Tugu Nasional. Sebagai sebuah aset nasional yang memiliki misi penting dalam membangun karakter bangsa, seharusnya lembaga semacam Panitia Pembina tetap ada dan mendampingi Pemda DKI dalam melaksanakan tugasnya (Supardi, 2011),

Penyerahan Museum Konferensi Asia Afrika kepada Departemen Luar Negeri

Berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 24 April 1980 saat acara puncak peringatan Konferensi Asia Afrika ke-25. Sesuai dengan Keputusan Bersama antara Departemen Luar Negeri No. 144/07/VI/80/01 dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 0815a/U/1980 tanggal 25 Juni 1980, status Museum Konferensi Asia Afrika berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pengelolaannya ditunjang oleh Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Museum Konferensi Asia Afrika ini termasuk kategori museum khusus, yaitu memamerkan berbagai artefak yang berkenaan dengan masalah diplomasi politik yang telah

diperankan oleh Departemen Luar Negeri. Berdasarkan pertimbangan itu, status museum yang semula berada di dalam lingkungan Ditjen diserahkan kepada Departemen Luar Negeri.

Penelitian Kebudayaan Daerah

Salah satu kebijakan yang dicanangkan waktu Prof. HS menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan adalah mengembangkan penelitian kebudayaan suku bangsa atau kebudayaan daerah. Sebagai seorang peneliti, HS mempopulerkan istilah “indigenous people” atau sekarang dikenal dengan “kearifan lokal”. Untuk mengembangkan konsep pikirannya itu, HS merintis berdirinya lembaga-lembaga penelitian di beberapa daerah, seperti Sundanologi, Javanologi, Batakologi, Baliologi dll. Di antara lembaga-lembaga itu ada masih berjalan.

Catatan akhir

Demikian gambaran sekilas mengenai konsep, kebijakan dan strategi yang ditempuh oleh Prof. Dr. HS selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan dua periode, 1978-1983 dan 1983-1988. Selama dua Pelita, yaitu Pelita III dan IV, Prof. HS banyak melahirkan konsep, kebijakan dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa.

Dalam hal penataan kelembagaan pada masa jabatannya menjadi relatif stabil. Ada beberapa lembaga kebudayaan UPT yang semula berada di bawah naungan

Ditjenbud diserahkan ke instansi lain, dan sebaliknya ada lembaga dari instansi lain yang diserahkan kepada Ditjenbud. Setelah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/O/1980 tentang Tata Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, struktur kelembagaan itu berjalan sampai dengan 1998 (selama 20 tahun), dengan hanya sedikit penyesuaian.

Mengenai konsep, kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan Prof. HS melakukan kajian ulang kebijakan masa jabatan Prof. Mantra yang dituangkan dalam buku *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan*, versi 1973. Dua kali Prof. HS melakukan penyempurnaan buku itu, yaitu buku versi 1980, 1983 dan 1986. Di dalam buku-buku itu antara lain adalah disebutkan tentang penelitian kebudayaan, seperti cerita rakyat, permainan rakyat, adat-istiadat, nilai tradisi, bahasa, sastra, sejarah dan penelitian arkeologi untuk terus ditingkatkan. Hasil dari berbagai penelitian itu sekarang dijadikan sebagai rujukan. Sementara itu kegiatan perlindungan benda cagar budaya yang telah diletakkan oleh Prof. IB Mantra sejak Pelita I dilanjutkan dan ditingkatkan mencakup seluruh wilayah Indonesia.



Atas: Presiden Suharto menandatangani prasasti pada sebangkah batu
Bawah: Prasasti peresmian candi Borobudur, 23 Februari 1983



Para anggota Expert Meeting Pemugaran Candi Borobudur sedang berbincang. Tampak Prof. Dr. R. Soekmono, H. Budiardjo (berpeci), dan Drs. Uka Tjandrasasmita, Direktur Perlindungan dan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Dirjenbud Prof. Dr. Haryati Soebadio tidak tampak.



Prof. Dr. Haryati Soebadio meresmikan pameran karya Popo Iskandar di Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud, Gambir.



Atas: bersama pelukis Popo Iskandar. Bawah: bersama Yusuf Susilo Hartono (wartawan) dan Watie Moerany, pengelola Gedung Pameran.

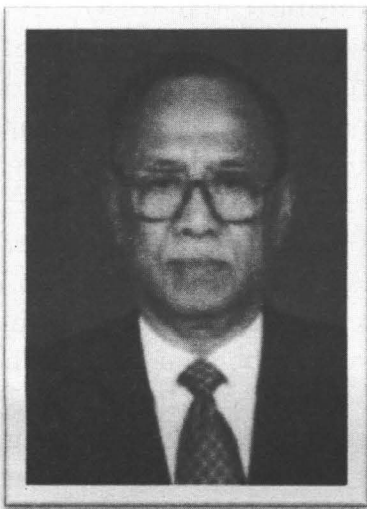


Atas: Prof. Dr. Haryati Soebadio (Dirjenbud) bersama Direktur Permuseuam Drs. Moh. Amir Sutaarga sedang melakukan peninjauan pameran di Aceh didampingi Kepala Museum Drs. Nasrudin Sulaiman. Bawah: prasasti persmian Loji Tondano oleh Prof. Dr. Haryati Soebadio

BAB VII

DRS. GUSTI BANDORO PANGERAN HARJO POEGER (1988-1993)

Nama Direktur Jenderal Kebudayaan keempat ini cukup panjang. Di depan nama yang sebenarnya, yakni Poeger, terdapat sebutan yang panjang “Gusti Bendoro Pangeran Harjo”, disingkat “GBPH” yang merupakan gelar resmi yang dikeluarkan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta.⁵ GBPH Poeger lahir pada tanggal 10 Mei 1932.



Beliau adalah adik bungsu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, raja Keraton Yogyakarta. Nama GBPH Poeger saat dilahirkan adalah Bendoro Raden Mas Robin Haryani adalah putra Sultan Hamengkuwono VIII dari garwa Raden Ayu Retno Puspito (Raden Ayu Siti Umiramtilah/Umiramsilah).

*Drs. GBPH Poeger Direktur Jenderal
Kebudayaan 1988-1993*

⁵ Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Drs. Bastomi Ervan, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1988-1993. Karena yang bersangkutan memasuki masa pensiun, selama dua bulan jabatan itu digantikan oleh Drs. Nunus Supardi.

Pendidikan tingkat dasar diperoleh di Sekolah Keputran Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2, masih di Yogyakarta. Setelah lulus SMP, GBPH Poeger pindah ke Jakarta mengikuti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tinggal di Jln. Mendut, Jakarta. Di Jakarta GBPH Poeger melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA I (Budi Utama) Jakarta. Setelah lulus, melanjutkan ke Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional.



GBPH Poeger ketika remaja

Meskipun masih keturunan darah biru, namun GBPH Poeger dikenal sederhana, santun, sabar dan sangat merakyat. Pendidikan kepanduan (Pramuka) yang pernah diterimanya membuat GBPH

Poeger – ada yang menye-butnya Romo Poeger – menjadi pribadi yang bisa mandiri. Dari pengalaman mengikuti pendidikan kepanduan itu oleh Sri Sultan, Pangeran Poeger muda diberi tugas sebagai “kepala urusan rumah tangga” di Jln. Mendut. Termasuk urusan belanja dan pekerjaan dapur berada di bawah pengelolaan Pangeran Poeger. Ketika ruang tamu yang berkaca tembus pandang tidak berkondem sehingga isi ruang tamu dapat terlihat dari luar, Pangeran Poeger yang mencari, menjahit dan memasang korden sendiri.

Setelah lulus sarjana (S1) Pangeran Poeger bekerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Asisten Kantor Pembinaan Kebudayaan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) merangkap sebagai Sekretaris Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) di Yogyakarta.

Karir di bidang birokrasi GBPH Poeger terus menanjak. Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum diangkat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, Drs. GBPH Poeger menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan provinsi DI Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah. Setelah pensiun beliau menjabat sebagai Penasihat Utama Hamengkubono X.

GBPH Poeger wafat dalam usia 67 tahun di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta pada hari Kamis, 26 Agustus 1999 pk. 13.30. Beliau masuk rumah sakit hari Jum'at tanggal 20 Agustus 1999 karena ada keluhan sakit asam urat. Setelah diadakan pemeriksaan menyeluruh (*general check-up*), ternyata beliau mengalami radang paru-paru dan ginjal. Beliau dimakamkan di makam Sapto Renggo Imogiri, Bantul, makam keluarga raja-raja Yogyakarta. Jenazah diberangkatkan dari Ndalem Brontokusuman dilepas oleh HB X. Beliau beristeri BR Ay. Bendoro Raden Ayu Imtamsaidjah Poeger, berputri empat orang yaitu, R Ay. Retno Isnewijayanti, R Ay. Retni Ispudiatari, R Ay. Retno Ishasriani, dan R Ay. Isnur Widiawari.

Sebagai putra raja, GBPH Poeger sejak kecil sudah dididik menguasai kebudayaan Jawa, khususnya di bidang seni tari. Karena keahliannya itu GBPH Poeger sering ikut dan memimpin misi kebudayaan/kesenian ke luar negeri, seperti ke Belanda, Jepang, Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang. Selain menari GBPH Poeger juga menciptakan beberapa tarian. Karya tari yang diciptakan oleh Pangeran Poeger antara lain tari Golek Sulung Dayung (1971), Bedoyo Ngambar Adem (1975), Golek Pamularsi (1976), Bedoyo Centini tahun 1980, dan Bedoyo Rono Biwodo (1983). Karya tarinya selalu dipentas pada menjamu tamu oleh penari grup tari Among Bekso Yogyakarta. Selain itu juga menulis buku “Sejarah Nilai-nilai Budaya dan Strategi Pembangunan Bidang Kebudayaan”.

Sebagai penghargaan atas jasa dan karya GBPH Poeger, pemerintah daerah DI Yogyakarta memberikan Anugerah Budaya tahun 2002 sebagai Pembina Seni Tari (Penghargaan Anugerah Budaya 2014, 2014: Dinas Kebudayaan DI Yogyakarta: hal. 51). Sementara penghargaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah pusat belum pernah diberikan.

Drs. GBPH Poeger menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan mulai tahun 1988 sampai dengan 1993. Selama menjabat 5 tahun itu telah melahirkan beberapa kebijakan dan melaksanakan kegiatan di bidang kebudayaan, antara lain sebagai berikut.

Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan (1987-1998)

Di awal menjabat sebagai Dirjenbud, tugas GBPH Poeger yang harus dikoordinasikan adalah penyelenggaraan program UNESCO, yang dikenal sebagai *The World Decade for Cultural Development*) 1988-1997, atau Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan (DASABUD). Tujuan dideklarasikannya DASABUD adalah agar masing-masing negara anggota berupaya meningkatkan kebudayaan melalui berbagai kegiatan dengan bekerja sama dengan masyarakat pemilik kebudayaan. Ada empat agenda dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu: (1) *Acknowledging the cultural dimension in development*; (2) *Asserting and enhancing cultural identities*; (3) *Broadening participation in cultural life*; dan (4) *Promoting international cultural co-operation*.

Dalam rapat Panitia Dasabud antarnegara tahun 1987 disempurnakan menjadi enam. Hasilnya: "... *the Strategy approved by the General Conference of UNESCO defined six priority areas of action for UNESCO's regular programme and invited the international to contribute to The World Decade for Cultural Development*". Keenam program kunci itu adalah: (1) *Acknowledging the cultural dimension in development*; (2) *Relationships between culture, science and technology*; (3) *Preservation of cultural heritage*; (4) *Man and mediasphere*; (5) *Participation in cultural life and in development*; dan (6) *Stimulation of artistic creation and creativity*. Untuk mensukseskan program tersebut Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan antara lain: Kongres Kebudayaan 1991, Seminar Silk Road (Jalur Sutra) di Surabaya tahun 1993, Seminar Budaya dan Budidaya Pertanian di Sumatra Barat, dll.

Untuk mengakhiri acara Dasabud di Yogyakarta, 4-5 November 1997 diselenggarakan Seminar Kebudayaan Keraton Nusantara dalam Rangka untuk membahas makalah: Peran puri Agung Karangasem dalam pelestarian budaya bangsa; Historius nilai luhur budaya keraton; Istana Asseraiyah Hasyimiah Kerajaan Siak Sri Indrapura/Kosmologi kebangsawanan nusantara; Peranan istana nusantara dalam pengembangan bangsa indonesia modern; Pembangunan dan peran istana kesultanan Bima dalam pengembangan jati diri budaya bangsa

Pameran Restrospeksi 80 Tahun Affandi, 1987

Mengawali tugas sebagai direktur Jenderal Kebudayaan, GBPH Poeger menyelenggarakan "Pameran Restrospeksi 80 Tahun Affandi" dan peresmian "Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud" yang kini menjadi gedung Galeri Nasional. Pameran pertama di gedung yang selesai dipugar itu dengan menampilkan maestro seni lukis Indonesia Affandi itu telah mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Pameran yang menggambarkan 80 tahun perjalanan Affandi itu menampilkan karya Affandi mulai dari awal, hingga yang terakhir, yang dilukis sehari sebelum pameran dibuka. Lukisan itu dibuat di gedung tersebut dengan disaksikan sejumlah undangan dan wartawan.

Melanjutkan pembangunan Wisma Seni Nasional (WSN)

Seperti pada masa jabatan Prof. Dr. HS, alasan terbatasnya anggaran juga berlaku pada masa jabatan GBPH Poeger. Proyek WSN dinilai *tidak penting*, sehingga pada tahun anggaran 1984/1985 proyek itu dihapuskan. Setelah proyek itu dihidupkan kembali, dukungan dana tetap saja kecil, sementara untuk pembebasan tanah dan pembangunan gedung WSN memerlukan dana yang sangat besar.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita memiliki gedung pameran dan gedung pertunjukan seni dengan cepat maka muncul gagasan untuk memecah lokasi WSN. Ada tiga gagasan yang pernah muncul. *Pertama*, menjajagi kemungkinan memindahkan lokasi gedung pameran sebagai bagian dari WSN ke TMIL. Upaya ini tidak berhasil karena dana pembebasan tanah yang disediakan tidak mencukupi.

Kedua, untuk gedung Galeri Nasional tetap berada di Jln. Merdeka Timur Jakarta, sedangkan untuk Teater Nasional ditempatkan di tanah bekas Bandara Kamayoran, yang dikelola oleh Badan Otorita Eks Lapangan Terbang Kemayoran. Sesuai dengan surat Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola Kompleks Kemayoran, No. R-707/M. Sesneg/11/ 1988, tanggal 29 November 1988 disediakan lahan seluas 2 ha. Rencana inipun mengalami kegagalan, karena tidak didukung anggaran. Mengenai surat izin pemanfaatan lahan 2 ha di eks bandara Kemayoran hingga kini belum pernah dicabut. Oleh karena itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu menanyakan status tanah tersebut kepada pihak Badan Otorita.

Ketiga, juga pernah muncul gagasan untuk memanfaatkan Istana Bogor sebagai Galeri Nasional, di samping fungsi Istana sebagai tempat penerimaan tamu negara dan ruang konvensi (Lihat Studi Kelayakan pemugaran Istana Bogor). Ketiga gagasan itu juga tidak dapat terwujud karena anggaran yang disediakan sangat terbatas.

Dari gambaran sekilas mengenai perjuangan untuk mewujudkan pemenuhan kebudayaan fasilitas kebudayaan di atas dapat disimpulkan bahwa para pengambil keputusan belum menempatkan proyek bidang kebudayaan sebagai proyek prioritas.

Melengkapi Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud

Setelah hasil renovasi Aula di Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 ditetapkan menjadi "Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud", disingkat GPSR DEPDIKBUD, kebijakan yang ditetapkan oleh Drs. GBPH Puger adalah mengisi berbagai kegiatan seni rupa. Selain dilakukan pendokumentasian, pengumpulan koleksi yang berada di berbagai tempat, konservasi lukisan dan patung, juga dilakukan kegiatan berbagai pameran seni rupa baik oleh seniman Jakarta dan daerah maupun dari luar negeri, diskusi, lomba melukis, dll.

Selain itu, juga dilakukan upaya pembebasan bangunan di sekitar gedung. Hasilnya, dilakukan pemindahan SMA VII, kemudian tanah dan bangunannya statusnya dipindahkan kepada Ditjen Kebudayaan dengan surat Kepmendikbud No. 122/101.B2/92, tanggal 28-10-1992. Selain itu, gedung yang sebelumnya digunakan oleh Direktorat

Pembinaan Generasi Muda Depdikbud ikut diserahkan atau dialih-fungsikan untuk perluasan Gedung Pameran Senirupa Depdikbud. Dengan demikian secara perlahan-lahan luas lahan GPSR DEPDIBUD semakin bertambah, dan keberadaan GPSR Depdikbud mulai dikenal orang. Gedung GPSR DEPDIBU menjadi idaman para seniman untuk dapat berpameran.

Kongres Bahasa Indonesia V, 1988.

Di awal menjabat, GBPH Poeger memulai aktivitasnya dengan menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 1988. Waktu itu bidang Bahasa, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa statusnya berada di bawah naungan Direktorat Jenderal kebudayaan. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima itu pembukaannya diadakan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 1988 dan sidang-sidangnya yang berlangsung hingga hari Kamis tanggal 3 November 1988 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Dari kongres itu disimpulkan kedudukan bahasa Indonesia semakin mantap sebagai wahana komunikasi, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan formal. Pemakaian bahasa Indonesia sejak tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi menunjukkan kemantapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, masih cukup banyak pemakai bahasa nasional kita yang belum mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan konteks pemakaian karena itu, pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan di perluas. Sementara itu,

prosa, puisi, drama, dan karya sastra pada umumnya, selain dapat dijadikan wahana pengembangan dan penyebaran bahasa Indonesia yang kreatif dan dinamis, dapat pula meningkatkan kecerdasan dan memantapkan manusia. Dalam kongres itulah diluncurkan buku Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pekan Apresiasi Sastra (PAS) 88

Untuk mendorong generasi muda pada bidang sastra, khususnya di kalangan pelajar maupun mahasiswa, pada 1988 Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan “Pekan Apresiasi Sastra 88” disingkat “PAS 88” diketuai oleh penyair Sapardi Djoko Damono. Acara pokok pada Pekan itu antara lain: Lomba baca puisi, Apresiasi Sastra di Radio, Pentas Sastra, Diskusi Sastra, Pameran Sastra dan Temu Pengarang.

Kegiatan yang diselenggarakan pertama kali pada masa jabatan GBPH Poeger itu tidak hanya menjadi tonggak dan motor penggerak diselenggarakan PAS berikutnya tetapi juga diikuti oleh berbagai lembaga di berbagai daerah. PAS 88 diselenggarakan di Plaza Depdikbud dari tanggal 2-7 Desember 1988, bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, penyelenggaraan PAS digabungkan dengan acara “Bulan Bahasa” yang dikoordinasikan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menjadi “Bulan Bahasa dan Sastra”.

Studi Kelayakan Pemugaran Istana Bogor, 1989

Pada tahun 1989, Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan studi kelayakan pemugaran Istana Bogor yang telah dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya. Pasca pemerintahan presiden Soekarno dapat dikatakan bangunan ini relatif jarang digunakan, kecuali untuk acara-acara tertentu saja. Sementara itu, masyarakat umum tidak diizinkan memasuki Istana Bogor.

Selain sebagai bangunan cagar budaya, Istana Bogor juga menyimpan sejumlah koleksi seni dan buku-buku yang dikumpulkan oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu muncul gagasan Prof. Dr. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memanfaatkan Istana Bogor menjadi bagian dari Galeri Nasional. Dalam hal ini berkenaan dengan berbagai koleksi seni rupa yang dikumpulkan oleh Presiden Soekarno agar dapat dilihat oleh masyarakat, tanpa mengganggu fungsi istana. Yang dimaksud adalah "tanpa mengganggu" fungsi sebagai tempat menerima tamu negara dan pertemuan-pertemuan (konvensi) penting yang bertaraf nasional maupun internasional.

Dalam rangka kegiatan studi kelayak itu datang ke Indonesia perwakilan dari RDMZ, Ir. Nellie Wieringa, dan Ir. Peter van Dun, serta dari Institut Teknologi Delft, Ir. R. Gill. Kedatangannya ke Indonesia setelah dicapai kesepakatan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan Menteri Nederlandse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Mr. Drs. L.C. Brinkman. Hasil dari Studi Kelayakan Istana Bogor tersebut selanjutnya

diserahkan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan GBPH Poeger. Karena berbagai alasan, hasil studi kelayakan tersebut belum direalisasikan pemugarannya, hingga sekarang.

Hibah (*Grant*) dari pemerintah Jepang, 1990

Pada tahun 1990-an keadaan Museum Negeri Provinsi Bali yang berdiri 1936 memerlukan renovasi, khususnya peralatan untuk penataan koleksi pameran. Setelah melalui peninjauan untuk mendapat dana hibah (*grant*) dari pemerintah Jepang.

Usaha mendapatkan hasil, dan pada tanggal 8 Juni 1990 GBPH Poeger menandatangani surat perjanjian bantuan hibah (*Grant*) dari pemerintah Jepang yang disampaikan melalui Duta Besar Jepang di Indonesia Michihiko Kunihiro. Hibah sebesar ¥ 46,000,000 itu digunakan untuk pengadaan peralatan pameran untuk Museum Bali. Dengan bantuan tersebut, tata pameran Museum Bali menjadi semakin menarik.

Pameran Kebudayaan Indonesia-Amerika Serikat (KIAS) 1990-1991

Program pengenalan kebudayaan Indonesia di luar negeri yang tergolong besar pada masa jabatan GBPH Poeger adalah penyelenggaraan festival tetapi sering disebut Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat disingkat KIAS. Pameran yang berlangsung tahun 1990-1991 itu merupakan pameran keliling yang dinilai sukses mengenalkan keanekaragaman kebudayaan Indonesia di mata

masyarakat Amerika Serikat. Kegiatan ini merupakan program kerja sama antara Departemen Luar Negeri dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi lain yang terkait.

Pameran ini dipimpin oleh Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, SH, LLM, berkeliling ke 50 kota dan mencakup 250 kali kegiatan (*events*) pameran, pertunjukan, peragaan dan diskusi mencakup berbagai aspek: benda seni klasik, seni kraton, seni tradisional, seni rupa, seni wayang, pakaian tradisional, makanan, benda kerajinan, dll. Pameran yang berlangsung selama hampir 2 tahun telah menjadi tonggak sejarah bagi upaya menumbuhkan dialog kebudayaan dan menumbuhkan apresiasi masyarakat dunia tentang Indonesia.

Setelah KIAS dilanjutkan dengan Pameran Kebudayaan (seni lukis, patung) Indonesia di Belanda, disingkat PAKIB dengan agenda "The Sculpture of Indonesia" di the Nieuwe Kerk, Amsterdam (6 Februari - 20 April 1992), "The Beyond of Java Sea" di Rijks Museum, Leiden (27 Februari - 1 Januari 1992), dan "Court Arts of Indonesia" di Kunstthall Rotterdam (31 Oktober-17 Januari 1993). Pameran PAKIB juga membawa dampak positif terhadap citra Indonesia bagi warga Belanda dan Eropa.

Pameran koleksi seni rupa Museum Nasional tahun 1991

Meskipun pengumpulan koleksi seni rupa di Museum Nasional sudah dimulai sejak zaman Belanda dan setelah Indonesia merdeka, namun koleksi-koleksi belum banyak

dikenal masyarakat. Untuk memperkenalkan karya-karya seni rupa koleksi Museum Nasional itu pada tanggal 4 Maret 1991 diselenggarakan pameran pertama. Koleksi itu dikumpulkan selain berasal dari hibah (termasuk pelukis Prancis) juga melalui pembelian. Di antara karya seni rupa yang dikumpulkan antara lain karya Trubus, Rastika, Hendra Gunawan, Affandi, Nashar dll. Pameran dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Drs. GBPH Poeger.

Setelah Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud di Jl. Medan Merdeka Timur ditetapkan sebagai Galeri Nasional karya-karya seni rupa Museum Nasional itu kemudian diserahkan ke Galeri Nasional. Ini berarti Museum Nasional menyerahkan sebagian koleksi ke unit lain untuk yang ketiga kalinya.

Selain meresmikan pembukaan pameran, GBPH Poeger juga meresmikan Purnapugar Dan Penyerahan Kembali Kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 Februari 1988 Disusul kemudian peresmian Museum Negeri Provinsi Bengkulu tanggal 31 Maret 1988 dan Museum Negeri Provinsi Kalimantan Tengah "BALANGA" pada 26 November 1990.

Pedoman Perutusan Kebudayaan, 1991

Sampai dengan tahun 1991, Keppres No. 100 tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan masih menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Kebudayaan. Masalahnya semakin lama semakin kompleks, terutama dalam hal pengaturan teknis. Volume penerimaan maupun pengiriman makin meningkat dan

kecenderungan terjadinya penyalahgunaan juga semakin bertambah.

Masuknya misi kesenian dari luar yang digelar di gedung-gedung pertunjukan banyak yang dinilai telah melanggar ketentuan. Demikian pula pengiriman misi kesenian ke luar negeri juga cenderung disalahgunakan. Para penyanyi yang dikirim ke Jepang dimanfaatkan juga dijadikan wanita penghibur. Oleh karena itu, Pedoman yang ditetapkan dengan Kepmendikbud No. 0599/U/1983 disempurnakan lagi, dan tahun 1991, dengan ditetapkannya Kepmendikbud No. 0314/P/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengiriman dan Penerimaan Peraturan Kebudayaan. Berdasarkan pada pedoman inilah, masalah pengiriman maupun penerimaan peraturan kebudayaan dilakukan pendataan, penataan dan pemantauan.

Kongres Kebudayaan 1991

Selanjutnya pada 1991 diselenggarakan Kongres Kebudayaan keenam, setelah Kongres kesatu 1948, kedua 1951, ketiga 1954, keempat 1957 dan kelima 1960. Ini berarti setelah hampir 31 tahun lamanya setelah Kongres Kebudayaan 1960. Suatu jarak waktu yang cukup panjang bila dibandingkan dengan penyelenggaraan kongres-kongres kebudayaan sebelumnya.

Suasana sistem politik pemerintahan pada saat itu dinilai sangat represif dan sentralistik, sehingga meskipun pada awal munculnya ide menyelenggarakan kongres sejak 1986 tetapi kenyataannya kongres baru bisa dilaksanakan lima tahun kemudian. Pada saat itu banyak pendapat yang meragukan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat

dalam forum kongres itu. Kongres akan banyak dikendalikan oleh pihak pemerintah, sehingga muncullah istilah-istilah yang bernada sinis seperti: *kongresnya baju Korpri*, *kongresnya baju safari*, *kongresnya pejabat pemerintah*, *kongres birokrasi*, *keputusan kongres sudah siap sebelum kongres dibuka*, dan lain-lain.

Kongres diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta mulai dari tanggal 29 Oktober hingga 3 November 1991. Pada akhir kongres banyak yang mencatat bahwa keraguan yang muncul sebelum kongres ternyata menjadi sebaliknya. Kongres dapat berlangsung secara terbuka dan bebas, dan sama sekali tidak memberikan kesan didominasi oleh birokrat atau mendapat tekanan dari pihak keamanan. Para pemakalah dan peserta seperti Prof. Dr. Sutan Takdir Alisjahbana, Prof. Dr. Umar Kayam, Nirwan Dewanto, W.S. Rendra, Gunawan Muhammad, Arief Budiman, A.A. Nafis dll dapat menyampaikannya dengan bebas. Seperti dicatat oleh Dr. Andre Hardjana, "*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinilai telah menunjukkan kembali kesungguhan minatnya pada masalah kebudayaan. Meskipun semula dikawatirkan akan menjadi sebuah "forum kedinasan", "rapat dinas", "pertemuan rekayasa birokrasi Depdikbud", "materi sudah disiapkan sebelum kongres ditutup", "didominasi oleh para birokrat" dsb. tetapi kesemuanya itu tidak terjadi*".

Peserta kongres berasal dari berbagai elemen: budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat yang bukan birokrat, tetapi tetap saja muncul berbagai komentar bernada sumbang dari kalangan sebagian masyarakat. Meskipun telah banyak mendapat dukungan, tetapi masih

saja ada yang menyatakan bahwa kongres itu adalah kongresnya pemerintah. Menjelang Kongres Kebudayaan berlangsung (1991) banyak tudingan yang menyatakan sebagai “kongresnya baju safari, kongresnya baju KORPRI, kongresnya pejabat pemerintah, kongresnya para birokrat”, dan sebutan-sebutan yang lain. Karena tidak percaya pada langkah Panitia Kongres, sejumlah budayawan dan seniman menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Tanding di Makassar, Sulawesi Selatan.⁶

RUU dan UU Benda Cagar Budaya, 1992

Pada masa jabatan GBPH Poeger, RUU tentang Benda Cagar Budaya terus disempurnakan. Kehadiran UU tersebut telah lama ditunggu karena keberadaan *Monumenten Ordonantie Stbl. 238* tahun 1931 yang telah diubah dengan *Monumenten Ordonantie No. 21* tahun 1934 *Stbl. No. 515* Tahun 1934 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. UU produk penjajah Belanda itu belum memuat hal-hal yang lebih rinci tentang penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan keberadaan benda cagar budaya.

Setelah melalui rapat-rapat penyusunan di Direktorat Jenderal Kebudayaan dan pembahasan yang cukup panjang di DPR, akhirnya perjuangan itu mendapatkan hasil, dan pada tanggal 21 Maret 1992, lahirlah UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dengan

⁶ Kongres Kebudayaan 1991: Laporan Penyelenggaraan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991/1992.

kehadiran UU ini masalah penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, dll. yang sebelumnya belum diatur sesuai amanat UU diatur ke dalam Peraturan Pemerintah (PP). Setahun kemudian, sebelum GBPH Poeger berhenti dari jabatannya karena pensiun, lahirlah PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

PT Taman Wisata Borobudur dan Prambanan, 1992

Setelah pemugaran candi Borobudur selesai, peresmian purnapugarnya diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 1983. Sementara itu, peresmian purnapugar candi Prambanan dilaksanakan sepuluh tahun kemudian, yaitu tanggal 23 Februari 1993. Meskipun saat itu pemugaran candi Prambanan belum selesai, tetapi usul untuk dikukuhkan dengan Keputusan Presiden menjadi Taman Arkeologi Borobudur atau Taman Purbakala Borobudur (*Borobudur Archaeological Park*) dan Taman Purbakala Prambanan (*Prambanan Archaeological Park*) sudah mulai disusun.

Dalam perjalanan pembahasan draf usul tersebut nomenklturnya bergeser ke arah nomenklatur lain, yaitu menjadi Taman Wisata Borobudur dan Prambanan. Mengenai latar belakang perubahan itu lebih didasarkan pada pertimbangan yang mengutamakan kepentingan ekonomi, dalam hal ini keberadaan Borobudur dapat menjadi tujuan wisata, sementara dengan nomenklatur Taman Purbakala Borobudur dinilai tidak mengarah pada pemanfaatan kepentingan masyarakat khusus saja. Dalam kenyataan pada saat itu masih tersisa permasalahan yang

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berkenaan dengan pemugaran candi Borobudur.

Suara untuk menjadikan Borobudur sebagai tujuan pariwisata semakin kuat setelah muncul sorotan dan bahkan kritik, dari berbagai pihak di dalam maupun luar negeri. Media massa dan surat-surat protes dari dalam dan luar negeri gencar membicarakan masalah tanah dan kerugian penduduk di sekitar candi, yang dinilai akan kehilangan nafkah.

Memang penduduk juga tidak secara merata dan serentak menerima pemugaran taman wisata itu maupun ganti rugi yang diberikan. Berbagai kejadian sengketa tanah yang masih menjadi masalah sampai tahun 1987, juga membuktikan bahwa kerisauan di kalangan penduduk cukup serius, sekalipun akhirnya semuanya terselesaikan secara baik.

Hampir sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1992, keluarlah Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang memberi dukungan kepada keagungan nilai peninggalan budaya kedua candi diperlukan langkah-langkah perencanaan dan pembangunan taman serta fasilitas lainnya di sekeliling candi.

Untuk mewujudkan melaksanakan pengelolaan itu dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan. Di dalam organisasi Secara *ex-officio* Direktur Jenderal Kebudayaan

menjadi anggota Dewan Komisaris Taman Wisata, sehingga siapa pun yang menjabat direktur Jenderal kebudayaan akan terlibat dengan permasalahan yang timbul. (Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun", 2009 (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 286-296).

Catatan Penutup

GBPH Poeger menjabat selama satu periode, 1988-1993. Pada akhir masa jabatannya itu, GBPH Poeger memasuki masa pensiun. Selama menjabat, BGPH Poeger mengurus kegiatan penting dalam upaya mengenalkan keanekaragaman kebudayaan kita. Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat (KIAS) 1990-1992 telah berhasil membuka mata banyak negara tentang keanekaragaman budaya Indonesia.

Tujuan utama dari penyelenggaraan KIAS, yaitu untuk membangun persahabatan melalui kebudayaan sebagai diplomasi bermatra kebudayaan terbukti berhasil dengan baik. Program yang sama dilaksanakan di Belanda dengan nama Pameran Kebudayaan Indonesia di Belanda disingkat PAKIB, berlangsung tahun 1993. Konsep diplomasi bermatra budaya terus dikembangkan upaya membangun persahabatan hubungan antarbangsa.

Salah satu tinggalkan penting dari GBPH Poeger adalah penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 1991, setelah Indonesia vakum tidak menyelenggarakan kongres selama 30 tahun. Dari rumusan hasil Kongres Kebudayaan 1991 menjadi acuan dalam meletakkan dasar pembangunan bidang kebudayaan. Selain itu, kongres itu juga menjadi motor penggerak untuk diselenggarakan Kongres Kebu-

dayaan berikutnya dan kongres-kongres unsur kebudayaan, seperti kongres kesenian, arkeologi, sejarah, bahasa daerah, sastra daerah dll.



Dirjen Kebudayaan Drs. BGPH Poeger membuka pameran Seni Ukir I Made Suteja, 1993 di Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud, Gambir.



*Atas: Dirjen Kebudayaan
Drs. BGPH Poeger bersama
H. Budihardjo dan pelukis
Kusnadi menyaksikan
koleksi pameran.*



*Kanan: H. Budihardjo
bersama undangan
pameran berbincang dengan
seniman I Made Suteja,*



Dirjenbud, Drs. GBPH Poeger sedang memberikan sambutan pada acara kesenian



Atas: Dirjenbud Drs. GBPH Poeger foto bersama dengan para eselon II dan undangan. Bawah: Dirjenbud Drs. GBPH Poeger di tengah-tengah pengurus Dharma Wanita Sub Ditjenbud ketika memeringati Hari Ibu ke-63, Hari Natal, dan Tahun Baru 1992.



Drs. GBPH Poeger ketika menghadiri Pameran Seni Lukis Bali di Setangaya, Jepang. Ki-ka: Drs. Subroto, Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Jepang, unus Supardi, Drs. GBPH Poeger dan Pande Suteja Neka, pemilik Museum Neka Museum di Ubud Bali.



Drs. GBPH Poeger beserta Istri



Ndalem Brongtokusuman tempat tinggal GBPH Poeger (Foto. dok BPCB D.I. Yogyakarta)

BAB VIII

PROF. DR. EDI SEDYAWATI (1993-1998)

Sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan kelima, Presiden Soeharto menunjuk Prof. Dr. Edi Sedyawati selanjutnya disingkat “EDS”, seperti yang sering beliau gunakan.⁷ Perempuan kedua yang dipercaya menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan setelah Prof. Dr. Haryati Soebadio. Saat itu sempat muncul keyakinan bahwa

cocoknya yang menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan itu memang perempuan.



Prof. Dr. Edi Sedyawati Dirjen Kebudayaan 1993-1999

EDS lahir di Malang, tanggal 28 Oktober 1938, tepat sepuluh tahun setelah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Putri pertama dari

pasangan Imam Sudjahri (seorang tokoh pergerakan dan

⁷ Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Drs. Nunus Supardi, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Kebudayaan 1993-1999..

pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial) dengan seorang tokoh pergerakan pula bernama Sumarminah.

Pada waktu tentara Jepang datang ke Indonesia, EDS bersama keluarga berpindah-pindah tempat tinggal, karena mengungsi dan karena tugas. Dari kota Malang pernah pindah ke Ponorogo, Semarang, Kendal, Magelang, Yogyakarta dan Jakarta. Masa kecil EDS dihabiskan di kota Malang, Yogyakarta dan pada tahun 1950 pindah ke Jakarta setelah pemerintahan RI kembali ke Jakarta dari Yogyakarta.

Pendidikan EDS dimulai dengan Sekolah Rakyat (SR) di Malang tahun 1945 kemudian disambung di SR Kris di Jakarta, lulus tahun 1951. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri I, Jakarta, lulus tahun 1954, dan tingkat selanjutnya lulus dari SMA Negeri I, Jakarta tahun 1957. Setelah lulus SMA, EDS melanjutkan kuliah di Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia.

Sejak belajar di SMP EDS sudah tertarik pada bidang arkeologi. Minat itu tumbuh setelah ia sering diajak ayahnya jalan-jalan ke Jawa Timur dan Tengah melihat berbagai candi. Seperti dalam pengakuannya, EDS merasa terpuh oleh peninggalan masa lalu dan sejak saat SMP itulah ia terobsesi untuk mempelajari ilmu yang satu itu. Tahun 1961 EDS lulus tingkat Sarjana Muda (BA) memilih judul skripsi "Relief-relief Tari pada Pagar Langkan Tjandi Induk Lara Djongrang" Prambanan, sesuai dengan arahan dosennya, Prof. Dr. R.M. Soetjipto Wirjosoeparto. Setelah lulus tingkat sarjana (S1) tahun 1963 EDS diangkat

menjadi pengajar di Fakultas Sastra UI tempat menimba ilmu hingga memasuki masa pensiun.

Dua puluh dua tahun setelah lulus S1, yaitu pada tahun 1985 EDS berhasil meraih gelar doktor. Disertasi yang mengantarkan EDS meraih gelar doktor berjudul "*Pengarcnaan Ganesha Masa Kadiri dan Singhasari: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian*". EDS memerlukan waktu lima tahun untuk menyelesaikan disertasi itu, dan hasilnya ES dinyatakan lulus dengan yudisium *magna cum laude*. Disertasi itu telah diterbitkan oleh EFEO, LIPI, dan Rijksuniversiteit Leiden tahun 1994. Terjemahan bahasa Inggris diterbitkan sebagai *Verhandeligen*, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), No. 160, Leiden 1994, berjudul *Ganesa statuary of the Kadiri and Singhasari periods, A study of art history*.

EDS tidak hanya ahli di bidang ilmu arkeologi tetapi juga di bidang seni, khususnya bidang tari. Seperti halnya ketika EDS jatuh hati pada arkeologi, EDS mengenal dan kemudian jatuh hati pada tari setelah diajak ayahnya, menonton wayang Ngesti Pandowo. Ia terpesona dengan sosok Abimanyu yang ditarikan oleh perempuan. Dalam dunia tari, karakter laki-laki berwatak lembut dan ditarikan perempuan itu disebut sebagai *bambangan*.

EDS yang saat itu masih duduk di bangku kelas II SMA itu ingin bisa menari *bambangan*. Ia lalu bergabung dengan Ikatan Seni Tari Indonesia (ISTI) pada tahun 1956. Minatnya terhadap tari Jawa selain didorong oleh ayahnya, juga didorong dari Profesor Tjan Tjoe Siem, Guru Besar dalam Sastra Jawa dan RM Kodrat Purbapangrawit, ahli Karawitan dan Tari Jawa dari Surakarta. EDS telah

beberapa kali menari di Istana Negara dan ikut berbagai misi kesenian ke luar negeri. Sejak saat itu ia tidak pernah berhenti menari hingga sekarang meskipun usianya di atas 70 tahun.

Penari, ilmuwan dan birokrat seni itu mendapat pendidikan tambahan bidang seni setelah mengikuti kursus Ethnomusikologi dari East-West Centre, 1975. Hidup memang penuh tantangan. Bagi EDS dalam menghadapi tantangan-tantangan hidupnya ternyata EDS mengaku mengambil contoh tokoh wayang Arjuna sebagai lambang indentifikasi dirinya. Arjuna selalu siap dan berani menghadapi lawan-lawannya. Identifikasi sikap hidup itu dituangkannya dalam se bait puisi yang ditulis ketika duduk di kelas dua SMA. Kutipannya sebagai berikut:

Arjuna yang kukenal

Menghentak pada alam mati yang menjerat lagumu

Maka senandungkan pelan

Subakastawa dari dasar hati yang sarat

Mider ing rat

Antara tantangan dan penerimaan

Selain aktif menari, EDS juga menulis ulasan pertunjukan tari yang baru saja dipentaskan. Kebiasaannya itu mengantarkan EDS menjadi seorang kritikus tari. Artikelnya dimuat di berbagai media dan menjadi salah satu referensi mengenai perkembangan tari di Indonesia. Berkat pengabdianya di dunia tari ini membuat Edi mendapat penghargaan Pengabdian Seumur Hidup (*Lifetime Achievement*) di bidang tari dalam Festival Tari Indonesia beberapa waktu lalu. Selanjutnya, pada 2015, Prof. EDS untuk kedua kalinya menerima "*Lifetime Achievement*

Award” di bidang Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Permuseuman dari Komunitas Jelajah.

Di mata EDS antara candi (arca dan relief) dan tari memiliki hubungan yang dekat. Hubungan antara keduanya terus digali dan diteliti hubungannya. Menurut EDS candi itu memiliki banyak teka-teki. Ekspresi arca dan pahatan di candi secara estetik sangat menarik, mendorong EDS untuk berusaha mengerti dan memahaminya lebih dalam. Dunia tari dan arkeologi yang sekilas tampak berlawanan akhirnya dipertemukan EDS ketika ia banyak menganalisis relief candi yang berhubungan dengan tari.

Melalui relief, EDS mempelajari perbedaan gaya seni antara Jawa dan India. Ia, misalnya, meneliti rangkaian relief tari pada Candi Roro Jonggrang Prambanan di Yogyakarta. Oleh karena itu EDS relief candi seharusnya bisa memperkuat pemahaman kita terhadap pengembangan tari di Indonesia. Ia menilai, kebudayaan Indonesia lebih menjurus ke arah hiburan semata sehingga meninggalkan akar-akar kebudayaan asli Indonesia. (*KOMPAS*, 5/9/2012) Dari penelitiannya tentang estetika tari terkait dengan arca candi itu hasilnya banyak dijadikan referensi bagi peneliti tari koreografer dari dalam dan luar negeri yang ingin menggali tentang khazanah tari Indonesia.

Dari pendapat berbagai teman beliau dikenal sebagai orang ramah, tegas, berwibawa dan suka mendengar pendapat orang lain. Juga dikenal sebagai guru dalam arti yang sebenarnya. Meskipun sudah menjabat sebagai dirjen, tetapi masih mengajar dan membimbing skripsi dan disertasi. EDS tidak hanya memimpin dari belakang meja

tetapi juga turun ke lapangan. Hubungan antara pimpinan dengan bawahan selalu cair.

Masih ada predikat lain yang diberikan. EDS adalah perempuan yang pernah berhenti berpikir yang dilengkapi dengan ketekunan dan keseriusan yang tinggi. Selain disebutnya sebagai “perempuan yang tak pernah berhenti berpikir”, oleh Jim Supangkat, seorang pelukis, kritikus dan kurator pameran seni rupa disebutnya sebagai “perempuan batu”. Kesimpulan itu diperoleh setelah bekerja sama dengan EDS menyiapkan pameran besar, melibatkan banyak negara, yaitu Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Anggota Non-blok tahun 1995. Meskipun saat itu harus menghadapi banyak hambatan, waktu yang singkat dan anggaran yang kecil, tetapi EDS pantang menyerah. Pameran berlangsung dengan sukses. (Rahayu Hidayat, 1999. *Cerlang Budaya: Gelar Karya untuk Edi Sedyawati*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Universitas Indonesia 378-405).

EDS menjabat Dirjen Kebudayaan ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. -Ing Wardiman Djojonegoro, 1993-1998. Prof. Wardiman dikenal dengan konsep pendidikan *Link and Match* atau “keterkaitan dan kesepadanan”, merupakan dua sisi mata uang (logam) yang tingkat kekekatannya begitu kuat sehingga tidak mungkin orang menyebut Wardiman Djojonegoro tanpa mengaitkan dengan *link and match* ataupun sebaliknya. (Endang Sunarya dkk. 2012: hal. x).

Sebagai Dirjenbud, Prof. EDS berjuang untuk menyeterakan posisi kebudayaan dengan bidang pendidikan. Dalam forum rapat-rapat pimpinan teras, Prof. EDS

menawarkan program yang sulit ditolak oleh Mendikbud. Kegigihan itu membuahkan hasil Prof. Wardiman Djojonegoro dikenal sangat dekat dengan bidang kebudayaan. Keberpihakan beliau pada bidang kebudayaan secara total telah menciptakan iklim baru di lingkungan Depdikbud. Dirasakan adanya keseimbangan posisi antara bidang pendidikan dan kebudayaan. Keduanya “direngkuh” menjadi satu paket program yang utuh sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31, 32, dan 36 UUD 1945. Oleh karena itu, di kalangan kebudayaan beliau diberi julukan sebagai “Bapak Kebudayaan”.

Selain berstatus dosen, di lingkungan UI EDS juga banyak pengalaman di bidang birokrasi. EDS pernah menjabat Ketua Jurusan Arkeologi UI (1971-1974); Ketua Jurusan Sastra Daerah, Fakultas Sastra UI (1987-1993); dan Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya UI (1989-1993). Selama mengajar di UI, EDS juga aktif mengajar dan memangku jabatan struktural di Institut Kesenian Jakarta, sehingga ada menyebutnya sebagai birokrat seni. EDS pernah menjabat Pembantu Dekan I Fakultas Kesenian Institut Kesenian Jakarta (IKJ 1978-1980), Ketua Jurusan/ Akademi Tari, LPKJ (1971-1977), Ketua Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta (1971-1976); Anggota Dewan Pengurus Harian DKJ (1971-1974); Pembantu Rektor I IKJ (1986-1989).

Selain aktif bekerja di UI, IKJ dan Universitas Hindu di Bali, EDS juga menjadi Anggota Konsorsium/Komisi Disiplin Ilmu Seni (sejak 1990). Di lingkungan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) EDS pernah menjabat sebagai Ketua MSI cabang Jakarta (1986-1990) dan menjabat Ketua

I MSI pada periode 1990-1999). Di lingkungan masyarakat seni, EDS pernah menjabat sebagai Penasihat Masyarakat Musikologi Indonesia (kemudian berganti nama Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia); Ketua Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia komisariat UI (1992-1993); Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (1995-1999, 1999-2002); dan Governor untuk Indonesia, Asia-Europe Foundation (1999-2001).

Selain sebagai arkeolog dan penari, Prof. EDS adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan karya tulis dalam bentuk artikel, makalah dan buku. Pada waktu duduk di SMP pernah mendapat hadiah mengarang dalam rangka 17 Agustus 1951 dari Kotapraja Jakarta. Semasa mahasiswa mengasuh majalah Tari dan lembaran tari majalah Trio. Sejak tahun 1969 menulis sejumlah artikel dan ulasan tari di Sinar Harapan, Kompas, Budaya Jaya dan Tempo. Banyak melakukan penelitian bidang ikonografi dan sejarah tari, antara lain: Gaya dalam Seni Area Klasik, Tari dalam Sejarah Kesenian Jawa dan Bali Kuno.

Sebagai ilmuwan dan penulis, Prof. EDS telah mendapatkan banyak penghargaan. Dari ketekunannya dalam melakukan penelitian, Prof. EDS mendapatkan predikat sebagai Peneliti Terbaik dari Universitas Indonesia bidang Humaniora (1986), Satyalencana Karya Satya 30 tahun (1977), Bintang Jasa Utama Republik Indonesia (1995), Bintang "*Chevalier des Arts et Letters*" dari Republik Perancis (1997) dan Bintang Mahaputera Utama (1998). Sebagai peneliti, tahun 2001, Prof. Dr. EDS kembali mendapatkan penghargaan dari UI sebagai Peneliti Senior Berprestasi.

Menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan ke-5 (1993-1999)

Sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan yang berasal dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud) sebelumnya Prof. EDS telah banyak mengenal dengan tugas yang akan diembannya. Sebelumnya EDS sebenarnya sudah pernah bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sekitar tahun 66-an, EDS pernah menjabat Ketua Bidang Koreografi pada Lembaga Musikologi dan Koreografi, Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K).

Langkah pertama yang dilakukan pada minggu-minggu pertama menjabat adalah menyampaikan tulisan kepada Menteri Dikbud Prof. Dr. -Ing Wardiman Djojonegoro berjudul "Strategi Kebudayaan dalam Kaitan dengan Beberapa Permasalahan Budaya". Pokok pikiran pertama yang diletakkan adalah pendapatnya bahwa pembangunan yang dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan keamanan, yang dalam kenyataan telah meningkatkan kesejahteraan bangsa, sudah waktunya diimbangi pula oleh penyimakan yang seksama atas masalah-masalah budaya yang muncul bersamanya. Yang ditekankan oleh EDS, adalah agar pengembangan kebudayaan ke depan yang menunjukkan perikehidupan manusia menuju ke arah yang semakin global, diharapkan akan muncul nilai-nilai budaya baru yang bersifat mondial, trans-nasional, dan yang karena kedudukannya menjadi semacam berada di mainstream kehidupan di dunia ini, maka nilai-nilai

tersebut menjadi acuan dan tolok ukur yang diterapkan di mana-mana.

Kedua, bertolak dari dampak budaya yang mungkin terjadi karena globalisasi dalam hal tata ekonomi dan tata informasi, maka hendaknya mewaspai akibat yang tidak menuntungkan terhadap sektor-sektor penduduk yang tidak berada di mainstream. Untuk menghindari dampak negatifnya diperlukan kampanye untuk mendudukkan jatidiri bangsa yang ditandai oleh kebudayaannya sebagai isu kemanusiaan yang sentral sifatnya. (Kumpulan Makalah (1993-1995):hal. 7)

Dalam tulisan itu EDS menyampaikan beberapa fokus kegiatan yang akan dilakukan: (1) intensifikasi peranan kebudayaan sebagai pemberi jatidiri bangsa; (2) Kajian kebudayaan masa kini; (3) pembudayaan kreativitas; (4) Pusat informasi Kebudayaan Indonesia; (5) Forum komunikasi pemikiran budaya; (6) Prestasi Indonesia di Forum Internasional; (7) Kerja sama lintas sektoral; dan (8) Pengembangan sumber daya manusia bidang kebudayaan. Kedelapan hal itu yang oleh EDS dianggap menjadi pokok permasalahan kebudayaan yang aktual, dan membutuhkan strategi untuk mengarahkannya kepada tujuan bangsa sebagaimana tertuang dalam GBHN (Kumpulan Makalah (1993-1995): hal. 5).

Sebagai bentuk konsep, kebijakan dan strategi dalam mengemban tugasnya sebagai direktur jenderal, kedelapan hal itu juga disebutnya sebagai perangsang, penggerak, koordinator atau pun pelaksana bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam memainkan perannya. Berbekal pada kedelapan hal itu Prof. EDS banyak meninggalkan jejak

kegiatan yang beberapa di antaranya dijadikan agenda tetap untuk memajukan kebudayaan pada masa-masa selanjutnya.

(1) Intensifikasi peranan budaya sebagai pemberi jatidiri bangsa

Menurut Prof. EDS identitas budaya yang ditunjang oleh kesadaran sejarahlah yang akan menentukan jatidiri bangsa. Adapun identitas budaya bangsa itu sendiri ditandai oleh nilai-nilai budaya serta corak berbagai ekspresi budaya yang khas pada bangsa yang bersangkutan. Jatidiri bangsa ditunjang pula oleh rasa mandiri dan berakar karena memiliki riwayat masa lalu bersama yang unik, berserta segala permasalahan yang khas, yang berbeda dengan riwayat bangsa lain.

Sementara itu, kesadaran sejarah bangsa membawa kepada rasa persatuan yang disebabkan oleh dimilikinya riwayat bersama yang memberikan landasan pula kepada cita-cita bersama untuk mencapai suatu masa depan yang merupakan kelanjutan dari masa lalu, dan dipersiapkan di masa kini. Strateginya, perlu diperkuat dengan kajian sejarah dan kajian budaya dalam berbagai aspeknya, dilakukan secara lebih meluas dan mendalam. Hasilnya disebarluaskan melalui pendidikan, penyebarluasan dan penanaman melalui media massa, baik cetak auditif maupun audiovisual.

(2) Kajian kebudayaan masa kini

Persiapan ke masa depan yang ditandai oleh lebih jauhnya kemajuan teknologi, lebih industrialnya kehidupan perekonomian, tata hubungan yang mengglobal yang diikuti dengan terpaan yang bersifat memaksa dari sistem informasi, kesemuanya itu harus mampu diantisipasi dan ditanggapi. Proses itu memerlukan penyimakan yang cermat melalui penelitian-penelitian dengan berbagai pendekatan dan metode, agar kita tidak terjebak pada perkiraan yang hanya diarahkan oleh harapan, atau asumsi yang belum teruji.

(3) Pengetahuan budaya untuk muatan lokal

Gagasan untuk memberikan muatan lokal di dalam pendidikan kenyataannya belum dapat berjalan secara optimal dan belum dapat diatasi oleh kalangan pendidik sendiri. Untuk mengatasi kesenjangan itu, baik dalam hal penyediaan bahan pelajaran maupun tenaga pengajarnya, dapat dipuayakan dan dilegalkan penggunaan tenaga non-guru dalam masyarakat yang mempunyai keahlian yang khas mengenai berbagai aspek kehidupan yang khas di wilayah tertentu. Muatan lokal dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar. Satu, yang berkaitan dengan pengetahuan alamiah dan yang berkaitan dengan pengetahuan budaya. Di tempat-tempat tertentu dapat ditambah dengan pengetahuan tentang adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya nasional.

(4) Pembudayaan kreativitas

Menjunjung tinggi kreativitas merupakan bagian penting dalam pembangunan karakter bangsa. Melalui

pengembangan kreativitas diharapkan kita akan mampu berpacu dalam mencapai berbagai prestasi yang punya daya saing dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Kreativitas diperlukan dalam kegiatan ilmiah, industri, sosial dan seni. Cara yang perlu ditempuh dengan mengintensifkan penyebarluasan dan diskusi mengenai karya-karya kreatif, melatih kemampuan kreatif, dalam pendidikan dalam arti luas: dalam keluarga, masyarakat, pendidikan formal dan melalui media massa.

(5) Pusat informasi budaya

Data dan informasi budaya tersebar di berbagai instansi. Untuk memungkinkan suatu pengambilan keputusan berdasarkan data terolah perlu dilakukan integrasi dalam satu Pusat Informasi Budaya terpadu. Untuk jenis-jenis informasi tertentu masih perlu lebih dirancang suatu sistem registrasi dan penelusurannya. Selanjutnya, data dan informasi itu dapat disebarluaskan melalui jejaring yang luas dan mudah diakses.

(6) Forum komunikasi pemikiran budaya

Kebudayaan yang berkembang di masing-masing lingkungannya akan dibina dan dikembangkan oleh masing-masing pemiliknya. Untuk menuju keharmonisan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perlu ada forum dialog yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Di dalam forum dialog itu akan dibahas masalah-masalah aktual seperti nilai budaya industrial, menjadi warga yang berbudaya (nasional dan lokal), mempersiapkan eksekutif yang

menghayati nilai-nilai budayanya, memahami makna sejarah dan terpaan nilai-nilai baru yang datang dari luar.

(7) Prestasi Indonesia di forum internasional

Jatidir bangsa banyak ditentukan oleh kemampuan sejumlah warga negaranya dalam meraih prestasi di forum internasional. Prestasi itu dapat di bidang politik, ilmu pengetahuan, industri, olah raga ataupun di bidang seni atau kebudayaan. Usaha-usaha untuk menunjukkan prestasi di forum internasional perlu dikembangkan. Selain untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai bangsa juga untuk mendorong berkembangnya prestasi di dalam negeri, khususnya di bidang kebudayaan termasuk kesenian.

(8) Kerja sama lintas sektoral

Dalam melakukan upaya pemajuan kebudayaan tentu tidak mungkin kalau hanya dibebankan di atas pundak pemerintah saja. Apalagi kalau hanya diletakkan di atas pundak Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selain perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi terkait dengan bidang kebudayaan, yang lebih penting lagi adalah membangun kerja sama dengan berbagai lembaga yang berkembang di masyarakat.

Selain itu juga kerja sama dengan berbagai lembaga di luar negeri. Dengan berpegang pada delapan agenda itu Prof. EDS melangkah melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan selama lima tahun (1993-1998). Konsep dan kebijakan yang pernah dilakukan dan hasilnya antara lain adalah:

Seminar Jalur Sutera (Silk Road)

Mengawali tugasnya sebagai Dirjenbud, EDS pada 1993 menyelenggarakan seminar internasional tentang perjalanan Jalur Sutra (*Silk Road*) khususnya jalur maritim (*Maritime Road*) di Indonesia di Surabaya. Seminar yang dihadiri oleh berbagai negara yang terkait dengan *Silk Road* merupakan bagian dari program UNESCO, *World Decade for Cultural Development* 1988-1998. Selanjutnya, tahun 1994 mulai melakukan rintisan perluasan gedung Museum Nasional yang tidak mampu menampung ratusan ribu koleksi.

Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Non-Blok I, 1995

Dalam rangka menyemarakkan 50 Tahun Indonesia Merdeka (1945-1995), EDS telah menelorkan berbagai ide kegiatan kebudayaan yang tergolong baru. Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Non-Blok I, 1995 (*Contemporary Art for Non-Aligned Countries: Unity in Diversity in International Art*) merupakan pameran pertama sejak Konfrenesi Asia-Afrika 1955, dan berdirinya Gerakan Negara-negara Non-Blok. Selama itu belum pernah diselenggarakan kegiatan kebudayaan bersama. Pameran seni pertama sejak lahirnya Dasasila Bandung 40 tahun lalu itu (1955) diikuti oleh 41 negara anggota itu melibatkan 48 seniman asing dan 72 orang seniman Indonesia. Pembukaan pameran oleh Presiden Soeharto dihadiri oleh pimpinan negara anggota GNB itu berlangsung dari tanggal 28 April – 28 Mei 1995.

Kongres Kesenian I, 1995

Masih dalam rangka menyemarakkan peringatan 50 Tahun Indonesia Merdeka, EDS membidani lahirnya Kongres Kesenian Indonesia (KKI) Pertama. Dibandingkan dengan unsur kebudayaan yang lain seperti arkeologi, sejarah, bahasa, sastra, penghayat kepercayaan, perpustakaan dan perbukuan, bidang kesenian paling tertinggal dalam hal menyelenggarakan forum kongres.

Tujuan diselenggarakannya KKI pertama adalah untuk mengadakan tinjauan dan mencari jalan menumbuhkan kesenian, baik secara intuitif maupun melalui jalan penelitian, mengenai masalah-masalah apa yang pernah ataupun sedang dihadapi dalam kehidupan kesenian di Indonesia, serta mengenai pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh selama 50 tahun perjalanan negara Indonesia merdeka. Bertolak dari permasalahan tersebut, kongres memilih tema “Retrospeksi dan Ancangan ke Depan”. KKI I diselenggarakan pada tanggal 3 Desember sampai dengan 7 Desember 1995 di Hotel Kartika Chandra Jakarta.

Art Summit Music and Dance, 1995

Selanjutnya, untuk mewujudkan kebijakan meningkatkan “Prestasi Indonesia di Forum Internasional” pada tahun 1995 untuk pertama kali diselenggarakan acara Festival Internasional Musik dan Tari Kontemporer 1995 (Art Summit: Music and Dance). Forum ini merupakan ajang tampilnya karya-karya puncak seniman tari dan musik

tingkat dunia. Yang diundang adalah orang-orang yang telah mempunyai reputasi jelas, tidak hanya dalam forum nasional tetapi juga internasional. Karya yang ditampilkan adalah karya kontemporer dan karya baru (Kompas, 11/7/1995). Yang tampil dalam Art Summit: Music and Dance 1995 antara lain: Urban Sax (Perancis), Ghana Dance Ensemble (Ghana/Afrika), Slamet Abdul Syukur (Indonesia) Chandraleka (India), Nucleodansa (Argentina), Sardono W Susumo (Indonesia), Banjar Grupe Berlin (Jerman), The Paul Drescher Ensemble (AS), Rahayu Supanggah (Indonesia), Orcherstra Ensemble Kanazawa (Jepang), Sankai Juku (Jepang), Richard Alston Dance Comany (Inggris), Bagong Kussudiardjo (Indonesia), Kazuo Ohno (Jepang) Weimer Tanztheater (Jerman).

Kegiatan yang dirintis oleh EDS ini beberapa tahun kemudian telah menjadi agenda tetap dan mendapat perhatian dunia. Ada dua catatan dari sepanjang kegiatan Art Summit: Music and Dance itu berlangsung. *Pertama*, kesimpulan yang dibuat oleh Mohammad Diennaldo dalam tulisannya berjudul "Art Summit Rekayasa Multikulturalisme. Dalam kesimpulan itu disebutkan "Art Summit Indonesia 95 (ASI 95) itu merupakan salah satu cara Orba memanipulasi isi pasal 32 UUD 1945".

Kedua, disebutkan oleh Diennaldo bahwa ASI 95 merupakan kebijakan pemerintah terhadap kesenian terutama diperuntukkan bagi pariwisata, dan merupakan sasaran antara untuk jangka panjang investasi pariwisata. Tampaknya, kesimpulan seperti itu didasarkan oleh kenyataan setelah bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata dari tahun 2000-2011, arah Art Summit:

Music and Dance mulai berbelok ke arah festival sebagai daya tarik wisata. (Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru, 2001: hal. 745) Bisa jadi demikian. Tetapi yang jelas ASI 95 digagas untuk menjadi ajang tampilnya karya-karya puncak seniman tari dan musik tingkat dunia, bukan untuk daya tarik wisata.

Pameran Benda Purbakala di Jerman, 1996

Dalam rangka realisasi program pengenalan kebudayaan Indonesia di luar negeri, pada tahun 1995-1996 diselenggarakan pameran benda purbakala keliling di berbagai kota-kota besar di Jerman. Pameran itu berlangsung berdasarkan kerja sama antara Indonesia dan Jerman. Koleksi terpilih dari Museum Nasional dan berbagai museum lainnya dikelilingkan ke berbagai kota seperti: Hannover, Hildesheim, Mainnheim, dan Stuttgart Jerman.

Pameran itu tidak hanya berhasil menumbuhkan apresiasi masyarakat Jerman tentang potensi budaya Indonesia, tetapi juga negara-negara Eropa lainnya sekitar Jerman yang hadir menyaksikan pameran. Selain itu, warisan budaya bangsa juga tampil pada pameran benda purbakala Indonesia di Hannover sebagai bagian dari Expo Hannover, yang diikuti oleh berbagai negara. Salah satu negara peserta Expo yang tertarik untuk mengundang pameran kebudayaan Indonesia adalah Finlandia. Setelah pameran di Mainnheim seluruh koleksi diangkut, dipindahkan di Tampere Museum, Finlandia. Pameran di Finlandia menjadi bagian penting bagi pengenalan kebu-

dayaan di wilayah Skandinavia, karena merupakan pameran pertama purbakala Indonesia di wilayah itu.

Festival Persahabatan Indonesia-Jepang, 1996-1997

Pada tahun 1996-1997, Indonesia menyelenggarakan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (FPIJ 97) di Jepang sebagai balasan atas diselenggarakannya Festival Persahabatan Jepang-Indonesia di Jakarta tahun 1995. Apresiasi masyarakat Jepang terhadap kebudayaan Indonesia sangat luar biasa. Tumbuhnya berbagai organisasi kebudayaan yang secara khusus mengembangkan kebudayaan Indonesia di Jepang memudahkan pelaksanaan festival dengan cara melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi kebudayaan di Jepang.

Organisasi seperti "Batik Indonesia" milik Mrs. Takeuchi Yo dengan koleksi batik yang dikumpulkan sejak tahun 1950, Paduan Suara "Bengawan Solo", perkumpulan "Otokoba Haneda" pimpinan Fumi Tamura-San yang mengembangkan gamelan dan tari Jawa, perkumpulan "Nihon Wayang Kyokai" yang dipimpin oleh Ryoh Matsu-moto-San, "Yamashirogumi Foundation" yang mengembangkan gamelan dan tari kecak Bali, "Belajar Bahasa Indonesia" yang dipimpin Yumi Kondo-san, dan "Japanese Society for Indonesian Music and Dance" khusus untuk anak-anak Jepang, sangat membantu kerja Panitia. Berbagai acara itu telah dihadiri oleh 2.689.395 orang di luar pembaca dan pemirsa melalui media cetak dan elektronik Jepang dan Indonesia.

Pembukaan Pameran "*The Treasures of Ancient Indonesia Kingdom Exhibition*" di Tokyo National Museum diresmikan oleh Putra Mahkota Pangeran Akishino dan Putri Kiko, pada tanggal 16 September 1997. Selanjutnya, pada tanggal 4 November 1997 Kaisar Jepang Prince Akihito dan Princess Michiko hadir juga menyaksikan pameran di Tokyo National Museum. FPIJ '97 telah menorehkan semangat "*Kokoro Kara Kokorohe*" di hati kedua bangsa. FPIJ '97 telah berhasil menyandingkan (bukan menandingkan) hati dan budaya kedua bangsa. Acara festival secara keseluruhan tergolong sukses setelah Festival KIAS di Amerika. (Nunus Supardi: 1999).

Mengatasi dualisme pengurusan kebudayaan

Masih mengenai jejak yang ditinggalkan oleh Prof. ES, adalah kebijakan dalam mengatasi muncul dualisme pengurusan kebudayaan. Sesuai dengan Keppres No. 62 Tahun 1998, dalam kabinet susunan kabinet ada kebijakan baru yang mengundang banyak komentar di kalangan budayawan dan seniman. Presiden Suharto membentuk dua departemen dengan nomenklatur yang hampir sama. Pertama, dibentuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Wiranto Arismunandar; dan kedua Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya, dipimpin oleh Abdul Latief. Mengapa bidang kebudayaan harus diurus oleh dua kementerian?

Dengan kebijakan itu dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dalam penanganan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Ada perbedaan misi antara lembaga bidang kebudayaan dan pariwisata. Antara misi

pembinaan dan pengembangan dengan memanfaatkan (sering disebut orang *menjual*) kebudayaan sebagai daya tarik untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), akan menimbulkan kerancuan apabila keduanya disatukan.

Dalam menghadapi permasalahan kelembagaan seperti itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. EDS menawarkan jalan tengah. Sesuai dengan misi yang selama ini dilakukan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menangani urusan kebudayaan bagian *hulu*, yakni yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, penelitian, pemeliharaan, perlindungan, perawatan, pemugaran, peningkatan mutu SDM, dan hal teknis lainnya. Untuk Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya sesuai dengan misinya menangani bagian *hilir* yakni menangani hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pemasaran berbagai objek kunjungan wisata, sosialisasi dan promosi kebudayaan untuk menunjang keberhasilan program pariwisata.

Konsep kebijakan sebagai jalan tengah itu akhirnya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berdasarkan kesepakatan itu tiap-tiap pihak menyusun organisasi dan tugas, fungsi, program, serta kegiatannya. Keberadaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, masih tetap dipertahankan, sedangkan di lingkungan Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya dibentuk Direktorat Jenderal Seni dan Budaya. Pembagian kewenangan atas dua kriteria itu dibahas secara serius di kantor Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan)

untuk menghindari terjadi tumpang-tindih dan kesamaan program dan kegiatan antara kedua lembaga itu.

Keputusan pendirian Galeri Nasional, 1998

Selain terjun menata kekisruhan dalam kelembagaan seperti disebut di atas, Prof. EDS juga menyelesaikan usulan penetapan secara definitif Galeri Nasional Indonesia yang dirintis oleh Direktur Jenderal Kebudayaan GBPH Poeger. Meskipun telah diusulkan sejak lam, namun pihak Menteri Penertiban Aparatur Negara belum segera memberikan persetujuan. Berkat perjuangan Prof. EDS akhirnya Menpan menyetujui Galeri Nasional yang dirintis sejak masa jabatan Drs GBPH Poeger.

Berdasarkan persetujuan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No. 34/MK.WASPAN/4/1998 tertanggal 30 April 1998, terbitlah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 099a/0/1998 tanggal 8 Mei 1998 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Wiranto Arismunandar menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.

RUU Kebudayaan, 1998

Selain beberapa kegiatan yang lahir dari gagasan EDS, ada pula beberapa kegiatan masa lalu yang ingin dituntaskan. Salah satu yang ingin dituntaskan adalah UU tentang Kebudayaan. Penyusunan Rancangan UU yang telah dirintis sejak tahun 1985, pada tahun 1994 oleh EDS

dicoba untuk dilanjutkan. Pada tahun 1998 drat RUU telah disampaikan ke Sekretariat Negara dan mendapat tanggapan untuk disempurnakan. Surat tanggapan dari Mensesneg itu ditandatangani oleh Prof. Dr. Muladi SH.

Langkah yang diambil oleh Prof. EDS untuk menuntaskan RUU Kebudayaan. Setelah melalui 6 kali rapat, akhirnya pada Mei 1999 Ditjenbud menghasilkan draf RUU hasil Penyempurnaan Draft Naskah Penjelasan dan RUU tentang Kebudayaan, dengan Pengantar Prof. Dr. Edi Sedyawati (Dirjenbud). Rapat-rapat itu antara lain dihadiri oleh Dr. Erman Rajagukguk, Prof. Dr. Chamamah Soeratno, Prof. Dr. Kusnadi Hardjasoemantri, Prof. Dr. Sedyono Tjondronegoro, Prof. Dr. Baharudin Lopa, SH, Prof. Dr. AB Lopian, Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Prof. Dr. Haryati Soebadio dan sejumlah tokoh lainnya sebanyak 50 orang

Selain menyiapkan draf RUU Kebudayaan, untuk menindaklanjuti amanat UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pada masa jabatannya Prof. EDS menuntaskan draf Peraturan Pemerintah (PP), yang melahirkan PP No. 19 tahun 1995, tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum. Selain itu juga telah ditetapkan sejumlah Keputusan Menteri, antara lain: Kepmendikbud No. 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya/Situs; Kepmendikbud No. 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya; dan Kepmendikbud No. 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya.

Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Di lingkungan pendidikan telah ditetapkan jabatan-jabatan fungsional guru dan dosen. Sementara di lingkungan Direktorat Pendidikan Luar juga telah melahirkan jabatan fungsional Pamong Belajar. Tahun 1985 dimulai perintisan dengan melahirkan konsep jabatan fungsional Pamong seni, Museawan, Pamong Budaya Spriritual, dan Purbakalawan. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Prof. EDS beberapa nomenklatur jabatan fungsional itu disatukan menjadi “Pamong Budaya”.

Program penuntasan jabatan fungsional Pamong Budaya

Selain menyelesaikan perangkat UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Prof. Dr. EDS juga berupaya menuntaskan Keputusan tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya. Rintisan perumusan Jabatan Fungsional tersebut sudah dimulai pada masa jabatan Drs. GBPH Poeger. Dalam rancangan awal, masing-masing unit kerja mengusulkan jabatan fungsional sesuai dengan nomeklatur unit kerjanya. Anatara lain jabatan fungsional pustakawan, pembina bahasa, museawan, purbakalawan, dan pamong seni. Oleh Prof. EDS disarankan hanya menggunakan satu nomenklatur sayja tetapi dapat menanungi seluruh profesi di bidang kebudayaan. Disepakati nama jabatan fungsional itu adalah Pamong Budaya.

Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan bidang Kebudayaan (SP3K)

Program ini lahir untuk mengatasi kekurangan tenaga bidang kebudayaan di berbagai daerah, karena kebijakan pemerintah membatasi penerimaan pegawai baru, atau yang dikenal dengan kebijakan “*zero growth*”. Sementara itu, lulusan S1 semakin bertambah, sehingga banyak yang menganggur atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Atas gagasan Prof. EDS digulirkan program Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan bidang Kebudayaan (SP3K).

Setelah melalui penyaringan dan pembekalan pada 1997 diberangkatkanlah sejumlah sarjana bidang kebudayaan yang dinyatakan lulus seleksi dikirim kebagai kecamatan untuk melaksanakan tugas memotivasi aktivitas kebudayaan di desa-desa. Untuk melakukan tugasnya mereka dibekali sejumlah peralatan dan biaya hidup, yang dituangkan dalam surat perjanjian. Selain gairah berkebudayaan di daerah mulai menggeliat, banyak dari anggota SP3K yang akhirnya diangkat menjadi PNS oleh Pemda setempat.

Pameran *Pithecantropus Erectus* di Jepang

Masih banyak kisah lain yang belum dicatat, tetapi pasti jejak langkah itu akan tetap menjadi catatan sejarah. Misalnya, ketika awal menjabat ada permohonan dari pihak pemerintah Jepang, dalam hal ini *Museum of Science and Technology* Tokyo untuk meminjam fosil *pithecantropus erectus* untuk dipamerkan di Jepang. Ini adalah permo-

honan yang kedua. Permohonan pertama tahun 1989 ditolak dengan alasan keamanan fosil. Ketika delegasi Jepang datang untuk kedua kalinya Prof. EDS menyetujui karena delegasi itu memohon dengan sangat diplomatis”, yaitu: *“Kami datang ke Indonesia untuk mengundang Saudara Tua ke Jepang”*. Seperti kita ketahui, selama Jepang menjajah Indonesia selalu menggunakan slogan “Jepang Saudara Tua”. Mereka membalik bunyi slogan itu. Pameran berlangsung dengan sukses dan “fosil *pithecanthropus erectus*” dari Indonesia itu kembali dalam keadaan asli, bukan dipalsukan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.

Catatan akhir

Demikian sekelumit hasil melacak jejak perjalanan Prof. Dr. Edi Sedyawati sebelum dan sesudah serta selama menjabat Direktur Jenderal kebudayaan 1993-1999. Banyak ide dan gagasan beliau yang kini masih dilaksanakan hingga sekarang. Untuk masalah kelembagaan kebudayaan, bagian yang paling diingat di kalangan Ditjenbud adalah ketika dibentuk dua departemen yang sama-sama mengurus kebudayaan. Tahun 1998 Presiden Soeharto membentuk Departemen Pariwisata dan Seni, dan Budaya, di samping ada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada Kabinet Pembangunan VII. Untuk menghindari tumpang-tindih tugas dan fungsi kedua departemen itu, oleh Prof. EDS ditetapkan Departemen Dikbud mengurus kebudayaan untuk bagian “hulu”, dan Departemen Parnasbud mengurus kebudayaan untuk bagian “hilir”.

Sisi lain yang ingin penulis sampaikan adalah masalah kesehatan Prof. EDS selama menjabat Dirjenbud. Beberapa kali penulis mendapat pesan agar menyampaikan kepada Prof. EDS untuk tidak memaksakan diri bekerja terlalu keras. Seperti ditulis di harian Pelita, selama enam tahun menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. EDS dikenal sebagai pekerja keras, dan gencar melancarkan ide-ide baru, meskipun terkadang sedang kurang sehat. (Pelita, 14/10/ 1995). Di balut oleh semangat kerja keras itulah yang justru membuat Prof. EDS seperti mengabaikan kesehatannya. Ketika kerja keras itu membuahakan hasil, kesehatan kembali pulih. Kelancaran tugas tidak terganggu karena kesehatannya.

Ketika mengikuti penataran Manggala P4 di Bogor (1994) beliau sakit, kemudian oleh A.M. Hendropriyono diantar ke Rumah Sakit Husada di Jakarta. Tetapi pagi hari berikutnya beliau sudah kembali ke tempat penataran. Pada waktu mendampingi Mendikbud Prof. Wardiman (1997) ke Irian Jaya beliau sakit dan sempat istirahat di RS Timika, sementara rombongan kembali ke Jakarta. Setelah istirahat dua malam, beliau kembali sehat dan terus terbang ke Jakarta.

Yang lumayan seru, Prof. EDS sakit saat menghadiri pembukaan festival kebudayaan di desa Sutopati di kaki gunung Merbabu dalam rangka 50 tahun Indonesia Merdeka (1995). Dengan mobil Bupati Magelang, Bpk. Sukardi, Prof. EDS dibawa ke Magelang dan dirawat di RS Muntilan, Magelang. Mendapat laporan Dirjenbud sedang sakit, Prof. Wardiman memerintahkan penulis menyusul ke Muntilan. Ada dua perintah yang disampaikan, pasien

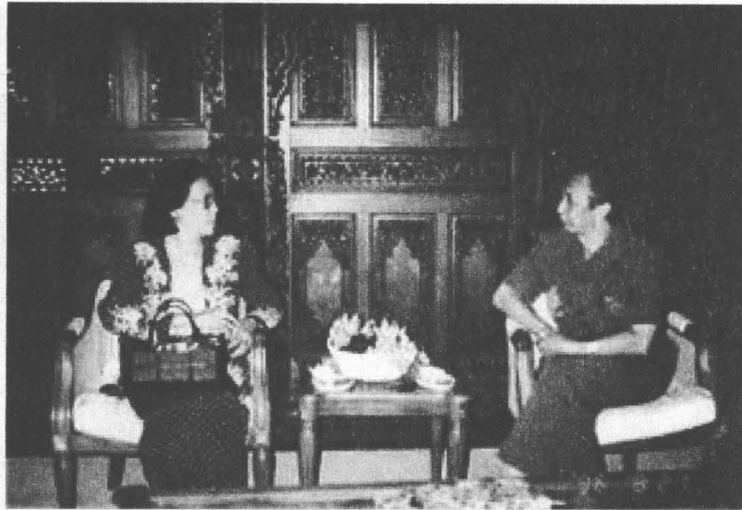
dibawa ke RS di Jakarta atau ke RS Yogyakarta. Yang terbayang di benak Pak Menteri, pastilah RS Muntilan tidak representatif.

Sebelum menjenguk ke RS, penulis bertemu lebih dahulu dengan Pak Bupati, untuk mendengar kronologi kejadian dan menyampaikan pesan Pak Menteri. Ketika penulis juga minta izin membawa Prof. Edi ke Yogya atau Jakarta sesuai dua pesan Pak Menteri, Pak Bupati memberikan jawaban yang membuat penulis terhenyak. *“Pak Nunus, kalau untuk mengobati Ibu Edi diperlukan peralatan khusus atau dokter ahli akan saya datangkan ke sini. Ibu Edi biar saja istirahat di Muntilan dulu. Tidak usah dipindahkan. Saya yang bertanggung jawab”*.

Mendengar jawaban yang penuh tanggung jawab itu akhirnya penulis menurut. Ibu Edi sementara tetap dirawat di RS Muntilan, hingga sembuh dan diizinkan pulang. Setahun kemudian penulis bertemu Pak Bupati dalam penataran P4 di Jakarta. Kalimat pertama yang disampaikan: *“Pak Nunus terima kasih ya. Sekarang RS Muntilan sedang dipugar, mendapat bantuan dana dari provinsi (Pak Gubernur)”*. Rupanya, peristiwa dirawatnya seorang direktur jenderal di RS kecamatan Muntilan menjadi peristiwa penting dan bersejarah bagi Pak Bupati. Dengan alasan itulah yang membuat Pemda Provinsi Jawa Tengah menukarkan dana bantuan untuk merehabilitasi RS Kecamatan Muntilan. RS itu sekarang tampak megah mirip dengan yang ada di tingkat provinsi.



Prof. Dr. Edi Sedyawati sedang menari

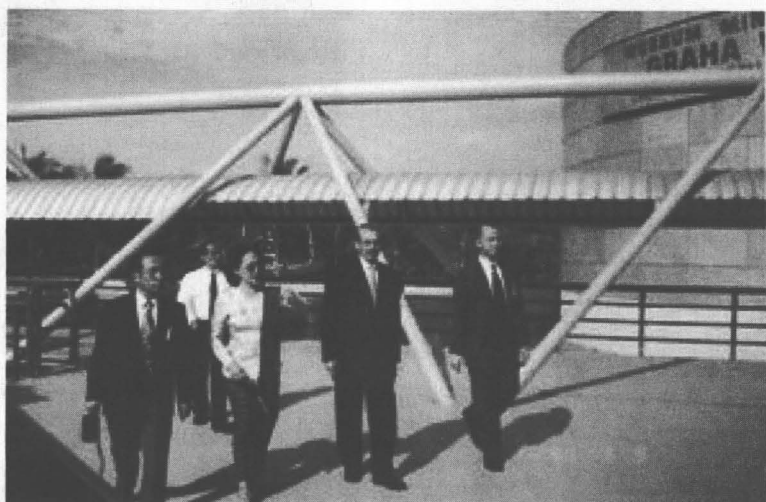


Atas: Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Edi Sedyawati berbincang dengan dengan Drs. Tedjo Susilo, Direktur Permuseuman. Bawah: Rapat koordinasi membahas Rencana Induk Pengembangan Situs Sangiran. Dari ka-ki: Prof. Hasan Muarif Ambary, Prof. Dr. Edi Sedyawati dan Drs. Nunus Supardi.



Atas: Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. Dr. Edi Sedyawati (1993-1998) didampingi Direktur Kesenian, Drs. Saini KM ketika mengadakan jumpa pers sebelum Kongres Kesenian Indonesia I dilaksanakan

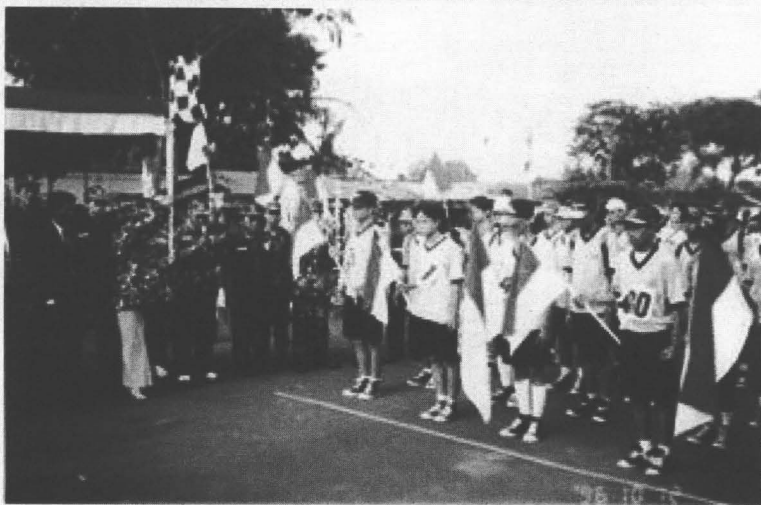
Bawah: Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Edi Sedyawati menandatangani naskah kerja sama dengan Direktur Tokyo National Museum, Mr. Abe.



Menghadiri acara pameran di Museum Minyak dan Gas Bumi di Taman Mini Indonesia Indah



Aktivitas Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Edi Sedaywati Sebagai arkeolog jika ke daerah Prof. Edi Sedyawati selalu menyempatkan berkunjung ke lapangan. Tampak Prof. Edi Sedyawati sedang mengomentasi bagian dari candi Padang Lawas di Sumatra Utara, dipayungi oleh Sri Hartini dari Museum Negeri Provinsi Sumatra Utara.



Dengan seragam militer Prof. Edi Sedyawati tampak tegar ketika mengibarkan keberangkat lomba gerak jalan pada acara ABRI masuk desa di Sumatra Barat



Tahun 1995, ketika menghadiri Festival Kesenian di desa Sutopati di kaki gunung Merbabu, Prof. Edi Sedyawati jatuh sakit, di rawat di Rumah Sakit Muntilan, Magelang. Tampak Bpk. GBPH Poeger beserta Ibu sedang menjenguk di RS Muntilan.



Atas: Prof. Dr. R. Soekmono meninjau ke Rumah Sakit. Bawah: Sebelum kembali ke Jakarta, berfoto bersama Bpk. Sukardi, Bupati Magelang dan istri (ketiga dan keempat dari kanan), dokter, perawat dan pejabat Pemda Magelang..

BAB IX

DR. I GUSTI NGURAH ANOM

Dr. I Gusti Ngurah (disingkat IGN) Anom ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan keenam.⁸ IGN Anon lahir di Bali tanggal 12 Agustus 1943. Setelah lulus SR, SMP dan SMA, di Bali. Melanjutkan pendidikan ke Universitas Gajah Mada mengambil jurusan Arkeologi Fakultas Sastra, lulus tingkat Sarjana (S1) tahun 1971. Tahun 1997 lulus S3 (doktor) pada universitas yang sama. Setelah lulus S1, IGN Anom diterima bekerja di lingkungan



Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ia ditempatkan di Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala provinsi Jawa Tengah.

Dr. I Gusti Ngurah Anom Direktur Jenderal Kebudayaan 1999-2000

Ia menjabat sebagai Dirjenbud relatif singkat, mulai bulan Oktober 1999 sampai dengan bulan Juli 2001 (22 bulan).

⁸ Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Dr.. Abdurrahman yang sebelumnya menjabat Direktur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. .

Singkatnya masa jabatan IGN Anom itu tidak terlepas dari kondisi politik pemerintahan saat itu. Setelah Presiden Suharto mengundurkan dan B.J. Habibie dilantik menjadi presiden kemudian digantikan oleh Gus Dur masa jabatan keduanya relatif singkat. Gonjang-ganjing kepemimpinan negara itu dengan sendirinya membuat masa jabatan menteri juga berlangsung singkat. Sebagai konsekuensi dari sering terjadinya pergantian menteri, kelembagaan bidang kebudayaan juga ikut sering berubah.

Setelah diterima menjadi PNS di lingkungan Ditjenbud ia ditempatkan di Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala provinsi Jawa Tengah. Karir pekerjaannya terus menanjak, dan mulai tahun 1980 dipromosikan menjadi Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 1990. Sebagai kebanyakan putra kelahiran Bali IGN Anom memeluk agama Hindu-Bali. Yang menarik dalam perjalanan karirnya IGN Anom tidak hanya menangani pelestarian bangunan tinggalan masa Hindu atau Budha saja, melainkan juga menangani bangunan Islam dan Kristen Katolik, seperti masjid, makam, gereja, dll. Sebagai seorang arkeolog hal seperti adalah biasa. Tidak ada beda antara arkeolog muslim, Hindu, Budha atau kristen katolik. Seorang arkeolog dituntut memiliki keahlian dalam hal tinggalan budaya dari zaman apa saja.

Bagi IGN Anom salah satu pengalaman sebagai arkeolog dan pejabat di lingkungan Ditjenbud, yang paling menarik bagi IGN Anom adalah ketika memugar Masjid Demak. Bagi dia pengalaman itu menjadi catatan khusus karena sebagai orang beragama Hindu mendapat kesem-

patan menjadi pemimpin proyek pemugaran masjid. Tidak hanya itu, pada peresmian purnapugar masjid itu ia ditunjuk untuk memandu Presiden Soeharto saat melakukan kunjungan keliling masjid.

Pemugaran Masjid Demak termasuk sangat penting saat itu, karena proyek itu berkaitan dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Seperti halnya dengan proyek pemugaran candi Borobudur yang mendapat bantuan dana dari berbagai negara, semula pemugaran Masjid Demak juga akan dilaksanakan dengan bantuan luar negeri, dalam hal ini dari negara-negara yang tergabung dalam OKI. Namun dana terbesar akhirnya juga berasal dari Bantuan Presiden, baru kemudian menyusul dana resmi pemugaran dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dana OKI hanya membantu sekadarnya, yaitu yang berwujud nasihat arkeolog yang didatangkan sebagai peninjau dari Turki.

Masjid Demak termasuk masjid tua di Indonesia. Masjid itu tetap berfungsi dari awal sampai sekarang sesuai dengan maksud pembangunannya, yaitu sebagai masjid. Menurut pandangan pemugaran arkeologi, masjid itu tergolongkan “monumen hidup (*living monument*)”, yaitu cagar budaya yang tidak pernah berubah fungsi atau ditinggalkan sesuai fungsinya pada saat dinyatakan sebagai “monumen”. Berbeda halnya dengan keberadaan candi-candi di Jawa atau Sumatera, fungsi asli sudah lama ditinggalkan ketika bangunannya dijadikan “monumen” atau cagar budaya, sehingga disebut sebagai “monumen mati (*dead monument*)”. Oleh sebab itu pemugaran Masjid Demak harus diamati betul-betul pemugarannya, supaya tidak menyalahi keadaan aslinya.

Acara peresmian terjadi pada tahun 1987. Prof. Haryati Soebagi sebagai Dirjenbud mendapat tugas memberi laporan pendahuluan kepada Presiden saat memasuki Kabupaten Demak. Sempat dijelaskan mengenai keberadaan menara, yang tampaknya sudah pernah didengar sebelumnya oleh Presiden dengan langsung bertanya mengenai menara. Menara di depan masjid bukan termasuk bangunan aslinya, sebagaimana halnya masjid-masjid lain yang dibangun pada abad ke-16. Tidak ada yang dilengkapi dengan menara, karena azan biasa diserukan dari bangunan atas atap. Menara masjid Demak baru dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1924. Dapat ditambahkan lagi bahwa kaki menara yang terbuat dari besi itu berasal dari kaki menara air PAM zaman Belanda.

Tiba giliran IGN Anom sebagai pimpinan proyek, memberikan keterangan teknis kepada Presiden. Agar dalam kunjungan itu Presiden mendapatkan gambaran yang lengkap, diacarakan Presiden melihat langsung ke bagian lantai atas, guna melihat detail teknis pemugaran dari bangunan yang dominan berbahan kayu. Ternyata bukan hanya Presiden, tetapi juga Ibu Tien langsung ikut naik, sekalipun tangganya sempit dan terjal. Di lantai atas Presiden dan Ibu Tien mengamati tempat azan pada zaman dahulu diserukan. Tempat tersebut kini telah disiapkan untuk digunakan kembali. Selain dari itu juga ditinjau bagian atas dari tiang yang sudah tersohor, karena dikisahkan terdiri atas kepingan kayu (dalam bahasa Jawa: tatal) yang konon didirikan oleh Sunan Kalijogo.

Mengenai tiang itu sendiri, pada hakikatnya bukan secara keseluruhan terdiri dari kepingan, melainkan dalam bentuk potongan-potongan yang di bagian atas. Dalam hal tiang itu, IGN Anom atas pertanyaan Presiden, memberi keterangan atas dasar pandangan ilmiah. IGN Anom sangat terkesan akan perhatian Presiden yang sedemikian mendalam, dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan mendetail. Selain itu IGN Anom juga merasa bangga, sebagai orang yang beragama Hindu mendapatkan kesempatan memberikan penjelasan tentang pemugaran masjid.

Tahun 1990 IGN Anom diangkat sebagai Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah) menggantikan Drs. Uka Tjan-drasasmita yang memasuki masa pensiun. Sebagai arkeolog dan menjabat sebagai Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala provinsi Jawa Tengah dan kemudian sebagai Direktur Ditlinbinjarah, IGN Anom banyak melakukan pemugaran bangunan cagar budaya berupa candi, keraton/istana, masjid, gereja di seluruh Indonesia. Antara lain banyak terlibat dalam pemugaran candi Borobudur yang diresmikan 23 Februari 1983 dan sepuluh tahun kemudian peresmian purnapugar kompleks candi Prambanan tanggal 23 Februari 1993.

Menggantikan Prof. Edi Sedyawati

Pada awal tahun 1998, Dr. Anom yang sebelumnya menjabat Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah) dari 1992-1998, diangkat menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal

Kebudayaan (22/12/1998) menggantikan Nunus Supardi. Jabatan Direktur Ditlinbinjarah yang ditinggalkan diserahkan kepada Drs. Nunus Supardi (tukar tempat). Setelah beberapa bulan menjabat sebagai Sekretaris Ditjenbud, Dr. IGN Anom kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan menggantikan Prof. Dr. Edi Sedyawati.

Dengan jabatan baru itu berarti IGN Anom merupakan orang kedua setelah R.M. Indrosoegondo yang menjadi direktur jedneral berasal dari dalam lingkungan Ditjenbud. Yang lain berasal dari luar Ditjenbud, dari Universitas Udayana (Prof. IB Mantra), dari Universitas Udayana, dari Universitas Indonesia (Prof. Haryati Soebadio dan Prof. Dr. Edi Sedyawati, Dr. Hilmar Farid), dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Jawa Tengah (Drs. GBPH Poeger), dan dari Universitas Airlangga (Prof. Kacung Marijan).

Dalam masa jabatan sebagai Dirjenbud selama 22 bulan IGN Anom harus menghadapi banyak kebijakan baru yang sifatnya sangat mendasar bagi bidang kebudayaan. Jabatan sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan IGN Anom relatif singkat, hanya dipangku sampai dengan tahun 2000, karena setelah itu bidang dipisah dari lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk digabungkan bidang pariwisata menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah bidang kebudayaan bergabung dengan bidang pariwisata tahun 2000, jabatan Dr. IGN Anom tidak lagi sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan tetapi sebagai sebagai Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, pada Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sampai masa pensiun tahun 2003.

Selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan yang relatif singkat itu, ada beberapa kebijakan yang perlu dicatat, antara lain adalah mempertahankan keberadaan bidang kebudayaan tetap bersatu dengan bidang pendidikan. Sebagaimana diketahui, setelah Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 meletakkan jabatan, B.J. Habibie - ketika itu sebagai wakil presiden - di hadapan pimpinan Mahkamah Agung dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga.

Sekitar tujuh bulan pemerintahan B.J. Habibie, dalam Sidang Umum MPR tanggal 14 Oktober 1999 Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban. Pidato itu ternyata ditolak, seperti dinyatakan oleh Ketua MPR Amin Rais pada Sidang Penutupan tanggal 20 Oktober 1999 dengan mengatakan, "...dengan demikian, pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak". Dengan penolakan itu, B.J. Habibie mengundurkan diri dari bursa calon presiden yang dipilih melalui referendum. Akhirnya, yang terpilih adalah Abdurrahman Wahid (biasa dipanggil Gus Dur) sebagai Presiden RI Keempat dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Berdasarkan Tap No. VII/MPR/ 1999, Habibie menyerahkan jabatan presiden kepada Abdurrahman Wahid. Gambaran sekilas tentang konsep, kebijakan dan strategi dalam masa jabatannya adalah sebagai berikut.

Mempertahankan bidang kebudayaan bersatu dengan bidang pendidikan

Setelah dilantik, Gus Dur membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Persatuan Nasional. Dalam hal

pengambilan kebijakan penataan (reformasi) di bidang kelembagaan, Gus Dur banyak membuat keputusan kontroversial. Gus Dur membubarkan dua lembaga yang sudah ada sejak Republik ini berdiri. Pertama, Departemen Penerangan yang dinilai telah dijadikan senjata oleh Soeharto untuk menguasai media dan menjadi corong Orde Baru. Kedua, membubarkan Departemen Sosial yang dinilai sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Ketiga, berdasarkan Keppres No. 136/1999 ditetapkan departemen dengan nomenklatur baru, yaitu Departemen Pendidikan Nasional, yang dipimpin oleh Yahya Muhaimin. Gus Dur juga membentuk Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian, yang dipimpin oleh Drs. Hidayat Djaelani.

Kebijakan ketiga, yaitu dibentuknya Departemen Pendidikan dan Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian menimbulkan pertanyaan bagi bidang kebudayaan. Dengan nomenklatur kedua kementerian seperti itu ada tiga hal yang menjadi pertanyaan. Pertama, apakah dengan nomenklatur baru menjadi Departemen Pendidikan Nasional berarti bidang *kebudayaan* dikeluarkan dari lingkungan bidang pendidikan? Kedua, dalam nomenklatur “Kementerian Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya pada Kabinet Reformasi Pembangunan Nasional diganti oleh Gus Dur menjadi Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian, tanpa *budaya*. Lalu bagaimana dan di mana bidang budaya ditempatkan?

Ketiga, status *departemen* (Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya) diganti menjadi *kementerian negara* (Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian). Bukankah tugas pokok “kementerian negara” tidak memiliki kewenangan

operasional melainkan hanya terbatas pada kebijakan dan koordinasi? Kalau bidang kebudayaan dilepas dari “departemen” (Departemen Pendidikan Nasional) dan ditempatkan di “kementerian negara”, lalu bagaimana dengan kegiatan oprasional bidang kebudayaan? Dengan hilangnya kata *kebudayaan* dari lingkungan pendidikan menjadi teka-teki banyak kalangan.

Ada yang menafsirkan keputusan itu sebagai realisasi pendapat Gus Dur untuk menghapuskan Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti halnya dengan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Pernah Gus Dur mewacanakan urusan kebudayaan sebaiknya diserahkan saja kepada pemilik kebudayaan, dan pemerintah tidak usah ikut campur. Ada pula yang menafsirkan, bidang kebudayaan yang selama Republik Indonesia berdiri disatukan dengan bidang pendidikan, bakal digabungkan dengan bidang pariwisata.

Dalam menyikapi kemungkinan-kemungkinan itu, sejumlah budayawan, seniman, dan pejabat kebudayaan berupaya agar bidang kebudayaan masih dapat dipertahankan bersatu dengan bidang pendidikan. Alasannya, ada kedekatan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan dan sebaliknya, sehingga para pendiri bangsa meletakkan kedua bidang itu dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945 bidang pendidikan ditempatkan pada Pasal 31, didekatkan dengan Pasal 32 tentang kebudayaan, di bawah naungan Bab XIII, berjudul Pendidikan. Hubungan antara keduanya sering diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Sangat tidak pas bila bidang kebudayaan dimasukkan ke dalam Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian.

Dengan nomenklatur seperti itu berarti kementerian hanya mengurus bidang kesenian saja. Lalu, bagaimana nasib unsur-unsur kebudayaan yang lain seperti museum, purbakala, nilai tradisional, sejarah, bahasa dan sastra, serta penghayat kepercayaan dll.? Dr. Anhar Gonggong dalam harian *Media Indonesia* mengangkat tulisan berjudul "Diragukan, Bila Masuk ke Lingkup Menparseni". Dalam pandangannya "Unsur kebudayaan harus menjadi napas dari sistem pendidikan yang akan datang untuk membangun karakter dan rasa kebangsaan manusia Indonesia. Kebudayaan akan memiliki pengertian komersialisasi jika lingkup kerjanya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian" *Media Indonesia*, 18 Maret 1999).

Menghadapi berbagai komentar itu IGN Anom melaporkan kepada Mendikbud, Dr. Yahya Muhaimin. Intinya, banyak kalangan yang mengharapkan agar bidang kebudayaan tetap bersatu dengan bidang kebudayaan. Ketika itu Mendikbud Yahya Muhaimin sedang sholat Jum'at di Mesjid Baiturahim di kompleks Istana Negara. Di tengah-tengah jemaah para pejabat tinggi, Pak Yahya sempat berbincang dengan Gus Dur selama 3 menit. Salah satu masalah yang disampaikan kepada Presiden Gur mengenai posisi bidang kebudayaan agar tetap disatukan dengan bidang pendidikan. Jawab Gus Dur singkat saja: "*Yèn Mas Yahya isih kuwat, yo iso waè*" (Kalau Mas Yahya masih kuat ya bisa saja).

Dengan pernyataan Gus Dur seperti itu, maka teka-teki mengenai di mana bidang kebudayaan akan berada menjadi terang benderang. Tiga hari kemudian keluar

Keppres Keppres No. 147/1999, merevisi Keppres yang telah keluar Keppres No. 136/1999 yang berisi penetapan tugas pokok Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Di dalam Keppres No. 136 itu disebutkan tugas pokoknya adalah "melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan". Dari bunyi rumusan seperti itu jelas kata-kata yang selama bertahun-tahun melekat, yaitu " *...di bidang pendidikan dan kebudayaan*" kata "dan kebudayaan" tidak ada lagi.

Sebagai gantinya, di dalam yang baru, yaitu Keppres No. 147/1999, rumusan tugas pokok Depdiknas diganti menjadi "melaksanakan sebagai tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan, *termasuk kebudayaan*". Dengan tambahan frasa *termasuk kebudayaan*, posisi kebudayaan masih dapat dipertahankan keberadaannya bersatu dengan pendidikan. Hal ini membuat lega banyak pihak karena keputusan itu sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang telah meletakkan dasar pemikiran tentang posisi kebudayaan dalam kehidupan sebuah bangsa yang multietnik dan multikultur.

Bidang kebudayaan "bedhol desa"

Masalah sulit yang dihadapi IGN Anom berikutnya adalah saat bidang kebudayaan "dipaksa" bergabung dengan bidang pariwisata. Meskipun penyatuan bidang kebudayaan dan pendidikan dapat dipertahankan dengan terbitnya Keppres No. 147/1999, tetapi pada tahun berikutnya penyatuan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pada 23 Agustus 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan *reshuffle* kabinet dan menetapkan susunan

kabinet baru dengan Keppres baru, No. 177 Tahun 2000. Di dalam Keppres itu Gus Dur mengganti nomenklatur

Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Dengan keluarnya kebijakan *reshuffle* kabinet itu justru telah mengundang tuntutan untuk mundur kepada Presiden Gus Dur menjadi semakin kuat. Akhirnya, pada 27 Juli 2001, Gus Dur dilengserkan dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan lahirnya departemen baru hasil *reshuffle* itu, oleh Presiden Megawati ditetapkan bidang kebudayaan digabung dengan bidang pariwisata. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan bidang kebudayaan tetap bersatu dengan bidang pendidikan, usaha itu sia-sia.

Meskipun penggabungan kedua bidang sudah harga mati, IGN Anom bersama sejumlah budayawan, seniman dan tokoh senior untuk berdiskusi mencari jalan keluar yang tepat. Sempat pula muncuk desakan untuk bersama-sama turun ke jalan menolak keputusan tersebut. Akhirnya ditempuh cara lain, yaitu melalui “rapat gelap” di Arsip Nasional, dihadiri oleh para senior seperti Prof. Dr. Daoed Josoef, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. -Ing Wardiman Djojonegoro, Prof. Dr. Haryati Soebadio, Prof. Dr. Edi Sedyawati, Prof. Dr. Nurhadi Magetsari, dll, dibahas mengenai rencana penggabungan kedua bidang itu. Peserta rapat sepakat untuk mempertahankan bidang kebudayaan tetap bersatu dengan bidang kebudayaan.

Konsep yang diusulkan adalah membagi kewenangan pengurusan bidang kebudayaan menjadi dua, yaitu unsur kebudayaan yang menjadi kewenangan Departemen Pendidikan Nasional dan unsur yang menjadi kewenangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Yang menjadi kewenangan Departemen Pendidikan Nasional adalah membina dan mengembangkan unsur kebudayaan seperti penelitian sejarah dan nilai tradisional dan bahasa, arkeologi, pemeliharaan dan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala. Sementara itu, yang menjadi kewenangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah mengenai pemanfaatan bidang kebudayaan yang memiliki daya tarik wisatawan seperti museum, galeri, taman budaya, dan candi seperti Borobudur, Prambanan, Ratu Boko dan yang lainnya.

Selain itu "rapat gelap" itu juga menyepakati untuk mengirim delegasi menghadap Presiden Megawati menyampaikan pernyataan agar bidang kebudayaan dan pendidikan tidak dipisahkan. Delegasi antara lain adalah Prof. Dr. Haryati Soebadio dan Prof. Dr. Edi Sedyawati. Hasilnya nihil. Bidang kebudayaan tetap digabungkan dengan bidang pariwisata. Pada delegasi akan mengakhiri pertemuan, sambil tersenyum Megawati mengatakan "*Nanti saja, kalau pada periode berikutnya saya masih menjabat, akan saya bentuk Kementerian Kebudayaan*".

Tiba giliran berikutnya adalah pembahasan masalah penggabungan kedua bidang. Karena masalah penggabungan itu merupakan keharusan, kalangan budayawan menyarankan agar sebaiknya seluruh unsur kebudayaan dipindahkan semuanya, tetapi dengan beberapa syarat.

Hasil dari pertemuan kedua belah pihak dicapai kesepakatan sebagai berikut: (1) yang digabungkan dengan pariwisata adalah semua unsur kebudayaan (bahasa Jawa: *bedhol desa*), tidak hanya sebagian seperti yang diusulkan oleh bidang pariwisata; (2) misi kebudayaan setelah bergabung dengan pariwisata akan tetap sama dengan ketika bersatu dengan pendidikan, yaitu mengutamakan misi pembinaan, pengembangan dan perlindungan; (3) bidang pariwisata melaksanakan misi pemanfaatan dalam kaitan sebagai obyek wisata budaya; (4) bahwa keberadaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sekretariat Lembaga Sensor Film tetap berada di lingkungan pendidikan (Depdiknas). Sayang, kesepakatan tidak dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani bersama, sehingga dalam perjalanan penggabungan terjadi gesekan-gesekan yang tidak menguntungkan bidang kebudayaan.

Dari empat kesepakatan itu, kesepakatan butir *b* yang sangat ditekankan oleh para budawayan dan seniman agar terus ditegakkan, yaitu bagaimana agar misi pelestarian kebudayaan bangsa tidak terbawa arus pada misi komersialisasi kebudayaan bangsa. Dengan adanya perubahan itu, bidang kebudayaan dipecah menjadi dua direktorat jenderal, yaitu (1) Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala dijabat oleh Dr. IGN Anom; dan (2) Direktorat Nilai Budaya, Seni, dan Film dijabat oleh Dr. Sri Hastanto, S.Kar.

Penyusunan Strategi Kebudayaan

Dalam masa jabatannya IGN Anom menghimpun sejumlah pakar kebudayaan budayawan dan seniman

untuk menyusun strategi pemajuan kebudayaan bangsa. Dalam mencapai visi dan misi kebudayaan nasional melalui suatu langkah atau cara yang telah ditentukan, diperlukan adanya strategi yang merupakan suatu pendekatan praktis, sehingga tujuan dapat dicapai secara optimal. Kekeliruan dalam pemilihan strategi akan berakibat negatif pada kebudayaan itu sendiri.

Setelah dibahas melalui seminar di Hotel Ibis, Slipi Jakarta yang dihadiri para budayawan, seniman, cendekiawan dan tokoh masyarakat ada empat hal dijadikan fokus kegiatan sebagai strategi dasar pembangunan kebudayaan. Antara lain hadir Prof. Dr. Daoed Joesoef, Prof. Dr. HAAR Tilaar, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Andre Hardjana, Prof. Dr. Ki Supriyoko, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Kuntowijoyo dll. Keempat strategi dasar yang perlu digunakan dalam pemajuan kebudayaan nasional Indonesia meliputi: pengembangan kebudayaan nasional, pelestarian kebudayaan daerah, peningkatan ketahanan budaya masyarakat dalam menghadapi datangnya kebudayaan asing serta peningkatan peran Indonesia dalam fora internasional.

Peresmian bantuan pemugaraan Angkor Wat

Sewaktu Dr. IGN Anom menjabat sebagai Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, sebagai kebijakan Direktur Jenderal Kebudayaan (Prof. Dr. Edi Sedyawati), mulai dirintis bantuan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Kamboja berupa sebuah proyek pemugaran salah satu candi pada kompleks

percandian Angkor Wat. Tim yang ditugasi antara lain Prof. Dr. Soekmono (mantan kepala proyek pemugaran candi Borobudur), didampingi Dr. IGN Anon, dan Drs. Samidi (alm.) mulai melakukan penjajagan.

Tugas Tim adalah menjelaskan kepada pemerintah Kamboja tentang tujuan proyek dan pemilihan sasaran pemugaran yang sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Dengan diantar oleh staf Kedutaan Besar RI di Kamboja, tim mengadakan kunjungan kehormatan kepada beberapa menteri dan secara khusus bertemu dengan Ketua Badan Otorita Angkor Wat. Pada kesempatan kunjungan tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan ini janganlah dilihat dari besarnya dana yang tersedia, melainkan dari tujuan utamanya, yaitu mempraktekkan dan meningkatkan kemampuan teknis dari para teknisi dan pekerja pemugaran dari Kamboja.

Sebelum memulai pemugaran terlebih mengundang teknisi dari Kamboja untuk mengikuti pelatihan di Borobudur. Semua biaya pelatihan selama di Borobudur dan biaya pulang-pergi ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Dari sekian banyak bangunan yang ada di kompleks Angkor Wat, bangunan yang dilihat setelah dilakukan studi kelayakan adalah Pintu Gerbang Tenggara (*South East Gate*), Gerbang Timur Laut (*North East Gate*) dan Gerbang Timur (*East Gate*).

Setelah teknisi Kamboja memiliki keterampilan, dengan didampingi teknisi dari Indonesia a.l.: Drs. Samidi, Drs. Dukut Santoso, Ismijono, Drs. Sadirin, Suyud Winarno dan Drs. Bambang Sumedi, secara bergantian mendampingi teknisi Kamboja sekaligus sebagai pengawas jalannya

pemugaran. Dengan pola kerja seperti itu terbukti disambut dengan sangat antusias oleh pemerintah Kamboja.

Cara kerja dan prestasi yang ditunjukkan oleh tenaga teknis dari Indonesia bersama tenaga Kamboja itu menarik perhatian negara-negara lain yang sedang melakukan program bantuan pemugaran Angkor Wat yang didanai oleh masing-masing negara. Terbukti, ketika proyek sedang berjalan, ada tawaran kepada teknisi dan pekerja Kamboja untuk bekerja pada proyek pemugaran Angkor Wat dari negara lain seperti Amerika, Perancis, dan Jepang. Meskipun mereka ditawari akan dibayar dengan gaji dua kali lipat dari yang selama itu mereka peroleh, mereka tidak pernah mau menerimanya.

Di tengah-tengah pelaksanaan pemugaran sempat dikunjungi oleh Mendikbud Prof. Wardiman Djojonegoro dan Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. Edi Sedyawati. Beliau menyempatkan diri melihat pelaksanaan pemugaran serta memberi pesan dan arahan guna meningkatkan motivasi dan dedikasi kerja dalam rangka alih teknologi dan persabatan di antara kedua bangsa.

Hasil dari bantuan pemugaran diresmikan oleh Pangeran Ranarit tahun 2000. Sebelum acara persemian, Direktur Jenderal Kebudayaan bertemu dengan Princess Bopha Devi (Putri Pangeran Norodom Sihanok), yang saat itu juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Seni (*Minister of Culture and Arts*), Kamboja. Pertemuan didampingi oleh Duta Besar Indonesia di Kamboja (Nasrudin Nasution) dan Direktur, Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Drs. Nunus Supardi), Direktur Hubungan Sosial, Kebudayaan, dan

Penerangan Departemen Luar Negeri (Drs. Hupudio Supardi). Acara peresmian ditutup dengan malam kesenian oleh Tim Kesenian yang dibawa dari Indonesia yang dipimpin oleh penari terkenal, Retno Maruti.

Proyek bantuan pemerintah Indonesia itu dikenal dengan nama *Indonesian Technical Assistance for Safeguarding Angkor* (ITASA). Dengan berakhirnya pemugaran itu berarti Indonesia tercatat dua kali alih teknologi pemugaran antara Indonesia dan Kamboja. Yang satu lagi adalah ketika pada masa pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1929 seorang teknisi pemugaran Angkor, Henri Marshal datang ke Indonesia (Jawa) mempelajari metode pemugaran yang dikenal dengan metode anastilosis. Setelah memahami teori itu Henri Marshal kemudian kembali ke Kamboja dan menerapkan metode itu pada pemugaran candi di di Kamboja.

Peresmian Galeri Nasional

Pada masa jabatan Prof. Dr. Fuad Hassan, gedung yang terletak di Jln. Medan Merdeka Timur No. 14 Jakarta dipugar dijadikan Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (GPSR DEPDIKBUD). Diresmikan tahun 1987 bersamaan dengan pameran bertema "Retrospektif 80 Tahun Affandi" oleh Mendikbud Prof. Dr. Fuad Hassan.

Selanjutnya, berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 34/MK.WASPAN/ 4/1998, tanggal 30 April 1998, GPSR DEPDIKBUD disetujui menjadi Galeri

Nasional. Untuk ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbitlah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 099a/0/1998, 8 Mei 1998 ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Wiranto Arismunandar. Pada masa jabatan IGN Anom sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan gedung itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Juwono Sudarsono pada tanggal 8 Mei 1999, setelah menunggu selama dua belas tahun.

Merintis penulisan buku sejarah Indonesia

Setelah melalui proses yang lama, pada 2010 telah terbit 9 jilid berjudul “Indonesia dalam Arus Sejarah”. Buku yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia mulai dari masa prasejarah hingga sekarang itu ditulis oleh 100 orang ahli sesuai kaidah akademik dan merekonstruksi sejarah secara bebas. Sebagai editor umum adalah Prof. Dr. Taufik Abdullah dan Prof. Dr. AB Lopian. Lahirnya buku itu dirintis oleh Dr. IGN Anom waktu menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan. Buku itu diharapkan akan menjadi buku acuan dalam penulisan buku pelajaran sejarah bangsa Indonesia.

Catatan akhir

Setelah bidang kebudayaan digabung dengan bidang pariwisata, nomenklatur “Direktorat Jenderal Kebudayaan” dihapuskan. Bidang kebudayaan dipecah menjadi dua direktorat jenderal, yaitu Direktorat Sejarah dan Purbakala (Ditjen Sepur), dan Direktorat Jenderal Nilai Budaya dan

Film (Ditjen NBSF. Pada saat itu IGN Anom ditunjuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, dan Dr. Sri Hastanto menjadi Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

Setelah pensiun 2003, IGN Anom pulang kembali ke kampung halamannya di Bali. Selain sehari-hari menjadi pemangku Pura Sukaluwih di desa Saba, kabupaten Gianyar, IGN Anom masih aktif mengajar dan menguji di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) di Bali. Di sela-sela kesibukan mengajar ia juga masih aktif menghadiri seminar, diskusi kebudayaan dan menulis makalah dan artikel.



Atas: Mendikbud Prof. Dr. Juwono Sudarsono sedang menandatangani prasasti peresmian Galeri Nasional, Kanan: Prof. Dr. Edi Sedyawati, mantan Dirjenbud sedang mengisi buku tamu. Bawah: Dirjenbud RI Dr. IGN Anom, bertemu Menteri Kebudayaan dan Seni, Kamboja Princess Bopha Devi. Dari ki-ka: Nunus Supardi, (Direktur Purbakala), Hupudio Supardi (Dirhubsosbudpen Deplu), Nasrudin Nasution (Dubes RI di Kamboja) penterjemah, Dr. IGN Anom, dan Princess Bopha Devi.



Atas: Pertemuan Dirjenbud, Dr. IGN Anom dengan Duta Besar RI di Kamboja Nasrudin Nasution di Kedutaan Besar RI di Kamboja. Bawah: kunjungan ke lokasi sebelum pemugaran di kompleks Angkor Wat sebelum acara peresmian.

BAB X

PROF. KACUNG MARIJAN PhD (2012-2015)

Sejak 19 Juli 2013, Prof. Kacung Marijan PhD menjabat Direktur Jenderal Kebudayaan ke-7 setelah sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.⁹ Sebelum diangkat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Kacung Marijan menjabat sebagai staf ahli bidang Kerja sama Internasional, merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Kacung. Prof. Kacung adalah Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Meraih gelar PhD ilmu politik di Australian National University Canberra, Australia.



*Prof. Kacung Marijan PhD Dirjen
Kebudayaan 2013-2015*

Bagi Prof. Kacung meskipun latar belakang pendidikannya adalah ilmu politik, tetapi bidang kebudayaan bukan hal

⁹ Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Drs. Gatot Gautama, 2012-2013, kemudian digantikan oleh Drs. Nono Adya Supriyanto, M.M., M.T, 2013-2015.

baru. "Saya bukan seniman, tetapi sejak kecil saya suka menikmati seni", demikian pengakuannya. Ia sering menonton pertunjukan teater tradisional seperti ludruk, kethoprak, yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, yang biasa disebut Kethoprak Tobong. Selain itu juga sering menonton pertunjukan wayang (kulit dan wong) serta siaran drama radio.

Tidak hanya seni tradisional, tetapi juga gemar menonton pertunjukan film. Bukan di gedung bioskop melainkan di lapangan yang sering disebut pertunjukan film "Misbar" (gerimis bubar) atau layar tanceb. Cita-citanya sejak kecil adalah menjadi seniman, pernah menulis puisi dan cerita pendek (untuk anak-anak) dan esai. Bahkan juga berangan-angan menjadi bintang film. Kalau akhirnya ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan menurut Prof. Kacung *"Itu namanya sudah ada yang mengatur"*.

Setelah sebelas tahun bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata nomenklatur satuan kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan dan jabatan Direktorat Jenderal Kebudayaan sempat menghilang. Bidang kebudayaan dipecah menjadi dua direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala dan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

Prof Kacung Marijan lahir di Lamongan, 25 Maret 1964. Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan ia pernah bekerja di berbagai bidang. Pernah menjadi guru SMA Nasional Lamongan dari 1985 sampai dengan 1987. Sambil bekerja sebagai guru, Prof. Kacung Marijan kuliah di Fakultas Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 1988 sebagai lulusan

terbaik FISIP Universitas Airlangga. Berbekal prestasi belajar yang cemerlang itu Kacung Marijan diterima menjadi dosen tetap Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak 1990. Tiga tahun mengajar (1993) Kacung Marijan dinobatkan Dosen Teladan Nomor 2 Universitas Airlangga. Masih soal prestasi mengajar pada 2011 Kacung Marijan Dosen dinyatakan sebagai dosen berprestasi Nomor Satu Universitas Airlangga.

Menyusul prestasinya sebagai dosen teladan, tahun 1995-1997 Kacung Marijan berturut mendapatkan kesempatan menambah pengalaman dan memperdalam ilmunya di luar negeri. Tahun 1995 mendapat beasiswa ADS untuk program Master, tahun 2000 mendapatkan undangan sebagai Visitor, the 2000 Election, dari Pemerintah Amerika Serikat, tahun 2001 mendapat Beasiswa ADS untuk program PhD, tahun 2006 Visiting Fellow, the Department of Economics, Research School of Asia and Pacific Studies, the Australian National University (June-July), tahun 2007 Visitor, the Department of Political and Social Change, Research School of Asia and Pacific Studies, the Australian National University (October 2006-July 2007). Disusul kemudian tahun 2008 mendapatkan Professorial Fellow di the School of Humanities and Social Sciences, the UNSW @ADFA Canberra (7-27 Oktober) dan tahun 2009 mendapatkan Professorial Fellow di the School of Humanities and Social Sciences, the UNSW @ADFA Canberra (Oktober-Desember).

Selain Kacung Marijan ahli di bidang ilmu politik juga mempunyai kegemaran menulis berbagai artikel, cerita

anak-anak dan puisi. Kacung Marijan adalah seorang kolumnis di sejumlah media massa, seperti Kompas, Jawa Pos, Seputar Indonesia, Jurnal Nasional, Surabaya Post, dan media lainnya, mengenai Masalah-Masalah Sosial, Politik, dan Kebudayaan. Kacung Marijan juga sering diundang sebagai pembicara seminar, *talkshow*, mengenai Masalah-masalah Sosial, Politik, Keagamaan, dan Kebudayaan. Sebagai ahli di bidang ilmu politik tentu saja Kacung Marijan dekat dengan urusan politik. Ia menjadi konsultan part-time di Partnership untuk Program Penguatan Perwakilan dan Partai Politik; Pendiri dan Peneliti Pusat Studi Hak-Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PusDeHAM), Surabaya.

Selain bidang politik, Kacung Marijan juga memiliki banyak pengalaman di bidang kebudayaan. Pernah menjadi Juara Baca Puisi Tingkat SLTP Kecamatan Sugio, Lamongan 1980. Di lingkungan SMA, ia duduk sebagai Ketua Seksi Kesenian OSIS SMA Nasional Lamongan 1983, Juri Lomba Baca Puisi Universitas Airlangga 1991, Penulis Cerita Anak-Anak untuk Harian Surabaya Post 1989-1991, Penulis puisi (tidak dipublikasikan) sejak 1986, dan pembicara dalam diskusi-diskusi kebudayaan, seperti di LESBUMI, pengurus Dewan Kesenian Surabaya, Dewan Kesenian Jawa Timur dan Dewan Kesenian Gresik.

Pengalaman dalam jabatan struktural antara lain sebagai Ketua S2 Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga (2007-2010), Koordinator Program Mahasiswa Kemitraan Negara Berkembang Universitas Airlangga (2007-2010), Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga wakil dosen 2005-2008, sekaligus Sekretaris

Komisi III Senat Akademik, dan sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga (2010-2014).

Setelah ditarik ke pusat, Prof. Kacung Marijan menjabat sebagai Plt. Staf Ahli Mendikdub Bidang Kerja sama Internasional mulai Agustus 2011- Februari 2012. Setelah itu ditetapkan sebagai Staf Ahli Mendikdub Bidang Kerjasama Internasional (Februari 2012). Setelah bidang kebudayaan disatukan kembali dengan bidang pendidikan, lahir kembali Direktorat Jenderal Kebudayaan, seperti sebelas tahun yang lalu. Sebelum Prof. Kacung ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, urusan bidang kebudayaan ditangani langsung oleh Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti. Beberapa bulan menjabat Plt Dirjen Kebudayaan dan kemudian ditetapkan sebagai Dirjen Kebudayaan sampai dengan 31 Desember 2016. Selama Prof. Kacung Marijan menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan beberapa kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut:

Pameran Museum se-Indonesia

Kegiatan merupakan forum pertemuan museum di Indonesia dengan memamerkan koleksi yang dimilikinya. Tentu saja disesuaikan dengan pameran yang setiap tahun berbeda-beda. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh museum-museum pemerintah pusat dan daerah tetapi juga museum swasta dan museum pribadi. Melalui program ini diharapkan akan mendorong kerja sama dan meningkatkan masing-masing museum. Forum itu dilaksanakan setiap tahun.

Kongres Kebudayaan 2013 di Yogyakarta

Tahun 2013 diselenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) ke-7 setelah Indonesia merdeka. Penyelenggaraan kongres itu dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kehidupan bersama dalam keberagaman yang telah berlangsung sejak tumbuhnya kesadaran berbangsa tersebut pasca reformasi telah diwarnai oleh berbagai konflik horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, sudah saatnya semua potensi budaya tersebut harus dipelihara dan terus ditanamkan kepada generasi muda.

Sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi dewasa ini, hubungan antarbudaya pun semakin terbuka dan saling memengaruhi. Sementara itu, selain hubungan budaya antaretnis memperlihatkan keterbukaan, terjadi pula kristalisasi kepentingan etnis atau daerah yang dapat mengancam upaya membangun keindonesiaan. Berbagai permasalahan tersebut di atas, harus ditangani secara sungguh-sungguh, berencana, dan berkelanjutan. Penanganan itu tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu dibahas secara menyeluruh, mendalam, dan tuntas dalam forum KKI. Kongres diselenggarakan di Hotel Ambarkromo Yogyakarta tanggal 8-11 Oktober 2013.

Tema kongres adalah “Kebudayaan untuk Keindonesiaan.” Tema tersebut dibagi ke dalam Subtema sebagai berikut: (1) Demokrasi Berkebudayaan dan Budaya Berdemokrasi; (2) Warisan dan Pewarisan Budaya; (3) Diplomasi Kebudayaan; (4) Pengelolaan Kebudayaan; (5) Sumberdaya Kebudayaan. Kongres ditutup de-

ngan menghasilkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi.

Sertifikasi Warisan Budaya Tak Benda

Selain memiliki banyak benda warisan budaya (*tangible*), Indonesia juga memiliki warisan budaya tak benda (*intangible*) kebudayaan. Berkenaan dengan warisan budaya tak benda, Direktorat Jenderal Kebudayaan melaksanakan pendataan, pendokumentasian dan pemberian sertifikat sebagai bentuk penetapan sebagai warisan budaya tak benda. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap setiap tahun dengan melibatkan para ahli.

Penetapan itu merupakan wujud komitmen pemerintahan Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) tahun 2003. Ratifikasi disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda. Hasil dari program sertifikasi telah diserahkan kepada masing-masing pemangku budaya. Penyerahan sertifikat penetapan warisan budaya tak benda telah dilangsungkan pada 17 Oktober 2014 di Museum Nasional Jakarta.

Rumah Budaya Indonesia

Kemendikbud, dalam hal ini Ditjenbud telah melakukan kajian tentang perlu dibangunnya pusata kegiatan kebudayaan di beberapa negara. Nama yang telah sering disebut adalah Rumah Budaya Indonesia (RBI) dan telah

ditentukan di sepuluh negara. Kesepuluh negara yang akan menjadi titik pembangunan RBI ini adalah Amerika, Jerman, Belanda, Perancis, Turki, Jepang, Timor Leste, Singapura, Myanmar, dan Australia. Pendirian RBI bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia di luar negeri yang pada gilirannya akan meningkatkan hubungan masyarakat Indonesia dengan dunia luar.

Warisan budaya dunia benda dan tak benda

Sesuai dengan definisi yang ditetapkan oleh UNESCO, warisan dunia (World Heritage) terdiri atas warisan alam dunia dan warisan budaya dunia. Warisan budaya dunia adalah kawasan yang memiliki nilai universal luar biasa dan mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya yang berada dalam wilayah NKRI serta ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Warisan budaya benda yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (Benda) adalah: (1) Kompleks candi Borobudur (1991); (2) Kompleks candi Prambanan (1991); (3) Situs Prasejarah Sangiran (1996); Lanskap Budaya sistem Subak di Bali (2012).

Sementara itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendefinisikan warisan budaya tak benda adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta alat-alat, benda (alamiah), artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka.

Warisan budaya tak benda ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksinya dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan daya cipta insani. Warisan budaya yang telah ditetapkan oleh UNESCO adalah: (1) Wayang, sebagai Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity, 2003; (2) Keris, sebagai Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity, 2005; (3) Batik, Representatif List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity, 2009; (4) Angklung sebagai Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity, 2010; (5) Tari Saman sebagai Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity, 2011; (6) Noken Representatif List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity, 2012); dan (7) Sembilan tari Bali yang dibagi ke dalam 3 genre yaitu tari Rejang, Sanghyang Dedari, Baris Upacara, Topeng Sidhakara, Dramatari Gambuh, Dramatari Wayang Wong, Legong Kraton, Joged Bumbung, dan Barong Ket. (2015). Program pengusulan warisan budaya tak benda yang lain ke UNESCO akan terus dilanjutkan.

Apresiasi Film Indonesia (AFI)

Dengan lahirnya kebijakan untuk mengembalikan bidang kebudayaan bersatu dengan pendidikan (2011), urusan film ikut serta pindah ke lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai pasal 1 angka 12 UU No. 33/2009 tentang Perfilman, menteri yang mengurus

masalah film adalah menteri yang membidangi kebudayaan. Untuk mengurus film Kemendikbud membentuk Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman. Salah satu programnya adalah menyelenggarakan acara Apresiasi Film Indonesia (AFI).

AFI merupakan kegiatan pemilihan film unggulan, penilaiannya berpatokan pada **kandungan** nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa. Program AFI merupakan kegiatan apresiasi karya film untuk membangun budaya toleransi terhadap keberagaman, mencerdaskan, pendidikan, dan cinta tanah air. Proses penyeleksian film berawal dari seleksi langsung oleh panitia AFI. Selanjutnya, Dewan Juri akan menentukan pemenang untuk pemeran utama/pendukung pria/wanita, penata suara, sutradara, pengarah sinematografi, penulis skenario cerita asli, pengarah artistik, penyunting gambar, dan penata musik. Acara yang dimulai 2012 itu diselenggarakan setiap tahun.

Pada awal diselenggarakannya AFI banyak yang memberikan komentar sebagai bentuk tandingan dari Festival Film Indonesia. Hal itu sudah disadari sejak awal, dan oleh sebab itu arah dan tujuan AFI lebih ditekankan pada upaya mendorong minat masyarakat untuk mengapresiasi film-film nasional yang memiliki nilai kultural edukatif tetapi justru kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Kalau FFI cenderung pada masalah komersial, sementara AFI lebih memfokuskan pada pemilihan film-film yang memiliki pesan pendidikan dan kebudayaan.

Program Nonton Bareng (NOBAR) Film Inspiratif

Film mempunyai daya penetrasi yang sangat cepat dan mudah, sehingga dapat dijadikan media belajar yang efektif bagi para siswa. Ada yang menyebut film mempunyai efek “magic” cukup kuat dalam mempengaruhi orang. Film juga menjadi media melakukan pendekatan komunikatif (*communicative approach*) yang sangat baik dalam dunia pendidikan. Dari menonton film siswa belajar mengenali dan memahami berbagai nilai budaya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab dll. Sejumlah nilai yang dapat dijadikan bekal dan modal dalam membangun karakter keindonesiaan para siswa. Menonton film menjadi media penyemaian nilai-nilai budaya bangsa di dalam diri para siswa.

Seperti telah disinggung di bagian depan, setelah Prof. Wiendu dilantik sebagai Wakil Menteri bidang Kebudayaan kepada pers menyatakan akan mendekatkan bidang kebudayaan dengan pendidikan. Dalam suatu rapat (akhir 2011), penulis menyampaikan gambaran tentang perfilman nasional. Dari pengalaman para produser film, memproduksi film yang sarat dengan muatan kultural-edukatif justru kurang menarik bagi penonton, sehingga produser cenderung rugi. Yang disenangi penonton adalah jenis film horor, kekerasan, seks dan campuran dari ketiganya. Mungkin, untuk “menutup” kerugian yang diderita para produser, film-film jenis kultural-edukatif dapat dijadikan sarana belajar bagi siswa.

Dengan menonton film yang memiliki nilai-nilai kultural-edukatif siswa akan banyak mendapat pelajaran tentang nilai-nilai kejujuran, kerja keras, toleransi, disiplin, hemat dll. Tampaknya, dengan sekilas gambaran tentang perkembangan perfilman nasional dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan, pada 2012 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, mencanangkan program baru yang diberi judul **“NONTON BARENG (NOBAR) FILM INSPIRATIF”** untuk para siswa dan guru. Program ini pada dasarnya merupakan upaya membangun “Persemaian Nilai Budaya sebagai Pembentuk Karakter Bangsa”. Program ini dilaksanakan setiap tahun di beberapa kabupaten/kota, terutama yang belum memiliki gedung bioskop.

Revitalisasi Museum Negeri Provinsi

Keberadaan Museum Negeri Provinsi di setiap provinsi sebelum dilaksanakan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah berada di bawah binaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Januari 2001 semua Museum Negeri Provinsi diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Tetapi dalam perjalanan hingga 2012 museum-museum itu tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Selain itu, keberadaan museum daerah dan swasta juga banyak memerlukan bantuan revitalisasi. Sebagai realisasi dari 8 pilar kebijakan, Ditjenbud mencanangkan program, pembangunan museum baru yang bersifat modern, dan revitalisasi museum-museum yang telah ada.

Pembangunan museum baru

Ditjenbud telah merencanakan membangun 15 museum baru, sebagai upaya untuk melestarikan berbagai benda warisan sejarah dan budaya bangsa. Museum-museum tersebut adalah Museum Islam Nusantara Jombang, Museum Situs Semedo Tegal, Museum Situs Gua Harimau Sumatera Selatan, Museum Perang Dunia Kedua dan Trikora, Museum Batik, Museum Maritim, Museum Song Terus Pacitan, Museum Situs Candi Prambanan dan Ratu Boko, Museum Dongeng Nusantara, Museum Musik, Museum PDRI, Museum Kerinci, Museum Subak Gianyar, Museum Coelacanth Ark Manado, dan Museum Keris. Selain membangun gedung museum baru, juga dipersiapkan tenaga yang akan mengelolan museum.

Revitalisasi museum

Yang pertama revitalisasi diarahkan pada penataan eksterior atau tata ruang luar museum, terutama yang berkenaan dengan tampilan muka atau pada fasade bangunan, ruang masuk bangunan (*entrance building*). Tujuannya agar bangunan mampu memberi citra sebagai museum yang mampu mengundang kehadiran publik. Selain itu juga diarahkan agar museum menjadi lebih 'terbuka' dan ramah terhadap lingkungan sekitar.

Yang kedua, diarahkan pada penataan Interior-ruang publik terutama pada penataan kembali interior museum, khususnya penataan interior Ruang Pameran Tetap, zona non koleksi-publik, yaitu ruang penyimpanan (*storage*), diikuti ruang pengenalan (*introduction area*) ruang

laboratorium, dan bengkel kerja preparasi ruang lobi museum, ruang informasi, ruang tiket, toilet, ruang multi media, dan ruang fasilitas penunjang yang diperlukan. Konsep penataan interior pada ruang publik boleh berbeda dan lebih lunak persyaratannya dibandingkan dengan ruang pameran dan penyimpanan, meskipun tetap memperhatikan unsur 'safety' pengunjung atau publik.

Revitalisasi Taman Budaya

Selain mencangkan revitalisasi museum, Ditjenbud juga mencanangkan revitalisasi Taman Budaya. Kondisi fisik dan pengelolaan Taman Budaya yang ada di beberapa provinsi juga sama dengan museum. Dalam melakukan revitalisasi juga akan mengarah pada bagian-bagian yang tata ruang luar dan pada beberapa bagian dalam. Selain Taman Budaya, Ditjenbud juga melakukan revitalisasi keberadaan Galeri Nasional di Jln. Medan Merdeka Timur Jakarta.

Pamong Budaya Non-PNS

Dengan adanya kebijakan nasional pembatasan penerimaan pegawai baru (*zero growth*) jumlah tenaga kebudayaan di pemerinatahan dewasa ini semakin berkurang karena pensiun. Penerimaan tenaga baru sangat terbatas. Berbagai unit kerja di pusat maupun di daerah tengah menghadapi masalah kurangnya tenaga kebudayaan. Apabila tidak segera dilakukan upaya untuk memecahkan masalah tersebut dikhawatirkan jalannya organisasi akan terganggu.

Salah satu program pembinaan SDM kebudayaan di tahun 1995-an adalah program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan bidang Kebudayaan (SP3K). Mulai tahun 2012, Direktorat Jenderal kebudayaan menghidupkan kembali program itu dengan bentuk yang agak beda. Bentuk yang dipilih adalah melalui perekrutan tenaga sarjana kebudayaan yang belum berstatus PNS. Tenaga kebudayaan itu diberi sebutan Pamong Budaya Non-PNS, yang berarti selama melaksanakan tugas-tugas pemajuan kebudayaan itu berstatus bukan pegawai negeri sipil. Pemilihan melalui penyaringan dan kemudian mereka dididik dan dilatih terlebih dulu. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya hampir sama dengan Pamong Budaya PNS, yaitu melaksanakan tugas-tugas pelestarian dalam arti perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seluruh aspek kebudayaan yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan di wilayah yang telah ditentukan.

Penghargaan kepada pelestari budaya

Penghargaan Kebudayaan Kategori Pelestari adalah penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjenbud) kepada tokoh atau beberapa orang yang memiliki integritas (personalitas dan kreativitas) untuk menggali, menjaga, mengembangkan, dan melindungi karya budaya. Antara lain dalam hal kuliner, kerajinan dan tata rias tradisional. Prestasinya memperlihatkan dedikasi dalam konteks pelestarian: menjaga, melindungi, dan menggali karya budaya yang telah

ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya sehingga mendorong pelibatan masyarakat

Pendeklarasian Hari Museum Indonesia

Sesuai kesepakatan para Kepala Museum se-Indonesia, selain Indonesia ikut memeringati “Hari Museum” Dunia (Museum Day), juga menginginkan Indonesia memiliki “Hari Museum” sendiri. Pemilihan itu dilakukan melalui seminar di Benteng Vredeburg Yogyakarta sejak 2010. Seminar menyepakati tanggal **24 Desember** sebagai “Hari Museum Indonesia”. Pilihan itu didasarkan pada pertimbangan tanggal 24 Desember 1957, sebagai hari penting karena pada tanggal itu dibentuknya “Urusan Museum” pada Jawatan Kebudayaan. Penetapan tanggal pilihan itu ternyata tidak segera diproses, sehingga terkatung-katung sampai dengan 2015.

Ketika pilihan tanggal itu didiskusikan ulang, peserta menilai tanggal “24 Desember” kurang tepat karena saat itu menjelang akhir tahun anggaran dan orang sibuk menyongsong Hari Natal dan Tahun Baru. Akhirnya disepakati usulan baru, yaitu tanggal 12 Oktober (1962) sebagai hari penting. Tanggal itu dinilai bersejarah karena pada tanggal itu diselenggarakan Musyawarah Museum pertama, se-Indonesia. Akhirnya, pada 2015 Prof. Kacung Marijan mendeklarasikan tanggal 12 Oktober sebagai “Hari Museum Indonesia” di hadapan para Kepala Museum se-Indonesia bersamaan dengan acara Pertemuan Nasional Museum di Malang 2015.

Kongres Kesenian III, 2015

Pada 2 Desember 2015 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan meresmikan pembukaan Kongres Kesenian III. Pelaksanaan kongres ini termasuk terlambat karena sesuai rekomendasi Kongres Kesenian II 2005, kongres berikutnya diselenggarakan 5 tahun kemudian, berarti pada 2010. Pada kongres kali ini tema yang dipilih adalah “Kesenian dan Negara dalam Arus Perubahan”. Kongres ini menghasilkan sejumlah kesimpulan dan deklarasi.

Catatan akhir

Pada 31 Desember 2015 jabatan Dirjen Kebudayaan Prof. Kacung Marijan PhD digantikan oleh Dr. Hilmar Farid. Pergantian itu seiring dengan perubahan pimpinan negara dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ir. Djoko Widodo. Proses lelang jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan sejak Mei 2015 baru terlaksana bulan Desember 2015. Dengan Keputusan Presiden Nomor 24/TPA Tahun 2015, Dr. Hilmar dilantik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Anies Baswedan.

Dalam keterangannya di harian Media Indonesia, seusai mengakhiri masa tugasnya sebagai Dirjen Kebudayaan Prof. Kacung Marijan akan kembali mengajar di almamaternya, Universitas Airlangga, Surabaya. Selain itu, ia juga akan merampungkan novel yang tengah ditulisnya. Isi cerita novel itu apa masih rahasia. Kita tunggu saja semoga segera terbit. (Media Indonesia, 3/1/2016).



Atas: Prof. Dr. Kacung Marijan PhD, menyalami Direktur Jenderal Kebudayaan yang baru, Dr. Hilmar Farid (kanan) setelah pelantikan, 31/12/2015. Bawah: Pembukaan pameran bertajuk "Teruntuk Sang Maha Indah" oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Kacung Marijan PhD, disaksikan oleh Prof. Dr. -Ing Wardiman Djojonegoro (Mendibud 1993-1998), Dra. Intan Mardiana (Kepala Museum Nasional, Drs. Luthfi Asiarto (mantan Direktur Permuseuman), dan Nunus Supardi (pemerhati budaya)



Atas: Prof. Kacung Marijan PhD, Direktur Jenderal Kebudayaan ketika meresmikan peringatan Hari Film Nasional Bawah: Bawah: penyerahan penghargaan kepada para pelestari budaya daerah



Atas: *Pembukaan Pertemuan Nasional Museum 2015 di Malang.*
 Bawah: *Peserta Pertemuan Nasional Museum di Malang.*



Atas: *Pembacaan Deklarasi Hari Museum oleh Prof. Kacung Marijan PhD.*
 Bawah: *Prof. Kacung Marijan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan*



Peringatan “237 Tahun Museum Nasional dan pembukaan Cafe Museum Nasional oleh Dirjenbud, Prof. Kacung Marijan PhD, didampingi oleh Kepala Museum Nasional, Dra. Intan Mardiana.

BAB XI

PENUTUP

Sebelum merangkum hasil pelacakan jejak setengah abad para Direktur Jenderal Kebudayaan, perlu juga menyimak hubungan antara kelembagaan yang dipimpinnya dengan kebudayaan itu sendiri. Seorang bankir kaya dari Kongo yang jatuh cinta pada kebudayaan, telah menyimpulkan hubungan antara keduanya ibarat hubungan antara ibu dengan anaknya. Ia adalah Daniel Etounga-Manguelle. Secara jelas Daniel menggambarkan budaya adalah ibu dan lembaga adalah anak. *Culture is the mother; institution are the children*. Pengandaian hubungan antara ibu (budaya) dengan anaknya (kelembagaan) menunjukkan betapa dekatnya hubungan itu. Itu berarti di dalam membentuk, menata maupun mengubah kelembagaan yang mengurus kebudayaan harus mempertimbangkan faktor kedekatan hubungan sebagai faktor utama. (Lawrence E. Harrison & Samuel P. Huntington (Ed.), *Culture Matters* 2000: xviii)

Penetapan nomenklatur kelembagaan bidang kebudayaan seperti apa pun bentuknya diharapkan tidak menyebabkan terjadi keretakan hubungan antara keduanya. Menurut Daniel hubungan itu tidak hanya sesaat tetapi akan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.

Kalau perubahan itu sampai terjadi dalam waktu yang pendek, maka perubahan-perubahan yang sering kali terjadi itu bisa jadi karena desakan politik kekuasaan yang mempengaruhinya. Bisa jadi berbagai perubahan yang terjadi dalam penataan kelembagaan selama ini karena adanya desakan politik juga, termasuk kelembagaan di bidang kebudayaan.

Hubungan antara kebudayaan dan pemerintahan (kekuasaan) tampaknya memang selalu ada kedekatan dan saling membutuhkan. Dengan bertolak dari arti kata *budaya* itu sendiri, sebagai sistem simbol atau sistem tanda yang hidup di tengah-tengah kelindan kekuasaan, menurut Prof. Dr. Djoko Saryono, tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan kekuasaan itu. Yang dimaksud dengan kata *kelindan* adalah benang berpilin untuk memutar jantera. Dalam hal ini, budaya menjadi bagian benang berpilin untuk memutar jantera kekuasaan.

Mengapa budaya ditempatkan sebagai kelindan? *Pertama*, bahwa budaya sebagai sistem simbol atau sistem tanda selalu berada, hidup, dan berkembang di dalam ruang penuh isi kekuasaan yang beraneka ragam (kuasa sejarah, sosial, politik, ekonomi, negara, pasar, dll.) tidak pernah dalam sebuah ruang hampa dan steril. Kekuasaan selalu hadir dan melekat di dalam budaya sehingga terjadilah persandingan, persentuhan, pergumulan, pergesekan, saling memberi pengaruh, bahkan tidak jarang saling menghegemoni. *Kedua*, sebagaimana ditunjukkan oleh Soemarsaid Moertono, dalam kekuasaan Jawa sejak dahulu hingga sekarang, sesungguhnya kebudayaan meru-

pakan salah satu pilar utama kekuasaan atau penguasa di samping pilar birokrasi dan militer. (Saryono, 2005:viii).

Bertolak dari pandangan itu, kunci agar keberlangsungan persandingan antara kebudayaan dan kekuasaan yang tidak dapat dihindari itu tidak merugikan kebudayaan, harus ada pengawalan dan pengawasan yang jelas dan ketat. Dalam pandangan Prof. Edi Sedyawati, hubungan antara kekuasaan dan kebudayaan dapat dilihat dari pergantian kekuasaan, yang membawa perubahan dalam penataan organisasi pemerintahan dalam pengurusan kebudayaan (Supardi, 2004:3) Meskipun terjadi pergantian kekuasaan, hal tersebut tidak selalu menyebabkan lembaga itu berhenti atau bubar. Lembaga itu dapat saja berubah nomenklaturanya, dipecah, digabung dengan bidang lain atau disatukan kembali, tetapi tetap ada kontinuitas kelembagaan dari kekuasaan sebelum dan sesudahnya.

Setelah lembaga kebudayaan hadir di dalam lingkaran pemerintahan untuk mengurus bidang kebudayaan dalam bentuk Direktorat Jenderal Kebudayaan, giliran berikutnya adalah hadirnya orang yang akan memimpin lembaga itu alias seorang direktur jenderal. Di tangan direktur jenderal hubungan antara ibu dan anak itu dikawal sehingga dapat berinteraksi secara intens dan efektif. Dari paparan sekilas perjalanan Direktorat Jenderal Kebudayaan selama setengah abad (50 tahun) tergambar hubungan ketiga elemen itu, yaitu antara budaya, lembaga dan pimpinan lembaga itu. Masing pemimpin dalam hal ini "direktur jenderal" telah meninggalkan jejak yang menunjukkan adanya dinamika, terutama mengenai konsep, kebijakan dan stra-

tegi dalam mengelola lembaga sebagai wadah untuk memajukan kebudayaan bangsa.

Dilihat dari sisi kelembagaan kebudayaan, dalam perjalanan setengah abad itu telah beberapa kali mengalami perubahan, penyempurnaan, pemisahan, penggabungan hingga penghapusan. Pada masa awal kemerdekaan karena faktor pemerintahan belum stabil dan keamanan negara sedang terancam, pemikiran ke arah penataan kelembagaan relatif stabil. Dibentuknya “Bahagian Kebudayaan” 1946 berlaku hingga 1948. Kemudian tahun 1948 diganti menjadi “Bagian D” sampai dengan 1949. Mulai 1949-1962 nomenklatur bidang kebudayaan berubah menjadi “Jawatan Kebudayaan”. Ini berarti nomenklatur “Jawatan Kebudayaan” berlaku selama 13 tahun. Mulai 1962, Jawatan Kebudayaan diganti menjadi Direktorat Kebudayaan sampai dengan 1966. Baru kemudian tahun 1966 lahir nomenklatur “Direktorat Jenderal Kebudayaan” hingga sekarang. Tanggal 4 Agustus 1966 “Direktorat Jenderal Kebudayaan” lahir.

Meskipun “Direktorat Jenderal Kebudayaan” hingga sekarang telah mencapai usia setengah abad, tetapi bukan berarti di dalamnya tidak terjadi gejolak perubahan. Masing-masing periode gejolak perubahan itu berbeda-beda. Bila dibandingkan antara masa kemerdekaan awal (1945-1965) dengan masa pembangunan (1965-1998) dan dengan masa reformasi (1998-sekarang), maka gejolak perubahan organisasi kebudayaan masa reformasi yang paling sering terjadi. Selama 18 tahun reformasi paling tidak telah mengalami sepuluh kali perubahan.

Sering dilakukannya perubahan kelembagaan sesungguhnya cenderung tidak efektif. Ketika terjadi perubahan, proses untuk untuk menata ulang itu diperlukan waktu yang lama. Selain, perubahan itu sering menyebabkan keresahan dan iklim kerja yang tidak serius, biaya yang ditimbulkan oleh perubahan itu juga tidak sedikit. Ganti nomenklatur berarti akan ganti kop surat, stempel, papan nama dll. Bisa jadi dengan sering terjadinya perubahan organisasi itu akan menyebabkan terjadinya kere-takan hubungan antara kebudayaan (ibu) dan lembaga (anak) seperti dikhawatirkan oleh Daniel Etounga-Mangu-elle. Mungkin perlu ada kajian tersendiri mengenai dampak dari perubahan organisasi terhadap kinerja karyawan.

Selanjutnya, bila dilihat dari sisi konsep, kebijakan dan strategi pemimpinya (direktur jenderal) juga memberikan gambaran yang titik penekannya berbeda-beda. Perbedaan itu terjadi karena situasi lingkungan yang berbeda-beda pula. Pada masa jabatan R.M. Indrosoegondo (Dirjen Kebudayaan ke-1), dapat dikatakan sebagai mengarah pada penataan kelembagaan dan SDM bidang kebudayaan. Pendirian Akademi Seni Rupa (ASRI), Akademi Seni Drama dan Tari (ASDRAFI), Akademi Tari Nasional Indonesia (ATNI) Konservatori Tari dan Karawitan (KOKAR) dll, menunjukkan bentuk kebijakan mencetak SDM kebudayaan yang akan mengurus kebudayaan. Selain itu, R.M. Indrosoegondo juga mengemban misi melakukan reha-bilitasi kebudayaan pasca peristiwa G30S/PKI dan persiapan pembangunan kebudayaan.

Pada masa jabatan Prof. Dr. I.B. Mantra (Dirjen Kebudayaan ke-2) misi penting yang harus dilakukan adalah

menyiapkan konsep pembangunan kebudayaan dalam Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Bila disimak buku Pelita I, rumusan pembangunan bidang kebudayaan tampak belum menemukan format yang utuh dan lengkap. Bidang kebudayaan saat itu masih disatukan dengan program Olah Raga. Salah satu konsep di bidang kelembagaan dari Prof. Mantra adalah perlunya membentuk unit-unit kerja yang akan mengurus seluruh aspek kebudayaan. Unit-unit yang berdiri dan sekarang masih ada adalah Taman Budaya, Museum Nasional, Museum Negeri Provinsi, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Wilayah, Balai Bahasa, dan Balai Arkeologi.

Sementara itu, pada masa jabatan Prof. Dr. Haryati Soebadio (Dirjen Kebudayaan ke-3) yang penting dicatat adalah mengenai konsep, kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan Prof. HS melakukan kajian ulang kebijakan masa jabatan Prof. Mantra yang dituangkan dalam buku *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan*, versi 1973. Tiga kali Prof. HS melakukan penyempurnaan buku itu, yaitu berupa buku versi 1980, 1983 dan 1986. Selain itu Dalam hal kebijakan penelitian kebudayaan daerah melalui proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, dan lembaga-lembaga penelitian seperti Javanologi, Sundanologi, Batakologi, dan Baliogi. Prof. Haryati juga aktif membangun kerja sama dengan instansi lain terkait.

Pada masa jabatannya telah melahirkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dirjen Kebudayaan

dengan Dirjen Radio Televisi dan Film, dengan Direktur Jenderal Kebudayaan dengan Dirjen Pariwisata dan Dirjen Pemerintahan Daerah. Kerja sama berikutnya adalah Kepolisian RI, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri berkenaan dengan masalah yang berkenaan dengan pengiriman dan penerimaan keputusan kebudayaan.

Direktur Jenderal berikutnya adalah Drs. GBPH Poeger sebagai Dirjen Kebudayaan ke-4. Pada masa jabatannya selain melanjutkan dan meningkatkan program yang ada, bersama dengan para budayawan, seniman dan cendekiawan merumuskan konsep, kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan melalui Kongres Kebudayaan 1991. Kongres itu menjadi penting, karena setelah Kongres Kebudayaan 1960, setelah vakum 30 tahun baru ada kongres lagi.

Selanjutnya, pada masa jabatan Prof. Dr. Edi Sedyawati (Dirjenbud ke-5), banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan yang baru. Kegiatan-kegiatan seperti Kongres Kesenian (1995), Pameran Seni Rupa Kontemporer negara-negara Non-Blok (1995), Art Summit Music and Dance (1995), Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan bidang Kebudayaan (SP3K) adalah gagasan Prof. Edi. Selain itu, Prof. Edi juga menggalang kerja sama kebudayaan dengan negara-negara sahabat, seperti penyelenggaraan pameran benda cagar budaya di Jerman, Finlandia, Belanda, dan Jepang.

Pada masa jabatan Dr. IGN Anom sebagai Dirjen Kebudayaan ke-6 terjadi "gonjang-ganjing" kelembagaan kebudayaan. Bidang kebudayaan akan digabungkan dengan bidang pariwisata. Sebagai Dirjenbud, IGN Anom

mencoba mempertahankan keberadaan bidang kebudayaan tetap disatukan dengan bidang pendidikan. Selain itu, pada masa jabatan IGN Anom telah dihasilkan dokumen (buku) tentang strategi pelestarian kebudayaan bangsa. Karena dokumen itu belum diikat melalui peraturan perundang-undangan maka statusnya belum memiliki ikatan yang kuat.

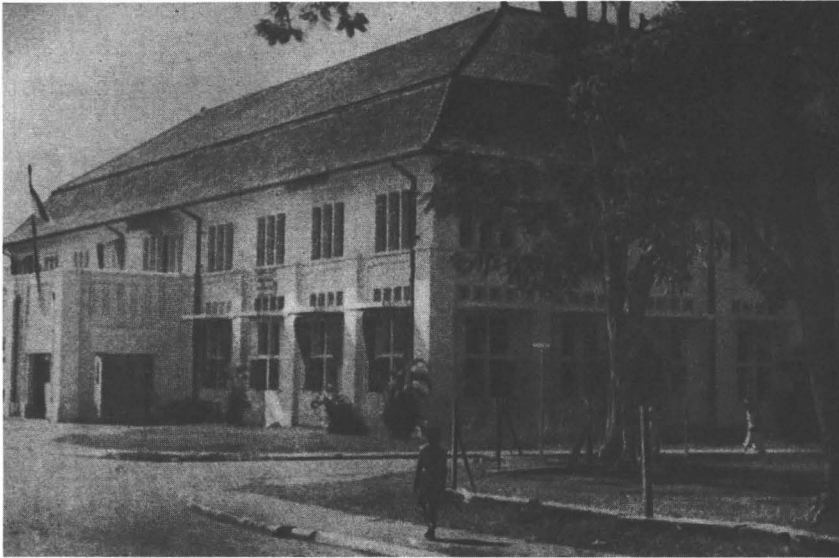
Sebagai Dirjenbud ke-7 adalah Prof. Kacung Marijan PhD. Pada masa jabatannya lahir 8 pilar kebijakan pembangunan kebudayaan yang kemudian melahirkan program-program: revitalisasi museum, revitalisasi taman budaya, Apresiasi Film Indonesia (AFI), penyemaian nilai budaya, Nonton Bareng (Nobar) Film Inspiratif, diplomasi budaya, pembangunan Rumah Budaya, dll.

Bila ditarik garis mulai dari Direktur Jenderal Kebudayaan pertama hingga ketujuh selama setengah abad, maka yang tampak adalah serangkaian kebijakan yang saling memperkuat. Antara Direktur Jenderal Kebudayaan pertama, kedua dan seterusnya saling mengintip, mencari titik kekurangan untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan konsep, kebijakan dan strategi untuk memperbaikinya. Tingkat keberhasilannya tentu sangat variatif, karena kebudayaan pada dasarnya secara alami memiliki sifat dinamis, selalu berubah sesuai dengan perkembangan lingkungannya. Kerja memajukan kebudayaan sesuai amanat Pasal 32 UUD 1945 yang telah dilakukan oleh tujuh direktur jenderal belum selesai.

Tugas berat dan menantang kini harus dihadapi oleh Direktur Jenderal Kebudayaan ke-8, Dr. Hilmar Farid. Ia sedang menyimak kelebihan dan celah-celah kekurangan

periode sebelumnya untuk dituangkan ke dalam konsep, kebijakan dan strategi yang tentu akan memiliki warna tersendiri.

Jakarta, 7 Mei 2016



Eks Gedung Kementerian PP dan K/Depdikbud Jln. Cilacap No. 4 Jakarta. Di gedung inilah Direktorat Jenderal Kebudayaan lahir, dan di gedung ini pula Direktur Jenderal Kebudayaan RM Indrosoegondo, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Prof. Dr. Haryati Soebadio, dan Prof. Dr. Edi Sedyawati berkantor. Kini, gedung itu berfungsi sebagai hotel (Hotel Hermitage).

Bahan bacaan:

- Dinas Kebudayaan DI Yogyakarta, 2014. *Penghargaan Anugerah Budaya 2014*.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1978. *Memorandum Akhir Masa Jabatan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra 1968-1978*.
- Djamhari, Saleh As'ad, 2009. *Komunisme di Indonesia*. Pusat Sejarah TNI dan Yayasan Kajian Citra Bangsa, Jakarta
- Dwipayana G. dkk, 1991. *Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun*, 2009: Jakarta: PT. Cipta Lamtoro Gung Persada, Jakarta.
- Kongres Kebudayaan 1991*: Laporan Penyelenggaraan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991/1992
- Kumpulan Makalah 1993-1995*, dicetak 1995/1996.
- Farid, Hilmar, 2014. *Arus Balik Kebudayaan: Sejarah sebagai Kritik*, Teater Jakarta/Taman Ismail Marzuki.
- Harrison, Lawrence E dan Samuel P Huntington, 2006. *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, LP3S, Jakarta.
- Hidayat, Rahayu: 1999. *Cerlang Budaya: Gelar Karya untuk Edi Sedyawati*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Uiniversitas Indonesia.

- Irna H.N. Hadi Soewito dkk, 1997. *Lasmidjah Hardi, Perjalanan Tiga Zaman*, Gramedia Widiasarana Indonesia 1997.
- Jones, Tot , 2015. *Kebudayaan dan Kekauasaan di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Marihandono, Djoko dan Harto Juwono, (penerjemah), 2014. *Perkembangan Pendidikan Kedokteran di Weltevreden 1851-1926*, Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta.
- Muhadjir (ed.) 1987. *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Munadjat Danusaputro, Prof. Mr. St. 1983. *Wawasan Nusantara III*, Alumni Bandung.
- Nagaoka Masanori, 2013. *100 Tahun Pascapemugaran Candi Borobudur*, Trilogi I, Balai Konservasi Borobudur.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997*, Jakarta
- Saryono, Djoko, 2005. *Bahasa, Seni dan Budaya di Tengah Kelindan Kuasa*. Pustaka Kayutangan, Malang.
- Sedyawati, Edi (Penyunting). 2003. *Warisan Budaya Tak Benda: Masalahnya Kini di Indonesia*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Depok.

Sunarya, Endang, dkk. 2012: *Link and Match: Pendidikan dan Kebudayaan*. Badan Kerja sama Kesenian Indonesia.

Supardi, Nunus: 20013. *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah dari Masa ke Masa*, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

-----: 1999. *Festival Persahabatan Indonesia-Jepang*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

-----: 1997/1998. *Sebelas Tahun Berdirinya Gedung Pameran Seni Rupa DEPDIKBUD*, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

-----:2015. *Balai Budaya: Riwayatmu Dulu, Kini dan Esok*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta.

Suwarno, 2012. Pidato Dies ke-62 ASRI berjudul “Dari Poros Gampingan, ke Poros Sewon – Bantul: Tapak Sejarah ASRI hingga Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta”.

Surat kabar/majalah:

Majalah Indonesia, 1950

Sinar Harapan, 23/3/1968

Sinar Harapan 3/4/1968

Harian KAMI, 21/6/1968

Harian KAMI 28/6/1968

Sinar Harapan, 29/6/1968

Sinar Harapan, 11/7/1968

Pelita, 14/10/1995

Kompas, 11/7/1995

Suara Merdeka, 27/8/1999

Suara Merdeka, 3 Februari 2016

Kompas, 5/9/2012
Kompas, 4 Juni 2015

Internet:

- <http://Jerome Robbins Dance Division> - diunduh tanggal 4/2/2013
- <http://treaty.kemlu.go.id>
- <http://groups.yahoo.com/groups/Isai/message/73>
- [http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/freepress 19520322-1.2.47.1.aspx](http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/freepress_19520322-1.2.47.1.aspx)
- <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/15000/kp1731966.pdf>, diunduh 8/1/2015
- <http://hilmarfarid.com/wp/bio>
- Wikipedia.org (Sharyn Elise Jackson)
- <https://m.tempco.co/read/news/2016/01/01/079732311/hilmar-farid-jadi-dirjen-kebudayaan-siapa-dia>

Indeks

A

- Abdul Latief, 236.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 9, 21, 153, 254, 259, 260,
261, 262, 263, 264. 207.
Affandi, 8, 104, 196, 203, 270.
Ajip Rosidi, 8.
Amerika Serikat, 6, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 82, 99,
157, 193, 202, 209, 236, 269, 277, 282.
Anas Ma'ruf, 8.
Anastilosis, 270.
Anhar Gonggong, 262.
Anies Baswedan, 291, 297.
Angkor Wat, 267, 268, 269, 270.
Anom, IGN, 9, 253, 254, 256, 257, 258, 262, 263, 264, 266,
267, 271, 272, 314, 315.
Amin Rais, 259.
Amir Sutaarga, 50, 105.
Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), 55, 56, 112, 113, 312.
Aakademi Seni Drama dan Film (ASDRAFI), 113, 312.
Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI), 113, 312.
Andre Hardjana, 267.
Apresiasi, 40, 41, 422, 199, 200, 202, 234, 235, 284, 315.
Apresiasi Film Indonesia, 40, 283, 284, 3315.
Artati Mardjuki Soedirdjo, 24.
Asrul Sani, 8.

B

- Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN), 7, 8, 76,
77.

Bagian D, 16, 311.
Bahagian Kebudayaan, 15, 16, 66, 311.
Bagong Kussudiardjo, 58, 59, 233.
Balai Budaya, 8, 38.
Bambang Sumedi, 269.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
17, 155, 159, 177.
Bio-Paleoantropologi, 160, 161, 178.
BPUPKI, 3, 4, 176.

D

Daniel Etounga-Manguelle, 315, 312.
Daoed Joesoef, 141, 142, 145, 146, 166, 174, 182, 264.
267.
de facto dan *de jure*, 11.
delapan pilar, 41, 46.
De Vleter, 5.
Direktorat Kebudayaan, 13, 18, 19, 66, 70.
Dukut Santoso, 269.

E

Edi Sedyawati (EDS), Prof. Dr., 50, 217, 222, 239, 242,
243, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227,
230, 231, 232, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 257, 258, 264, 265, 268, 269, 310, 314.
Eropa Barat, 6.

F

Fuad Hassan, 146, 150, 166, 198, 200, 264, 267, 270.

G

Galeri Nasional, 103, 124, 125, 150, 196, 197, 198, 201, 203, 238, 270, 271, 288.

Gayus Siagian, 8.

Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud, (GPSR
DEPDIBUD), 150, 196, 198, 203, 270, 271.

Goenawan Mohamad, 202.

Gunarso, 14.

H

Habibie BJ, 43, 254, 259.

Harimurti Kridalaksana, 76, 81.

Harsya W Bachtiar, 155, 156.

Haryati Soebadio (HS), 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 153, 154, 156, 157, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 178, 183, 184, 185, 196, 217, 239, 256, 264, 265, 313,

Hilmar Farid, VII, IX, X, XII, 22, 291, 292, 258, 305

I

Idris, M, 47, 69.

Indrosoegondo, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 98, 100, 105, 109, 128, 147, 258, 312.

Istana Bogor, 197, 200, 201.

Ismijono, 269.

J

Jawatan Kebudayaan, 16, 17, 18, 50, 56, 64, 66, 70, 112, 117, 168, 169, 290, 311.

Jassin, HB, 8

Joko Widodo, 291, 297, 300, 301, 305.

Juwono Sudarsono, 271.

K

Kacung Marijan Prof., PhD, 22, 258, 275, 276, 277, 278,
279, 296, 291, 297, 315.

Katamsi, 55.

kementerian gerilya, 14

Ki Hadjar Dewantara, 11, 12.

Koentjoro Poerbopranoto, 5, 17, 66.

Konservatori Karawitan (KOKAR), 70, 112, 169, 312.

Kusnadi, 8, 55, 106, 107.

Kusnadi Hadjasoemantri, Prof. Dr. 239.

Kunst Ambachts School, 55.

L

Lasmidjah Hardi, 23, 24, 25, 26, 28.

Lekra, 76, 77.

Lembaga Bahasa Nasional (LBN), 110, 111, 112, 117.

Lembaga Musikologi dan Koreografi, 54, 71, 110, 115, 225.

Lembaga Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional
(LPPN), 70, 110, 111, 114, 116, 172.

Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA), 70, 110, 111, 114,
115.

M

Mantra, IB, Prof. Dr., 20, 47, 50, 75, 80, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 105, 106, 109, 111, 116, 118, 120, 121,
124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 147, 152,
161, 162, 170, 172, 185, 258, 313.

Maria Ulfah Santoso, 26, 63, 64.

Mashuri, 80, 98, 99, 109.

Megawati Soekarnoputri, 9, 22, 259, 264, 265.

Miftah Thoha, 31.

Misbach Yusa Biran, 9.
 Moh Nuh, 9, 22, 43, 297.
 monumen, 129, 156, 164, 165, 167, 168, 181, 255.
 monumen hidup, 164, 255.
 monumen mati, 255.
 Monumenten Ordonnantie, 156, 158, 179, 207.
 Mulia, TSG. 14.
 Museum Sumpah Pemuda, 181.
 Museum Kebangkitan Nasional, 180, 181.
 Museum Perumusan Naskah Proklamasi, 160.
 Museum Nasional, 132, 159, 160, 177, 203, 231, 234, 281,
 313.
 Museum Konferensi Asia-Afrika, 183.
 Museum Kota Tua, 104.

N

Nazaruddin Sjamsuddin, 4.
 New York World Fair, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
 Nonton Bareng (NOBAR) Film Inspiratif, 40, 285, 286, 322.
 Nugroho Notosusanto, 1, 146, 166, 167, 180.

O

Overkapping, 5.

P

Pekan Apresiasi Sastra (PAS), 199.
 Poeger, GBPH, 57, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 200, 201,
 202, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 238, 240, 258,
 314.
 Perpustakaan Nasional, 132, 159, 160, 177, 313.
 PPKI, 3. 4, 12, 176.
 Pramoedya Ananta Toer, 8, 299.
 Prijono, Prof. Dr., 18, 19, 63, 119.

R

Retno Maruti, 50, 58, 107, 270.
reshuffle, 22, 23, 31, 264.
Roosseno, Ir, 129
Rusia, 6.
rumah budaya, 8, 41, 281, 282, 315.

S

Sadirin, 269.
Sampoerno, 72, 74, 75.
Samidi, 269.
Sardono W. Kusumo, 50, 55, 57, 58, 233.
Soedarsono, 17, 66.
Soe Hok Djien, 8.
Soedjatmoko, 8, 104.
Soeharto, 19, 20, 23, 65, 77, 79, 98, 108, 131, 141, 167,
168, 174, 179, 183, 217, 231, 242, 255, 259, 260.
Soekarno, 19, 26, 27, 28, 29, 48, 57, 60, 61, 62, 64, 182,
200, 201.
Soekmono, 158, 187, 252, 268.
Soewandi, 14.
Sutardji Calzoum Bachri, 8.
Sumardjo, 19.
Summit, 44, 232, 233, 234, 321.
Susilo Bambang Yudhoyono, 9, 22, 23, 24, 33, 291.
Suyud Winarno, 269.
Sharyn Elise Jackson, 59, 61, 62.
Sri Sultan (Hamengkubuwono IX, X), 79, 98, 106, 166, 191,
192.
Sri Hastanto, 9, 266, 272.
Sumantri Brodjonegoro, 99.
Sumantri Sastrosuwondo, 152.
Syarief Thayeb, 98, 99.

T

Taman Budaya, 38, 111, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 133, 166, 265, 288, 313.
Taman Kebudayaan, 17, 69, 119, 120, 124.
tatal, 256.
Taufik Abdullah, 271.
Taufiq Ismail, 8.
Tojib Hadiwidjaja, Prof. Ir., 18.
Trisno Sumardjo, 8
Trusbus, 203.

U

Umar Khayam, 8.
UNESCO, 42, 43, 78, 79, 102, 106, 119, 128, 129, 140, 157, 158, 161, 162, 194, 195, 231, 282, 283.
Universitas Airlangga, 258, 275, 276, 277, 278, 279, 291.
Universitas Gajah Mada, 27, 33, 57, 79, 160, 161, 178, 253, 272.
Universitas Indonesia, 4, 27, 96, 117, 118, 142, 191, 192, 200, 218, 224, 258, 299.
Universitas Udayana, 80, 97, 98, 258.
Usmar Ismail, 77.
Utami Surjadarma, 26, 63.

W

Wardiman Djojonegoro, 222, 225, 243, 264, 269, 292.
Wiendu Nuryanti, 24, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 43, 45, 279, 285.
Wiranto Arismunandar, 236, 238, 271.
Wiratmo Sukito, 8.
Wisma Seni Nasional (WSN), 103, 111, 124, 125, 149, 150, 196, 197.

World Culture Forum (WCF), 42, 43, 304.

Y

Yahya Muhaimin, 260, 262.

Yamin, Muhammad, 5, 6, 7, 30, 130.

Z

Zaini, 8.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nunus Supardi bin Karsodimedjo lahir di Madiun, 19 Agustus 1943. Setelah lulus sekolah rakyat (SR) di desa Mojo-rejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun 1956, sekolah guru bantu (SGB) 1959, dan sekolah guru atas (SGA) 1962 di kota kela-



hirannya, ia melanjutkan studinya ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang Cabang Madiun. Ia memilih masuk, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lulus S1 1970. Setelah meraih gelar sarjana muda, Nunus menjadi asisten dosen merangkap Kepala Tata Usaha FKSS (1965—1973). Selama di Madiun, ia pernah menimba pengalaman sebagai guru/staf pengajar di sekolah asisten apoteker (SAA), Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), dan IKIP PGRI, baru kemudian pindah ke Jakarta pada 1973.

Nunus menjadi staf di Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perjalanan kariernya di lembaga kebudayaan ini, antara lain pernah menjabat Kepala Bagian Perencanaan (1985-1993), Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993-1999), dan Direktur Direktorat Purbakala (1999-2001). Setelah itu, ia dipercayai menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5 Februari—14 November 2001). Sebelum memasuki purnabakti pada 2003, Nunus memangku jabatan sebagai Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, sebuah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND).

Sebagai orang yang berperan aktif di bidang kebudayaan, Nunus pernah menjabat Sekretaris Panitia Pelaksana Kongres

Kebudayaan 1991, anggota Panitia Pengarah Kongres Kesenian Indonesia 1995, Kongres Kebudayaan 2003, 2008 dan 2013. Pada 2009 hingga sekarang ia masih duduk sebagai anggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia. Selain itu, ia pernah ditugasi untuk menjadi Koordinator Penyelenggaraan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (Indonesia-Nihon Yukosai) di Jepang (1996--1997), Ketua Pengelola Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini menjadi Galeri Nasional), dari 1987-1998.

Setelah pensiun, Nunus masih aktif, baik sebagai Ketua I Badan Kerjasama Kesenian (BKKI) dan Ketua II Lingkar Budaya Indonesia (LBI). Ia juga salah satu pendiri Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Dalam kurun waktu 2005--2008, ia pernah menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF), kemudian mulai 2009 menjabat Wakil Ketua LSF periode 2009--2015. Pengalamannya yang lain, namanya juga tercatat sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi Museum Indonesia (AMI), anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dan anggota Tim Ahli Panitia Nasional Pengangkatan Benda Isi Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Departemen Kelautan dan Perikanan (2004-2009). Juga menjadi salah satu anggota Dewan Juri Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2012 dan 2013 serta anggota Panitia Seleksi Film Edukatif Kultural pada 2012, 2013, 2014, 2015.

Sejumlah karyanya yang sudah diterbitkan, antara lain *Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (1998), *Persahabatan Indonesia-Jepang* (1998), *Pedoman Merehabilitasi Gedung Bersejarah* (terjemahan, 2000), *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka* (2003), *Pendidikan Karakter Bangsa di Lingkungan Birokrasi* (Ketua Tim, 2004), *Kongres Kebudayaan 1918-2003* (Edisi Revisi. 2007), *Sejarah Kelembagaan Kebudayaan di Pemerintahan dan Dinamikanya* (Ketua Tim, 2004), *Lima Tahun Otonomi Bidang Kebudayaan* (Ketua Tim. 2006), *Pendidikan Apresiasi Budaya di*

Lingkungan Pesantren (Ketua Tim Peneliti, 2007), *50 Tahun Tugu Nasional/Monumen Nasional* (Ketua Tim, 2011), *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* (2013), *Bianglala Budaya: 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2016* (2013) *Deklarasi Hari Museum Indonesia* (2015) *Balai Budaya: Riwayatmu Dulu, Kini dan Esok* (2015).

Beberapa artikel dalam media massa (surat kabar dan majalah), termasuk makalah dan tulisannya dalam buku antologi, misalnya *"Ranah Ilmu Budaya"* (2004), *"Archaeology: Indonesian Perspective"* (2006). Menjadi salah satu penulis buku *"Kapal Karam: Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon"* (2008), *"Sejarah Museum di Indonesia"* (2010), *"Indonesia dalam Arus Sejarah"* (2011, Sembilan jilid), *"Sejarah Sensor Film di Indonesia"* (2011), *"Arkeologi untuk Publik"* (2012), dan *"77 Tahun Wardiman Djojonegoro"* (2013), *"Link and Match"* (2013). Selain itu juga sebagai Narasumber penulisan buku *"Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945-2012"*, sebanyak 12 jilid (2013).

